



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai MISI Organisasi Pemerintah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan inerja Instansi Pemerintah dan disusun secara periodik. Oleh sebab itu Akuntabilitas Kinerja pada Bab ini akan menguraikan tentang perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Tujuan dan Sasaran selama kurun waktu Tahun 2015.

Berikut akan diuraikan akuntabilitas kinerja Tahun 2015, yaitu terkait dengan informasi tentang :

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2015
- REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2015

Pada sub bab ini akan diuraikan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, yang merupakan pencapaian atas target kinerja sebagaimana yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 yaitu Perjanjian Kinerja (PK) Revisi, yang telah dijelaskan pada Bab II. Selanjutnya uraian Capaian Kinerja tersebut akan diuraikan menurut Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, dan selanjutnya capaian kinerja organisasi Tahun



2015 pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis, juga perlu dilakukan analisis capaian kinerja dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2015;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2015 dengan relaisasi kinerja Tahun 2014 yaitu sepanjang masih relevan dengan IKU yang digunakan;
3. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2015 dengan target jangka menengah dan atau Target Tahunan IKU;
4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2015 dengan standard nasional (*jika ada*).
5. Melakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu yang berkenaan dengan efisiensi anggaran.
7. Melakukan analisis atas program/kegiatan yang menunjang dalam rangka keberhasilan ataupun kegagalan atas pencapaian kinerja sebagaimana pernyataan kinerja yang dirumuskan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015.
8. Melakukan analisis terhadap serapan anggaran dalam rangka keberhasilan dari masing-masing pernyataan Sasaran Strategis.

A.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2015

Pengukuran kinerja dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat capaian kinerja yang diperoleh dari perbandingan antara capaian realiasi dengan target kinerja selama kurun waktu tahun 2015, dimana pengukuran kinerja tersebut dilakukan pada masing-masing pernyataan sasaran strategis hingga indikator kinerja yang digunakan pada setiap pernyataan sasaran strategis untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran. Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa indikator yang digunakan sebagai instrumen pengukuran kinerja sasaran strategis tersebut di atas adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta indikator kinerja penunjang dari Indikator Kinerja Utamanya, yaitu sebagaimana yang telah dirumuskan dan ditetapkan pada Tabel 5.1. Bab V pada



RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Tahapan Pengukuran kinerja yang dilakukan di akhir tahun berkenaan dengan capaian organisasi tahun 2015 akan diuraikan menurut :

1. Sasaran strategis;
2. Indikator kinerja atau Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan/kegagalan Sasaran Strategis;
3. Target Kinerja, yaitu Target Kinerja yang diperjanjikan untuk dicapai dari masing-masing Indikator Kinerja Utama selama Turun waktu tahun 2015.
4. Realisasi Kinerja, yaitu angka capaian dari Target Kinerja
5. Capaian Kinerja, yaitu angka capaian perbandingan antara Capaian Realisasi dengan target kinerja.
6. Pengkategorian Capaian Kinerja.

Bahwa terkait dengan Capaian kinerja organisasi juga perlu dilakukan deskripsi atau pengkategorian atas capaian Kinerja,. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana tingkat capaian kinerja organisasi apakah pada kategori BAIK, TIDAK BAIK dan seterusnya, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 9
Pengkategorian dan Pemingkatan Capaian Kinerja

No.	INTERVAL CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT/ KATEGORI
1.	0 – 45 %	TIDAK BAIK
2.	46 – 65 %	CUKUP BAIK
3.	66 – 85 %	BAIK
4.	> = 86 %	SANGAT BAIK

Sasaran Strategis-1 :
“Terwujudnya Sistem Tata Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Hukum”

Tabel 10.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (Jumlah Kasus Korupsi Sektor Keuangan)	15	1 Kasus	5 %
2.	Peningkatan Good Governance melalui implementasi e-Government (Sistem Aplikasi) :			
	▪ e-Office,	1	-	-
	▪ e-Planning,	-	-	-
	▪ e-Budgeting,	-	-	-
	▪ e-Procurement	-	-i	-
	▪ e-Performance	-	-	-
3.	APBD dan Perubahan APBD tepat waktu	2 Perda	2 Perda	100
4.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	-	-
5.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	CC	CC	100
6.	Persentase SKPD Provinsi menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	40 %	46,15 %	115,4
7.	Ditetapkannya Sistem Perencanaan dan Penganggaran terpadu melalui Peraturan Daerah (Perda)	-	-	-
8.	Tersedianya pusat data informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara	1 Unit	1 Unit	100

Tabel 9 di atas dapat menjelaskan bahwa Sasaran Strategis ke-1 yaitu **TERWUJUDNYA SISTEM TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK BERLANDASKAN HUKUM** diukur dengan menggunakan 8 (delapan) Indikator Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan berikut ini akan diuraikan Capaian Kinerja masing-masing Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis pertama dengan melakukan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

A.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja (keberhasilan dan kegagalan) dalam periode 1 (satu) tahun yang dilaporkan pada Laporan Kinerja, dimana salah satu hal



yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi dan analisis terhadap Capaian Kinerja pada masing-masing pernyataan Sasaran Strategis melalui Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan dari setiap pernyataan Sasaran Strategis tersebut. Oleh sebab itu, berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja :

Perbaikan Indeks Persepsi Korupsi
(Jumlah Kasus Korupsi Sektor Keuangan)



Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau lazim disebut dengan SAKIP, pada prinsipnya sangat tidak mentolerir adanya tindak korupsi di masing-masing instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah sampai kepada penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu, bercermin dari permasalahan dan fenomena yang terjadi di beberapa tahun terakhir, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk mengeliminir praktek dan tindakan yang mengarah kepada tindakan korupsi baik secara institusi maupun perorangan di jajaran pemerintahan maupun aparatur. Pada tahun 2015 pada prinsipnya tidak ada terjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pada Indikator ini SANGAT BAIK.

Perbandingan CAPAIAN KINERJA Tahun 2014 dengan Tahun 2015 :

Kinerja tahun 2014 pada indikator ini untuk perbandingan dengan tahun 2015 adalah dapat dideskripsikan pada tabel berikut :

Tabel 11.
Perbandingan Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Perbaikan Indeks Persepsi Korupsi Jumlah Kasus Korupsi Sektor Keuangan)	20	1	5	15	1	6

Sumber : Biro Hukum Setdaprov. Sumut



Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pada indikator ini SANGAT BAIK, dengan pertimbangan bahwa capaian kinerja sangat rendah. Oleh sebab itu ada kecenderungan bahwa trend korupsi semakin menurun, meskipun pada prinsipnya fenomena yang terjadi dilingkupann Pemerinrah Provinsi Sumatera Utara yang menjerat Kepala Daerah dan beberapa pimpinan DPRD adalah rentetan permasalahan-permasalahan di Tahun 2010 s/d. Tahun 2013. Dengan demikian sangat tidak relevan kalau skor nilai hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 yang lalu oleh Kementerian PAN dan RB, tidak dapat mencapai ke predikat B hanya dikarenakan fenomena tersebut di atas.

Tabel 12
DAFTAR PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN PEMPROVSU TAHUN 2014

NO	PERKARA	KET
(1)	(2)	(3)
1	Tindak Pidana Korupsi Uang Hasil Penerimaan Retribusi Jasa Usaha pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provsu Tahun 2012 yang tidak disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 817.994.886,00 (delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) atas nama tersangka Ir. Henny J.M Nainggolan, MSi dan Ervina Sari, ST, MT selaku Kepala dan Bendahara Penerimaan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Laboratorium Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provsu	Perkara yang berjalan adalah menyangkut Korupsi penyalahgunaan keuangan daerah Provsu Tahun 2009-2012.
2	Tindak pidana korupsi dalam proyek pemagaran kawasan perkemahan pramuka Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dengan dana sebesar Rp 9.335.719.000,- (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara An. Tersangka Said Hadi, SE	-sda
3	Tindak Pidana Korupsi pada Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat pada TA. 2011 sebesar Rp. 27.464.575.500,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan pada TA. 2012 sebesar Rp. 7.273.971.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah), yang diduga disalahgunakan dan dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berindikasi merugikan keuangan Negara H. Darwinsyah, SH	-sda
4	Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka Ermansyah Napitupulu, SH, Dkk selaku Kepala Sekolah Mts Al-Ijtihadayah atas Penerimaan Dana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemprovsu di Kab. Serdang Bedagai TA. 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	-sda



NO	PERKARA	KET
(1)	(2)	(3)
5	Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provsu TA. 2012 Terdakwa Anggiat Hutagalung, SH dan Paiyan Sipahutar	Perkara yang berjalan adalah menyangkut Korupsi penyalahgunaan keuangan daerah Provsu Tahun 2009-2012.
6	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Uang Negara yang bersumber dari Pungutan Pajak Negara TA. 2010 pada Biro Umum Sekretariat Daerah Sumatera Utara Tersangka AMINUDDIN, SH, MH	-sda-
7	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Provsu Masa Bhakti 2004 s/d 2009 An. Tersangka H. Ridwan Rustam	-sda-
8	perkara atas nama tersangka Akhyar Nasution, Dkk yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 400.000.000,- TA. 2010	-sda-
9	Dugaan tindak pidana korupsi terhadap Pembuatan Peta Titik Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat TA. 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara atas nama Tersangka Aris Fadillah Acheen selaku PPTK	-sda-

Sumber : Biro Hukum Setdaprov Sumatera Utara

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa :

Tidak ada perkara yang menyangkut korupsi penyalahgunaan keuangan daerah Provsu Tahun Anggaran 2015.

Perkara yang berjalan adalah menyangkut Korupsi penyalahgunaan keuangan daerah Provsu Tahun 2010-2014.



Tabel 13
DAFTAR PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN PEMPROVSU TAHUN 2015

NO	PERKARA	KET
(1)	(2)	(3)
1	Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 400.000.000,- TA. 2010 dengan tersangka Akhyar Nasution sebagai Penerima Hibah	
	Dugaan tindak pidana korupsi terhadap Pembuatan Peta Titik Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat TA. 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara atas nama Tersangka Aris Fadillah Acheen selaku PPTK, Ir. Pendi Sebayang MT selaku Direktur Utama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering, dan Zainal Arifin, SE selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa	
3	Perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Revitalisasi Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Teknik Permesinan pada SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara APBD TA. 2014 sebesar Rp. 11.575.080.000,- atas nama tersangka Riswan, S.pd selaku Pejabat Peleksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Muhammad Rais selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sub Bagian Tata Usaha SMK Negeri Binaan Dinas Pendidikan Sumatera Utara	
4	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Bersama-sama atau Turut Serta Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu Berupa Uang Kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara yang diduga dilakukan oleh Tersangka GATOT PUJO NUGROHO dan EVY SUSANTI	
5	Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 atas nama tersangka Gatot Pujo Nugroho, ST. M. Si dan Drs. Eddy Syofian, MAP	

Sumber : Biro Hukum Setdaprov Sumatera Utara



Dari Tabel 13 di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Tidak ada perkara yang menyangkut korupsi penyalahgunaan keuangan daerah Provsu Tahun Anggaran 2015.
2. Perkara yang berjalan adalah menyangkut Korupsi penyalahgunaan keuangan daerah Provsu Tahun 2010-2014.

Capaian Indikator Kinerja :

Peningkatan Good Governance melalui implementasi e-Government (Sistem Aplikasi)



Capaian Kinerja indikator ke-dua Peningkatan Good Governance melalui implementasi e-Government (Sistem Aplikasi), pada e-office tidak dapat diukur sampai dengan penyampaian Laporan Kinerja ini. Sedangkan untuk e-planning dan e-budgeting akan dapat diukur pada Laporan Kinerja Tahun 2016, dan e-performance pada tahun 2017.

Capaian Indikator Kinerja :

APBD dan Perubahan APBD tepat waktu Tahun Anggaran 2015



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang diperoleh maupun belanja yang akan digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu Tahun 2015 untuk melaksanakan Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Implementasi Otonomi dan Pelayanan Umum.

APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan berpedoman kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;



2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015;
3. Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, pokok-pokok pikiran DPRD, hasil musyawarah perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2015;
4. Hasil indentifikasi aspirasi masyarakat lainnya yang disampaikan, baik melalui perangkat Pemerintah Provinsi maupun DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui Pelaksanaan Reses;
5. Kebijakan Umum Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 (KUA-PPAS) yang disepakati dan dirumuskan dalam Arah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 serta Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2015.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa arah dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sehingga pelaksanaannya yang dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.**



Selanjutnya, bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 116 ayat (2) **“Penetapan RANPERDA tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilaksanakan paling lambat 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya.** Kemudian pada Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 172 Ayat (5), **“Pengambilan Keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Perubahan APBD dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir”.**

Oleh sebab itu, sejalan dengan uraian di atas Capaian kinerja tahun 2015 untuk kinerja pada indikator kinerja **“APBD dan Perubahan APBD tepat waktu”**, dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu 2 Perda atau dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 14.
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%
APBD dan Perubahan APBD tepat waktu	2 Perda	2 Perda	100

Sumber : Biro Keuangan Setdaprov. Sumut

Penyusunan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 dengan persetujuan dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara disepakati APBD Tahun Anggaran 2015 yang secara hukum diatur dan ditetapkan pada :

1. Perda APBD Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015.



2. Untuk APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 dengan Perda Nomor 6 Tahun 2015, tanggal 22 Desember 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015.

Dengan demikian, kinerja pada indikator ini untuk 2 Perda sebagaimana yang menjadi target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 diperoleh realisasi kinerja 2 Perda, meskipun waktu penyelesaian penyusunan Perda untuk P. APBD Tahun 2015 tidak tepat waktu.

**Perbandingan Realisasi Tahun 2014
dengan Tahun 2015 :**

Perda APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2014 melalui Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu untuk Perda APBD Perubahan ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2014 melalui Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diawali dengan adanya Persetujuan bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap RANPERDA APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 1 September 2014.

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
APBD dan Perubahan APBD tepat waktu	2	2	100	2	2	100

Sumber : Biro Keuangan Setdaprov. Sumut

Sebagaimana tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terkait dengan penetapan Perda APBD Tahun Anggaran 2014, tidak tepat waktu sedangkan untuk penetapan perda pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 tepat waktu karena masih dalam



rentang waktu 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran 2014 berakhir. Namun sekalipun demikian bahwa kinerja untuk Perda APBD dan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dapat tercapai sebagaimana target kinerja ditetapkan dengan 2 Perda.

Capaian Indikator Kinerja :

Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah



Capaian Indikator Kinerja “**Opini BPK RI terhadap laporan keuangan daerah**”, sebagaimana target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah WTP. Namun sampai dengan Laporan Kinerja ini dibuat, Opini Keuangan dari BPK Tahun 2015 hingga saat ini belum diperoleh, sehingga capaian kinerja pada indikator ini belum dapat diukur.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%
Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	-	-

Perbandingan Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2015 :

Untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014, dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2014

No.	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	WTP	Akan diperoleh setelah Opini dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Dari Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terkait dengan kinerja untuk **Opini BPK RI terhadap laporan keuangan daerah** Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari



Tahun 2014 dengan predikat WTP, padahal yang ditargetkan adalah predikat WDP. Oleh sebab itu capaian kinerja Tahun 2014 dapat melebihi dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2014. Sementara itu untuk Tahun 2015 belum dapat disajikan pada Laporan Kinerja ini, dikarenakan hasilnya belum diperoleh dari BPK RI.

Capaian Indikator Kinerja :

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah



Capaian Indikator Kinerja “**Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**”, adalah berkenaan dengan hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, dan sebagaimana target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah “CC” . Sebagaimana hasil Evaluasi AKIP dari Kementerian PAN dan RB untuk Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh predikat nilai “CC” . Namun sekalipun demikian sangat tidak relevan kalau skor nilai hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 yang lalu oleh Kementerian PAN dan RB untuk peringkat “CC”, tidak dapat mencapai ke predikat “B” hanya dikarenakan fenomena permasalahan hukum Kepala Daerah dan pimpinan DPRD Sumatera Utara yang sekarang sedang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan Agung.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan beberapa Tahun terakhir

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai AKIP Pemprov Sumut Tahun					Bobot	2015
			2011	2012	2013	2014			
1.	Perencanaan Kinerja	35	15,17	16,08	18,35	18,98	30	18,85	
2.	Pengukuran Kinerja	20	8,63	8,71	8,09	10,96	25	11,56	
3.	Pelaporan Kinerja	15	7,75	7,96	8,43	8,61	15	9,74	
4.	Evaluasi Kinerja	10	5,73	5,83	5,98	6,02	10	6,48	
5.	Capaian Kinerja	20	12,83	12,87	12,26	12,56	20	11,36	
	Nilai Hasil Evaluasi	100	50,11	51,45	53,11	57,13	100	57,99	
	Tingkat AKIP		“CC”	“CC”	“CC”	“CC”		“CC”	

Sumber : LHE AKIP Pemprovsumut Tahun 2013 – 2014 dari Kementerian PAN dan RB



Data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator ini dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 nilai hasil Evaluasi Evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih berada pada peringkat “CC”, meskipun dari segi skor nilai yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2015 ada kenaikan. Oleh sebab itu, ke depan nilai Evaluasi AKIP tersebut diharapkan di tahun berikutnya capaian kerjanya akan dapat meningkat ke predikat yang lebih tinggi.

Untuk Evaluasi AKIP Tahun 2015, bobot dari masing-masing komponen berbeda yaitu untuk **Komponen Perencanaan Kinerja**, yang tadinya bobot nilainya 35 turun menjadi 30, hal ini antara lain disebabkan perubahan template Evaluasi AKIP dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas.

Capaian Indikator Kinerja

Persentase SKPD Provinsi menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)



Untuk capaian kinerja pada Indikator Kinerja “**Persentase SKPD Provinsi menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**”, target kinerja adalah sebesar 40%, dan diakhir tahun diperoleh realisasi 46,15% sehingga capaian kinerja 115,4% atau SANGAT BAIK. Capaian kinerja ini diperoleh dari terbentuknya SATGAS Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD.

Dari 52 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 24 SKPD telah menerapkan SPIP dengan membentuk Tim Satgas SPIP. Adapun 24 SKPD tersebut adalah Inspektorat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Orta, Dinas Perkebunan, Sekwan, Dinas Koperasi dan UKM, Rumah Sakit Jiwa, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Dinas Pertanian, Dispenda, BKD, Dinas PSDA, Badan Penanaman Modal dan Promosi, Badan Ketahanan Pangan, Satpol PP, BPPT, Badan Lingkungan Hidup, Badan Kesbang



dan Linmas, Dinas Perhubungan, Dinas Kesejahteraan dan Sosial dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2015

No.	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	25 %	46,5 %

Sumber : Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) target kinerja sebesar 25% dan terealisasi 42,30% sehingga capaian kinerja 169,2%. Dari 52 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 22 SKPD telah menerapkan SPIP dengan membentuk Tim Satgas SPIP. Adapun 22 SKPD tersebut adalah Inspektorat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Orta, Dinas Perkebunan, Sekwan, Dinas Koperasi dan UKM, Rumah Sakit Jiwa, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Dinas Pertanian, Dispenda, BKD, Dinas PSDA, Badan Penanaman Modal dan Promosi, Badan Ketahanan Pangan, Satpol PP, BPPT, Badan Lingkungan Hidup, Badan Kesbang dan Linmas, Dinas Perhubungan, Dinas Kesejahteraan dan Sosial dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Capaian Indikator Kinerja

Ditetapkannya Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu melalui Peraturan Daerah (PERDA)



Capaian kinerja pada Indikator Kinerja **“Ditetapkannya Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu melalui Peraturan Daerah (PERDA)”** untuk tahun 2015 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Tidak ada karena tidak di tahun 2015 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Sehingga capaian kinerja tidak diukur. Implementasinya adalah dengan penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* yang seluruh proses pelaksanaannya akan dapat diakses dan diawasi oleh seluruh lapisan



masyarakat. Penerapan sistem ini memerlukan komitmen seluruh stakeholder terutama oleh Kepala Daerah dan DPRD terkait dengan implementasinya baik dari segi dana dan sumberdaya manusia. Pembuatan system aplikasi *e-planning* dan *e-budgetting* akan dilaksanakan pada tahun 2016 dan penerapannya akan dimulai untuk perencanaan dan penganggaran pada tahun 2017 yang akan datang.

Capaian Indikator Kinerja

Tersedianya pusat data informasi Geospasial
Provinsi Sumatera Utara



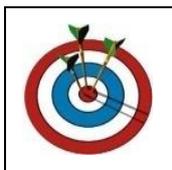
Capaian kinerja pada Indikator Kinerja “**Tersedianya pusat data informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara**” bahwa pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 tidak ada karena tidak di tahun 2015 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Sehingga capaian kinerja tidak diukur. Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara ini merupakan salah satu program kegiatan Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap data informasi spasial berbagai produk perencanaan pembangunan dan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara, antara lain berupa peta-peta tematik. Lingkup kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara yaitu :

1. Melakukan pertemuan/rapat-rapat koordinasi antar-sektor dan wilayah dalam rangka penguatan jaringan data informasi geospasial Provinsi Sumatera Utara;
2. Melakukan perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan dan penguatan data;
3. Koordinasi dan inventarisasi tentang data informasi geospasial serta hal lainnya yang terkait dengan pengembangan perencanaan pembangunan dan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara;
4. Menyusun dokumen terkait pengelolaan data informasi geospasial Provinsi Sumatera Utara;
5. Mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait data informasi geospasial dalam rangka peningkatan kualitas SDM pengelola data informasi geospasial Provinsi Sumatera Utara; dan



6. Memanfaatkan kerjasama tenaga ahli dalam bidang informasi dan data geospasial guna mendukung kelancaran kegiatan

Hasil/output kegiatan berupa Website/Portal simpul jaringan yang content utamanya berupa Peta-peta tematik perencanaan pembangunan (berbasis GIS dan Web) yang dikelola oleh Kelompok Kerja Simpul Jaringan yang berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Sumatera Utara.



Sasaran Strategis-2 :

“Terwujudnya peningkatan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat didalam pembangunan”

Tabel 20
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan atas inisiatif DPRD	5		
2.	Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (%) kehadiran dalam pelaksanaan Musrenbang	100	100	100
3.	Persentase usulan masyarakat yang ditampung dalam dokumen perencanaan RKPD (minimal)	15	2,5	16,7
4.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (Jlh dokumen)	-	-	-
5.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (Jlh dokumen)	1	1	100
6.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Jlh dokumen)	1	1	100

Dari Tabel 19 di atas dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis ke-2 yaitu **“TERWUJUDNYA PENINGKATAN INDEKS DEMOKRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN”**, dimana keberhasilan maupun kegagalan pada



Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan sebanyak 6 (enam) Indikator Kinerja. Capaian Kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja

Jumlah Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan atas inisiatif DPRD



Kebutuhan suatu peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel, dibutuhkan oleh masyarakat dan bagi pemerintah sebagai payung hukum dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, maka peraturan daerah sangat penting diterbitkan. Salah satu tujuan pembentukan perda adalah untuk mensejahterakan masyarakat, bukan sebaliknya menjadi beban bagi masyarakat. Mengingat begitu pentingnya perwujudan dari fungsi legislasi dan agar perencanaan program pembentukan peraturan daerah dapat disusun secara berencana, terpadu dan sistematis dalam suatu program pembentukan peraturan daerah, maka dibentuklah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sejalan dengan hal itu berdasarkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, melalui Bagian Hukum dan Perundang-undangan yang antara lain mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam menyelenggarakan urusan Hukum dan Perundang-Undangan di bidang Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Daerah, Penyusunan Produk Hukum, Pengkajian dan Evaluasi. Selanjutnya berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 239 ayat (1) menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda dan selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Program pembentukan peraturan daerah merupakan cerminan dari keberadaan pemerintah



sebagai negara hukum. Dengan adanya program pembentukan Perda akan membantu pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan secara lebih pasti, karena tidak boleh ada tindakan dari penyelenggara pemerintahan yang tidak memiliki dasar hukum, terlebih-lebih jika penyelenggaraan pemerintahan itu terkait dengan nasib rakyat secara komprehensif. Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi di luar program pembentukan Perda, apabila diperlukan untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam, dalam hal akibat kerja sama dengan pihak lain dan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah, akibat pembatalan oleh Menteri dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan. Dengan adanya program pembentukan Perda, perencanaan di bidang pembentukan Perda menjadi lebih terarah dan terencana sesuai dengan target, baik yang menyangkut waktu maupun substansi yang akan diatur pada masing-masing rancangan peraturan daerah.

Berkenaan dengan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, salah satu diantaranya adalah partisipasi DPRD selaku lembaga perwakilan rakyat daerah di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan untuk pembangunan daerah. Oleh sebab itu, ada beberapa produk hukum daerah atas inisiatif DPRD.

HASIL YANG DICAPAI :

Pada Tahun 2015 Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan urusan Hukum dan Perundang-Undangan di bidang Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Daerah, Penyusunan Produk Hukum, Pengkajian dan Evaluasi, yaitu :



▪ **MEMFASILITASI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN PEMBENTUKAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.**

a. Ranperda yang telah disyahkan dalam Rapat Paripurna Dewan :

- 1) Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 (Usulan Pemprovsu)
- 2) Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Usulan Pemprovsu)
- 3) Ranperda tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sumatera Utara (Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara) (Usulan Pemprovsu)
- 4) Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 (Usulan Pemprovsu)
- 5) Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Diluar Prolegda / (Usulan Pemprovsu)
- 6) Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 (Usulan Pemprovsu.

b. Ranperda Yang Masih Dalam Tahap Pembahasan :

- 1) Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Usulan DPRD-SU)

c. Ranperda Yang Ditarik Dari Prolegda :

- 1) Ranperda tentang Izin Usaha Perikanan di Provinsi Sumatera Utara (Usulan DPRD-SU)
- 2) Ranperda tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara (Usulan Pemprovsu)



- 3) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Usulan DPRD-SU)
- 4) Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Usulan DPRD-SU)
- 5) Ranperda tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Indonesia ke Luar Negeri (Usulan DPRD-SU).

Sementara itu, sisanya sebanyak 9 (sembilan) Ranperda belum dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara dikarenakan Draft Ranperda beserta Naskah Akademiknya belum disampaikan oleh pengusul Ranperda, baik usulan Pemprovsu maupun usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya perlu juga dijelaskan bahwa pada Tahun 2015 telah ditampung anggaran untuk biaya Pembuatan Naskah Akademik Ranperda Usulan DPRD-SU. Namun anggaran tersebut tidak terealisasi 100% dikarenakan sampai akhir tahun 2015, tidak ada yang diajukan permohonan untuk pembuatan Draft Ranperda beserta Naskah Akademiknya dari Anggota DPRD-SU baik dari Komisi maupun Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

▪ **MEMFASILITASI PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS / KELOMPOK KERJA DAN PEMBAHASAN REKOMENDASI DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA SERTA PRODUK HUKUM DPRD.**

Pada Tahun 2015, yang difasilitasi untuk Pembentukan Panitia Khusus DPRD-SU, yaitu :

- 1) Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan.
- 2) Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Tata Cara Rapat dan Sidang.



- 3) Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan Persiapan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
- 4) Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Asset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014.

▪ **REKOMENDASI DAN PRODUK HUKUM DPRD-SU**

Pada Tahun 2015 yang difasilitasi oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan, yaitu :

- 1) Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 10/K/2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 11/K/2015 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 15/K/2015 tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.
- 4) Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perumusan Pokok-Pokok Pikiran.
- 5) Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 24/K/2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016.



Tabel 21
PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD TAHUN 2015

No	JUDUL RANPERDA	KETERANGAN
1.	Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Belum ada dibahas
2.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba	Belum ada dibahas
3.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 26 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara	Belum ada dibahas
4.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	Belum ada dibahas
5.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkebunan menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara	Belum ada dibahas
6.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	Belum ada dibahas
7.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	Belum ada dibahas
8.	Ranperda tentang Bantuan Hukum	Belum ada dibahas
9.	Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Belum ada dibahas
10.	Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Belum ada dibahas
11.	Ranperda tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Indonesia ke Luar Negeri	Belum ada dibahas

Sumber : Sekretariat DPRD dan Biro Hukum Setdaprov Sumut

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Peraturan Daerah (PERDA) atas inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 2015 belum dibahas, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini tidak ada. Sekalipun demikian perda tersebut akan ditindaklanjuti pada tahun 2016 ini.

Permasalahan dan Kendala :

1. Penyampaian naskah akademik/keterangan serta draft ranperda, baik usulan dari DPRD Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Daerah ke Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara sering terlambat dan tidak terprogram, sehingga menyulitkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) untuk



-
- melakukan pembahasan dan penjadwalannya mengingat volume kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara cukup padat.
2. Sulitnya menyatukan waktu yang sama bagi Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD-Sumatera Utara, sehingga jika diadakan rapat, maka kehadiran Anggota BPPD relatif sangat minim. Hal ini berakibat kadang rapat menjadi ditunda dan jika rapat tetap dilaksanakan, maka pembahasannya juga menjadi kurang maksimal.
 3. Adanya rangkap tugas dalam berbagai kegiatan dari Anggota Dewan, dimana seorang Anggota Dewan disamping sebagai Anggota Komisi, dan Alat Kelengkapan Lain serta Fraksi dan Anggota Partai Politik yang tunduk dan patuh terhadap kebijakan partai politiknya, maka tugas untuk memprioritaskan kegiatan di BPPD untuk membahas Ranperda sangat sulit dan selalu terjadi tumpang tindih jadwal dengan kegiatan lainnya yang sudah terjadwal melalui Badan Musyawarah (BAMUS) DPRD Provinsi Sumatera Utara.
 4. Peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan juga menjadi permasalahan yang cukup mendasar dalam pembahasan ranperda. Misalnya Perubahan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berubah menjadi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, banyak ketentuan dan kewenangan provinsi yang telah berubah tentu pengaturannya juga harus berubah pula. Selain itu, lahirnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak dibarengi oleh peraturan pelaksanaannya sebagai acuan dalam penyusunan Ranperda, disamping lambatnya peraturan pelaksana dari UU tersebut terbit baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.
 5. Terjadinya inkonsistensi peraturan perundang-undangan di pusat yang tingkatannya diatas peraturan daerah sehingga berdampak terjadinya kekeliruan dalam menentukan acuan hukum sehingga menyulitkan bagi daerah dalam menyusun/memproses ranperda maupun dalam melakukan penyempurnaan terhadap perubahan perda.
 6. Setiap pengajuan program pembentukan Perda semestinya disertai dengan penjelasan dan atau keterangan dan pengajuan ranperda dari Pemerintah Daerah harus disampaikan mulai dari awal tahun secara bertahap, sehingga
-



memudahkan penjadwalannya. Begitu juga ranperda usulan dari komisi-komisi hendaknya segera diproses pembuatan Naskah Akademik (NA) dan draft ranperdanya setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD-Sumatera Utara hendaknya dapat dijadikan sebagai badan yang eksis dan lebih memiliki peran yang kuat dalam menjalankan fungsi legislasi dewan. Pembentukan Pansus idealnya dilakukan untuk hal-hal yang memang tingkat urgensi dan tingkat politisnya tinggi, sementara untuk pembahasan ranperda sebaiknya penugasannya diserahkan melalui BPPD sebagai alat kelengkapan dewan yang menangani bidang pembentukan Perda, sehingga tanggung jawab penyelesaian proses ranperda menjadi perda dapat diselesaikan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.
8. Pada Prolegda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 terdapat 12 ranperda usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara yang kesemuanya merupakan luncuran dari Prolegda Tahun 2014 dan dari 12 usulan ranperda tersebut hanya 1 (satu) draft ranperda dan naskah akademik yang telah disampaikan untuk dibahas. Sedangkan sisanya, draft ranperda beserta naskah akademiknya belum juga dibuat/disampaikan. Untuk ini agar agar tidak menjadi temuan aparat fungsional yang melakukan pembinaan dan pemeriksaan di lingkungan SKPD Provinsi Sumatera Utara, pengusul ranperda kiranya dapat menyiapkan dan menyampaikan draft ranperda beserta naskah akademiknya untuk segera dibahas. Bila pengusul tidak dapat menyampaikan draft ranperda beserta naskah akademik tersebut maka sebaiknya usulan ranperda tersebut ditarik dari prolegda.

Saran dan Solusi :

1. Diharapkan seluruh Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki peran dan komitmen yang kuat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, baik penyelesaian ranperda yang berasal dari Pemprovsum maupun ranperda yang berasal dari Inisiatif DPRD-SU, sehingga apa yang



menjadi prioritas kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

2. Agar setiap tahunnya dapat dianggarkan biaya untuk pencetakan Perda-Perda dan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah dibahas dan disahkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara maupun peraturan perundang-undangan lainnya dan disimpan dalam ruangan khusus, sehingga bila diperlukan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atau stakeholder dengan mudah memperoleh produk-produk hukum tersebut.
3. Berdasarkan amanah undang-undang dinyatakan bahwa setiap ranperda yang sedang dan telah dibahas wajib disosialisasikan kepada masyarakat, stakeholder serta pemangku kepentingan lainnya guna memperoleh masukan dan memberikan informasi berkaitan dengan ranperda tersebut. Untuk ini diharapkan agar dapat dianggarkan biaya sosialisasi Ranperda dan Perda dimaksud.

Capaian Indikator Kinerja

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (%)
kehadiran dalam pelaksanaan MUSRENBANG



Pendekatan perencanaan pembangunan yang salah satunya adalah pendekatan partisipatif dimana usulan diperoleh dari seluruh lapisan masyarakat yang disampaikan pada saat pelaksanaan Musrenbang, baik ditingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat. Pada saat pelaksanaan Musrenbang elemen masyarakat diwakili oleh Asosiasi, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, organisasi wanita, pers, dan organisasi masyarakat lainnya, dimana tingkat kehadirannya mencapai 100 %.

Realisasi kinerja telah tercapai sebagaimana yang diperjanjikan di awal tahun anggaran 2015 yang kemudian ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Pendekatan perencanaan pembangunan yang salah satunya adalah pendekatan partisipatif dimana usulan diperoleh dari seluruh lapisan masyarakat yang



disampaikan pada saat pelaksanaan Musrenbang, baik ditingkat **Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat**. Pada saat pelaksanaan Musrenbang elemen masyarakat diwakili oleh Asosiasi, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, organisasi wanita, pers, dan organisasi masyarakat lainnya, dimana tingkat kehadirannya mencapai 100 %.

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2015

No.	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	100 %	100 %

Sumber : BAPPEDA Prov. Sumut

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Capaian kinerja tahun 2014 dan Tahun 2015 hasilnya sama, yaitu 100 %, artinya bahwa animo dan partisipasi masyarakat dalam perumusan, kehadiran dalam setiap pelaksanaan MUSRENBANG di Provinsi Sumatera Utara sangat baik.

Capaian Indikator Kinerja

Persentase usulan masyarakat yang ditampung dalam dokumen perencanaan RKPD (Minimal)



Capaian Indikator Kinerja “Persentase usulan masyarakat yang ditampung dalam dokumen perencanaan RKPD (Minimal)”, belum menunjukkan kinerja yang seharusnya karena realisasi kinerja hanya 2,5 % saja. Kinerja ini juga diperoleh dari hasil reses DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015.

Tabel 23
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2015

No.	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	25 %	46,5 %

Sumber : BAPPEDA Prov. Sumut



Dari 100 % usulan masyarakat yang disampaikan DPRD melalui laporan hasil Reses Dewan yang disampaikan ke Bappeda Provinsi Sumatera Utara, setelah ditelaah pada saat proses penyusunan Ranwal RKPD. Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 10% usulan masyarakat yang akan ditampung dalam dokumen RKPD 2015. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 1,5 % yang kegiatannya dilaksanakan melalui SKPD terkait, BKP, Hibah dan Bansos.

Capaian Indikator Kinerja

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (Jlh dokumen)



Terkait dengan Dokumen perencanaan pemerintah daerah yaitu RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk periode Tahun 2013-2018, telah ditetapkan pada Nomor 5 Tahun 2014. Sehingga dengan demikian bahwa kinerja pada indikator ini sudah dicapai pada Tahun 2014 dan selain daripada itu dapat dijelaskan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015, indikator ini tidak ada target yang akan dicapai meskipun pada Perjanjian Kinerja 2015 indikator ini tetap dicantumkan.

Target yang ditetapkan pada tahun tahun 2015 adalah (0) dokumen dan pada tahun 2015 karena dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan melalui **Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018** tanggal 13 Mei 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22).

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2015

No.	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1.	1 Dok Perencanaan (RPJMD)	-

Sumber : BAPPEDA Prov. Sumut



Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 1 (satu) dokumen dan pada tahun 2014 telah ditetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara melalui **Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018** tanggal 13 Mei 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22) sehingga pencapaian kinerjanya menjadi 100%.

Capaian Indikator Kinerja

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (Jlh dokumen)



Ketepatan waktu dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara melalui pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan pada minggu IV bulan Maret dan/atau minggu I bulan April telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis (Renstra) SKPD;



-
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
 5. Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil reses DPRD tahun 2014. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2015 berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Rangkuman hasil telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD tersebut antara lain :

1. Peningkatan kehidupan beragama, penguatan tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
3. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan.
4. Revitalisasi pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agroindustri/agribisnis.
5. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
6. Peningkatan infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi.
7. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin.

Bahwa target yang ditetapkan pada tahun tahun 2015 adalah 1 (satu) dokumen dan pada tahun 2015 telah ditetapkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 melalui **Pergubsu Nomor 23 Tahun 2015 tentang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016** tanggal 27 Mei 2015 (*Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 26*) sehingga pencapaian kinerjanya menjadi 100%.

CAPAIAN TAHUN 2014 :

Capaian Kinerja untuk **“Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (Jlh dokumen)”**, menunjukkan bahwa relisasi kinerja telah tercapai sebagaimana yang diperjanjikan di awal tahun anggaran 2014 yang kemudian ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 yaitu 1 Dokumen RKPD. Target yang ditetapkan pada tahun tahun 2014 adalah 1 (satu)



dokumen dan pada tahun 2014 telah ditetapkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 melalui **Pergubsu Nomor 21 Tahun 2014 tentang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015** tanggal 23 Mei 2014 (*Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 21*) sehingga pencapaian kinerjanya menjadi 100%.

Capaian Indikator Kinerja

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Jlh dokumen)



Target yang ditetapkan pada tahun tahun 2015 adalah 1 (satu) dokumen. Penjabaran program RPJMD yang dijabarkan oleh masing-masing SKPD di dalam Renstra SKPD lima tahun yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD yang akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD Provinsi. Rekapitulasi dokumen Renja seluruh SKPD yang memuat program dan kegiatan SKPD sebagai bagian dari RPJMD dan Renstra SKPD yang telah diverifikasi oleh Bappeda Provsu dijadikan sebagai satu dokumen untuk dimasukkan ke dalam dokumen RKPD Provinsi.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 :

Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 pada indikator kinerja ini, dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 25
Perbandingan Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (Jlh dokumen)	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100

Sumber : BAPPEDA Prov. Sumut



Realisasi kinerja telah tercapai sebagaimana yang diperjanjikan di awal tahun anggaran 2014 yang kemudian ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 1 (satu) dokumen. Penjabaran program RPJMD yang dijabarkan oleh masing-masing SKPD di dalam Renstra SKPD lima tahun yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD yang akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD Provinsi. Rekapitulasi dokumen Renja seluruh SKPD yang memuat program dan kegiatan SKPD sebagai bagian dari RPJMD dan Renstra SKPD yang telah diverifikasi oleh Bappeda Provsu dijadikan sebagai satu dokumen untuk dimasukkan ke dalam dokumen RKPD Provinsi. Keberhasilan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah salah satunya dapat dilihat dari capaian Indikator makro pembangunan, baik indikator makro pembangunan sosial, maupun indikator makro pembangunan ekonomi. Salah satu indikator makro pembangunan sosial yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu : meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak.

Selanjutnya, salah satu indikator makro pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan, khususnya kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yaitu : PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi (atas dasar harga Konstan), Pendapatan per Kapita dan Tingkat Inflasi.



Sasaran Strategis - 3 :

“Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat beriman, bermoral, beretika dan berbudaya”

Keberhasilan Sasaran Strategis ke-3 ini, mencakup 2 (dua) aspek yaitu Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan. Untuk indeks pendidikan pada prinsipnya diukur dengan menggunakan 14 (empat belas) Indikator Kinerja, sedangkan pada Aspek Kesehatan diukur dengan menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja. Capaian Kinerja secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 26
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3

▪ INDEKS PENDIDIKAN

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lama Usia Sekolah (tahun)	10,00	8,93	89,30
2	Angka Buta Huruf (%)	1,77	1,18	66,67
3	APK/APM Pendidikan Formal			
	▪ APK PAUD Non Formal (%)	47,61	68,70	144,30
	▪ APM SD/ MI (%)	94,10	92,21	97,99
	▪ APK SD/ MI (%)	106,90	114,01	106,65
	▪ APK SMP/ MTs (%)	92,30	102,98	111,57
	▪ APM SMP/ MTs (%)	75,15	81,96	109,06
	▪ APK SMA/SMK (%)	85,26	88,75	104,09
	▪ APM SMA/SMK (%)	68,00	67,74	99,62
	▪ APK Perguruan Tinggi (%)	30,16	21,56	71,49
4	Angka Kelulusan SD/MI (%)	99,80	99,67	99,87
5	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100,00	99,12	99,12
6	Angka Kelulusan SMA/ MA/ SMK (%)	93,56	98,19	104,95
7	Persentase guru TK berkualifikasi akademik S1/D4 (%)	22,17	93,66	422,46
8	Persentase Guru SD/SDLB berkualifikasi akademik S1/D4 (%)	50,23	86,98	173,16



No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Persentase Guru SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/D4 (%)	80,91	89,28	110,34
10	Persentase Guru SMA berkualifikasi S1/D4	90,43	89,92	99,44
11	Persentase Guru SD/ SDLB bersertifikat Pendidikan (%)	75,04	42,53	56,68
12	Persentase Guru SMP/ SMPLB bersertifikat Pendidikan (%)	67,46	43,83	64,97
13	Persentase Guru SMA/ bersertifikat Pendidikan (%)	77,51	43,10	55,61
14	Persentase Guru SMK/ bersertifikat Pendidikan (%)	72,12	34,34	47,62

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Terkait dengan Indeks Pendidikan pada Sasaran Strategis ke-3 pada umumnya menunjukkan capaian kinerja dengan kategori SANGAT BAIK, hal ini adalah sebagaimana tergambar pada Tabel di atas.

CAPAIAN KINERJA INDEKS PENDIDIKAN TAHUN 2015

Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Selain jumlah penduduk yang besar, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan adalah relative besarnya disparitas ketersediaan sarana pendidikan. Di satu pihak, di wilayah perkotaan umumnya memiliki sekolah yang berkualitas dengan biaya pendidikan yang relative mahal dan dikelola secara mandiri. Dipihak lain, beberapa daerah masih terfokus pada peningkatan cakupan, atau masih berkuat pada peningkatan kualitas. Berikut akan diuraikan capaian kinerja pernyataan sasaran strategis ke-2, dari indeks pendidikan berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur pencapaian keberhasilan sasaran strategis.



Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 :

Tingkat capaian kinerja mulai dari target, realisasi dan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis ke 3 ini, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 27
Perbandingan Angka Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015
pada masing-masing Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2014					TAHUN 2015					
	TARGET		REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET		REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	
	VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN		VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
A. INDEKS PENDIDIKAN											
1	Lama Usia Sekolah (tahun)	9,50	%	9,13	%	96,11	10,00	%	8,93	%	89,30
2	Angka Buta Huruf (%)	0,92	%	1,31	%	142,39	1,77	%	1,18	%	66,67
3	APK/APM Pendidikan Formal										
	APK PAUD Non Formal (%)	44,06	%	65,02	%	147,57	47,61	%	68,70	%	144,30
	APM SD/ MI (%)	93,75	%	93,59	%	99,83	94,10	%	92,21	%	97,99
	APK SD/ MI (%)	106,40	%	114,38	%	107,50	106,90	%	114,01	%	106,65
	APK SMP/ MTs (%)	90,05	%	101,22	%	112,40	92,30	%	102,98	%	111,57
	APM SMP/ MTs (%)	72,23	%	80,90	%	112,00	75,15	%	81,96	%	109,06
	APK SMA/SMK (%)	82,92	%	86,74	%	104,61	85,26	%	88,75	%	104,09
	APM SMA/SMK (%)	64,00	%	64,36	%	100,56	68,00	%	67,74	%	99,62
	APK Perguruan Tinggi (%)	26,96	%	36,59	%	135,72	30,16	%	21,56	%	71,49
4	Angka Kelulusan SD/MI (%)	99,60	%	99,69	%	100,09	99,80	%	99,67	%	99,87
5	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100,00	%	98,30	%	98,30	100,00	%	99,12	%	99,12
6	Angka Kelulusan SMA/ MA/ SMK (%)	90,60	%	97,82	%	107,97	93,56	%	98,19	%	104,95
7	Persentase guru TK berkualifikasi akademik S1/D4 (%)	21,12	%	0,00	%	0,00	22,17	%	93,66	%	422,46
8	Persentase Guru SD/SDLB berkualifikasi akademik S1/D4 (%)	40,20	%	68,70	%	170,90	50,23	%	86,98	%	173,16
9	Persentase Guru SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/D4 (%)	76,56	%	82,65	%	107,95	80,91	%	89,28	%	110,34



INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2014					TAHUN 2015				
	TARGET		REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET		REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)
	VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN		VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10 Persentase Guru SMA berkualifikasi S1/D4	88,72	%	94,03	%	105,99	90,43	%	89,92	%	99,44
11 Persentase Guru SD/SDLB bersertifikat Pendidikan (%)	68,73	%	44,39	%	64,59	75,04	%	42,53	%	56,68
12 Persentase Guru SMP/SMPLB bersertifikat Pendidikan (%)	59,78	%	38,45	%	64,32	67,46	%	43,83	%	64,97
13 Persentase Guru SMA/bersertifikat Pendidikan (%)	68,78	%	41,12	%	59,78	77,51	%	43,10	%	55,61
14 Persentase Guru SMK/bersertifikat Pendidikan (%)	62,16	%	34,19	%	55,00	72,12	%	34,34	%	47,62

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Capaian Indikator Kinerja

Lama Usia Sekolah. (Tahun)



Peningkatan Lama usia sekolah (tahun) untuk mendukung tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun. Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja **Lama Usia Sekolah (Tahun)**. Capaian kinerja indikator ini sebesar 89,30 % atau dengan predikat SANGAT BAIK. Hal ini ditunjukkan dari capaian realisasi dari target 10 % diperoleh yang diukur di akhir tahun 2015. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Capaian Kinerja Lama Usia Sekolah Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%
Lama Usia Sekolah	10.00	8.93	89.30

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Realisasi indikator kinerja Lama Usia Sekolah (Tahun) di Tingkat Pendidikan Dasar Tahun 2015 mencapai 8.93% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 10.00%.



Persentase pencapaian indikator kinerja ini adalah 89.30% atau dengan kategori SANGAT BAIK.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015
dengan Tahun 2014 :

Tingkat capaian kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 dapat digambarkan tabel di bawah ini.

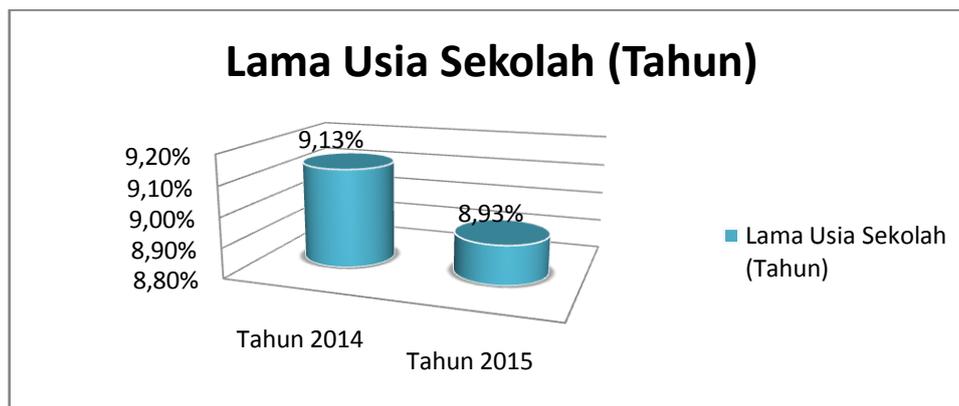
Tabel 29
Perbandingan Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Lama Usia Sekolah (Tahun)	9.50	9.13	96.11	10.00	8.93	89.30

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Angka realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 penurunannya mencapai 0.20% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 9.13% menjadi 8.93% pada tahun 2015. Berikut grafik Lama Usia Sekolah (Tahun) dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015.

Grafik 3. Lama Usia Sekolah



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Capaian Angka Lama Sekolah rata-rata Provinsi Sumatera Utara, mengalami trend positif dengan peningkatan sejak tahun 2008 (8,5 tahun), 2009 (8,6 tahun), 2010 (8,8 tahun), 2011 (8,8 tahun) hingga tahun 2012 telah mencapai 9,1 tahun.

Grafik 4. Angka Rata-Rata Lama Sekolah



Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

Capaian Indikator Kinerja

Angka Buta Huruf



Target indikator kinerja Angka Buta Huruf yang direncanakan pada Tahun 2015 sebesar 1.77%, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 1.18%, dengan capaian presentase kinerja sebesar 66.67%. Dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 0.59%. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 penurunannya mencapai 0.13% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 1.31% menjadi 1.18% pada tahun 2015.

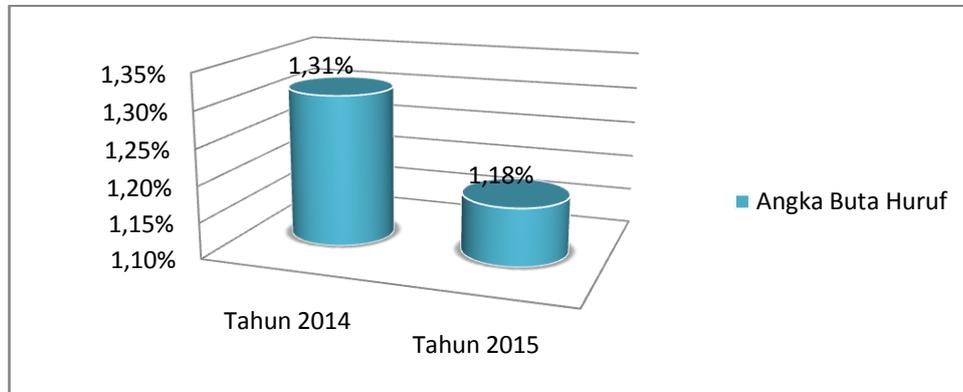
Tabel 30
Perbandingan Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Angka Buta Huruf	0.92	1.31	142.39	1.77	1.18	66.67

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Berikut grafik Angka Buta Huruf dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 :

Grafik 5.
Angka Buta Huruf



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

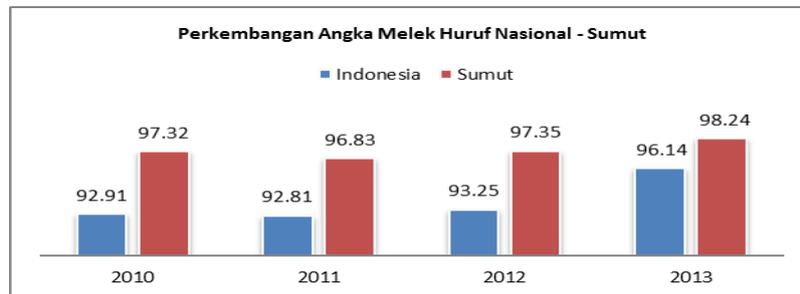
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan STANDARD NASIONAL :

Perkembangan antar waktu Angka Melek Huruf (AMH) Sumatera Utara dibandingkan capaian Nasional selama periode 4 (empat) tahun terakhir sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 secara umum mengalami tren positif (efektif). Capaian Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010 yang mencapai 97,32 persen, berada di atas capaian Nasional pada tahun yang sama mencapai 92,91 persen.

Kondisi ini terus berlangsung hingga tahun 2013, dimana capaian Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Utara mencapai 98,24 persen tetap berada di atas capaian Nasional yang mencapai 96,14 persen. Perkembangan Angka Melek Huruf di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 – 2013 bila dilihat dari komposisi laki-laki dan perempuan, berada di atas capaian nasional dan didominasi oleh laki-laki dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 98,80 persen sedangkan perempuan mencapai 97,70 persen, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 6. Perkembangan Angka Melek Huruf Sumatera Utara



Sumber :RKPD Pemporvu Tahun 2016

Capaian Indikator Kinerja

APK /APM Pendidikan Formal



Untuk pencapaian kinerja ini, juga dilihat dari indikator kinerja yang menjadi indikator penunjang, antara lain yaitu :

1. APK Pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal



Indikator kinerja Pendidikan Non Formal untuk Pendidikan Anak Usia Dini direncanakan sebesar 47.61%, dan mencapai realisasi sebesar 68.70% dengan capaian presentase kinerja yang baik yaitu mencapai sebesar 144.30%. Dimana perbandingan antara target dan realisasi APK PAUD Non Formal terjadi kenaikan sebesar 21.09%.



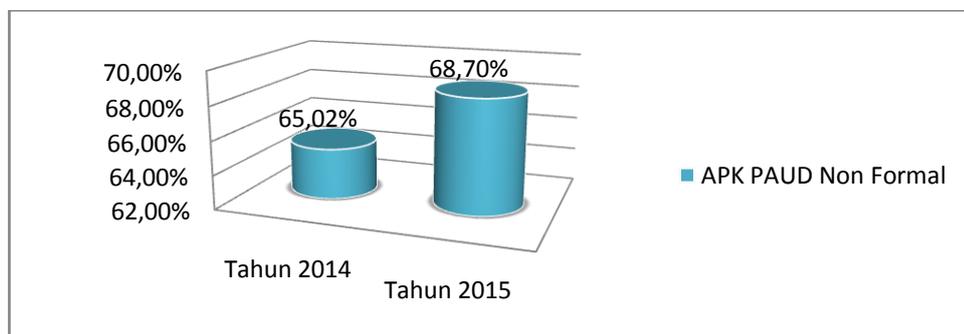
Tabel 31
Perbandingan Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
APK PAUD Non Formal	44.06	65.02	147.57	47.61	68.70	144.30

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 kenaikannya mencapai 3.68% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 65.02% menjadi 68.70% pada tahun 2015. Dimana jumlah penduduk usia 3-6 Tahun pada 2015 adalah 1.239.490 orang sedangkan jumlah siswa PAUD berjumlah 874.821 siswa. Berikut grafik Angka Partisipasi Kasar PAUD Non Formal dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015:

Grafik 7. APK PAUD Non Formal



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB



Tingkat ketercapaian melalui indikator kinerja **APM SD/SDLB**, tingkat pencapaiannya dapat digambarkan pada tabel berikut :



Tabel 32
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB
Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%
APM SD/SDLB	94.10	92.21	97.99

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Realisasi APM SD/SDLB Tahun 2015 mencapai 92.21% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 94.10%, sehingga pencapaian Indikator Kinerja adalah 97.99%, atau dengan kategori SANGAT BAIK dan perbandingan antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 1.89%.

**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015
dengan Tahun 2014**

Gambaran capaian kinerja untuk tahun 2015 dengan tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir adalah sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 33
Capaian Kinerja APM SD/MI Tahun 2013-2015

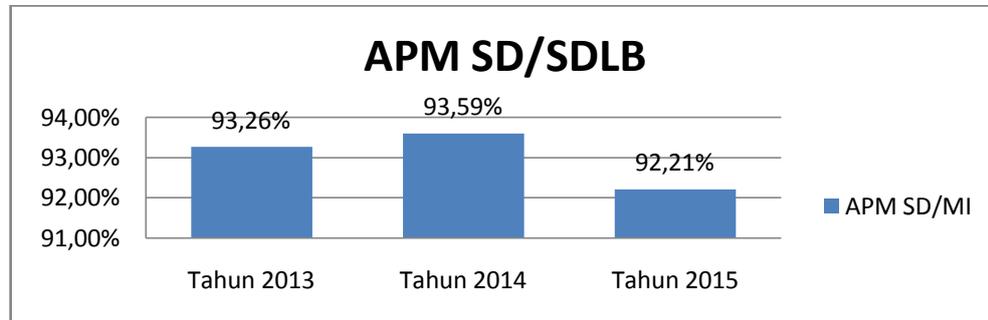
Indikator kinerja	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
APM SD/SDLB/MI	103.43	93.26	90.17	93.75	93.59	99.83	94.10	92.21	97.99

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 penurunannya mencapai 1.38% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 93.59% menjadi 92.21% pada tahun 2015. Perhitungan APM SD/SDLB/MI berdasarkan Jumlah penduduk usia 7-12 adalah 1.711.170 orang, sedangkan anak yang sekolah Tahun 2015 di SD/MI usia 7-12 tahun berjumlah 1.610.391 siswa.

Berikut grafik Angka Partisipasi Murni SD/SDLB/MI dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015.

Grafik 8.
Capaian Kinerja APM SD/SDLB/MI Tahun 2013-2015



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD /SDLB



Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja **APK SD/SDLB**, adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB
Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%
APK SD/SDLB	106.90	114.01	106.65

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Capaian kinerja yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2015 untuk sasaran strategis ke-3 ini, dimana dari target yang ditetapkan sebesar 106,9 %, diperoleh realisasi sebesar 114,01 %. Sehingga capaian kinerja nya mencapai 106,65 %.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 :

Untuk mengetahui trend peningkatan kinerja yang dicapai selama beberapa tahun terakhir di Provinsi Sumatera Utara untuk APK SD/SDLB adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini :



Tabel 35
Capaian Kinerja APK SD/SDLB Tahun 2013-2015

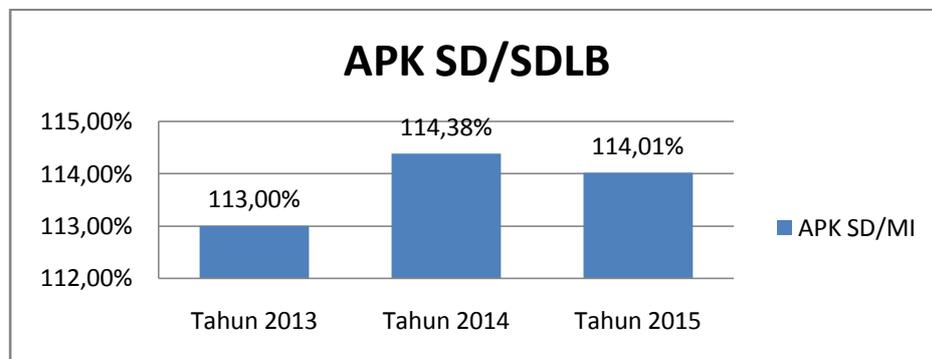
Indikator kinerja	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
APK SD/SDLB	112.59	113	100.36	106.40	114.38	107.50	106.90	114.01	106.65

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Realisasi APK SD/SDLB Tahun 2015 mencapai 114.01% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 106.90%. Persentase pencapaian IKU ini adalah 106.65%, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 7.11%. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi penurunan 0.37% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 114.38% menjadi 114.01 pada tahun 2015. Dimana jumlah penduduk usia 7-12 adalah 1.711.170 orang sedangkan jumlah siswa yang sekolah di SD/MI berjumlah 1.938.752 siswa.

Berikut grafik Angka Partisipasi Kasar SD/SDLB dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015:

Grafik 9. Capaian Kinerja APK SD/SDLB Tahun 2013-2015



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Pencapaian realisasi kenaikan APM SD/SDLB sebesar 1.89% dari target 94.10% menjadi 92.21% dan APK SD/SDLB sebesar 7,11% dari target 106.90% menjadi 114.01% didukung dengan adanya beberapa kegiatan yang dapat menunjang kenaikan APM dan APK SD/SDLB tersebut adalah **1) Seleksi Calon Peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD Tingkat Provinsi** yang bertujuan



a) Meningkatkan kemampuan Siswa Sekolah Dasar (SD) di bidang Mata Pelajaran Matematika dan IPA, baik dalam bentuk pemahaman maupun analisis sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan; b) Meningkatkan kemampuan daya saing siswa SD dalam bidang akademik matematika dan IPA sekaligus merupakan even tingkat Provinsi dalam hal evaluasi prestasi akademik yang diharapkan dapat memotivasi siswa dan sekolah dalam meningkatkan kualitasnya; c) Menjaring siswa-siswa terbaik dari jenjang SD untuk menjadi peserta olimpiade sains tingkat nasional tahun 2014.

Sasaran kegiatan ini adalah Siswa-siswi terbaik jenjang SD hasil seleksi di tingkat kabupaten/kota tahun 2014 yang berasal dari 2 (dua) mata pelajaran yang diperlombakan yaitu Bidang mata pelajaran Matematika dan IPA. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah a) Meningkatnya kemampuan siswa SD di Provinsi Sumatera Utara dalam Bidang Mata Pelajaran Matematika dan IPA; b) Meningkatnya motivasi siswa SD dalam mengembangkan kapasitas intelektual dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Prestasi yang dicapai pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) di Tingkat Nasional.

Hasil yang dicapai pada kegiatan OSN di Tingkat Nasional adalah mendapat perolehan 2 (dua) Medali Perak, yaitu pada Bidang Matematika atas nama **Alvinsen Japutra SD Sutomo 1 Medan** dan pada Bidang IPA atas nama **Gregorius Simanjuntak SD St. Yosef Sidikalang, Kabupaten Dairi** serta mendapat perolehan 2 (dua) Medali Perunggu pada Bidang IPA atas nama **Kevin S. Zebua SD Tunas Harapan Mandiri, Kabupaten Labuhanbatu** dan atas nama **Nuel D. Butar-Butar SD Bonapasogit Sejahtera, Kabupaten Toba Samosir.** 2) **Lomba Olahraga Siswa SD Tingkat Provinsi** yang bertujuan untuk; a) Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang olahraga; b) Membina dan mempersiapkan olahragawan berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional sejak usia sekolah; c) Mengembangkan jiwa sportivitas, kompetitif, rasa percaya diri, dan rasa tanggung jawab; d) Mengembangkan budaya hidup sehat dan gemar berolahraga; e) Menumbuhkembangkan nasionalisme dan cinta tanah air. Sasaran yang dituju adalah Siswa-siswa SD dengan memperlombakan 8



cabang olah raga yaitu Atletik, Pencak Silat, Catur, Bulu Tangkis, Tennis Meja, Senam, Karate dan Renang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini ditingkat Provinsi adalah menghasilkan peserta terbaik dalam tiap cabang olahraga yang dipertandingkan yaitu:

NO	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/ KOTA	KET
I. ATLETIK PUTRA				
1.	Agung Krisnawan	SDN 050586 Tanjung Jati	Langkat	Juara 1
2.	Ari Gunawan	SDN 118385 Pingir Jati	Labuhanbatu Utara	Juara 2
3.	Rizky Afrianda	SDN 050586 Tanjung Jati	Langkat	Juara 3
4.	Sanjaya Oji Nasution	SDN 112189 Negeri Lama	Labuhan Batu	Juara 4
ATLETIK PUTRI				
1.	Nadila Shafira	SDN 064011 Mabar	Medan	Juara 1
2.	Sheri Meliana Lubis	SDN 118385 Pingir Jati	Labuhanbatu Utara	Juara 2
3.	Aprianita	SDN 014722 Sumber Makmur	Batubara	Juara 3
4.	Elsa Simbolon	SDN 112265 Damuli Kebun	Labuhanbatu Utara	Juara 4
I. PENCAK SILAT PUTRA				
1.	Iqbal Zardarri Sa'i	SD Eria Medan Kota	Medan	Juara 1
2.	Anggara Gide Pangestu	SDN 101900 Lubuk Pakam	Deli Serdang	Juara 2
3.	Irgi Al-Fahrezi Nasution	SDN 020263 Jati Negara	Binjai	Juara 3
4.	Sahrian Sitorus	SDN 133888 Sei Tualang Raso	Tanjung Balai	Juara 4
PENCAK SILAT PUTRI				
1.	Siti Julaikah	SDN 105355 Suka Mulia	Deli Serdang	Juara 1
2.	Nazwa Sri Wahyuni Nst.	SDN 025281 Jati Makmur	Binjai	Juara 2
3.	Fatma Sari	SD Muhammadiyah 03	Pematang Siantar	Juara 3
4.	Rizki Ananda	SDN 133888 Sei Tualang Raso	Tanjung Balai	Juara 4
III. CATUR PUTRA				
1.	Derrickco Jotin	SD Nanyang Zhi Hui	Medan	Juara 1
2.	Riko Siholong Marito	SDN 112316 Aek Hite Toras	Labuhanbatu Utara	Juara 2
3.	Jidan Sekata	SDN 162091 Padang Hulu	Tebing Tinggi	Juara 3
4.	Fadli Habibi Rambe	SDN 112221 Sei Berombang	Labuhanbatu	Juara 4
CATUR PUTRI				
1.	Bulan Nainggolan	SDN 017112 Kuala	Batubara	Juara 1



NO	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/ KOTA	KET
		Tanjung		
2	Helena Marito Simanjuntak	SDN 118252 Aek Nabara	Labuhanbatu	Juara 2
3.	Devi Fifi Tarigan	SDN 020267 Satria	Binjai	Juara 3
4.	Zahra Amini Lubis	SDN 076 Panyabungan	Mandailing Natal	Juara 4
IV.	BULUTANGKIS PUTRA			
1.	Marsyahdid Nabil Mudzaffar	SD IT Himatul Fadhillah	Medan	Juara 1
2	M. Reza Pahlevi Harahap	SDN 101896 Dagang Kerawan	Deli Serdang	Juara 2
3.	Luis Nasution	SDN 026559 Paya Roba	Binjai	Juara 3
4.	Rifqi Alfha Raja	SDN 014688 Sidomukti	Asahan	Juara 4
	BULUTANGKIS PUTRI			
1.	Debby Ariani	SDN 115467 Kanopan Ulu	Labuhanbatu Utara	Juara 1
2	Zahra Dwi Sartika	MIN Aek Loba Pekan	Asahan	Juara 2
3.	Silvi Kartika Hasanah	SD IT Al Ikhlas Beringin	Medan	Juara 3
4.	Laila Kirani Jannah	SD Perguruan Tunas Bangsa	Deli Serdang	Juara 4
V.	TENIS MEJA PUTRA			
1.	Abim Ananda	SDN 101801 Deli Tua	Deli Serdang	Juara 1
2	Nahdhal Khair	SDN Percobaan	Medan	Juara 2
3.	Syahrul Fadli	SDN 010145 Labuhan Ruku	Batubara	Juara 3
4.	Irwansyah Lubis	SDN 117857 Leidong	Labuhanbatu Utara	Juara 4
	TENIS MEJA PUTRI			
1.	Suwandira	SDN 101801 Deli Tua	Deli Serdang	Juara 1
2	Sherly Amelia	SDN 013869 Indrapura	Batubara	Juara 2
3.	Bunga Kinanti Rajagukguk	SDN 056646 Sesirah Besitang	Langkat	Juara 3
4.	Iwa Rifani	SDN 164518 Persiapan	Tebing Tinggi	Juara 4
VI.	SENAM PUTRA			
1.	Patrick Willyam Butar-Butar	SDN 067091 Medan Kota	Medan	Juara 1
2	Kenny Gabriel Manurung	SD Wasley Marindal 2	Deli Serdang	Juara 2
3.	Rafael Ananda Sinulingga	SDN 023905 Binjai Utara	Binjai	Juara 3
4.	Taufik Nurhidayat	SDN 112280 Aek kanopan	Labuhanbatu Utara	Juara 4
	SENAM PUTRI			
1.	Nekhesa Putri	MIS Al Qubah Medan	Medan	Juara 1



NO	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/ KOTA	KET
	Islamy Siregar	Denai		
2	Rigan Tania Tambunan	SD Sinar Sentosa P. Sei Tuan	Deli Serdang	Juara 2
3.	Maya Jou Ito Siregar	SDN 165728 Tanjung Marulak	Tebing Tinggi	Juara 3
4.	Cleo Argatta Meisya	SDN 112280 Aek Kanopan	Labuhanbatu Utara	Juara 4
VII.	KARATE PUTRA			
1.	Aji Nugraha Alamsyah Hasibuan	SDN 020258 Binjai Barat	Binjai	Juara 1
2	M. Haqqy Annazily Rangkuti	SDN 010083 Kisaran Kota	Asahan	Juara 2
3.	Rendi Aprian Dinova	SDN 101882 Batu Bedimbar	Deli Serdang	Juara 3
4.	Rizky Aditri Rozal	SD Al Ulum Kota Matsum 2	Medan	Juara 4
	KARATE PUTRI			
1.	Gizza Divia Cantika	SD Muhammadiyah 34	Medan	Juara 1
2	Shahnaz Yuliananda	SDN 050668 Kwala Begumit	Langkat	Juara 2
3.	Nurul Junia Putri	SDN 101881 Batu Bedimbar	Deli Serdang	Juara 3
4.	Amiratul Husna Z	SD Sultan Hasanuddin	Labuhanbatu Utara	Juara 4
VIII.	RENANG PUTRA			
1.	Guntur Mahesa Putra	MIS Al Rasyid Suka Maju	Deli Serdang	Juara 1
2	Choky Arifandi Uliansyah Ritonga	SD Muhammadiyah 03 Tj. Sari	Medan	Juara 2
3.	Cassamo Miguel Manurung	SDN 017976 Indrapura	Batubara	Juara 3
4.	Muhammad Haiqal Bahari	SDN 027950 Binjai Kota	Binjai	Juara 4
	RENANG PUTRI			
1.	Aissa Arumdapta Rinaldi	SD Perguruan As Syafi'iyah	Medan	Juara 1
2	Dian Rizky Ananda	SD Darul Ilmi Murni	Deli Serdang	Juara 2
3.	Anindya Rakhima	SDN 200104 WEK II	Padang Sidempuan	Juara 3
4.	Selly Naomi Br. Tambunan	SDN 024762 Binjai Timur	Binjai	Juara 4

Sedangkan hasil yang diperoleh pada Lomba Olimpiade Olahraga SD Tingkat Nasional adalah : 1) Cabang Senam Putra mendapat perolehan 1 (satu) Medali Emas dan 1 (satu) Medali Perak atas nama **Patrick Willyam Butar-Butar** dari **SDN 067091 Kota Medan**; 2) Cabang Senam Putri mendapat perolehan 1 (satu) Medali Emas dan 1 (satu) Medali Perak atas nama **Nekhesa Putri Islamy Siregar** dari **MIS Al Qubah Medan Denai, Kota Medan**; 3) Cabang Renang Putra



mendapat perolehan 2 (dua) Medali Perunggu atas nama **Guntur Mahesa Putra** dari **MIS Al Rasyid Suka Maju, Kab. Deli Serdan**; 4) Cabang Renang Putra mendapat perolehan 1 (satu) Medali Emas, 1 (satu) Medali Perunggu dan 1 (satu) Medali Perak atas nama **Aissa Arumdapta Rinaldi** dari **SD Perguruan As Syafi'iyah**. 3) **Pembinaan dan Pembekalan Calon Peserta Olimpiade Olahraga Dan Seni (O2SN) Tingkat Nasional Jenjang SD** yang bertujuan; a) Meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi peserta SD untuk dapat berprestasi setinggi mungkin; b) Menjalin persaudaraan diantara siswa peserta SD yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara sehingga terbina kebersamaan antara siswa peserta menciptakan kerjasama tim yang solid pada lomba yang dilakukan secara beregu sehingga terjalin keterpaduan diantara peserta; c) Memperluas wawasan dan pengetahuan peserta mengenai teknik dan strategi terbaik dalam menghadapi O2SN SD Tingkat Nasional melalui materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Sasaran yang akan dicapai adalah siswa-siswa SD yang terseleksi dari lomba O2SN.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP /SMLB



Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja **APK SMP/MTs**. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Capaian Kinerja APK SMP/SMPLB Tahun 2013-2015

Indikator kinerja	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
APK SMP/MTs	105.01	88.55	84.33	90.05	101.22	112.40	92.30	102.98	111.57

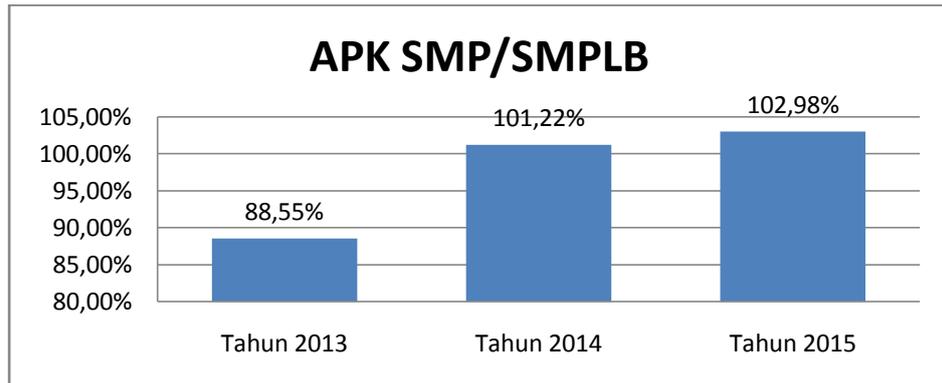
Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Realisasi APK SMP/SMLB Tahun 2015 mencapai 102.98% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 92.30%. Persentase pencapaian IKU ini adalah 111.57%, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 10,68%. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014



dan tahun 2015 kenaikannya mencapai 1,76% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 101.22% menjadi 102.98% pada tahun 2015. Dimana jumlah penduduk usia 13-15 Tahun adalah 813.830 orang sedangkan jumlah siswa yang sekolah di SMP/MTs berjumlah 843.477 siswa. Berikut grafik Angka Partisipasi Kasar SMP/SMPLB dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 :

Grafik 10. Capaian Kinerja APK SMP/SMPLB Tahun 2013-2015



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP /SMPLB



Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja **APM SMP/SMPLB**. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 37
Capaian Kinerja APM SMP/SMPLB Tahun 2013-2015

Indikator kinerja	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
APM SMP/MTs	97.52	70.51	72.30	72.23	80.90	112	75.15	81.96	109.06

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

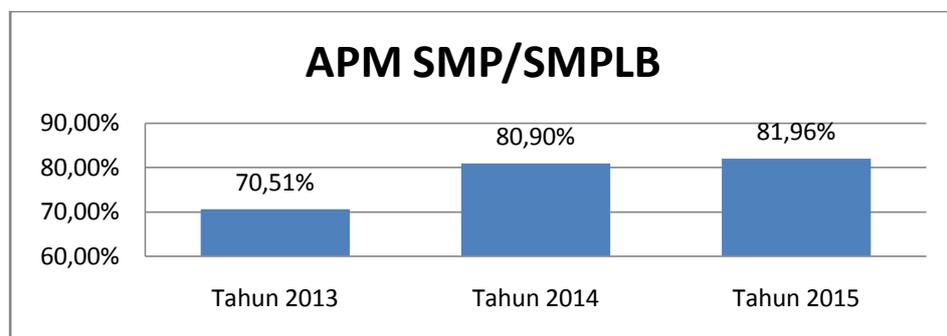
Realisasi APM SMP/SMPLB Tahun 2015 mencapai 81.96% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 75.15%. Persentase pencapaian IKU ini adalah 109.06%, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 6.81%. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dan



tahun 2015 kenaikannya mencapai 1.06% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 80.90% menjadi 81.96% pada tahun 2015. Dimana jumlah penduduk usia 13-15 Tahun adalah 813.830 orang sedangkan jumlah siswa usia 13-15 tahun yang sekolah di SMP/SMPLB berjumlah 678.021 siswa.

Berikut grafik Angka Partisipasi Murni SMP/SMPLB dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015:

Grafik 11.
Capaian Kinerja APM SMP/SMPLB Tahun 2013-2015



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Pencapaian realisasi kinerja dari APM SMP/SMPLB sebesar 81.96 melebihi dari dari target sebesar 75.15% dengan kenaikan sebesar 6.81% dan Target APK SMP/MTs sebesar 92.30 dengan realisasi kinerja sebesar 102.98% dengan kenaikan sebesar 10.68%, hal ini karena didukung dengan adanya beberapa kegiatan yang dapat menunjang kenaikan APM dan APK SMP/SMPLB tersebut adalah **1) Pembinaan dan Pembekalan Calon Peserta Olimpiade Olahraga Siswa (O2SN) Tingkat Nasional Jenjang SMP** yang bertujuan untuk; a) Memantapkan mental, meningkatkan kreatifitas dan strategi peserta; b) Meningkatkan rasa percaya diri dan memotivasi peserta O2SN Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk dapat berprestasi setinggi mungkin; c) Menjalinkan persaudaraan diantara siswa peserta O2SN SMP yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara sehingga terbina kebersamaan antara siswa peserta; d) Menciptakan kerjasama tim yang solid pada lomba yang dilakukan



secara beregu sehingga terjalin keterpaduan diantara peserta; e) Memperluas wawasan dan pengetahuan peserta mengenai teknik dan strategi dalam menghadapi O2SN SMP Tingkat Nasional melalui materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Sasaran kegiatan ini adalah siswa-siswa SMP yang terseleksi dari lomba O2SN. Hasil yang dicapai didalam kegiatan ini adalah menghasilkan peserta terbaik ditingkat nasional. **2) Seleksi Calon Peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SMP Tingkat Provinsi** yang bertujuan untuk; a) Meningkatkan kemampuan SMP di bidang Mata pelajaran Matematika, IPA (Biologi, Fisikal dan IPS, baik dalam bentuk pemahaman maupun analisis sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan; b) Meningkatkan kemampuan daya saing siswa SMP dalam bidang akademik Matematika, IPA (Biologi, Fisika) dan IPS sekaligus merupakan even tingkat Provinsi dalam hal evaluasi prestasi akademik yang diharapkan dapat memotivasi siswa dan sekolah dalam meningkatkan kualitasnya; c) Menjaring siswa-siswa terbaik dari jenjang SMP untuk menjadi peserta olimpiade sains tingkat nasional tahun 2014. Sasaran kegiatan ini adalah siswa-siswi jenjang SMP, SMP Terbuka, SD-SMP satu atap baik negeri maupun swasta. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah; a) Meningkatnya kemampuan siswa SMP di Provinsi Sumatera Utara dalam Bidang Matematika, IPA (Biologi, Fisika) dan IPS; b) Meningkatnya motivasi siswa SMP dalam mengembangkan kapasitas intelektual dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil yang dicapai pada kegiatan OSN di Tingkat Nasional adalah mendapat perolehan 1 (satu) Medali Perak pada bidang studi IPA atas nama **Christina, SMP Swasta Methodist Charles Wesley Medan**; 1 (satu) Medali Perak pada bidang studi IPS atas nama **Maurits Arif Fathoni Lubis, SMP Swasta Harapan 1 Medan**; 1 (satu) Medali Perak pada bidang studi Matematika atas nama **Akeyla Pradia Naufal, SMP Swasta Muhammadiyah 1 Medan**; 2 (dua) Medali Perunggu pada Bidang Matematika atas nama **Brenna Varian, SMP Swasta Sutomo 2 Medan** dan **Chaterine Charles, SMP Swasta Sutomo 1 Medan**. **3) Lomba Seni Siswa SMP Tingkat Provinsi** yang bertujuan untuk; a) Menggali dan melestarikan seni dan budaya bangsa Indonesia yang tersebar di 34 provinsi; b) Membina dan mengingatkan kreativitas siswa dalam



bidang seni dan sastra; c) Menanamkan dan membina apresiasi seni dan sastra, khususnya terhadap nilai-nilai tradisi yang berakar pada budaya bangsa; d) Mengembangkan sikap kompetitif dalam diri siswa yang berwawasan global. Sasaran kegiatan ini adalah siswa-siswi jenjang SMP baik negeri maupun swasta. Hasil yang dicapai dari Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 adalah terseleksi siswa-siswa yang berprestasi dalam bidang seni dengan pemenang sebagai berikut :

NO	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/ KOTA	KET
I.	LOMBA KREATIVITAS SENI TARI			
1	Arlya Fairuz Saragih	SMPN 2 Rantau Utara	Labuhanbatu	Juara 1
2.	Yoppi Septianda Br. Sebayang			
3.	Disty Uni Khanaya			
4.	Astiana Sakinah Dalimunthe			
5.	Hafizah ningtias			
1	Naza balqis Lintang	SMP Harapan 1	Medan	Juara 2
2.	Tiara Shafa Maharani Br. Karo-Karo			
3.	Nadira Anjani			
4.	Dhea Hidayati			
5.	Shalika Tertiera Surya Bhuana			
1	Aldo Sitorus	SMPN 2 Kota Tanjung Balai	Tanjung Balai	Juara 3
2.	Aldo Agustino Kharafi D.			
3.	Indra Risky Mahesa			
4.	Andre Ragil Ashari			
5.	Wan Rizki Ananda Tampubolon			
II.	STORY TELLING			
1.	Syarifah Zuhra	SMP Harapan 1 Medan	Medan	Juara 1
2	Marhaenis Clara Br. Sembiring	SMP St. Maria Kabanjahe	Karo	Juara 2
3.	Saphira Ailin	SMPN 4 Kota Medan	Tebing Tinggi	Juara 3
III.	CIPTA PUISI			
1.	Andika Simamora	SMPN 2 Dolok Masihul	Serdang Bedagai	Juara 1
2	Nurul Pusfita Napitupulu	SMPN 1 Pulau Rakyat	Asahan	Juara 2
3.	Ade Syifa Azzahra	SMPN 1 Kota Tj. Balai	Tanjung Balai	Juara 3
IV.	CIPTA LAGU			
1.	Ditha Yohana Patricya Damanik	SMP Tunas Harapan	Labuhanbatu	Juara 1



Laporan Kinerja (LK)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

NO	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/ KOTA	KET
		Mandiri		
2	Alya Andriyani	SMP Panca Budi Kota Medan	Medan	Juara 2
3.	Gian Ananta Abrao Tamba	SMPN 2 Babalan	Langkat	Juara 3
V.	SENI LUKIS			
1.	Muhammad Fachri Saragih	SMP Al-Muslimin Pandan	Tapanuli Tengah	Juara 1
2	Faustine Utomo	SMP Budi Dharma	Tebing Tinggi	Juara 2
3.	Cut Azizah	SMPN 37 Medan	Medan	Juara 3
VI.	BACA PUISI			
1.	Nurul Annisa	SMPN 1 Hamparan Perak	Deli Serdang	Juara 1
2	Isty Nurul Chairida	SMPN 11 Medan	Medan	Juara 2
3.	Juliano Adjie Mansiz	SMPN 1 Pantai Cermin	Serdang Bedagai	Juara 3
VII.	DESAIN MOTIF BATIK			
1.	Aulia Kartika	SMPN 7 Kota Tj. Balai	Tanjung Balai	Juara 1
2	Tantri Thahirah Pasaribu	SMPN 1 Kota Binjai	Binjai	Juara 2
3.	Rizka Wulandari Saragih	SMPN 2 Pandan Nauli	Tapanuli Tengah	Juara 3
VIII.	SENI BACA AL-QUR'AN PUTRA			
1.	Selamet	SMPN 1 Panai Tengah	Labuhanbatu	Juara 1
2	Fadel Muhammad Ramadhan P.	SMP Al-Muslimin Pandan	Tapanuli Tengah	Juara 2
3.	Muhammad Fiqri Aulia Siregar	SMPN 1 Sei Suka	Batubara	Juara 3
	SENI BACA AL-QUR'AN PUTRI			
1.	Nurul Fadilah Harahap	SMPN 1 Barumon Tengah	Padang Lawas	Juara 1
2	Sulis Setiawati	SMPN 2 Buntu Pane	Asahan	Juara 2
3.	Naila Syabina Rachmi	SMPN 1 Sei Suka	Batubara	Juara 3
IX.	VOKAL GRUP			
1	Theresia Theovany Br. Tarigan	SMP St. Maria Kabanjahe	Karo	Juara 1
2.	Stefani Tiarma Junita Malau			
3.	Trinita Roulina Bahari Br. Sigiro			
4.	Eferani Aginta Br. Barus			
5.	Roi Winata			
1	Ira Permata Kristina Harefa	SMP Pemda 2	Gunung Sitoli	Juara 2



NO	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/ KOTA	KET
2.	Erwin Saputra Gea	Gunung Sitoli		
3.	Joyce Margareth			
4.	Idem Suarni Gea			
5.	Restu Dharmajaya Zendrato			
1	Radeo Gerald Sinaga			
2.	Cyriella Odela Bu'ulolo	SMP Perguruan Methodist	Binjai	Juara 3
3.	Ema Nina Chairina Br. Sitorus			
4.	Tamara Gabriela Br. Siahaan			
5.	Karen Nusinda Barus			
X.	CIPTA CERPEN BERBAHASA INDONESIA			
1.	Yola Nur Annisa Tanjung	SMP Al- Muslimin Pandan	Tapanuli Tengah	Juara 1
2	Ondina Melati Citra Simbolon	SMP Budi Muli Pangururan	Samosir	Juara 2
3.	Jeli Ria Hartami Zendrato	SMP Lentera Harapan	Gunung Sitoli	Juara 3
XI.	DESAIN POSTER			
1.	Muhammad Hambali	SMPN 1 Binjai	Binjai	Juara 1
XII.	FESTIVAL MUSIK TRADISIONAL			
1.	Umiersyah	SMPN 1 Hampanan Perak	Deli Serdang	Juara 1
2	Irgi Fahrezi			
3.	Khairunnisa			
4.	Ummu Alfin Karimah			
5.	Salmiah			

Sedangkan hasil yang dicapai pada kegiatan Festival Lomba Seni Siswa (FLS2N) SMP di Tingkat Nasional adalah mendapat perolehan 1 (satu) Medali Perunggu untuk lomba Cerpen atas nama *Yola Nur Annisa Tanjung, SMP Swasta Al-Muslimin Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah*; dan 1 (satu) Medali Perunggu untuk lomba Story Telling atas nama *Syahrifa Duha, SMP Swasta Harapan 1 Medan*. 4) **Lomba Olahraga Siswa SMP Tingkat Provinsi** yang bertujuan untuk ; a) Meningkatkan kecintaan dan apresiasi siswa SMP terhadap bidang olahraga; b) Meningkatkan kecakapan kolaboratif dan kooperatif para siswa SMP; c) Meningkatkan kesehatan jasmani siswa; d) Meningkatkan mutu akademis siswa; e) Menciptakan kondisi kompetitif secara sehat; f) Melatih sportivitas dan tanggungjawab; g) Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam olahraga; h) Meningkatkan persatuan dan kesatuan antara siswa seluruh Indonesia. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terseleksinya dan terpilihnya siswa SMP



terbaik dari Provinsi Sumatera Utara sebagai peserta Olimpiade Olah Raga Siswa di Tingkat Nasional dengan pemenang sebagai berikut:

NO	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/ KOTA	KET
I.	PENCAK SILAT PUTRA			
1.	Perdana Arian Putra	SMPN 1 Lubuk Pakam	Deli Serdang	Juara 1
2.	Andreas Nababan	SMP Daerah Kisaran Selawan	Asahan	Juara 2
3.	Fauzan Pratama Effendi	SMPN 1 Binjai Kota	Binjai	Juara 3
	PENCAK SILAT PUTRI			
1.	Ajeng Ayu Ningrum	SMPN 2 Lubuk Pakam	Deli Serdang	Juara 1
2.	Nur Aisyah Wardah	SMPN 11 Binjai Utara	Binjai	Juara 2
3.	Wuri Fadillah	SMPN 2 Kota Tj. Balai	Tanjung Balai	Juara 3
II.	BOLA VOLLI PUTRA			
1.	Hairunas Habinowo	SMP Dharma Pancasila	Medan	Juara 1
2.	Muhammad Syafi'i Pohan	SMP Namira		
3.	Mhd. Zuhri	SMP Dharma Pancasila		
4.	Lutfi Fahriandi	SMP Al Fityan		
5.	Muhammad Vebryansyah	SMPN 41 Medan		
6.	M. Bima Surya Kanta	SMP Ar Rahman		
7.	Ananda Bima Pratama	SMP Ar Rahman		
	BOLA VOLLI PUTRI			
1	Wina Anggriani Rambe	SMP TPI Janji PTPN 3	Labuhanbatu	Juara 1
2.	Dewi Kumala Kholisa Srg.			
3.	Fajriah Umairah			
4.	Siti Nurhamsiah			
5.	Febriana Sari			
6.	Annisa Adha Dwi Putri			
7.	Dila Tri Andriyani			
1	Dinda Ayu Lestari	SMP Pertiwi	Medan	Juara 2
2.	Widya Aulia Putri	SMP Al Fattah		
3.	Widya Utari	SMPN 33		
4.	Dewi Fahra Diva	SMPN 33		
5.	Putri Octaviana	SMPN 33		
6.	Vivi Sri Handayani	SMPN 33		



NO	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/ KOTA	KET
7.	Zara Zetira	SMPN 25		
1	Yunda Miranda Putri	SMP Nusantara	Deli Serdang	Juara 3
2.	Vina Kumala Sari	SMPN 1 Galang		
3.	Anggita	SMPN 1 Bangun Purba		
4.	Sekar Dwi Wulandari	SMPN 1 Lubuk Pakam		
5.	Yunda Herliana	SMPN 1 Lubuk Pakam		
6.	Tiara Indriyani	SMPN 1 Lubuk Pakam		
7.	Elvira Rizka Putri	SMPN 1 Lubuk Pakam		
III.	KARATE PUTRA			
1.	Andrianto Sinaga	Smpn 1 Siempat Rube	Pakpak Bharat	Juara 1
2.	Budi Parmonangan	SMPN 2 Bandar Khalipah	Serdang Bedagai	Juara 2
3.	Samuel Rivaldo Sagala	SMPN 7 Medan	Medan	Juara 3
	KARATE PUTRI			
1.	Jihan Nur Savira	SMPN 7 Medan	Medan	Juara 1
2	Novia Yolanda Purba	SMPN 4 T. Tinggi	Tebing Tinggi	Juara 2
3.	Yeremia K.K. Sinaga	SMP PKMI Sidikalang	Dairi	Juara 3
IV.	TENIS MEJA PUTRA			
1.	Suhada	SMPN 11 Tj.Balai	Tanjung Balai	Juara 1
2	Amri Syahpudan	SMPN 1 Kualuh Hulu	Labuhanbatu Utara	Juara 2
3.	Epyphanias Enoniman	SMPN 1 Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	Juara 3
	TENIS MEJA PUTRI			
1.	Stevany	SPMN 2 Rantau Utara	Labuhanbatu	Juara 1
2	Thariyah Batrisyah	SMPN 1 Bangun Purba	Deli Serdang	Juara 2
3.	Dwi Harti C. Hutagalung	SMPN 6 Kisaran	Asahan	Juara 3
V.	CATUR PUTRA			
1.	Yudha Anyes Fijay Sinuhaji	SMPN 1 Berastagi	Karo	Juara 1
2	Ryan Agustian	SMPN 9 T. Tinggi	Tebing Tinggi	Juara 2
3.	Said Muhammad Ikbil Alhaddad	SMPN 1 Kisaran	Asahan	Juara 3
	CATUR PUTRI			
1.	Miftahul Jannah	SMPN 1 Panai Hilir	Labuhanbatu	Juara 1
2	Friska Harahap	SMPN 1 Padang Bolak	Padang Lawas Utara	Juara 2
3.	Hafiza Fikri Naipospos	SMP Sultan Hasanuddin	Labuhanbatu Utara	Juara 3
VI.	RENANG PUTRA			



NO	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/ KOTA	KET
1.	Erlangga Andaru Rinaldi	SMP Primbana	Medan	Juara 1
2.	Arkhansyah Purba	SMP Buddhist Manjusri	Pematang Siantar	Juara 2
3.	Fadli Aminur Rasyid S.	SMP Nurul Ilmi	Padang Sidempuan	Juara 3
RENANG PUTRI				
1.	Cindy Shiesylia Putri	SMP Mayjend Sutoyo SM.	Medan	Juara 1
2.	Gabby Chintya S.	SMPN 1 P. Sidempuan	Padang Sidempuan	Juara 2
3.	Rafa Ijmi Alamsick	SMPN 2 Pandan Nauli	Tapanuli Tengah	Juara 3
VII. BULUTANGKIS PUTRA				
1.	Mhd. Dewa Sihombing	SMPN 1 T. Tinggi	Tebing Tinggi	Juara 1
2.	Ari Kesuma	SMPN 35 Medan	Medan	Juara 2
3.	Daniel Trinov Lovez S.	SMPN 2 Medan	Medan	Juara 3
4.	Nilwan Syahputra Harahap	SMPN 1 Sei Kanan, Langgapayung	Labuhan Selatan	Juara 4
BULUTANGKIS PUTRI				
1.	Sekar Dyah Ayu	SMPN 11	Medan	Juara 1
2.	Tri Intan Syahfitri	SMP Sinar Husni	Deli Serdang	Juara 2
3.	Natasya Juwita	SMP Diponegoro	Asahan	Juara 3
4.	Alsya Aulia Febry Elbana Hasibuan	SMP Bina Insan	Labuhanbatu	Juara 4
VIII. ATLETIK PUTRA				
1.	Muhammad Azizi Rahman	SMPN 6 Kisaran	Asahan	Juara 1
2.	Juan Arya Pratama Meliala	SMP RK. St. Maria Penen, Sibiru Biru	Deli Serdang	Juara 2
3.	Fikry Rezki Al Faris	SMPN 1 Tj. Balai	Tanjung Balai	Juara 3
ATLETIK PUTRI				
1.	Omega Romauli Br. Jalibu	SMPN 1 Onanganjang	Humbang Hasundutan	Juara 1
2.	Rahita Purba	SMP Budi Mulia Suka Raja	Pematang Siantar	Juara 2
3.	Sinta Belia Nanda	SMPN Padang Bolak	Padang Lawas Utara	Juara 3

Sedangkan hasil yang dicapai pada kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa (O2SN) SMP di Tingkat Nasional adalah mendapat perolehan 3 (tiga) Medali Emas untuk cabang lomba Renang Putra Gaya Bebas, Gaya Punggung dan Gaya Kupu-kupu atas nama ***Erlanggand Handaru Rinaldi, SMP Swasta Primbana Medan.***

6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA /MA/ SMK



Program pendidikan menengah dan Program Pendidikan Menengah Kejuruan diarahkan untuk meningkatkan akses ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan menengah dan terus meningkatkan kualitas lulusan yang dihasilkan, relevansi dan berkesetaraan. Dengan program ini diharapkan akan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar pendidikan menengah dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tujuan strategis Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja **APK SMA/MA/SMK**. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Capaian Kinerja APK SMA/MA/SMK Tahun 2013-2015

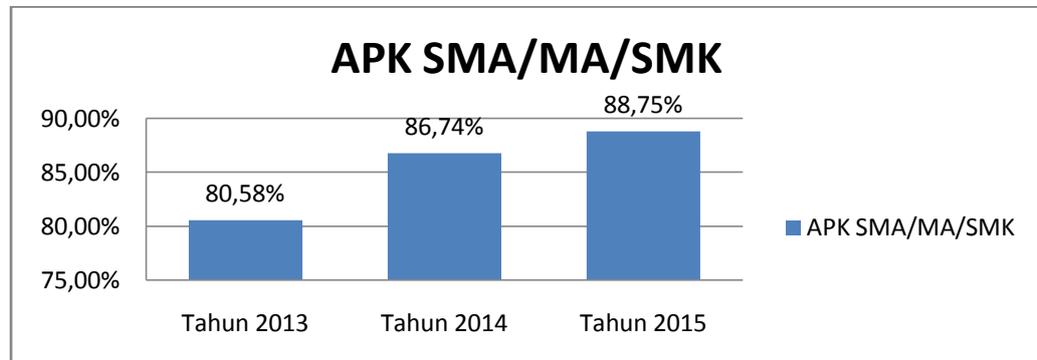
Indikator kinerja	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
APK SMA/MA/SMK	89.99	80.58	89.55	82.92	86.74	104.61	85.26	88.75	104.09

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Realisasi APK SMA/MA/SMK Tahun 2015 mencapai 88.75% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 85.26%. Persentase pencapaian IKU ini adalah 104.09%, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 3.49%.

Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 kenaikannya mencapai 2.01% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 86.74% menjadi 88.75% pada tahun 2015. Dimana jumlah penduduk usia 16-18 Tahun adalah 792.010 orang sedangkan jumlah siswa yang sekolah di SMA/MA/SMK berjumlah 687.415 siswa. Berikut grafik Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015:

Grafik 12.
Capaian Kinerja APK SMA/MA/SMK Tahun 2013-2015



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

7. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI



Tujuan utama yang diharapkan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya APM SMA/MA/SMK adalah meningkatnya akses pendidikan menengah. Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dilihat melalui IKU **APM SMA/MA/SMK**. Adapun tingkat pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Capaian Kinerja APM SMA/MA/SMK Tahun 2013-2015

Indikator kinerja	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
APM SMA/MA/SMK	74.59	63.01	84.48	64.00	64.36	100.56	68.00	67.74	99.62

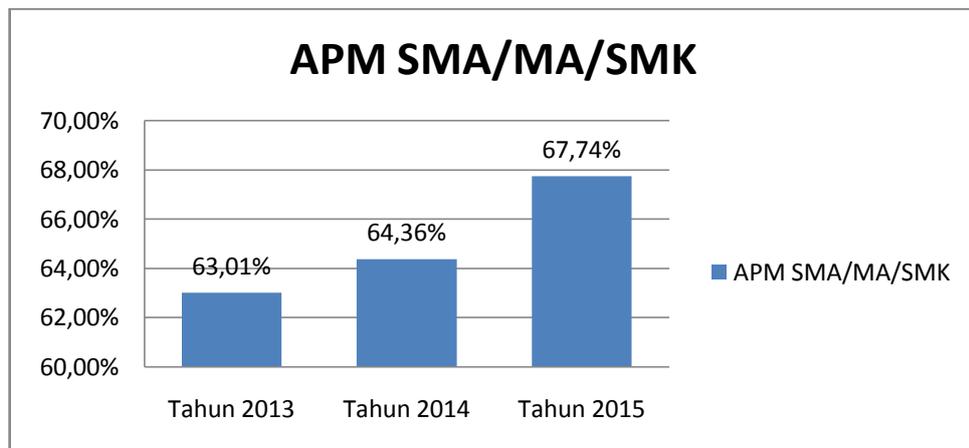
Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Realisasi APM SMA/MA/SMK Tahun 2015 mencapai 67.74% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 68.00%. Persentase pencapaian IKU ini adalah 99.62%, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 0.26%. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 kenaikannya mencapai 3.38% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja



sebesar 64.36% menjadi 67.74% pada tahun 2015. Dimana jumlah penduduk usia 16-18 Tahun adalah 792.010 orang sedangkan jumlah siswa usia 16-18 tahun yang sekolah di SMA/MA/SMK berjumlah 537.920 siswa. Berikut grafik Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 :

Grafik 13.
Capaian Kinerja APM SMA/MA/SMK Tahun 2013-2015



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

8. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi



Dalam rangka Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan tinggi yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis doktor melalui akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas yang relevan terhadap kebutuhan pasar kerja. Indikator Kinerja adalah APK Perguruan Tinggi Usia 19-23.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja **Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Usia 19-23**. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :



Tabel 40
Capaian Kinerja APK Perguruan Tinggi Usia 19-23 Tahun 2015 dan Tahun 2014

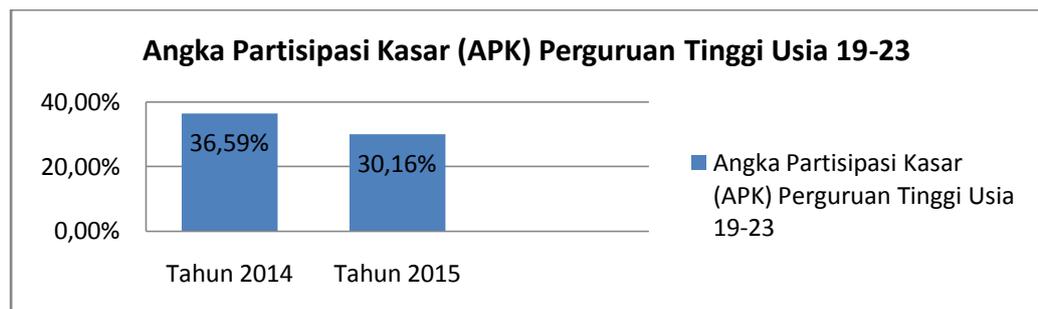
Indikator kinerja	Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Usia 19-23	26.96	36.59	135.72	30.16	21.56	71.49

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

APK Perguruan Tinggi ditargetkan untuk tahun 2015 sebesar 30.16% dengan capaian realisasinya sebesar 21.56% sehingga persentase capaian kinerja untuk tahun 2015 sebesar 71.49%, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 8.60%. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 15.03%. Dimana jumlah penduduk usia 19-23 Tahun pada 2015 adalah 1.321.414 orang sedangkan jumlah Mahasiswa yang kuliah berjumlah 284.876 Mahasiswa.

Berikut grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Usia 19-23 dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015:

Grafik 14.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Usia 19-23 Tahun 2015



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Untuk menunjang dan mempertahankan capaian kinerja dari peningkatan Presentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Usia 19-23 tahun 2015 ini yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Seksi Perguruan Tinggi Bidang yaitu : **Penerbitan Jurnal Ilmiah Perguruan**



Tinggi, manfaat yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah untuk pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermutu serta menyebarkanluaskan informasi hasil kajian/penelitian kepada akademis/mahasiswa, praktisi serta pihak lain yang membutuhkan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya untuk para dosen dan mahasiswa, serta memicu para dosen untuk berminat melakukan penelitian.

Capaian Indikator Kinerja

Angka Kelulusan SD/MI



Peningkatan kelulusan SD/MI untuk mendukung tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun. Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja **Angka Kelulusan SD/MI**. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Capaian Kinerja Angka Kelulusan SD/MI Tahun 2013-2015

Indikator kinerja	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Angka Kelulusan SD/MI	100	99.82	99.82	99,60	99.69	100.09	99.80	99.67	99.87

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Realisasi Angka kelulusan SD/MI Tahun 2015 mencapai 99.67% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 99.80%. Persentase pencapaian IKU ini adalah 99.87%, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 0.13%. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 0.02%, pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 99.69% dan pada tahun 2015 sebesar 99.67%. Dimana jumlah siswa SD/MI yang mengikuti ujian akhir sekolah adalah berjumlah 296.615 siswa sedangkan jumlah siswa SD/MI yang lulus berjumlah 295.637 siswa.

Capaian Indikator Kinerja

Angka Kelulusan SMP/MTs



Peningkatan kelulusan SMP/MTs untuk mendukung tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun. Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja **Angka kelulusan SMP/MTs**. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Capaian Kinerja Angka Kelulusan SMP/MTs Tahun 2013-2015

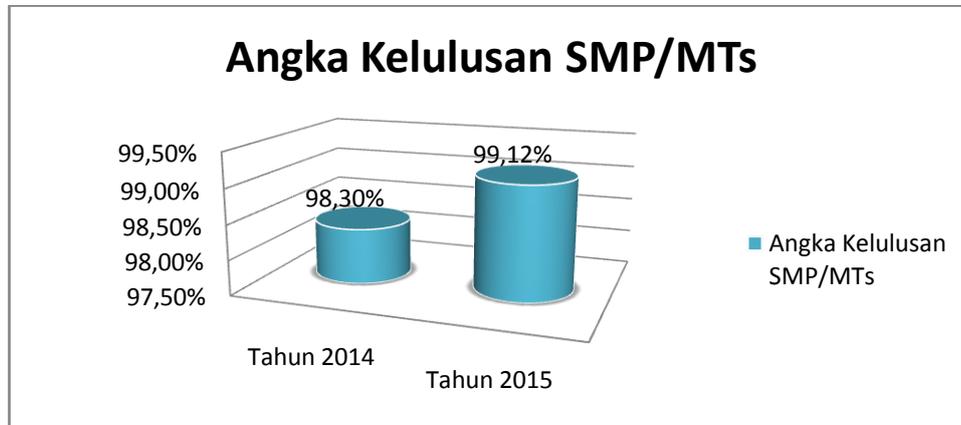
Indikator kinerja	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Angka Kelulusan SMP/MTs	100	98.13	98.13	100	98.30	98.30	100	99.12	99.12

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Realisasi Angka kelulusan SMP/MTs Tahun 2015 mencapai 99.12% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Persentase pencapaian IKU ini adalah 99.12%, dimana perbandingan antara target dan realisasi tidak mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 0.88%. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 kenaikannya mencapai 0.82% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 98.30% menjadi 99.12% pada tahun 2015. Dimana jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti ujian akhir sekolah adalah berjumlah 214.461 siswa sedangkan jumlah siswa SMP/MTs yang lulus berjumlah 212.574 siswa.

Berikut grafik Angka kelulusan SMP/MTs dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 :

Grafik 15
Angka Kelulusan SMP/ MTs



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Capaian Indikator Kinerja

Angka Kelulusan SMA/MA/SMK



Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja **Angka Kelulusan SMA/MA/SMK**. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Capaian Kinerja Angka Kelulusan SMA/MA/SMK Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	90.60	99.88	110.24	90.60	97.82	107.97	93.56	98.19	104.94

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Realisasi indikator Angka Kelulusan SMA/MA/SMK Tahun 2015 mencapai 98.19% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 93.56%. Persentase pencapaian IKU ini adalah 104.94%, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 4.63%. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dan



tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 0.37% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 97.82% menjadi 98.19% pada tahun 2015. Dimana jumlah peserta Ujian Nasional Tahun 2015 adalah 232.013 siswa sedangkan jumlah siswa yang lulus di SMA/MA/SMK berjumlah 227.815 siswa, dengan ketentuan siswa SMA/MA yang terdaftar berjumlah 116.406 dengan kelulusan sebesar 115.106 siswa sedangkan siswa SMK yang terdaftar berjumlah 115.607 siswa dengan kelulusan sebesar 112.709 siswa.

Untuk mencapai kinerja dari peningkatan APM dan APK SMA/MA/SMK, dan Angka kelulusan SAMA/MA/SMK tahun 2015 ini didukung dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi yaitu : **1) Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Jenjang SMA Negeri/Swasta Tingkat Provinsi** yang bertujuan untuk a) Memasyarakatkan dan membudayakan pentingnya penyelenggaraan kehidupan berkonstitusi melalui pemahaman aturan dasar bernegara, khususnya di kalangan generasi muda; b) Membangun dan membina persahabatan antar generasi muda yang dapat memperkuat persatuan bangsa; c) Memahami pentingnya kebhinekaan dalam program budaya dan hidup berbangsa di kalangan siswa SMA. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa-siswa SMA Negeri dan Swasta dari 33 Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara sebanyak 3 (tiga) orang per kabupaten/kota ditambah 1 (satu) orang pendamping yang kesemuanya berjumlah 99 siswa dan 33 pendamping. Hasil yang dicapai setelah melalui penilaian dari dewan juri yang ditunjuk maka didapat utusan yang akan menjadi Duta Provinsi Sumatera Utara di tingkat Nasional; **2) Seleksi Olimpiade Sains SMA Tingkat Provinsi Sumatera Utara** yang bertujuan untuk; a) Menumbuh kembangkan peserta dan siswa-siswi SMA pada umumnya untuk lebih berbudaya kompetitif, jujur, berpikir kritis, cinta iptek, dan mampu menerapkan “problem solving” dalam proses pembelajaran di sekolah; b) Untuk mendapatkan siswa-siswi pemenang/juara Olimpiade Sains SMA tingkat Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya menjadi utusan Provinsi Sumatera Utara pada Olimpiade Sains Nasional Tahun 2015 di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tanggal 18 s.d. 24 Mei 2015; c) Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan siswa



dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sasaran kegiatan ini adalah 27 (dua puluh tujuh) Siswa SMA Negeri dan Swasta terdiri dari 3 siswa dari masing masing 10 (sepuluh) mata lomba dari 33 Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara ditambah 3 (tiga) pendamping per-kabupaten/kota yaitu Bidang studi Matematika, Bidang studi Fisika, Bidang studi Kimia, Bidang studi Biologi, Bidang studi Komputer, Bidang studi Astronomi, Bidang studi Ekonomi, Bidang studi Kebumian, Bidang studi Geografi. Sedangkan hasil yang diperoleh pada Olimpiade Sains SMA Tingkat Nasional adalah : 1 (satu) Medali Emas untuk bidang studi Kebumia atas nama **Seto Julianto** dari **SMA Swasta Methodist 3 Medan**; 1 (satu) Medali Emas bidang studi Ekonomi atas nama **Syanindita Chintya P** dari **SMAN 1 Matauli Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah**; 1 (satu) Medali Perak bidang studi Fisika atas nama **Bella Godiva** dari **SMA Swasta Sutomo 1 Medan**; 1 (satu) Medali Perak bidang studi Kebumian atas nama **Jesslyn Jane** dari **SMA Swasta Sutomo 1 Medan**; 1 (satu) Medali Perunggu bidang studi Biologi atas nama **Andrea Laurentius** dari **SMA Swasta Sutomo 1 Medan**; 1 (satu) Medali Perunggu bidang studi Geografi atas nama **Sherley Angeline** dari **SMA Swasta Methodist 2 Medan**; 1 (satu) Medali Perunggu bidang studi Atronomi atas nama **Jofiandy Leonata P** dari **SMA Swasta Sutomo 1 Medan**; dan 2 (dua) Medali Perunggu bidang studi Ekonomi atas nama **Iman Hafandy dan Irna Dewi Ariska** dari **SMA Swasta Darul Mursyid, Kabupaten Tapanuli Selatan**; 3) **Lomba Seni Siswa SMA Tingkat Provinsi** yang bertujuan untuk; a) Memberikan pengalaman berkopetensi dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran untuk mencapai prestasi tertinggi bidangnya; b) Membina dan meningkatkan dan apresiasi siswa terhadap bidang seni yang berakar pada budaya bangsa; c) Mempererat persahabatan, persatuan dan kesatuan bangsa sesama siswa Indonesia yang berasal dari berbagai karakter dengan tingkat keterampilan dan budaya yang berbeda; d) Turut berkontribusi terhadap pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran kegiatan ini adalah siswa-siswa SMA Negeri dan Swasta dari 33 Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara. Hasil yang dicapai Setelah melalui penilaian dari dewan juri yang ditunjuk maka didapat pemenang yang akan menjadi Duta Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti Festival Lomba Seni Siswa ke Tingkat Nasional; 4) **Lomba Olahraga Siswa SMA Tingkat Provinsi** yang bertujuan untuk; a)



Menumbuhkembangkan iklim kompetisi yang sehat di lingkungan peserta didik jenjang pendidikan menengah di tingkat Sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional; b) Menjaring peserta didik unggul pada jenjang pendidikan menengah dalam bidang Olahraga untuk disiapkan menjadi Tim Provinsi Sumatera Utara dalam kompetisi di tingkat Nasional; c) Meningkatkan motivasi peserta didik menengah dalam penguasaan bidang olahraga; d) Memacu terjadinya peningkatan mutu pendidikan, khususnya bidang olahraga, pada jenjang pendidikan menengah; e) Meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan antar generasi muda se-Provinsi Sumatera Utara; f) Memberikan kesempatan kepada peserta didik jenjang SMA mengenali keragaman budaya dan kebiasaan dari berbagai Kabupaten/Kota; g) Meningkatkan kreativitas peserta didik jenjang pendidikan menengah (SMA). Sasaran kegiatan ini adalah siswa-siswa SMA Negeri dan Swasta dari 33 Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara. Hasil yang dicapai setelah melalui penilaian dewan juri yang ditunjuk maka didapat pemenang yang akan menjadi Duta Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa ke Tingkat Nasional; **5) Seleksi dan Pengiriman O2SN Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara** yang bertujuan untuk; a) Menumbuhkembangkan iklim kompetisi yang sehat di lingkungan peserta didik jenjang pendidikan menengah di tingkat Sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional; b) Menjaring peserta didik unggul pada jenjang pendidikan menengah dalam bidang Olahraga untuk disiapkan menjadi Tim Provinsi Sumatera Utara dalam kompetisi di tingkat Nasional; c) Meningkatkan motivasi peserta didik menengah dalam penguasaan bidang olahraga; d) Memacu terjadinya peningkatan mutu pendidikan, khususnya bidang olahraga, pada jenjang pendidikan menengah; e) Meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan antar generasi muda se-Provinsi Sumatera Utara; e) Memberikan kesempatan kepada peserta didik jenjang SMK mengenali keragaman budaya dan kebiasaan dari berbagai Kabupaten/Kota; g) Meningkatkan kreativitas peserta didik jenjang pendidikan menengah (SMK). Sasaran kegiatan ini adalah siswa-siswa SMK Negeri dan Swasta dari 33 Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara. Hasil yang dicapai setelah melalui penilaian dewan juri yang ditunjuk maka didapat pemenang yang akan menjadi Duta Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa ke Tingkat Nasional. Hasil yang diperoleh

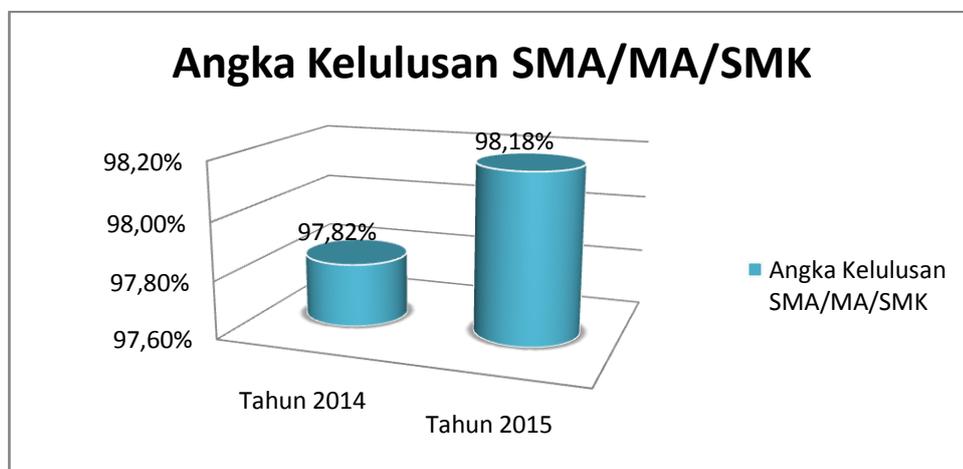


pada Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMK Tingkat Nasional adalah : 1) Mendapat perolehan 1 (satu) Medali Emas pada Cabang Futsal atas nama tim yang terdiri dari 5 (lima) orang dari **SMK Swasta Mulia Medan** yaitu **Akhyar Fadhillah, Dedi Kurniawan, Ramadan Ade Putra, Robi Armawan, Yoga Helambang**; 1 (satu) orang dari **SMKN Binanaan Provinsi Sumatera Utara** atas nama **Lindu Ajie Tirto Samudera**; dan 1 (satu) orang dari **SMK Swasta Putra Anda Binjai** atas nama **Yusliandi**; 6) **Seleksi dan Pengiriman FL2SN Siswa Berprestasi Provinsi Sumatera Utara** yang bertujuan untuk; a) Memberikan pengalaman berkompetisi dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran untuk mencapai prestasi tertinggi di bidangnya; b) Membina dan meningkatkan kreativitas dan apresiasi siswa terhadap bidang seni yang berakar pada budaya bangsa; c) Mempererat persahabatan, persatuan, dan kesatuan bangsa sesama siswa Indonesia yang berasal dari berbagai karakter dengan tingkat keterampilan dan budaya yang berbeda; d) Turut berkontribusi terhadap pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa-siswa SMK Negeri dan Swasta dari 33 Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara. Setelah melalui penilaian dari dewan juri yang ditunjuk maka didapat Pemenang yang akan menjadi Duta Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional. Hasil yang diperoleh pada Festival Lomba Seni Siswa (FLS2N) SMK Tingkat Nasional adalah : 1) Mendapat perolehan 1 (satu) Medali Emas pada Cabang Tari Tradisional atas nama tim yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dari **SMK Swasta Kesehatan Sartika, Kabupaten Labuhanbatu** atas nama **Nurullia Syafitri, Dinda, Anindah Mentari, Irma Sari, Fatmawati Harahap, Rizky Chairunnisa, Dan Lisa Lolita**; dan 1 (satu) Medali Emas pada untuk Bassist Terbaik atas nama **Boas Hutabarat** dari **SMKN 11 Medan**; 7) **Seleksi dan Pengiriman OSTN Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara**, tujuan kegiatan Seleksi dan Pengiriman Olimpiade Sains Tingkat Nasional (OSTN) Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara untuk; a) Mengembangkan sikap kompetitif dikalangan siswa SMK; b) Meningkatkan citra kemampuan siswa SMK di bidang Matematika Teknologi, Matematika Non Teknologi, Fisika Terapan, Kimia Terapan dan Biologi Terapan; c) Mempromosikan pembelajaran Adaptif di SMK sebagai sarana pembekalan bagi lulusan SMK berkarier secara lentur, adaptif dan siap berkembang; d)



Mensosialisasikan Model Pembelajaran bidang adaptif di SMK yang menyenangkan dan memiliki keterkaitan dengan bidang keahlian yang ditekuni. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa-siswa SMK Negeri dan Swasta dari 33 Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara; **8) Seleksi dan Pengiriman GPBN Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara**, tujuan kegiatan Seleksi dan Pengiriman Gelar Prestasi dan Bela Negara (GPBN) Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara untuk; a) Mengembangkan sikap kompetitif dikalangan siswa SMK; b) Meningkatkan kemampuan siswa SMK di bidang bahasa asing, karya ilmiah, kepemimpinan dan bela negara, dan kewirausahaan; c) Meningkatkan citra SMK melalui unjuk kemampuan dan pengukuran puncak-puncak prestasi bagi siswa SMK; d) Menciptakan insan cerdas dan terampil yang mampu memecahkan berbagai persoalan serta mampu menunjukkan sikap dan perilaku santun, mandiri, kreatif dan berdedikasi tinggi sebagai kader penerus generasi. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa-siswa SMK Negeri dan Swasta dari 33 Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara. Berikut grafik Angka kelulusan SMA/MA/SMK dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015:

Grafik 16. Angka Kelulusan SMA/ MA/ SMK



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Capaian Indikator Kinerja

Persentase Guru TK Berkualifikasi Akademik S1/D4



Indikator kinerja Persentase Guru TK Berkualifikasi Akademik S1/D4, target yang direncanakan sebesar 22.17%, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 87.67% dengan capaian presentase kinerja yang baik yaitu mencapai sebesar 395.44%. Dimana jumlah guru TK yang berkualifikasi Tahun 2015 adalah 6.881 orang sedangkan keseluruhan guru TK berjumlah 7.347 orang.

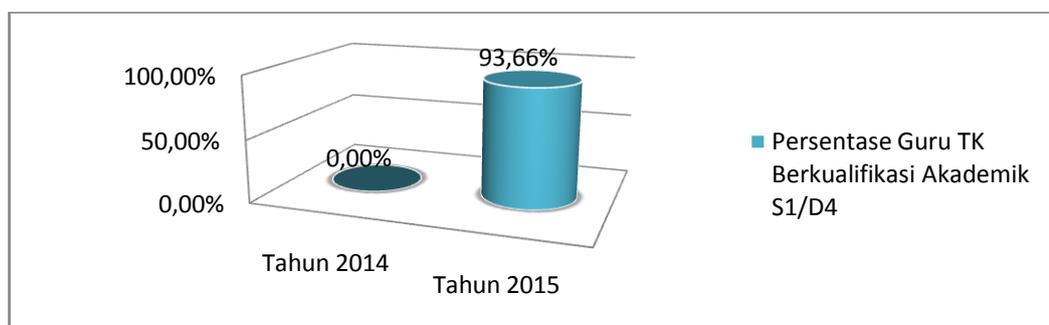
Tabel 44
Capaian Realisasi Persentase Guru TK Berkualifikasi Akademik S1/D4
Tahun 2014 dengan Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Guru TK Berkualifikasi Akademik S1/D4	21.12	0.00	0.00	22.17	93.66	442.46

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Kinerja Persentase Guru TK Berkualifikasi Akademik S1/D4, target yang direncanakan sebesar 22.17%, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 87.67% dengan capaian presentase kinerja yang baik yaitu mencapai sebesar 395.44%. Dimana jumlah guru TK yang berkualifikasi Tahun 2015 adalah 6.881 orang sedangkan keseluruhan guru TK berjumlah 7.347 orang. Berikut grafik Persentase Guru TK Berkualifikasi Akademik S1/D4 dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015:

Grafik 17. Guru TK Berkualifikasi Akademik S1/D4



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut



Capaian Indikator Kinerja

Persentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S1/D4



Sasarannya adalah meningkatnya jumlah rasio guru dan siswa tenaga kependidikan, pemerataan dan peningkatan kemampuannya dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran. Program yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran diatas adalah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja **Persentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S1/D4**. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 45
Capaian Kinerja Presentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S1/D4
Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Guru SD/SDLB berkualifikasi akademik S1/D4	75.29	55.97	74.34	40.20	68.70	170.90	50.23	86.98	173.16

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 18.28% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 68.70% menjadi 86.98% pada tahun 2015, jumlah guru SD yang berkualifikasi Tahun 2015 adalah 77.658 orang sedangkan keseluruhan guru SD berjumlah 89.280 orang.

Program yang dilaksanakan :

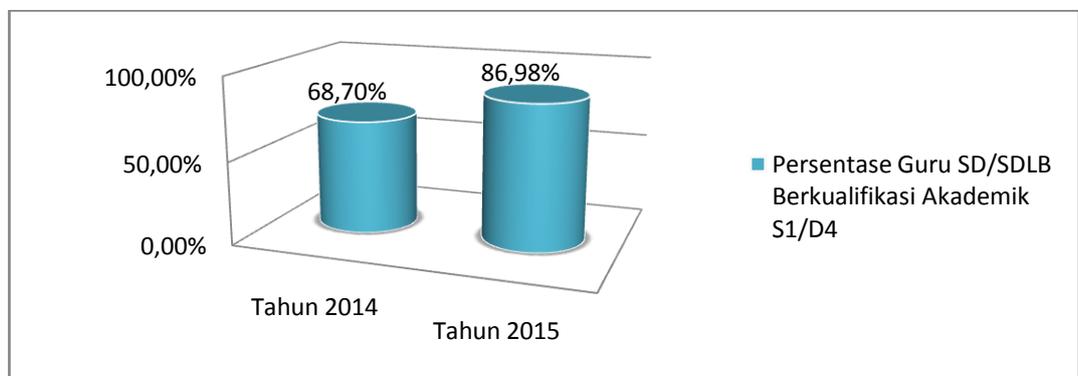
Program yang dilaksanakan adalah :

1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
2. Program Tenaga Pendidikan. Indikator kinerja adalah Persentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S1/D4.



Target yang direncanakan sebesar 50.23%, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 86.98% dengan capaian presentase kinerja yang baik yaitu mencapai sebesar 173.16%. Dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 36.75%. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 18.28% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 68.70% menjadi 86.98% pada tahun 2015. Dimana jumlah guru SD yang berkualifikasi Tahun 2015 adalah 77.658 orang sedangkan keseluruhan guru SD berjumlah 89.280 orang.

Grafik 18.
Persentase Guru SD/ SLB Berkualifikasi Akademik S1/D4



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Capaian kinerja pada indikator “**Persentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S1/D4**”, dimana target yang direncanakan sebesar 50.23%, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 86.98% dengan capaian presentase kinerja yang baik yaitu mencapai sebesar 173.16%. Dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 36.75%.

Capaian Indikator Kinerja

Persentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4



Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja **Persentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4**. Adapun tingkat pencapaiannya juga termasuk capaian di beberapa tahun terakhir, yaitu sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :



Tabel 46
Capaian Kinerja Presentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4 Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/D4	82.12	77.93	94.90	76.56	82.65	107.95	80.91	89.28	110.34

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Program yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran diatas adalah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan Indikator kinerja adalah Persentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4, target yang direncanakan sebesar 80.91%, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 89.28% dengan capaian presentase kinerja yang baik yaitu mencapai sebesar 110.34%. Dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 8.37%. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 kenaikannya mencapai 6.63% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 82.65% menjadi 89.28% pada tahun 2015. Dimana jumlah guru SMP yang berkualifikasi Tahun 2014 adalah 34.497 orang sedangkan guru SMP berjumlah 38.637 orang.

Indikator kinerja Persentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4, target yang direncanakan sebesar 80.91%, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 89.28% dengan capaian presentase kinerja yang baik yaitu mencapai sebesar 110.34%, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 8.37%.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015
dengan Tahun 2014 :

Untuk perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 kenaikannya mencapai 6.63% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 82.65% menjadi 89.28% pada tahun 2015.



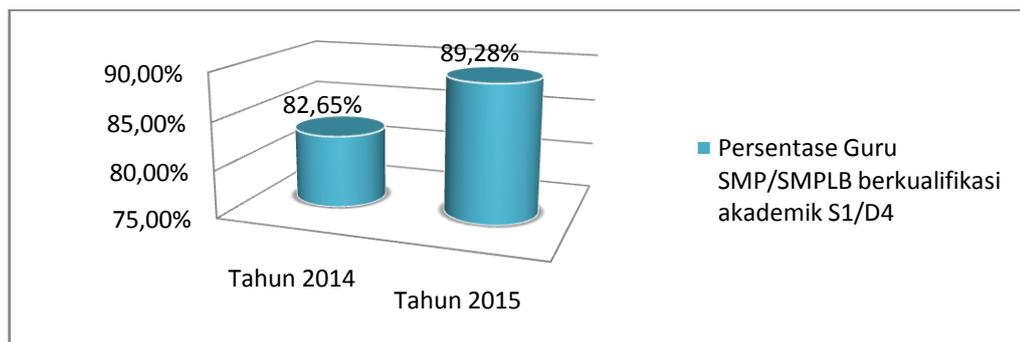
Tabel 47
Perbandingan Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Guru SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/D4	76.56	82.65	107.95	80.91	89.28	110.34

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Dari perbandingan tersebut, jumlah guru SMP yang berkualifikasi Tahun 2015 adalah 34.497 orang sedangkan guru SMP berjumlah 38.637 orang. Berikut grafik Persentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4 dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015

Grafik 19.
Persentase Guru SMP/ SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Capaian Indikator Kinerja

Persentase Guru SMA Berkualifikasi Akademik S1/D4



Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja **Persentase Guru SMA Berkualifikasi Akademik S1/D4**. Program yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran diatas adalah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan Indikator kinerja adalah Persentase Guru SMA Berkualifikasi Akademik S1/D4, target yang direncanakan sebesar 90.47%, dimana realisasi



pelaksanaan sebesar 89.92% dengan capaian presentase kinerja yang baik yaitu mencapai sebesar 99.44%. Dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 0.51%.

Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 penurunannya mencapai 4.11% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 94.03% menjadi 89.92% pada tahun 2015. Dimana jumlah guru SMA yang berkualifikasi Tahun 2015 adalah 24.362 orang sedangkan guru SMA berjumlah 27.094 orang. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 48
Capaian Kinerja Presentase Guru SMA
Berkualifikasi Akademik S1/D4 Tahun 2015

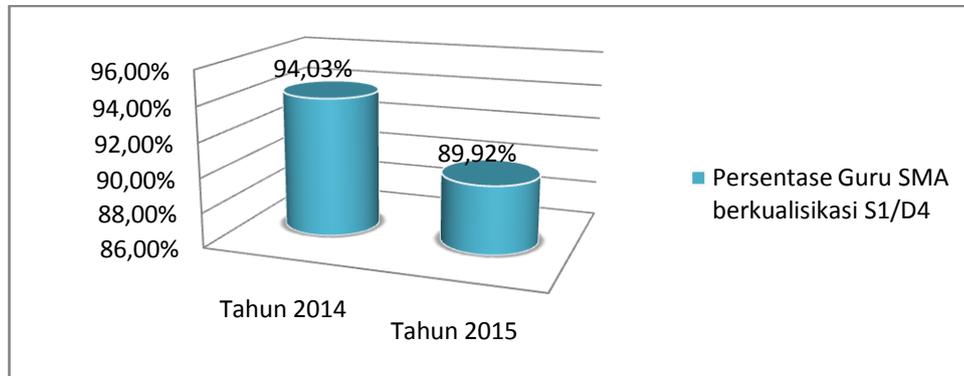
Indikator kinerja	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase guru SMA berkualifikasi akademik S1/D4	93.31	85.66	91.80	88.72	94.03	105.99	90.43	89.92	99.44

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Capaian Indikator kinerja Persentase Guru SMA Berkualifikasi Akademik S1/D4, target yang direncanakan sebesar 90.47%, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 89.92% dengan capaian presentase kinerja yang baik yaitu mencapai sebesar 99.44%.

Angka Perbandingan antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 0.51%. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 penurunannya mencapai 4.11% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 94.03% menjadi 89.92% pada tahun 2015. Jumlah guru SMA yang berkualifikasi Tahun 2015 adalah 24.362 orang sedangkan guru SMA berjumlah 27.094 orang.

Grafik 20.
Persentase Guru SMA berkualifikasi S1/D4



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Capaian Indikator Kinerja

Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik S1/D4



Tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui indikator kinerja **Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik S1/D4**. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 49
Capaian Kinerja Presentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik S1/D4 Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	87.56	87.24	99.64	84.74	89.92	106.11	88.31	91.47	103.58

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Program yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran diatas adalah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan Indikator kinerja adalah Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik S1/D4, target yang direncanakan sebesar 88.31%, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 91.47% dengan capaian presentase kinerja yang baik yaitu mencapai sebesar 103.58%. Dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 3.16%. Sedangkan perbandingan



antara realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 kenaikannya mencapai 1.55% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 89.92% menjadi 91.47% pada tahun 2014. Dimana jumlah guru SMK yang berkualifikasi Tahun 2015 adalah 21.889 orang sedangkan guru SMK berjumlah 23.935 orang. Untuk menunjang dan mempertahankan capaian kinerja dari peningkatan Presentase Guru yang Berkualifikasi Akademik S1/D4 Dijenjang SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMK tahun 2015 ini didukung dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Bidang Pengendalian Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) yaitu : **1) Seleksi Tutor Paket A, Paket B dan Paket C Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015** yang bertujuan untuk;

- a) Menilai prestasi yang dicapai oleh tutor paket yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, wawasan kependidikan dan professional maupun peran serta atau sumbangsih kepada masyarakat;
- b) Menetapkan tutor paket berprestasi secara provinsi untuk diikutsertakan dalam pemilihan tutor paket berprestasi tingkat nasional;
- c) Mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata;
- d) Meningkatkan motivasi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Manfaat dari kegiatan ini adalah a) Termotivasinya tutor paket untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi dan loyalitas untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara;
- b) Meningkatkan harkat, martabat, citra dan profesionalisme tutor paket;
- c) Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran;
- d) Terjalinnnya interaksi antar peserta untuk saling tukar pengalaman dalam mendidik siswa;
- e) Terpupuknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan.

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Pemilihan Tutor Paket A, Paket B dan Paket C Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 adalah terpilihnya tutor paket C berprestasi I, II dan III tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015. **2) Pemilihan Guru Berprestasi Kelompok TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA dan SMK serta Pemberian Penghargaan bagi Guru PLB Berdedikasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015** yang bertujuan untuk;

- a) Menilai prestasi yang dicapai oleh guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, wawasan kependidikan dan profesional maupun peran serta atau sumbangsih guru kepada masyarakat;
- b) menetapkan guru



berprestasi secara provinsi untuk diikutsertakan dalam pemilihan guru berprestasi tingkat nasional; c) Mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata; d) Meningkatkan motivasi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Manfaat dari kegiatan ini adalah; a) Termotivasinya guru untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi dan loyalitas untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara; b) Meningkatkan harkat, martabat, citra dan profesionalisme guru; c) Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran; d) Terjalannya interaksi antar peserta untuk saling tukar pengalaman dalam mendidik siswa; e) Terpupuknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Pemilihan Guru Berprestasi dan Pemberian Penghargaan Guru PLB Berdedikasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 adalah terpilihnya guru berprestasi I, II dan III dari setiap kelompok tingkat Provinsi Sumatera Utara.

3) Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) Mata Pelajaran Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi Jenjang Pendidikan Menengah Tingkat Provinsi Sumatera Utara tujuan pelaksanaan kegiatan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi untuk jenjang SMA/SMK Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 adalah; a) Menumbuhkembangkan budaya kompetitif yang sehat dikalangan Guru; b) Meningkatkan wawasan pengetahuan, motivasi, kompetensi, profesionalisme dan kerja keras untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikalangan Guru; c) Membina dan mengembangkan kesadaran ilmiah untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi masa kini dan yang akan datang; d) Mengangkat status Guru sebagai penyandang profesi yang terhormat mulia bermartabat dan terlindungi; e) Membangun komitmen mutu Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata. Manfaat dari kegiatan ini adalah a) Termotivasinya guru untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi dan loyalitas untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara; b) Meningkatkan harkat, martabat citra dan profesionalisme guru; c) Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran; d) Terjalannya interaksi antar peserta untuk saling tukar pengalaman dalam mendidik siswa; e) Terpupuknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan.



Hasil yang dicapai pada pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) tahun ini adalah terpilihnya guru-guru berprestasi di bidang sains untuk jenjang Pendidikan Dasar di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015. **4) Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) Mata Pelajaran Matematika dan Sains untuk Jenjang Pendidikan Dasar Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015** tujuan pelaksanaan kegiatan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) mata pelajaran Matematika dan IPA untuk jenjang SMP Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 adalah; a) Menumbuhkembangkan budaya kompetitif yang sehat dikalangan Guru; b) Meningkatkan wawasan pengetahuan, motivasi, kompetensi, profesionalisme dan kerja keras untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di kalangan Guru; c) Membina dan mengembangkan kesadaran ilmiah untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi masa kini dan yang akan datang; d) Mengangkat status Guru sebagai penyandang profesi yang terhormat, mulia bermartabat dan terlindungi; e) Membangun komitmen mutu Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata. Manfaat dari kegiatan ini adalah; a) Termotivasinya guru untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi dan loyalitas untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara; b) Meningkatkan harkat, martabat citra dan profesionalisme guru; c) Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran; d) Terjalinnnya interaksi antar peserta untuk saling tukar pengalaman dalam mendidik siswa; e) Terpupuknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan. Hasil yang dicapai pada pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) tahun ini terpilihnya guru-guru yang berprestasi di bidang Sains untuk jenjang Pendidikan Dasar di Tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2015. **5). Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Kelompok SD, SMP, SMA dan SMK Tingkat Provinsi Sumatera Utara** yang bertujuan untuk; a) Meningkatkan prestasi, kinerja dan motivasi kerja pengawas sekolah; b) Meningkatkan harkat dan martabat pengawas sekolah sebagai tenaga kependidikan yang profesional; c) Meningkatkan rasa percaya diri pengawas sekolah dalam mengemban tanggungjawab sebagai tenaga kependidikan; d) Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi pengawas sekolah atas kemajuan sekolah di wilayah tugasnya; e) Memberikan kesempatan kepada pengawas sekolah



untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pengawas profesional; f) Menetapkan pengawas sekolah berprestasi tingkat provinsi untuk diikutsertakan dalam pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional; g) Mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata; h) Meningkatkan motivasi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Penyelenggaraan Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi kelompok SD, SMP, SMA dan SMK tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 bermanfaat untuk : a) Meningkatkan kemampuan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur kerja yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan; b) Meningkatkan profesionalisme pengawas sekolah. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Kelompok SD, SMP, SMA dan SMK tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 adalah terpilihnya pengawas sekolah berprestasi I, II dan III dari setiap kelompok tingkat Provinsi Sumatera Utara.

6). Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Kelompok TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan untuk; a) Menilai prestasi yang dicapai oleh kepala sekolah yang meliputi kompetensi manajerial dan supervisi, kepribadian, sosial, wawasan kependidikan, kewirausahaan dan profesional maupun peran serta dalam masyarakat; b) Menetapkan kepala sekolah berprestasi secara provinsi untuk diikutsertakan dalam pemilihan kepala sekolah berprestasi tingkat nasional; c) Mendorong peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata; d) Meningkatkan motivasi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Manfaat dari kegiatan ini adalah a) Termotivasinya kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi dan loyalitas untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara; b) Meningkatkan harkat, martabat citra dan profesionalisme kepala sekolah; c) Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah; d) Terjalinnnya interaksi antar peserta untuk saling tukar pengalaman dalam pengelolaan manajemen sekolah; e) Terpupuknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 adalah terpilihnya kepala sekolah berprestasi I, II dan III dari setiap kelompok jenjang pendidikan.

Capaian Indikator Kinerja

Persentase Guru SD/SDLB Bersertifikat Pendidikan



Target Indikator kinerja Persentase Guru SD/SDLB Bersertifikat Pendidikan S1/D4 yang direncanakan sebesar 75.04%, realisasi pelaksanaan sebesar 42.53% dengan capaian presentase kinerja sebesar 56.68%. Capaian kinerja akan dapat digambarkan seperti yang tertera pada tabel berikut.

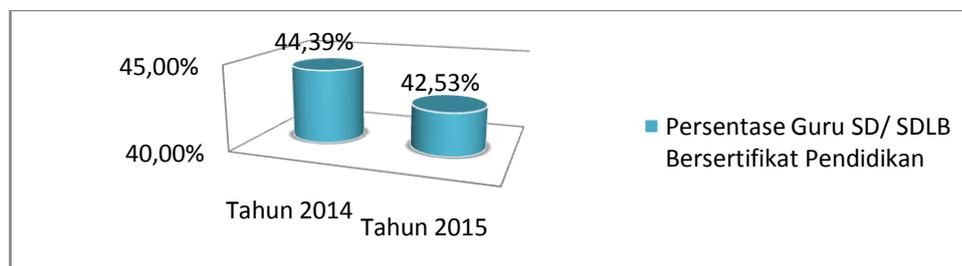
Tabel 50
Perbandingan Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Guru SD/ SDLB Bersertifikat Pendidikan	68.73	44.39	64.59	75.04	42.53	56.68

c

Angka perbandingan antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 32.51%. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 1.86% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 44.39% menjadi 42.53% pada tahun 2015. Sehingga capaian kinerjanya pada tahun 2014 adalah 64,59 %, maka di Tahun 2015 hanya 64,97 %. Berikut Grafik Guru SD/ SDLB Bersertifikat Pendidikan

Grafik 21. Persentase Guru SD/ SDLB Bersertifikat Pendidikan



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Capaian Indikator Kinerja

Persentase Guru SMP/SMPLB Bersertifikat Pendidikan



Target Indikator kinerja Persentase Guru SMP/SMPLB Bersertifikat Pendidikan S1/D4 yang direncanakan sebesar 67.32%, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 43.83% dengan capaian presentase kinerja sebesar 64.97%, antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 23.63%.

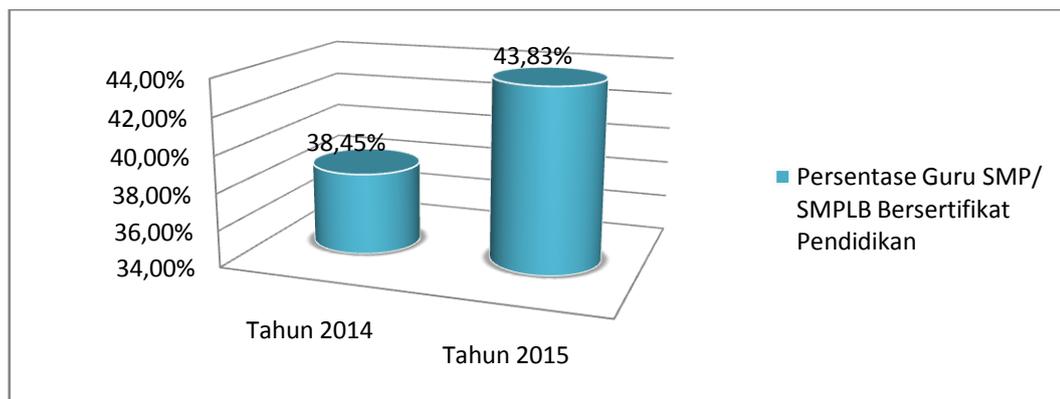
Tabel 51
Perbandingan Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Guru SMP/SMPLB Bersertifikat Pendidikan	59.78	38.45	64.32	67.46	43.83	64.97

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Terkait dengan perbandingan realisasi kinerja antara tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 5.38% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 38.45% menjadi 43.83% pada tahun 2015. Sehingga capaian kinerjanya di tahun 2014 adalah 64,32 %, maka di Tahun 2015 naik menjadi 64,97 %.

Grafik 22. Persentase Guru SMP/ SMPLB Bersertifikat Pendidikan



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut



Capaian Indikator Kinerja

Persentase Guru SMA Bersertifikat Pendidikan



Target Indikator kinerja Persentase Guru SMA Bersertifikat Pendidikan S1/D4 yang direncanakan sebesar 77.51%, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 43.10% dengan capaian presentase kinerja sebesar 55.61%. Dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 34.41%. Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 1.98% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 41.12% menjadi 43.10% pada tahun 2015.

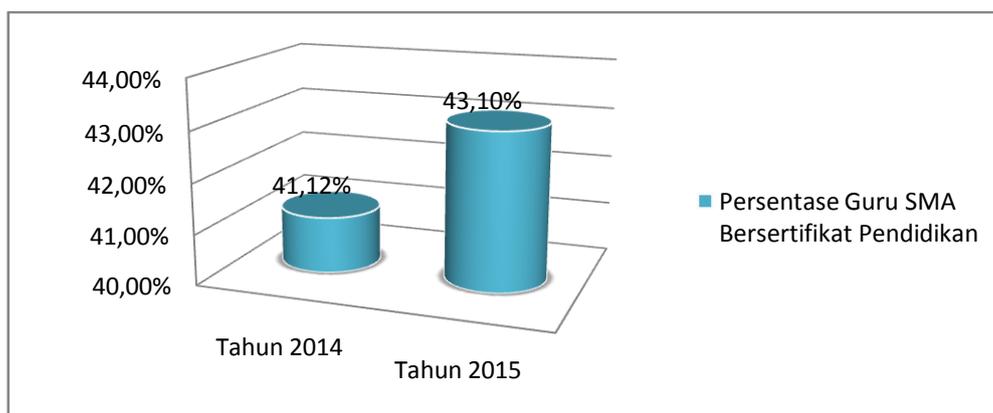
Tabel 52
Perbandingan Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Guru SMA Bersertifikat Pendidikan	68.78	41.12	59.78	77.51	43.10	55.61

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa, capaian kinerja di tahun 2014 sebesar 59,78 %, dan di Tahun 2015 turun menjadi 55,61 %.

Grafik 23. Persentase Guru SMA Bersertifikat Pendidikan



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Capaian Indikator Kinerja

Persentase Guru SMK Bersertifikat Pendidikan



Target Indikator kinerja Persentase Guru SMK Bersertifikat Pendidikan S1/D4 yang direncanakan sebesar 72.12%, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 34.34% dengan capaian presentase kinerja sebesar 47.62%, dengan perbandingan antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 37.78%.

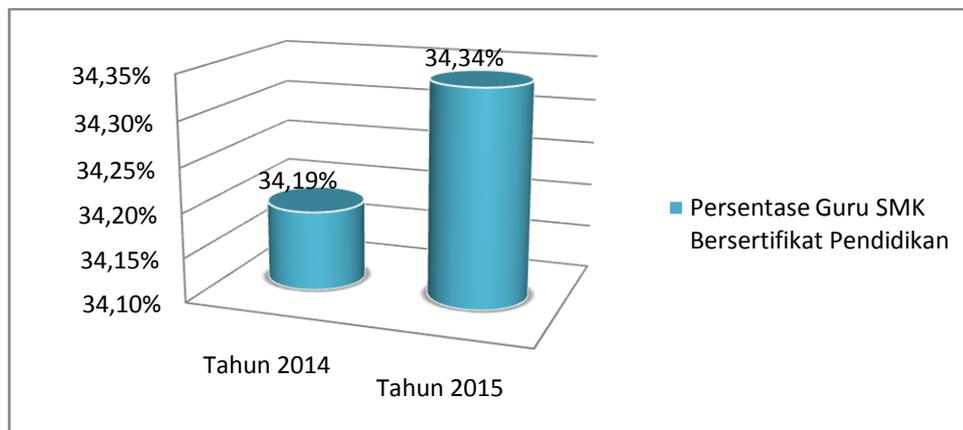
Tabel 53
Perbandingan Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2015

Indikator kinerja	Tahun 2014			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Guru SMK Bersertifikat Pendidikan	62.16	34.19	55.00	72.12	34.34	47.62

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumut

Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 0.15% yaitu pada tahun 2014 realisasi kinerja sebesar 34.19% menjadi 34.34% pada tahun 2015.

Grafik 24.
Persentase Guru SMK Bersertifikat Pendidikan



Sumber Data : Dinas Pendidikan Provsu



▪ **INDEKS KESEHATAN**

Tabel 54
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Angka kematian bayi (AKB)/1000 KH	23,8	19	125,26
2. Angka kematian ibu (AKI)/100.000 KH	233	268	86,94
3. Prevalensi gizi buruk dan kurang (%)	19	21,3	89,20
4. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,6	68,21	95,27

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis ini dari 4 (empat) Indikator Kinerja dan pada umumnya telah menunjukkan capaian kinerja yang SANGAT BAIK. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu dilaksanakan pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pemenuhan hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan menuju masyarakat mandiri untuk hidup sehat.

Berbagai upaya pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan mendapatkan tantangan baik secara lokal, nasional maupun global sebagai akibat dari perubahan sosial ekonomi serta perubahan lingkungan strategis. Berbagai masalah dan tantangan dalam pembangunan kesehatan telah berkembang semakin berat dan kompleks dan kadang-kadang tidak terduga. Semakin dirasakan bahwa pembangunan kesehatan tidak dapat mencapai tujuannya bila hanya diselenggarakan oleh sektor kesehatan saja.



Keikutsertaan pihak lain (*stakeholders*) secara lintas sektor termasuk swasta dan masyarakat serta seluruh potensi bangsa sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tanggung-jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan UUD 1945 pasal 34 dan sasaran pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan berbagai upaya pembangunan kesehatan. Laporan Capaian Kontrak Kinerja ini merupakan upaya memenuhi salah satu fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera dalam hal monitoring, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan serta untuk mengetahui hasil-hasil pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan Kontrak Kinerja yang telah dibuat antar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

Berikut akan diuraikan capaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja yang digunakan, yaitu :

Capaian Indikator Kinerja

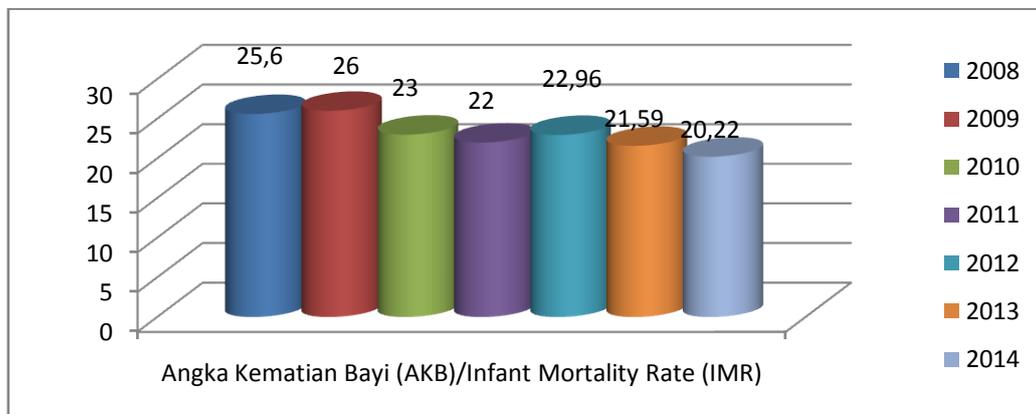
1. Angka kematian bayi (AKB)/1000 KH



Dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2014 jumlah bayi yang meninggal adalah sebanyak 1.078 bayi dari 228.947 kelahiran hidup. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Utara, Indikator Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara per 1.000 kelahiran hidup cenderung mengalami perbaikan dari tahun ketahun. Sejak tahun 2008 dari 25,6 kematian bayi per 1.000 KH telah dapat diturunkan menjadi 20,22 kematian bayi per 1.000 KH, seperti terlihat pada grafik berikut :



Grafik. 25. Jumlah Angka Kematian Bayi



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, data diolah

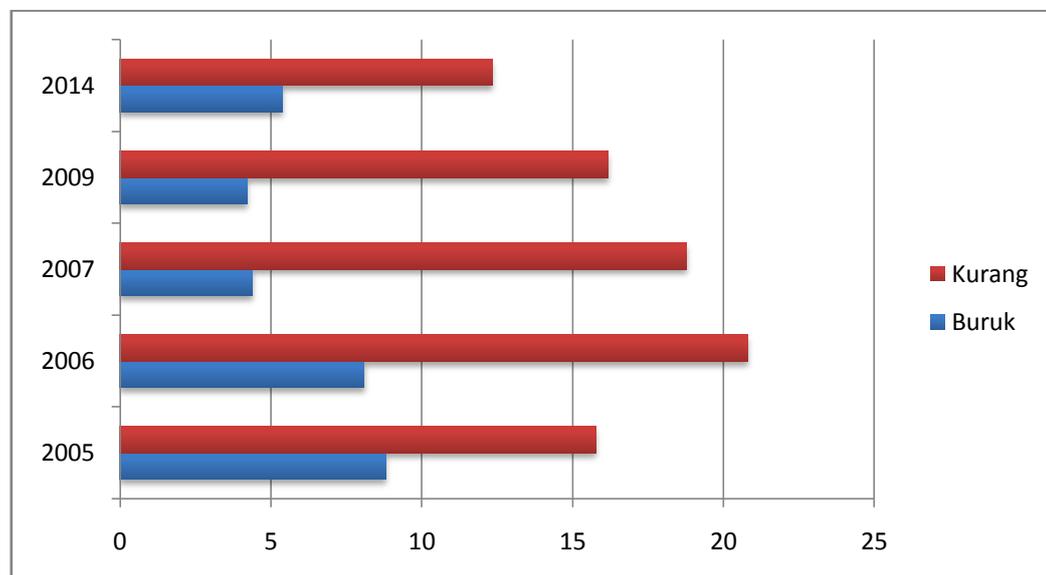
Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami penurunan. Berdasarkan angka BPS, AKB mampu diturunkan dari 39,4 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2001 menjadi 25,7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010). Berdasarkan trend penurunan yang terjadi kurun waktu 2001-2010, dimana penurunan terjadi sekitar 1,37 per 1.000 kelahiran hidup; maka diperkirakan AKB Sumatera Utara pada tahun 2014 yaitu 20,22 per 1.000 kelahiran hidup menurun menjadi 19 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2014 jumlah bayi yang meninggal adalah sebanyak 1.078 bayi dari 228.947 kelahiran hidup; pada tahun 2015 jumlah kematian bayi menurun menjadi 874 bayi dari total sasaran bayi 308.878 bayi.

Status Gizi Balita merupakan prasyarat dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa karena status gizi anak akan mempengaruhi tingkat kesehatan fisik dan kecerdasan anak yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat produktivitas secara ekonomis. Data Kementerian Kesehatan RI (Riskesdas, 2010), Provinsi Sumatera Utara masih tergolong provinsi dengan angka kekurangan gizi balitanya diatas angka rata-rata nasional yakni 21,4 sementara angka rata-rata nasional 17,9, meskipun secara umum



persentase gizi kurang dan buruk di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami penurunan. Meskipun demikian status gizi balita berdasarkan Berat Badan per umur menunjukkan bahwa Prevalensi buruk-kurang (underweight) provinsi Sumatera Utara, jika dibandingkan dengan angka prevalensi buruk-kurang secara nasional maka pada tahun 2013 angka prevalensi buruk-kurang di provinsi Sumatera Utara (22,4 persen yang terdiri dari 8,3 persen gizi buruk dan 14,1 gizi kurang) lebih tinggi 2,8 persen dibandingkan dengan angka prevalensi buruk-kurang nasional (19,6 persen) (Risikesdas 2013)

Grafik 26
Persentase Gizi Kurang dan Buruk Provinsi Sumatera Utara 2007-2013



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Capaian Indikator Kinerja

2. Angka kematian Ibu (AKI) /100.000 KH



Tinggi rendahnya AKI merefleksikan status kesehatan/gizi ibu slama hamil serta nifas, kualitas pelayanan kesehatan serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi di suatu negara. Oleh karena tidak adanya survey atau riset kesehatan yang mendukung tersedianya data AKB . Angka Kematian Ibu (AKI) menurun. AKI tahun 2014 dan 2015, masih mempergunakan angka hasil survey AKI dan AKB Provinsi



Sumatera Utara tahun 2010 adalah 268/100.000 kelahiran hidup. Dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2014 jumlah ibu melahirkan yang meninggal adalah sebanyak 187 orang dari 228.947 kelahiran hidup; pada tahun 2015 jumlah ibu melahirkan menurun menjadi 176 orang dari total sasaran ibu hamil sebanyak 348.021 orang.

Capaian Indikator Kinerja

3. Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang



Pada tahun 2015, dilakukan Survey Pemantauan Status Gizi (PSG) di 33 kab/kota dan diketahui bahwa prevalensi balita dengan gizi kurang dan buruk mencapai 21,3%. Hal ini tidak jauh berbeda dengan survey PSG yang dilakukan tahun 2014 di 11 Kab/Kota dimana prevalensi balita dengan gizi kurang dan buruk mencapai 21,05%.

Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan pada tahun 2015, sebanyak 1.150 balita dan keseluruhan balita yang mengalami gizi buruk tersebut mendapatkan penanganan (100%). Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan mendapatkan penanganan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yaitu 1.196 kasus, namun tetap lebih tinggi dari tahun 2013 yaitu 1.133 kasus, tahun 2012 yaitu 746 kasus dan tahun 2011 yaitu 375 kasus. Ini menunjukkan adanya trend peningkatan balita gizi buruk yang ditemukan dan ditangani. Distribusi kasus balita gizi buruk yang ditemukan dan ditangani per kab/kota seperti tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 55
Jumlah Balita Gizi Buruk yang Ditemukan dan Ditangani
Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015

NO	KAB/KOTA	BALITA GIZI BURUK				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	NIAS	-	8	18	25	40
2	MANDAILING NATAL	15	62	9	110	62
3	TAPANULI SELATAN	15	41	3	17	15
4	TAPANULI TENGAH	12	13	14	20	43
5	TAPANULI UTARA	7	13	37	21	32
6	TOBA SAMOSIR	12	12	5	9	16

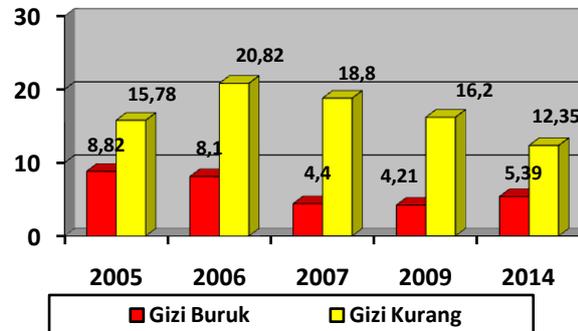


NO	KAB/KOTA	BALITA GIZI BURUK				
		2011	2012	2013	2014	2015
7	LABUHAN BATU	10	3	8	15	19
8	ASAHAN	20	45	127	98	117
9	SIMALUNGUN	25	23	27	26	21
10	DAIRI	20	110	60	83	55
11	KARO	15	35	11	8	20
12	DELI SERDANG	4	5	7	9	14
13	LANGKAT	27	19	149	136	72
14	NIAS SELATAN	10	2	0	38	25
15	HUMBANG HASUNDUTAN	8	13	9	9	8
16	PAKPAK BHARAT	4	3	18	7	7
17	SAMOSIR	7	3	10	14	8
18	SERDANG BEDAGAI	12	12	45	48	52
19	BATUBARA	18	14	79	73	49
20	PADANG LAWAS	11	38	2	34	42
21	PADANG LAWAS UTARA	6	9	21	36	22
22	LABUHAN BATU SELATAN	10	21	24	17	11
23	LABUHAN BATU UTARA	13	10	13	18	21
24	NIAS UTARA	6	14	12	2	18
25	NIAS BARAT	5	20	6	79	71
26	SIBOLGA	12	21	6	15	2
27	TANJUNGBALAI	13	1	27	26	28
28	PEMATANG SIANTAR	5	7	14	13	12
29	TEBING TINGGI	4	6	14	9	8
30	MEDAN	25	143	265	84	111
31	BINJAI	12	12	37	35	26
32	PADANGSIDIMPUAN	5	3	8	17	27
33	GUNUNG SITOLI	9	5	48	45	76
JUMLAH		375	746	1.133	1.196	1.150

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Survey PSG dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan mengambil sampel beberapa Kab/Kota. Bila dilihat hasil PSG sejak tahun 2005 terlihat ada penurunan prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang, namun hasil PSG belum representative untuk seluruh populasi. Pada tahun 2014 survey PSG hanya dilaksanakan di 11 Kab/Kota dengan hasil prevalensi balita dengan gizi kurang dan buruk yaitu 17,74%.

Grafik 27
Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk dan Kurang
Tahun 2005-2014



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sumut

Hasil PSG ini coba disandingkan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar yang dilaksanakan oleh Kemenkes RI dimana prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang pada tahun 2013 yaitu 22%, 2010 yaitu 21,4%, dan tahun 2007 yaitu 22,7%. Dengan membandingkan trend kecenderungan ke-2 sumber data tersebut maka diperhitungan range penurunan prevalensi balita dengan gizi kurang dan buruk antara 1,3% - 0,68% sehingga prevalensi balita dengan gizi kurang dan buruk yaitu antara 21,4% - 20,7%. Dengan demikian maka ditetapkan prevalensi gizi kurang dan buruk pada balita di Sumatera Utara yaitu 21,5% pada tahun 2014..

Capaian Indikator Kinerja

4. Angka Usia Harapan Hidup (UHH)

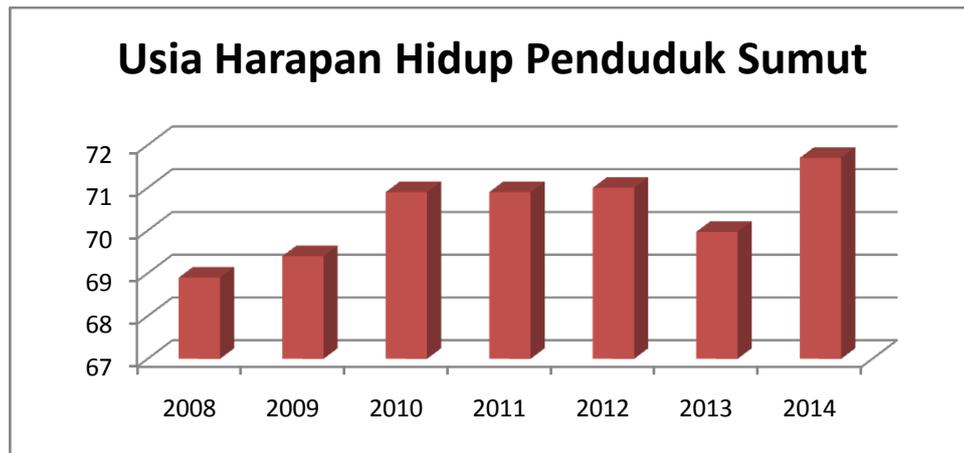


UHH penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data di dalam Sumatera Utara Dalam Angka (SUDA) Tahun 2015 yang diterbitkan oleh BPS, diketahui bahwa UHH penduduk Sumatera Utara tahun 2012 yaitu 67,81 tahun, tahun 2013 yaitu 67,97 tahun dan tahun 2014 yaitu 68,04 tahun. Dengan memperhitungkan trend kecenderungan peningkatan UHH kurun waktu 2012-2014, dimana terjadi peningkatan umur penduduk sebesar 0,17 tahun setiap tahunnya, maka diperkirakan UHH Sumatera Utara mencapai tahun 2015 yaitu 68,21 tahun. Usia harapan hidup penduduk Sumatera Utara mengalami peningkatan dari



68,9 tahun pada tahun 2008 menjadi 69,65 tahun pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 telah mencapai 69,81 tahun dan pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 71,7 Tahun sebagaimana tertera pada grafik berikut :

Grafik. 28
Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

UHH penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti yang tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 56
Pencapaian UHH Tahun 2004-2012

TAHUN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
UHH	67,3 tahun	68,7 tahun	68,9 tahun	69,1 tahun	69,2 tahun	69,35 tahun	69,5 tahun	69,65 tahun	69,81 tahun

Sumber : SUDA; BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2010-2012/BPS-National SocioEconomic Survey 2010-2012

Berdasarkan data BPS, UHH penduduk Sumatera Utara meningkat dari 67,3 tahun pada tahun 2004 menjadi 69,81 tahun pada tahun 2012. Dengan memperhitungkan trend kecendrungan peningkatan UHH kurun waktu 2004-2012, dimana terjadi peningkatan umur penduduk sebesar 0,16 tahun setiap tahunnya, maka diperkirakan UHH Sumatera Utara mencapai 69,97 tahun pada tahun 2013 dan 70,13 tahun pada tahun 2014. Dengan demikian target sasaran utama UHH pada tahun 2014 yaitu 71,7 tahun. Berkenaan



dengan pencapaian kinerja dari Aspek Kesehatan, yang pada prinsipnya menjadi tugas yang dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan maka pencapaian kinerja yang akan diuraikan di bawah ini juga dilihat dari aspek Indikator Kinerja pada tingkat SKPD di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengingat bahwa Indikator Kinerja Utama pada RPJMD secara makro, tentu disikapi dengan Indikator Kinerja pada tingkat SKPD di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Oleh sebab itu dengan tidak mengurangi hakekat penyajian informasi kinerja yang disajikan pada Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka dipandang perlu disajikan secara lebih detail sampai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2014, berkenaan dengan pencapaian Kinerja dari Aspek Kesehatan sesuai dengan Indikator Kinerja yang tertera pada Pada tahun 2015, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 9 (sembilan) program utama, dan masing-masing program melaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu :

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2015 :

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Pertemuan e - Logistik bagi Petugas Kab/Kota
3. Pertemuan Pilot Project Pelayanan Kefarmasian di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota.
4. Pertemuan dalam rangka CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik)
5. Pelatihan Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan
6. Pertemuan tentang CPAKB (Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik) dan CPPKRTB (Cara Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik).



b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Program Upaya Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi LP/LS dalam Pelaksanaan PPIA (Pencegahan Penularan HIV/AIDS dari Ibu ke Anak.
2. Evaluasi Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di Provinsi
3. Pertemuan Evaluasi P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi)
4. Pelatihan PONED (Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)
5. Supervisi Terpadu Pelayanan Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
6. Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) bagi Petugas di Kab/Kota
7. Evaluasi PUG-BK dan ARG Kabupaten/Kota
8. Peningkatan Kemampuan dalam Penanganan Asfiksia dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
9. Peningkatan Kemampuan Petugas Puskesmas dalam SDDDTK (Simulasi dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang)
10. Pemantapan General Emergency Life Support (GELS) untuk Dokter di Kab/Kota
11. Basic Cardiac Life Support (BCLS) Perawat di Kabupaten/ Kota
12. Persiapan Akreditasi di Pelayanan Primer di Kabupaten/ Kota
13. Pemantapan Manajemen di Pelayanan Kesehatan Primer di Kab/Kota
14. Pendampingan Persiapan Pelayanan Kesehatan Primer Kab/Kota menuju BLUD
15. Pembinaan Pelayanan Konseling Usila dan Santun Usila di Sarana Pelayanan Primer (Percontohan)
16. Pertemuan Koordinasi Program Kesehatan Usia Lanjut di Sarana Pelayanan Kesehatan Kab/Kota
17. Peningkatan Kapasitas Petugas untuk Pembinaan Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji



-
18. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad) di Kab/Kota
 19. Sosialisasi Tim Pembina Pengarah Pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)
 20. Penjaringan Kasus Pasung (Eliminasi Pasung) di Kab/Kota
 21. Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
 22. Evaluasi Pelaksanaan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Tk. Provinsi
 23. Sosialisasi Dokter Gigi Keluarga bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas

c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendidikan Masyarakat melalui Peringatan Hari-Hari Besar Kesehatan
2. Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Media Cetak dan Elektronik
3. Karnaval/Mobil Hias
4. Reportase Kegiatan Bidang Kesehatan
5. Lomba Poster Kesehatan bagi Kab/Kota
6. Perlombaan dan Penilaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
7. Pembinaan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ke Kab/Kota
8. Lomba Tanaman Obat Keluarga (TOGA).

d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Tatalaksana Gizi Buruk Petugas Kesehatan di Kab/Kota
2. Pendampingan Kasus Gizi Buruk dan Gizi Kurang
3. Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
4. Pertemuan Manajemen Program Gizi di Kabupaten/Kota
5. Pemantauan Status Gizi di Kab/Kota
6. Penyediaan Makanan Pengganti Air Susu Ibu (ASI) bagi Bayi 6 Bln - 1 Thn dan Balita (>1 Tahun)



-
7. Bimbingan Teknis Program Gizi ke Kabupaten/Kota
 8. Pendidikan dan Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan

e. Program Lingkungan Sehat

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Program Lingkungan Sehat adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
2. Stimulan Pembangunan Percontohan Rumah Sehat dan Sederhana
3. Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
4. Monitoring Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
5. Pengadaan Stimulan Sarana Jamban Keluarga.
6. Pilot Project Pembentukan Kota Sehat
7. Gerakan Aksi Penyehatan Kawasan Danau Toba
8. Stimulan Sarana Kesehatan Lingkungan Kabupaten/Kota Sehat
9. Sosialisasi Program Penyehatan Kabupaten/Kota Sehat di Kabupaten/Kota
10. Stimulan Sarana Kesehatan Lingkungan di Daerah Wisata
11. TOT Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten
12. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa.
13. Pengadaan Stimulan Sarana Air Bersih
14. Pengawasan Penyehatan Air Minum di Kabupaten/Kota
15. Sosialisasi Program Pengolahan Limbah Medis Sarana Pelayanan Kesehatan di 6 Kab/Kota
16. Training of Trainer (TOT) Pengelolaan Limbah Medis Sarana Pelayanan Kesehatan
17. Inspeksi Limbah Medis Sarana Pelayanan Kesehatan di Kab/Kota
18. Pertemuan Hygiene Sanitasi Pasar Sehat di Kabupaten/ Kota

f. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
2. Peningkatan Imunisasi
3. Ekspansi TB dengan Strategi DOTS di Fasilitas Pelayanan Kesehatan



-
4. Workshop Program TB dengan Strategi DOTS pada DPS
 5. Pembinaan Program TB dengan Strategi DOTS untuk Meningkatkan CDR
 6. Workshop TB-MDR (Multi Drug Resisten
 7. Workshop IPT
 8. Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan TB-MDR (Multi Drug Resisten
 9. Integrasi Peningkatan Perlindungan Masyarakat terhadap Penyakit Zoonosis (Flu Burung, Rabies, Antraks, Leptospirosis)
 10. Sosialisasi Usaha Pemberdayaan Pengendalian Penyebaran Zoonosis pada Petugas Masyarakat dan Monitoring Rabies Centre
 11. Pengendalian Penyakit Diare
 12. Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Diare
 13. Sosialisasi dan Advokasi tentang Hepatitis
 14. Workshop Konseling dan Tes HIV
 15. Workshop Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) terhadap ODHA
 16. Pelatihan Prevention Mother to Child Transmissions (PMTCT)
 17. Penyelidikan Epidemiologi (PE) Kasus DBD & Arbovirosis Lainnya
 18. Pemantauan dan Evaluasi Daerah Endemis Filariasis
 19. Evaluasi Intensitas Penyakit Kecacangan pada Anak Usia Sekolah Dasar
 20. Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit
 21. Peningkatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana
 22. Pertemuan Evaluasi Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 23. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Tidak Menular (PTM)
 24. Pengendalian Penyakit Malaria
 25. Pengendalian Penyakit Thypoid
 26. Pemberantasan Penyakit ISPA
 27. Pengendalian Penyakit Kusta

Program Upaya Kesehatan Perorangan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Program Upaya Kesehatan Perorangan adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)
2. Pertemuan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi



-
3. Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat Rumah Sakit yang Sesuai Standar
 4. Peningkatan Pelayanan Ambulans/Stay Lapangan Merdeka
 5. Pengadaan Mobil Ambulans dan Alat Pendukung Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu
 6. Pengadaan Sarana Komunikasi (IT) Pendukung Ambulans
 7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu.
 8. Peningkatan Kemampuan bagi Petugas Operator Pelayanan Ambulans Gawat Darurat
 9. Pertemuan Kerjasama Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu dengan Lintas Sektor Terkait dan Rapat Intern
 10. Workshop Persiapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit
 11. Workshop Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 12. Pertemuan Penguatan Fungsi Komite Medik Rumah Sakit Terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
 13. Sosialisasi Badan Pengawas Rumah Sakit dan Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009
 14. Penguatan Sistem Rujukan Regional Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Sumatera Utara
 15. Pengembalian Jasa Medis Tenaga Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
 16. Workshop Akreditasi Rumah Sakit Versi Tahun 2012 untuk Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta
 17. Stimulan Akreditasi Rumah Sakit
 18. Pertemuan dalam rangka Akselerasi Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah
 19. Orientasi Penetapan Kelas Rumah Sakit
 20. Pertemuan dalam rangka Akselerasi Penetapan Kelas Rumah Sakit Swasta
 21. Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Penetapan Kelas Rumah Sakit
 22. Pertemuan Peningkatan Mutu Penerapan Standar Bidang Sarana dan Peralatan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah
-



-
23. Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT
 24. Pertemuan Meningkatkan Mutu dalam rangka Penerapan Proteksi Radiasi pada Alat Kesehatan di RSUD Kab/Kota
 25. Pertemuan Meningkatkan Mutu dalam rangka Penerapan Proteksi Radiasi pada Alat Kesehatan di RSU Swasta
 26. Pertemuan dalam rangka Kalibrasi Peralatan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab/Kota
 27. Pertemuan dalam rangka Kalibrasi Peralatan Kesehatan pada Rumah Sakit Swasta
 28. Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Indera Masyarakat (KIM)
 29. Akreditasi terhadap Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
 30. Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Paru Masyarakat (KPM)
 31. Pengadaan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

g. Program Sumber Daya Kesehatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Program Sumber Daya Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Dokter Internship
2. Pelatihan Item Review dan Item Dept dalam rangka Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
3. Pertemuan Koordinasi Kompetensi Tenaga Kesehatan
4. Sosialisasi Registrasi Tenaga Kesehatan
5. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
6. Pelatihan Kepemimpinan Puskesmas
7. Pertemuan Koordinasi Pengelola Jabatan Fungsional Kabupaten/Kota
8. Pertemuan Penilaian PAK (Penetapan Angka Kredit) Jabatan Fungsional Apoteker
9. Penguatan Dukungan Manajemen Pengelola Jabatan Fungsional
10. Supervisi dan Bimbingan Teknis Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan



11. Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan

12. Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat

h. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin Sumatera Utara
2. Rapat Koordinasi Kepesertaan Semesta Jaminan Kesehatan
3. Advokasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke Kab/Kota
4. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan/Program Kesehatan
5. Penyusunan dan Pembuatan Laporan dan Evaluasi Tahunan
6. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kesehatan
7. Sosialisasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Kesehatan
8. Finalisasi Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi
9. Operasional Bank Data dan Website Dinas Kesehatan
10. Pertemuan Pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan Bank Data Kesehatan
11. Pembinaan dan Peningkatan Management Data Kesehatan ke Kabupaten/Kota
12. Koordinasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
13. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Forum SKPD Bidang Kesehatan Tahun 2015
14. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran serta Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
15. Peningkatan Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan
16. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan II Tahun 2015
17. Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Auditor
18. Pendataan dan Penyelesaian Hibah Aset Provinsi Sumatera Utara
19. Dukungan Pengelolaan PPID Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.



Sasaran Strategis- 4 :

“Terwujudnya Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Pengembangan Wilayah”

Tabel 57
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	78 %	76,11 %	97,5
2. Optimalisasi Jaringan Irigasi	72,0 %	64,10 %	90, 14
3. Tersedianya sumber air baku (waduk/embung/ situ)	40 unit	23 unit	57,55
4. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan Kelembagaan Pengelola Irigasi (SKPD,KOMIR, P3A, GP3A, IP3A)	8 Kab/ Kota	8 Kab/Kota	100
5. Dokumen dan Regulasi Perencanaan KSP (Kawasan Stegegis Provinsi)	2 dok	2 dok	100
6. Regulasi Daerah terhadap Pengendalian Ruang (Regulasi)	1	1	100
7. Luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perkotaan (%)	12 %	1,06 %	8,83 %

Sebagaimana Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis ke-4 yaitu “**TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH**”, untuk keberhasilan maupun kegagalan pada Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan sebanyak 13 (tiga belas) Indikator Kinerja dan secara umum menunjukkan capaian kinerja yang SANGAT BAIK.

Capaian Indikator Kinerja

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap



Panjang jaringan jalan di Provinsi Sumatera Utara pada saat ini 38.715,044 Km yang terdiri dari jalan nasional 2.249,644 Km, jalan provinsi 3.048,500 Km dan jalan kabupaten/kota 33.452,900 Km. RPJMD Pemerintah Provinsi Periode Tahun 2013-



2018 menargetkan jalan mantap 95% pada tahun 2018 untuk jalan nasional dan jalan provinsi serta 70 % untuk jalan kabupaten/kota. Menyikapi hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2015 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pembangunan/peningkatan jalan provinsi sepanjang 112,18 Km, dari target 247,47 Km dalam target RPJMD. Pemeliharaan berkala jalan sepanjang 15,35 Km serta pembangunan/penggantian jembatan dengan total panjang 222 M. Pada tahun 2014 proporsi panjang jaringan jalan nasional dalam kondisi mantap adalah sebesar 80,30%, jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 74,42% dan jalan kabupaten/kota dalam kondisi mantap sebesar 57,80%. Kondisi kemantapan jalan Provinsi pada akhir tahun 2015 sebesar 76,11% dari target RPJMD sebesar 82,44%. Tidak tercapainya capaian RPJMD tahunan adalah disebabkan adanya penundaan pekerjaan akibat kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Sehingga peningkatan kondisi kemantapan Jalan Provinsi hanya mengalami peningkatan sebesar 51,45 Km atau sebesar 1,69 %. Selain itu, pada tahun 2015 ada 19 ruas jalan Provinsi yang diusulkan perubahan fungsi dan statusnya menjadi jalan Nasional sepanjang 360.07 Km dengan dikeluarkannya surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tanggal 23 April 2015, sehingga sejak tahun 2016 panjang jalan Nasional di Provinsi Sumatera Utara menjadi 2.632,22 Km dari semula sepanjang 2.249,64 yang penanganannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan panjang jalan Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi 2.688,43 Km yang sebelumnya 3.048,50 Km. Urusan Wajib Pekerjaan Umum khususnya Pembangunan Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi kewenangan dan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan dibidang ekonomi, sosial dan budaya, daerah terisolir, pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional dalam rangka mempersatukan NKRI untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional. Jalan sebagai juga merupakan urat nadi kehidupan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan



bernegara, yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan beberapa Tahun Terakhir :

Hasil capaian kinerja “**Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap**” dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 58.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2013-2014

Kondisi		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
Mantap	Baik	1.325,23	43,47	1.190,19	39,04	1.236,23	40,55
	Sedang	796,50	26,13	1.078,56	35,38	1.083,97	35,56
	Jumlah	2.121,73	69,60	2.268,75	74,42	2.320,20	76,11
Tidak Mantap	Rusak Ringan	412,08	13,52	259,00	8,50	259,72	8,52
	Rusak Berat	514,68	16,88	520,75	17,08	468,58	15,37
	Jumlah	926,76	30,40	779,75	25,58	728,30	23,89

Sumber : Dinas Bina Marga Prov. Sumut

Dari tabel di atas, dapat dilihat adanya Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi dari tahun 2013 sepanjang 2121,73 km menjadi 2268,75 km pada tahun 2014 dan 2320,20 Km. Realisasi tahun 2015. Pembangunan Jalan sepanjang 247,47 Km untuk Pembangunan / Peningkatan Jalan dan 691 M untuk Pembangunan / Penggantian Jembatan hanya terealisasi 112,18 Km Pembangunan / Peningkatan Jalan dan 222 M Pembangunan / Penggantian Jembatan serta target Kemantapan Jalan Provinsi pada tahun 2015 sebesar 82,44 % sementara realisasi pencapaian pada tahun 2015 sebesar 76,11 %. Berikut grafik jalan tahun 2015 dan beberapa tahun terakhir dalam kondisi mantap.

Grafik 29. Kondisi Jalan Mantap



Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara



Tahun anggaran 2014 yang kemudian ditetapkan bahwa Infrastruktur Jaringan Jalan di Provinsi Sumatera Utara sepanjang 38.715,29 Km yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 2.249,66 Km, Jalan Provinsi sepanjang 3.048,50 Km dan Jalan Kabupaten/Kota sepanjang 33.367, 13 Km. Pada Tahun 2013 proporsi panjang jaringan Jalan Nasional dalam kondisi mantap adalah sebesar 81,51 %, Jalan Provinsi dalam kondisi mantap sebesar 69,60 % dan Jalan Kabupaten/Kota dalam kondisi mantap sebesar 57,95 %. Pada Tahun 2014 proporsi Jaringan Jalan Provinsi dalam kondisi mantap sebesar 74,42 %, di sini dapat kita bandingkan dengan kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi mantap Tahun 2013 sebesar 69,60 %. Kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi mantap pada Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 4,82 %.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan
Tahun Anggaran 2015..... :

Tabel 59.
Program dan kegiatan untuk Kinerja
Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap T.A. 2015

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
1	2	3	4	
PROGRAM PENINGKATAN/ PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN		612.450.000.000		
I	Pembangunan/peningkatan Jalan	524.150.000.000	143,0	Km
1	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Bts. Binjai - Kuala di Kab. Langkat	7.650.000.000	1,70	Km
2	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Kuala - Timbang Lawang di Kab. Langkat	13.850.000.000	3,08	Km
3	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Deli Tua - Tiga Juhar di Kab. Deli Serdang	11.250.000.000	2,50	Km
4	Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Jurusan Tanah Abang - Bts. Sergei di Kab. Deli Serdang	7.200.000.000	1,80	Km
5	Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Jurusan Tanah Abang - Sei Buaya di Kab. Deli Serdang (DAK)	18.000.000.000	4,50	Km
6	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Lubuk Pakam - Tanah Abang di Kab. Deli Serdang	4.500.000.000	1,00	Km



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
1	2	3	4	
7	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Bts. Deli Serdang - Dolok Masihul - Kota Tebing Tinggi di Kab. Serdang Bedagai	7.000.000.000	2,00	Km
8	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tebing Tinggi (Wts.Sergai) - Sipispis di Kab. Serdang Bedagai	16.000.000.000	4,00	Km
9	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Bandar Pulau - P. Rakyat - Bts. Tobasa di Kab. Asahan	7.000.000.000	2,00	Km
10	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Kisaran - Air Joman - Watas Kota Tanjung Balai di Kab. Asahan	10.500.000.000	3,00	Km
11	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan T. Balai (Pangkal Tembok) - Pasar I - Bts. Labura di Kab. Asahan	7.000.000.000	2,00	Km
12	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Psr 1 - Psr XIX (Perbangunan) - Sei Dua - Psr Banjar (WTS Kota Tanjung Balai) di Kab. Asahan	7.000.000.000	2,00	Km
13	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Jamin Ginting (Kota Tj. Balai) di Kota Tanjung Balai	17.500.000.000	4,20	Km
14	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sidikalang - Penjaratan di Kab. Dairi	7.000.000.000	2,00	Km
15	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sumbul Pegagan - Parikki - Pangiringan di Kab. Dairi	3.500.000.000	1,00	Km
16	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sukaramai - Tanjung Rahu - Penjaratan (Bts. Dairi) di Kab. Pakpak Bharat	7.000.000.000	2,00	Km
17	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sp. Jambu - Kuta Jungak - Sigalingging (Bts. Dairi) di Kab. Pakpak Bharat	6.000.000.000	1,70	Km
18	Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Jurusan P. Siantar - P. Raya di Kab. Simalungun	7.500.000.000	2,00	Km
19	Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Jurusan P. Raya - T.Runggu di Kab. Simalungun (DAK)	18.000.000.000	4,00	Km
20	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Saribu Dolok - Saran Padang di Kab. Simalungun	6.500.000.000	2,00	Km
21	Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Jurusan Bts. Simalungun - Sondi Raya di Kab. Simalungun	8.000.000.000	2,00	Km
22	Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Jurusan S. Padang - Bts. Sergei di Kab. Simalungun	9.000.000.000	2,00	Km
23	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Silimbat - Parsoburan di Kab. Toba Samosir	7.000.000.000	2,00	Km



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
1	2	3	4	
24	Pembangunan Jalan Provinsi Jurusan Parsoburan - Bts. Labuhan Batu di Kab. Samosir	3.500.000.000	1,00	Km
25	Lanjutan Pembukaan Jalan Provinsi Jurusan Borbor - Rianiate - Garoga di Kab. Toba Samosir	3.000.000.000	4,50	Km
26	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Parsoburan - Borbor - Pangururan - Janji Maria - Sipahutar di Kab. Toba samosir	3.500.000.000	1,00	Km
27	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sipahutar - Aek Humbang di Kab. Tapanuli Utara	8.750.000.000	2,50	Km
28	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Pangaribuan - Garoga di Kab. Tapanuli Utara	5.250.000.000	1,50	Km
29	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Simp. IV Hutabarat - Sipahutar di Kab. Tapanuli Utara	7.000.000.000	2,00	Km
30	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Simp. Silangit - Simp. III Muara - Muara - Bakkara (Bts. Humbahas) di Kab. Tapanuli Utara	14.000.000.000	4,00	Km
31	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sp. Sitanggor - Meat (Bts. Tobasa) di Kab. Tapanuli Utara	7.350.000.000	2,10	Km
32	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tomok - Onan Runggu di Kab. Samosir (DAK)	17.500.000.000	4,50	Km
33	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Nainggolan - Pangururan di Kab. Samosir	7.000.000.000	2,00	Km
34	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Pakkat - Tara Bintang di Kab. Humbang Hasundutan	8.750.000.000	2,50	Km
35	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tara Bintang - Parlilitan di Kab. Humbang Hasundutan	8.750.000.000	2,50	Km
36	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Dolok Sanggul - Pakkat di Kab. Humbang Hasundutan	10.000.000.000	2,70	Km
37	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Hutaimbaru - Batas Labusel di Kab. Padang Lawas Utara	7.000.000.000	2,00	Km
38	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Aek Godang - Gunung Tua di Kab. Padang Lawas Utara	9.000.000.000	2,00	Km
39	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Gunung Tua - KM. 168 (Binanga) di Kab. Padang Lawas Utara	8.000.000.000	1,00	Km



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
1	2	3	4	
40	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Hutaimbaru - Sipiongot di Kab. Padang Lawas Utara	7.000.000.000	2,00	Km
41	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan KM. 168 (Binanga) - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	8.500.000.000	1,00	Km
42	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sibuhuan - Ujung Batu di Kab. Padang Lawas	14.100.000.000	1,60	Km
43	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sigambal - Batas Paluta di Kab. Labuhan Batu	10.500.000.000	3,00	Km
44	Pembangunan Jalan Provinsi Jurusan Sp. Ajamu - Sei Rakyat - Panipahan di Kab. Labuhan Batu	7.000.000.000	2,00	Km
45	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sp. Kota Pinang - Batas Paluta di Kab. Labuhan Batu Selatan	9.000.000.000	2,00	Km
46	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Pal XI - Aek Godang di Kab. Tapanuli Selatan	9.000.000.000	2,00	Km
47	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sipenggeng - Marancar - Sipirok di Kab. Tapanuli Selatan	9.000.000.000	2,00	Km
48	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sipirok - Sp. Tandosan - Bts. Tapanuli Utara di Kab. Tapanuli Selatan	10.500.000.000	3,00	Km
49	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sp. Tandosan - Simangimbat - Sipagimbar di Kab. Tapanuli Selatan	10.500.000.000	3,00	Km
50	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Simpangimbar - Tolang di Kab. Tapanuli Selatan	10.500.000.000	3,00	Km
51	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Jembatan Merah - Muarasoma di Kab. Mandailing Natal	13.500.000.000	3,00	Km
52	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Simpang Pulo Padang - Batahan - Bts. Sumbar di Kab. Mandailing Natal	7.000.000.000	2,00	Km
53	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Afulu - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Utara	6.000.000.000	4,00	Km
54	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Siwalawa II - Sirombu di Kab. Nias Barat	6.000.000.000	4,00	Km
55	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tanjung Pura - Tanjung Selamat di Kab. Langkat	10.500.000.000	3,00	Km



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
1	2	3	4	
56	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tj. Selamat - Namu Unggas - Tangkahan di Kab. Langkat	10.500.000.000	3,00	Km
57	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Namu Ukur - Bts. Karo di Kab. Langkat	10.500.000.000	3,00	Km
58	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sorkam Kiri - Sigambo-gambo - Barus di Kab. Tapanuli Tengah	12.250.000.000	3,50	Km
II	Pembangunan/Penggantian Jembatan	88.300.000.000	369,00	m
1	Pembangunan Jembatan Provinsi Tambat Begu pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Tiga Juhar - Gunung Meriah di Kab. Deli Serdang	1.250.000.000	5,00	m
2	Penggantian Jembatan Sei Taman pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Gertak Serong - Sarang Elang - Sei Sembilang - Watas Labura di Kab. Asahan	2.500.000.000	10,00	m
3	Penggantian Jembatan Sei Box Kuning pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Bts. Simalungun - Kisaran di Kab. Asahan	1.750.000.000	7,00	m
4	Penggantian Jembatan Sei Dadap pada Ruas Jalan Provinsi Jrs. S. Padang - Bts. Sergei di Kab. Simalungun	6.000.000.000	40,00	m
5	Penggantian Jembatan Aek Huwalu II pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Parsoburan - Borbor - Rianiate di Kab. Toba Samosir	8.100.000.000	30,00	m
6	Penggantian Jembatan Aek Parlotingan pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Sp. Silangit - Sitanggor - Bts. Tobasa di Kab. Tapanuli Utara	1.900.000.000	8,00	m
7	Pembangunan Box Culvert pada ruas Jalan Provinsi Pangururan - Ambarita di Kab. Samosir	900.000.000	3,00	m
8	Pembangunan Jembatan Sitahuis pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Pakkat - Tara Bintang di Kab. Humbang Hasundutan	5.000.000.000	20,00	m
9	Pembangunan Box Culvert pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Pakkat - Bts. Tapteng di Kab. Humbang Hasundutan	450.000.000	3,00	m
10	Pembangunan Jembatan Aek Ambasang pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Sipiongot - Tolang di Kab. Padang Lawas Utara	5.000.000.000	20,00	m



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
1	2	3	4	
11	Pembangunan Jembatan Aek Simargappual pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Gunungtua - KM.168 (Binanga) di Kab. Padang Lawas Utara	2.500.000.000	10,00	m
12	Pembangunan Jembatan Aek Ombik pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Gunungtua - KM.168 (Binanga) di Kab. Padang Lawas Utara	2.500.000.000	10,00	m
13	Pembangunan Jembatan Aek Hadungdung pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan KM.168 (Binanga) - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	3.750.000.000	15,00	m
14	Pembangunan Jembatan Aek Rampa Ruas Jalan Provinsi Jurusan KM.168 (Binanga) - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	5.250.000.000	21,00	m
15	Pembangunan Jembatan Aek Rurasotul pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan KM.150 (Sosopan) - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	2.500.000.000	10,00	m
16	Pembangunan Jembatan Aek Hulim pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Aek Godang - KM.150 (Sosopan) di Kab. Padang Lawas	2.500.000.000	10,00	m
17	Pembangunan Jembatan Aek Hutabaru pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan KM.150 (Sosopan) - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	2.500.000.000	10,00	m
18	Pembangunan Jembatan Aek Paringgonan 1 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan KM.150 (Sosopan) - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	2.000.000.000	8,00	m
19	Pembangunan Jembatan Aek Batu Marsaong pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Muara Soma - Sp. Gambir di Kab. Mandailing Natal	1.750.000.000	7,00	m
20	Pembangunan Jembatan Aek Ranto Sore pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Muara Soma - Sp. Gambir di Kab. Mandailing Natal	1.750.000.000	7,00	m
21	Pembangunan Jembatan Aek Simpang Banyak pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Muara Pungkut - Sp.Banyak di Kab. Mandailing Natal	2.250.000.000	9,00	m
22	Pembangunan Jembatan Idano Saua Km. 110+900 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Afulu - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Utara	7.500.000.000	30,00	m



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
1	2	3	4	
23	Pembangunan Jembatan Idano Ture Namohesa Km. 113+200 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Afulu - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Utara	2.000.000.000	8,00	m
24	Pembangunan Jembatan Idano Sokara Km. 121+200 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Afulu - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Utara	2.000.000.000	8,00	m
25	Pembangunan Jembatan Idano Baruzo Km. 48+250 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Tuhembuasi - Mandrehe di Kab. Nias Barat	2.000.000.000	8,00	m
26	Pembangunan Jembatan Idano Ge'e Km. 58+900 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Tuhembuasi - Mandrehe di Kab. Nias Barat	3.000.000.000	12,00	m
27	Pembangunan Jembatan Idano Mazinali Km. 61+300 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Tuhembuasi - Mandrehe di Kab. Nias Barat	2.000.000.000	8,00	m
28	Pembangunan Jembatan Aek Garotak 3 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Aek Kota Batu - Bts. Tobasa di Kab. Labuhan Batu Utara	1.700.000.000	8,00	m
29	Pembangunan Jembatan Aek Siborangan pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Sigambal - Bts. Paluta di Kab. Labuhan Batu	3.000.000.000	12,00	m
30	Pembangunan Jembatan Aek Aporaron pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Aek Kota Batu - Bts. Tobasa di Kab. Labuhan Batu Utara	3.000.000.000	12,00	m

Sumber : Dinas Bina Marga Prov. Sumut

Pada tahun anggaran 2015 ada 15 paket kegiatan pembangunan/peningkatan jalan provinsi dengan total panjang 32,60 Km dan 9 paket kegiatan Pembangunan/penggantian Jembatan dengan total panjang 147,00 m yang ditunda pelaksanaannya, penundaan pelaksanaan tersebut dikarenakan adanya pembayaran paket kegiatan TA. 2014 yang telah selesai 100 % (fisik) tidak dapat dibayarkan 100 % karena keterbatasan anggaran pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2014, sehingga pembayaran sisa kontrak ditampung dan dibayarkan pada TA 2015, adapun paket kegiatan yang ditunda pelaksanaannya adalah :



Tabel 60. Paket Kegiatan

No	Nama Paket Kegiatan	Panjang Penanganan
1	2	3
	Pembangunan/Peningkatan Jalan	32,60 Km
1	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Bts. Binjai - Kuala di Kab. Langkat	1,70 Km
2	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Deli Tua - Tiga Juhar di Kab. Deli Serdang	2,50 Km
3	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan T. Balai (Pangkal Tembok) - Pasar I - Bts. Labura di Kab. Asahan	2,00 Km
4	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sp. Jambu - Kuta Jungak - Sigalingging (Bts. Dairi) di Kab. Pakpak Bharat	1,70 Km
5	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Saribu Dolok - Saran Padang di Kab. Simalungun	2,00 Km
6	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Silimbat - Parsoburan di Kab. Toba Samosir	2,00 Km
7	Pembangunan Jalan Provinsi Jurusan Parsoburan - Bts. Labuhan Batu di Kab. Samosir	1,00 Km
8	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Parsoburan - Borbor - Pangururan - Janji Maria - Sipahutar di Kab. Toba samosir	1,00 Km
9	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Pangaribuan - Garoga di Kab. Tapanuli Utara	1,50 Km
10	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tara Bintang - Parlilitan di Kab. Humbang Hasundutan	2,50 Km
11	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Dolok Sanggul - Pakkat di Kab. Humbang Hasundutan	2,70 Km
12	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Gunung Tua - KM. 168 (Binanga) di Kab. Padang Lawas Utara	1,00 Km
13	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Afulu - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Utara	4,00 Km
14	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Siwalawa II - Sirombu di Kab. Nias Barat	4,00 Km
15	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tanjung Pura - Tanjung Selamat di Kab. Langkat	3,00 Km
	Pembangunan/Penggantian Jembatan	
1	Penggantian Jembatan Sei Dadap pada Ruas Jalan Provinsi Jrs. S. Padang – Bts. Sergei di Kab. Simalungun	40,00 m
2	Penggantian Jembatan Aek Huwalu II pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Parsoburan - Borbor - Rianiate di Kab. Toba Samosir	30,00 m
3	Penggantian Jembatan Aek Parlotingan pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Sp. Silangit - Sitanggor - Bts. Tobasa di Kab. Tapanuli Utara	8,00 m
4	Pembangunan Jembatan Sitahuis pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Pakkat - Tara Bintang di Kab. Humbang Hasundutan	20,00 m
5	Pembangunan Jembatan Aek Simpang Banyak pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Muara Pungkut - Sp.Banyak di Kab. Mandailing Natal	9,00 m
6	Pembangunan Jembatan Idano Ge'e Km. 58+900 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Tuhembuasi - Mandrehe di Kab. Nias Barat	12,00 m



No	Nama Paket Kegiatan	Panjang Penanganan
1	2	3
7	Pembangunan Jembatan Idano Mazinali Km. 61+300 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Tuhembuasi - Mandrehe di Kab. Nias Barat	8,00 m
8	Pembangunan Jembatan Aek Garotak 3 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Aek Kota Batu - Bts. Tobasa di Kab. Labuhan Batu Utara	8,00 m
9	Pembangunan Jembatan Aek Aporaron pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Aek Kota Batu - Bts. Tobasa di Kab. Labuhan Batu Utara	12,00 m

CAPAIAN KINERJA : REALISASI PENCAPAIAN KINERJA

Pada uraian ini akan menjelaskan sejauh mana hasil capaian program dan kegiatan yang tertera pada Tabel 53 di atas, yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun anggaran 2015 yang pembiayannya hanya bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera saja bukan dari APBN atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.

Tabel 61
Realisasi Program/ Kegiatan Dalam Rangka
Proporsi Jalan Dalam Kontisi Mantap Tahun Anggaran 2015

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		Fisik (%)	Ket	
			Kinerja	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	
PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN		472.100.000.000			432.046.835.536	97,00	91,52 %
I	Pembangunan/Peningkatan Jalan	416.750.000.000	112,18	Km	382.470.271.838		
1	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Kuala - Timbang Lawang di Kab. Langkat	13.850.000.000	3,08	Km	11.974.192.238	100,00	
2	Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Jurusan Tanah Abang - Bts. Sergej di Kab. Deli Serdang	7.200.000.000	1,80	Km	7.019.881.700	100,00	
3	Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Jurusan Tanah Abang - Sei Buaya di Kab. Deli Serdang (DAK)	18.000.000.000	4,50	Km	17.327.114.300	100,00	
4	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Lubuk Pakam - Tanah Abang di Kab. Deli Serdang	4.500.000.000	1,00	Km	1.923.300.661	42,74	Putus Kontrak



Laporan Kinerja (LK)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi			Fisik (%)	Ket
			Kinerja		Anggaran (Rp)		
1	2	3	4		5	6	7
5	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Bts. Deli Serdang - Dolok Masihul - Kota Tebing Tinggi di Kab. Serdang Bedagai	7.000.000.000	2,00	Km	6.667.770.296	100,00	
6	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tebing Tinggi (Wts.Sergai) - Sipispis di Kab. Serdang Bedagai	16.000.000.000	4,00	Km	14.902.832.757	100,00	
7	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Bandar Pulau - P. Rakyat - Bts. Tobasa di Kab. Asahan	7.000.000.000	2,00	Km	1.350.018.354	19,29	Putus Kontrak
8	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Kisaran - Air Joman - Watas Kota Tanjung Balai di Kab. Asahan	10.500.000.000	3,00	Km	9.560.925.477	100,00	
9	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Psr 1 - Psr XIX (Perbangunan) - Sei Dua - Psr Banjar (WTS Kota Tanjung Balai) di Kab. Asahan	7.000.000.000	2,00	Km	6.573.152.300	100,00	
10	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Jamin Ginting (Kota Tj. Balai) di Kota Tanjung Balai	17.500.000.000	4,20	Km	16.096.978.373	100,00	
11	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sidikalang - Penjaratan di Kab. Dairi	7.000.000.000	2,00	Km	6.689.054.303	100,00	
12	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sumbul Pegagan - Parikki - Pangirangan di Kab. Dairi	3.500.000.000	1,00	Km	3.402.948.847	100,00	
13	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sukaramai - Tanjung Rahu - Penjaratan (Bts. Dairi) di Kab. Pakpak Bharat	7.000.000.000	2,00	Km	6.725.843.757	100,00	
14	Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Jurusan P. Siantar - P. Raya di Kab. Simalungun	7.500.000.000	2,00	Km	7.329.673.347	100,00	
15	Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Jurusan P. Raya - T.Runggu di Kab. Simalungun (DAK)	18.000.000.000	4,00	Km	15.492.333.596	86,07	luncuran
16	Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Jurusan Bts. Simalungun - Sondi Raya di Kab. Simalungun	8.000.000.000	2,00	Km	7.823.617.193	100,00	
17	Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Jurusan S. Padang - Bts. Sergei di Kab. Simalungun	9.000.000.000	2,00	Km	8.654.473.560	100,00	
18	Lanjutan Pembukaan Jalan Provinsi Jurusan Borbor - Rianiate - Garoga di Kab. Toba Samosir	3.000.000.000	4,50	Km	2.778.669.000	100,00	



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		Fisik (%)	Ket	
			Kinerja	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	
19	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sipahutar - Aek Humbang di Kab. Tapanuli Utara	8.750.000.000	2,50	Km	8.463.169.500	100,00	
20	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Simp. IV Hutabarat - Sipahutar di Kab. Tapanuli Utara	7.000.000.000	2,00	Km	6.628.717.000	100,00	
21	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Simp. Silangit - Simp. III Muara - Muara - Bakkara (Bts. Humbahas) di Kab. Tapanuli Utara	14.000.000.000	4,00	Km	13.538.768.000	100,00	
22	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sp. Sitanggor - Meat (Bts. Tobasa) di Kab. Tapanuli Utara	7.350.000.000	2,10	Km	6.444.412.000	100,00	
23	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tomok - Onan Runggu di Kab. Samosir (DAK)	17.500.000.000	4,50	Km	16.278.974.765	100,00	
24	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Nainggolan - Pangururan di Kab. Samosir	7.000.000.000	2,00	Km	6.684.061.218	100,00	
25	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Pakkat - Tara Bintang di Kab. Humbang Hasundutan	8.750.000.000	2,50	Km	8.497.906.159	100,00	
26	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Hutaimbaru - Batas Labusel di Kab. Padang Lawas Utara	7.000.000.000	2,00	Km	6.304.388.000	100,00	
27	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Aek Godang - Gunung Tua di Kab. Padang Lawas Utara	9.000.000.000	2,00	Km	8.855.000.000	100,00	
28	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Gunung Tua - KM. 168 (Binanga) di Kab. Padang Lawas Utara	8.000.000.000	2,00	Km	7.701.525.000	100,00	
29	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Hutaimbaru - Sipiongot di Kab. Padang Lawas Utara	7.000.000.000	2,00	Km	6.613.518.000	100,00	
30	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sibuhuan - Ujung Batu di Kab. Padang Lawas	14.100.000.000	1,60	Km	13.481.774.000	100,00	
31	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sigambal - Batas Paluta di Kab. Labuhan Batu	10.500.000.000	3,00	Km	10.050.296.700	100,00	
32	Pembangunan Jalan Provinsi Jurusan Sp. Ajamu - Sei Rakyat - Panipahan di Kab. Labuhan Batu	7.000.000.000	2,00	Km	6.521.849.400	100,00	



Laporan Kinerja (LK)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		Fisik (%)	Ket	
			Kinerja	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	
33	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sp. Kota Pinang - Batas Paluta di Kab. Labuhan Batu Selatan	9.000.000.000	2,00	Km	8.472.435.700	100,00	
34	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Pal XI - Aek Godang di Kab. Tapanuli Selatan	9.000.000.000	3,40	Km	8.498.826.000	100,00	
35	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sipenggeng - Marancar - Sipirok di Kab. Tapanuli Selatan	9.000.000.000	2,00	Km	8.552.740.000	100,00	
36	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sipirok - Sp. Tandosan - Bts. Tapanuli Utara di Kab. Tapanuli Selatan	10.500.000.000	3,00	Km	10.300.000.000	100,00	
37	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sp. Tandosan - Simangimbat - Sipagimbar di Kab. Tapanuli Selatan	10.500.000.000	3,00	Km	10.350.000.000	100,00	
38	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Simpangimbar - Tolang di Kab. Tapanuli Selatan	10.500.000.000	3,00	Km	10.327.999.000	100,00	
39	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Jembatan Merah - Muarasoma di Kab. Mandailing Natal	13.500.000.000	3,00	Km	12.563.166.192	100,00	
40	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Simpang Pulo Padang - Batahan - Bts. Sumbang di Kab. Mandailing Natal	7.000.000.000	2,00	Km	6.612.109.280	100,00	
41	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Tj. Selamat - Namu Unggas - Tangkahan di Kab. Langkat	10.500.000.000	3,00	Km	8.835.375.591	100,00	
42	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Namu Ukur - Bts. Karo di Kab. Langkat	10.500.000.000	3,00	Km	9.952.980.072	100,00	
43	Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Sorkam Kiri - Sigambo-gambo - Barus di Kab. Tapanuli Tengah	12.250.000.000	3,50	Km	9.647.500.200	100,00	
II	Pembangunan/Penggantian Jembatan	55.350.000.000	222	m	49.576.563.698		
1	Pembangunan Jembatan Provinsi Tambat Begu pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Tiga Juhar - Gunung Meriah di Kab. Deli Serdang	1.250.000.000	5,00	m	1.200.266.998	100,00	
2	Penggantian Jembatan Sei Taman pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Gertak Serong - Sarang Elang - Sei Sembilang - Watas Labura di Kab. Asahan	2.500.000.000	10,00	m	1.482.156.926	59,29	luncuran



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		Fisik (%)	Ket	
			Kinerja	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	
3	Penggantian Jembatan Sei Box Kuning pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Bts. Simalungun - Kisaran di Kab. Asahan	1.750.000.000	7,00	m	1.346.337.055	76,93	luncuran
4	Pembangunan Box Culvert pada ruas Jalan Provinsi Pangururan - Ambarita di Kab. Samosir	900.000.000	3,00	m	803.649.789	100,00	
5	Pembangunan Box Culvert pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Pakkat - Bts. Tapteng di Kab. Humbang Hasundutan	450.000.000	3,00	m	378.493.592	100,00	
6	Pembangunan Jembatan Aek Ambasang pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Sipiongot - Tolang di Kab. Padang Lawas Utara	5.000.000.000	20,00	m	4.670.999.000	100,00	
7	Pembangunan Jembatan Aek Simargappual pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Gunungtua - KM.168 (Binanga) di Kab. Padang Lawas Utara	2.500.000.000	10,00	m	2.408.000.000	100,00	
8	Pembangunan Jembatan Aek Ombik pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Gunungtua - KM.168 (Binanga) di Kab. Padang Lawas Utara	2.500.000.000	10,00	m	2.182.183.000	100,00	
9	Pembangunan Jembatan Aek Hadungdung pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan KM.168 (Binanga) - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	3.750.000.000	15,00	m	3.499.468.000	100,00	
10	Pembangunan Jembatan Aek Rampa Ruas Jalan Provinsi Jurusan KM.168 (Binanga) - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	5.250.000.000	21,00	m	4.799.727.000	100,00	
11	Pembangunan Jembatan Aek Rurasotul pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan KM.150 (Sosopan) - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	2.500.000.000	10,00	m	2.341.900.000	100,00	
12	Pembangunan Jembatan Aek Hulim pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Aek Godang - KM.150 (Sosopan) di Kab. Padang Lawas	2.500.000.000	10,00	m	2.327.157.000	100,00	
13	Pembangunan Jembatan Aek Hutabaru pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan KM.150 (Sosopan) - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	2.500.000.000	10,00	m	2.254.331.000	100,00	
14	Pembangunan Jembatan Aek Paringgonan 1 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan KM.150 (Sosopan) - Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	2.000.000.000	8,00	m	1.856.309.000	100,00	



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		Fisik (%)	Ket	
			Kinerja	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	
15	Pembangunan Jembatan Aek Batu Marsaong pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Muara Soma - Sp. Gambir di Kab. Mandailing Natal	1.750.000.000	7,00	m	1.601.160.891	100,00	
16	Pembangunan Jembatan Aek Ranto Sore pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Muara Soma - Sp. Gambir di Kab. Mandailing Natal	1.750.000.000	7,00	m	1.609.247.958	100,00	
17	Pembangunan Jembatan Idano Sava Km. 110+900 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Afulu - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Utara	7.500.000.000	30,00	m	6.996.300.170	100,00	
18	Pembangunan Jembatan Idano Ture Namohesa Km. 113+200 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Afulu - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Utara	2.000.000.000	8,00	m	1.868.764.135	100,00	
19	Pembangunan Jembatan Idano Sokara Km. 121+200 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Afulu - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Utara	2.000.000.000	8,00	m	1.867.991.445	100,00	
20	Pembangunan Jembatan Idano Baruzo Km. 48+250 pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Tuhembuasi - Mandrehe di Kab. Nias Barat	2.000.000.000	8,00	m	1.830.142.338	100,00	
21	Pembangunan Jembatan Aek Siborangan pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Sigambal - Bts. Paluta di Kab. Labuhan Batu	3.000.000.000	12,00	m	2.251.978.400	100,00	

Sumber : Dinas Bina Marga Prov. Sumut

Capaian Indikator Kinerja

Optimalisasi Jaringan Irigasi



Merujuk kepada Peraturan Presiden RI Nomor 33 tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA, ada tugas yang harus segera diselesaikan, yaitu pada tahun 2015 seluruh sungai di Indonesia, harus sudah tersusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, untuk seluruh Daerah Aliran Sungai. Tujuan utama dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA adalah keamanan dan ketahanan SDA itu sendiri, ketahanan air adalah ketersediaan baik kuantitas maupun kualitas air



untuk kehidupan, kesehatan, dan untuk keberlanjutan ekosistem itu sendiri. Ketersediaan air yang memadai baik kuantitas dan kualitasnya dapat mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Untuk mencapai tujuan *water security*, *food security*, hingga *energy security*, maka pengembangan sumber daya manusia mutlak diperlukan untuk peningkatan kapasitas teknisnya, selain itu penguatan kelembagaan melalui wadah koordinasi atau TKPSDA pun perlu mendapat perhatian, serta tidak melupakan pembiayaan yang berdasarkan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan.

Dalam hal ini, sampai dengan tahun 2015, Provinsi Sumatera Utara telah merancang Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air untuk 5 Wilayah Sungai kewenangan Provinsi, diantaranya :

- 1) Rancangan Dokumen Pola PSDA Wilayah Sungai Wampu Besitang.
- 2) Rancangan Dokumen Pola PSDA Wilayah Sungai Bah Bolon.
- 3) Rancangan Dokumen Pola PSDA Wilayah Sungai Sibundong – Batang Toru.
- 4) Rancangan Dokumen Pola PSDA Wilayah Sungai Kualuh – Barumon.
- 5) Rancangan Dokumen Pola PSDA Wilayah Sungai Batang Angkola -Batang Gadis.

Kelima Rancangan Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut sampai saat ini telah tersusun, namun belum mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Dokumen Pola PSDA dari Gubernur Sumatera Utara. Namun, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara telah menggunakan Rancangan Dokumen tersebut dalam merencanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Provinsi.

Untuk rencana tahun anggaran 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan Rancangan Dokumen Pola PSDA Wilayah Sungai Nias, yang sekaligus sebagai penyusunan Dokumen Pola PSDA terakhir pada wilayah sungai kewenangan Provinsi Sumatera Utara. Dari rencana pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara periode



2013 – 2018 sebesar 72% rasio jaringan irigasi kondisi baik, yang terealisasi hanya sebesar 64,9% pada tahun 2015, dimana kondisi awal rasio jaringan irigasi kondisi baik sebesar 60%. Hal ini disebabkan keterbatasan pendanaan dalam pencapaian target kinerja pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah direncanakan, dalam mencapai Visi Misi Gubernur Sumatera Utara. Luas baku irigasi dan rawa di Provinsi Sumatera Utara seluas 1.430.595 Ha yang meliputi lahan irigasi seluas 418.590 Ha dan lahan rawa seluas 1.012.005 Ha. Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengelola daerah irigasi dan rawa yang sudah terbangun seluas 113.845 Ha dengan jaringan irigasi seluas 86.999 Ha dan jaringan rawa seluas 26.846 Ha. Jaringan irigasi yang berfungsi melalui ketersediaan air irigasi pada tahun 2014 sebesar 69,9% dari total luasan provinsi seluas 86.999 Ha, maka ketersediaan air irigasi di tahun 2014 seluas 60.813 Ha, dan pada tahun 2015 sebesar 74,93 % dari total luasan provinsi seluas 86.999 Ha, maka ketersediaan air irigasi di tahun 2015 seluas 65.189 Ha.

Berikut Capaian Kinerja Optimalisasi Jaringan Irigasi pada Tahun 2015, digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 62.
Capaian Kinerja Optimalisasi Jaringan Irigasi Tahun 2015

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1.	Optimalisasi Jaringan Irigasi (%)	72 %	64,90 %	90,14

Sumber : Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air Prov. Sumut

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa Realisasi Kinerja tercapai sebesar 64,90 % , sehingga Capaian kinerja mencalai 90,14 % atau dengan kategori SANGAT BAIK. Target ini didasarkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara yang telah sesuai dengan perencanaan penganggaran yang tertuang pada dokumen tersebut. Target kinerja ini akan dicapai melalui **Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya** yang terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya :

1. Perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan O&P Jaringan Irigasi dan rawa, Keg. Program WISMP-II / Loan 8027-ID - Komponen 2, Peningkatan



Pengelolaan Sistem irigasi Partisipatif - PPSIP dan Komponen 4, Manajemen Proyek dan Dukungan Implementasi (PPIU-Dinas PSDA Provsu). Kedua kegiatan ini terlaksana dengan baik pada tahun ini.

2. O&P jaringan irigasi dengan dengan target kinerja kegiatan 75.694 ha, diakhir tahun anggaran realisasi target kinerja kegiatan ini adalah 75.694 ha.
3. Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi pada DI. Di 9 UPT PSDA. Kegiatan ini terdiri dari beberapa pekerjaan yang masing-masing memiliki target pada tahun 2015 ini berupa bangunan irigasi sebanyak 3.420 buah, saluran pasangan/tembok pasangan sepanjang 178.887 m dan normalisasi saluran/tanggul saluran dengan panjang 490.816 m.

Kendala dan Permasalahan :

1. Pada akhir Tahun Anggaran 2015 realisasi target dari kegiatan ini untuk bangunan irigasi sebanyak 3.413 buah, saluran pasangan/tembok pasangan sepanjang 172.932 m dan normalisasi saluran/tanggul saluran dengan panjang 489.516 m. Terdapat juga 13 kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi yang tidak terlaksana. Hal ini diakibatkan karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, mengingat pendanaannya turun setelah disahkannya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 sehingga waktu untuk melaksanakan tidak mencukupi. Terdapat juga 17 kegiatan yang mengalami penundaan yaitu kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi, yang akhirnya kegiatan tersebut dihentikan. Hal ini diakibatkan karena kemampuan keuangan provinsi yang tidak mencukupi. Hal ini juga berakibat terjadinya penurunan target capaian kinerja khususnya untuk pencapaian kinerja Optimalisasi Jaringan Irigasi.
2. Dengan adanya beberapa faktor dan kendala seperti yang telah dijelaskan diatas, realisasi kinerja untuk indikator optimalisasi jaringan irigasi pada akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar 64,90 %. Dengan demikian persentase capaian kinerja



pada indikator optimalisasi jaringan irigasi untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar 90,14 %, dalam skala Likert termasuk dalam kriteria penilaian sangat baik.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2015 :

Dalam rangka pencapaian kinerja pada indikator ini, dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan 51 (lima puluh satu) kegiatan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 75.466.075.970,-. Pada akhir Tahun Anggaran 2015, realisasi keuangan pada indikator ini adalah sebesar Rp.50.452.257.277,- atau 66,85%, dengan rincian sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1	Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah				
1	Optimalisasi Jaringan Irigasi (%)				
24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	51	75.466.075.970	50.452.257.277	66,85%
	O&P jaringan irigasi (1.000 ha – 3.000 ha) dan lintas Kab/Kota pada 9 UPT PSDA	9	18.579.535.800	18.063.353.975	97,22%
	Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi pada DI.	39	53.052.740.170	28.895.564.225	54,47%
	Keg. Program WISMP-II /Loan 8027-ID/10837101-World Bank, dalam pengelolaan SDA : Komponen 2 Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) dan Komponen 4 Manajemen Proyek dan Dukungan Implementasi - PPIU Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara	1	3.343.800.000	3.202.189.850	95,76%
	Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan O&P Jaringan Irigasi dan Rawa	1	195.000.000	156.111.477	80,06%
	Konsultasi Regional O&P Pengelolaan SDA Wilayah Barat	1	295.000.000	135.037.750	45,78%

Sumber : Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air Prov. Sumut



Capaian Tahun 2015 :

Capaian pada tahun 2014 sebesar 61,31 %. Pada Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara menetapkan target kinerja untuk indikator ini sebesar 72 %.

Capaian Indikator Kinerja

Tersedianya sumber air baku (waduk/embung/ situ)



Capaian Kinerja pada indikator kinerja ini pada Tahun 2015, digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 63.
Capaian Kinerja tersedianya Air Baku (Waduk/ embung/ situ) Tahun 2015

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Tersedianya sumber air baku pada daerah kekurangan air di musim hujan dalam bentuk Waduk / Embung / Situ-situ (bh)	40 Unit	23 Unit	57,5

Sumber : Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air Prov. Sumut

Pada Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara menetapkan target kinerja untuk indikator ini sebesar 40 Unit Waduk/ Embung/ Situ. Target ini didasarkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara yang telah sesuai dengan perencanaan penganggaran yang tertuang pada dokumen tersebut.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015
dengan Tahun 2014 :

Pada Tahun 2014 Capaian Indikator Kinerja “**Tersedianya sumber air baku (waduk/embung/ situ)**”, bahwa sebagaimana telah ditetapkan target kinerja target



kinerja sebesar 30 bh. Pada akhir tahun anggaran realisasi kinerja sebesar 21 bh. Persentase capaian indikator tersedianya sumber air baku pada daerah kekurangan air di musim hujan dalam bentuk waduk / Embung / Situ-situ untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar 70,00 % atau dengan Kategori **BAIK**.

Kendala dan Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi pada indikator ini sama dengan pada indikator pertama, yaitu alokasi dana yang terbatas serta terdapat satu kegiatan yang tidak terlaksana, yang disebabkan karena ketidaksesuaian lokasi pekerjaan, serta beberapa permasalahan teknis terkait pembebasan lahan untuk pekerjaan pembuatan embung/waduk baru, dan inventarisasi data embung/waduk yang masih belum jelas.

Dengan adanya beberapa faktor dan kendala seperti yang telah dijelaskan diatas, realisasi kinerja untuk indikator tersedianya sumber air baku pada daerah kekurangan air di musim hujan dalam bentuk Waduk / Embung / Situ-situ pada akhir Tahun Anggaran 2015 sebanyak 23 buah. Dengan demikian persentase capaian kinerja pada indikator ini untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar 57,5 %, dalam skala Likert termasuk dalam kriteria penilaian cukup.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2015 :

Dalam rangka pencapaian kinerja pada indikator ini, dilaksanakan melalui Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dengan 2 (dua) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Pada akhir Tahun Anggaran 2015, realisasi keuangan pada indikator ini sebesar Rp. 975.325.750,- atau 97,53% (Sangat Baik) dan dengan rincian sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah				
Tersedianya sumber air baku pada daerah kekurangan air di musim hujan dalam bentuk Waduk / Embung / Situ-situ (bh)				
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	2	1.000.000.000	975.325.750	97,53
Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana air baku	2	1.000.000.000	975.325.750	97,53

Capaian Indikator Kinerja

Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan Kelembagaan Pengelola Irigasi (SKPD, KOMIR, P3A, GP3A, IP3A)



Capaian Kinerja Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan Kelembagaan Pengelola Irigasi (SKPD, KOMIR, P3A, GP3A, IP3A) pada Tahun 2015, digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 64.
Capaian Kinerja Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan Kelembagaan Pengelola Irigasi (SKPD, KOMIR, P3A, GP3A, IP3A) Tahun 2015

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan SDA (SKPD, Komisi Irigasi, P3A, GP3A, IP3A)	8 Kab/Kota	8 Kab/Kota	100,00

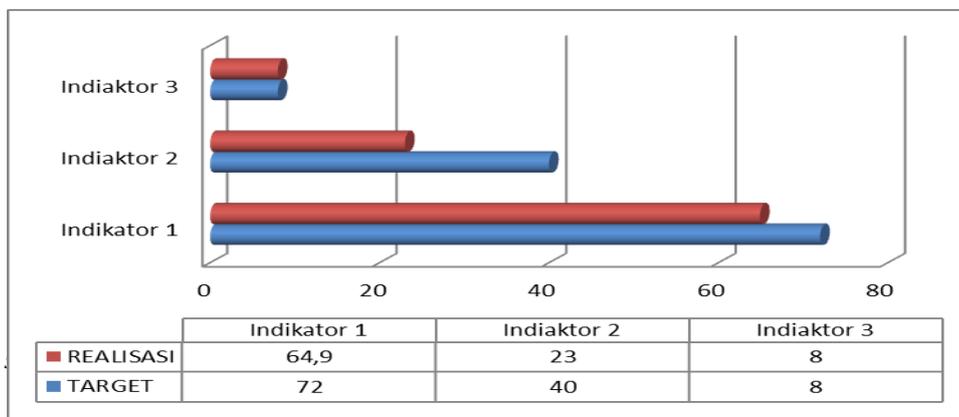
Sumber : Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air Prov. Sumut

Pada Indikator Kinerja Utama ini, data capaian pada tahun 2014 sebanyak 4 Kab./Kota, secara keseluruhan program/kegiatan pendukung tercapainya target kinerja pada indikator ini terlaksana dengan baik kecuali terdapat beberapa kegiatan yang ditunda akibat ketidakmampuan keuangan Provinsi, diantara adalah kegiatan Penguatan kapasitas Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Utara 1 kegiatan, Pelatihan/Lokakarya/Workshop 3 kegiatan, dan Training of Trainer 1 Kegiatan. Hal ini tentu berdampak pada pencapaian target kinerja Tahun. 2015.

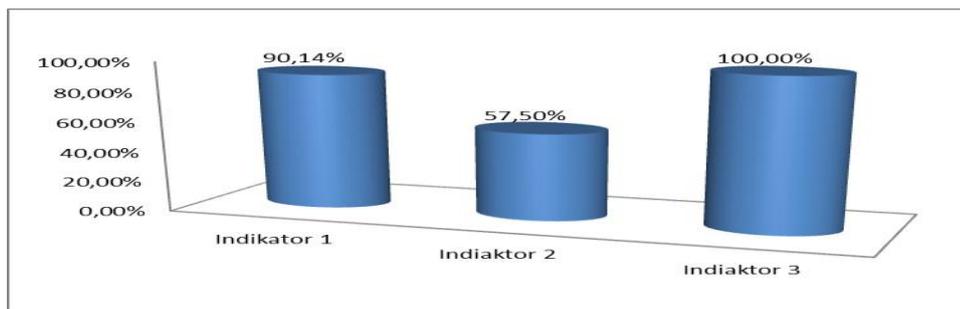


Namun demikian, beberapa kegiatan yang dilaksanakan dapat menutupi kekurangan pada target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian capaian target kinerja pada Tahun Anggaran 2015 adalah 8 Kab./Kota dan persentase capaian kinerja pada indikator ini untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar 100 %, dalam skala Likert termasuk dalam kriteria penilaian sangat baik.

Grafik 30.
Perbandingan Capaian Kinerja dari masing-masing Indikator



Grafik 31.
Capaian Target dan realisasi kinerja masing-masing Indikator Tahun 2015 per indikator.



Sumber : Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air Prov. Sumut

Hasil pengukuran kinerja Tahun 2015 berdasarkan IKU Provinsi Sumatera Utara menunjukkan dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga Indikator), dimana **2 (dua) indikator** berhasil mencapai kinerja sangat baik (100% - 80%) dan **1 (satu) indikator** mencapai kinerja cukup (59,99 % - 40 %).



Program dan Kegiatan
yang dilaksanakan TA. 2015 :

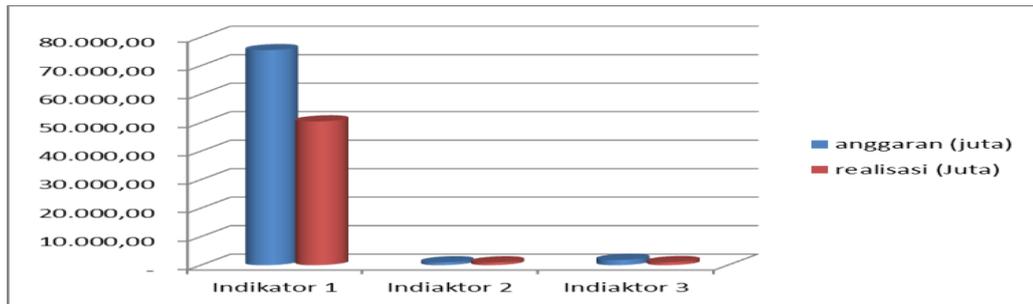
Dalam rangka pencapaian kinerja pada indikator ini, dilaksanakan melalui **Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif**, dengan 8 (delapan) Kegiatan. Alokasi anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 1.845.401.100,-. Pada akhir Tahun Anggaran 2015, realisasi keuangan pada indikator ini sebesar Rp. 1.060.646.395,- atau 57,48 % (cukup) dan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 65
Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 masing-masing Indikator Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1	Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah				
7	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan SDA (SKPD, Komisi Irigasi, P3A, GP3A, IP3A)				
36	Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	8	1.845.401.100	1.060.646.395	57,48%
	Kegiatan Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Utara	1	552.500.000	64.670.463	11,71%
	Penyusunan profil kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Sumatera Utara	1	300.000.000	105.003.040	35,00%
	Pelatihan/Lokakarya bagi staf Dinas PUP/SDA tentang "Konstruksi Irigasi Partisipatif".	1	131.068.700	113.426.660	86,54%
	Pelatihan/Lokakarya bagi staf Dinas PUP/SDA tentang "OP Irigasi Partisipatif".	1	131.068.700	113.626.660	86,69%
	Pelatihan Konstruksi Partisipatif untuk P3A/GP3A/IP3A.	1	200.000.000	177.073.639	88,54%
	Pelatihan O&P Jaringan Irigasi Partisipatif untuk P3A/GP3A/IP3A.	1	200.000.000	194.935.639	97,47%
	Pelatihan O&P Petugas Juru dan Pengamat Jaringan Irigasi Dinas PSDA	1	165.763.700	144.531.526	87,19%
	Pemilihan petugas OP Teladan Tingkat Provinsi	1	165.000.000	147.378.768	89,32%

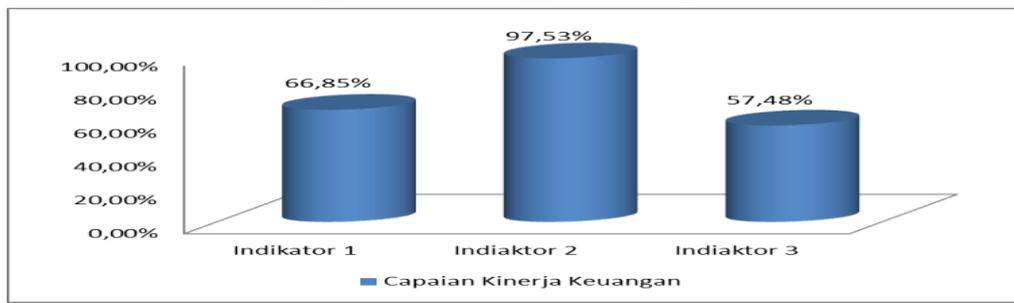
Sumber : Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air Prov. Sumut

Grafik 32
 Persentase capaian kinerja keuangan masing-masing indikator.



Sumber : Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air Prov. Sumut

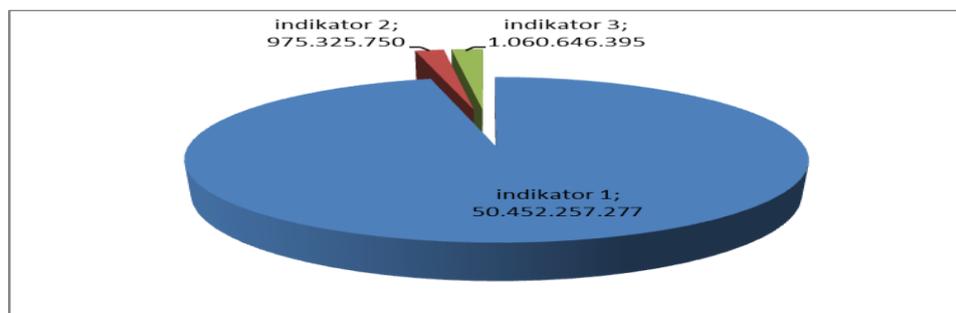
Grafik 33.
 Realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 per indikator.



Sumber : Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air Prov. Sumut

Untuk program prioritas terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 31.179.341.528,- yang berasal dari sisa tender pekerjaan dan pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan atau diselesaikan akibat tidak cukupnya waktu pelaksanaan pekerjaan, yang disebabkan anggaran kegiatan tersebut dianggarkan pada P.PABD 2015.

Grafik 34.
 Realisasi anggaran program prioritas berdasarkan indikator Tahun Anggaran 2015



Sumber : Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air Prov. Sumut



Total realisasi anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 untuk belanja langsung dan tidak langsung berdasarkan program adalah sebagai berikut :

Tabel 66.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan masing-masing Indikator Kinerja
Tahun Anggaran 2015

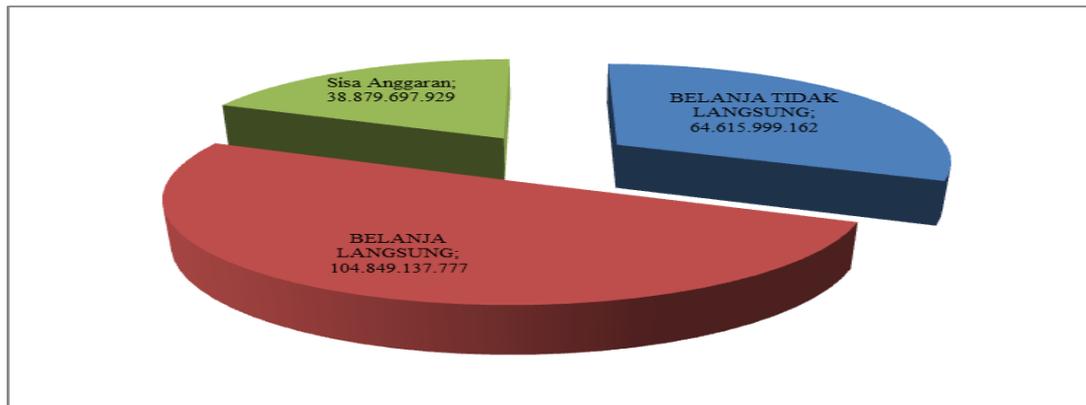
Program / Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%	Sisa Rp.
JUMLAH	173	208.344.834.868,00	169.465.136.939,00	81,34%	38.879.697.929,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2	70.410.460.000,00	64.615.999.162,00	91,77%	5.794.460.838,00
Belanja Pegawai	2	70.410.460.000,00	64.615.999.162,00	91,77%	5.794.460.838,00
BELANJA LANGSUNG	171	137.934.374.868,00	104.849.137.777,00	76,01%	33.085.237.091,00
PROGRAM PENDUKUNG (KEGIATAN RUTIN / NON URUSAN)	31	7.402.015.600,00	5.496.120.037,00	74,25%	857.029.391,80
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	2.228.350.000,00	1.671.084.994,00	74,99%	557.265.006,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10	2.698.250.000,00	1.864.432.905,00	69,10%	833.817.095,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2	628.665.600,00	544.142.666,00	86,56%	84.522.934,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7	1.296.750.000,00	934.867.702,00	72,09%	361.882.298,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	550.000.000,00	481.591.770,00	87,56%	68.408.230,00
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (URUSAN WAJIB)	140	130.532.359.268,00	99.353.017.740,00	76,11%	31.179.341.528,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya	65	84.707.515.570,00	58.711.033.972,00	69,31%	25.996.481.598,00
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	2	1.000.000.000,00	975.325.750,00	97,53%	24.674.250,00
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	3	6.222.500.000,00	4.804.928.714,00	77,22%	1.417.571.286,00
Program Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	42	29.275.942.598,00	27.046.465.119,00	92,38%	2.229.477.479,00
Program Pembinaan, Pengaturan, dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air	20	7.481.000.000,00	6.754.617.790,00	90,29%	726.382.210,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	8	1.845.401.100,00	1.060.646.395,00	57,48%	784.754.705,00

Sumber : Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air Prov. Sumut

Secara umum jumlah dana yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 untuk Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan 11 (sebelas) program dapat dilihat pada tabel diatas. Persentase realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2015 secara keseluruhan sebesar 81,34 % dimana

untuk realisasi belanja tidak langsung 91,77 % dan realisasi belanja langsung 76,01 %. Dari belanja langsung dapat dilihat juga persentase realisasi program pendukung mencapai 74,25 % dan program prioritas mencapai 76,11 %.

Grafik 35.
Realisasi anggaran program prioritas berdasarkan
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2015



Sumber : Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air Prov. Sumut

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015
dengan Kinerja tahun 2014 :

Capaian kinerja dari 3 Indikator di atas, untuk beberapa tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 67
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2014
dengan Tahun 2015.

No.	INDIKATOR/PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2014	REALISASI SAMPAI TAHUN 2015
1.	Optimalisasi Jaringan Irigasi (%)	61,31 %	64,90 %
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		
	O&P jaringan irigasi (1.000 ha – 3.000 ha) dan lintas Kab/Kota pada UPT PSDA	75.201 Ha	75.694 Ha
	Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi pada DI.		
	1) Bangunan Irigasi	3.398,00 bh	3.413,00 bh
	2) Peningkatan saluran, pasangan/tembok penahan	162.297,00 m'	172.932,00 m'
	3) Normalisasi	481.516,00 m'	489.516,00 m'
	Keg. Program WISMP – II	-	1 Komponen
	Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan O&P Jaringan Irigasi dan Rawa	1 Tahun	2 Tahun
	Konsultasi O&P Pengelolaan SDA	1 Laporan Kegiatan	2 Laporan Kegiatan



No.	INDIKATOR/PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2014		REALISASI SAMPAI TAHUN 2015	
2.	Optimalisasi Jaringan Rawa (%)	39,28	%	43,01	%
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				
	O&P jaringan rawa (1.000 ha – 3.000 ha) dan lintas Kab/Kota pada UPT PSDA	52.832,00	Ha	52.832,00	Ha
	Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur Rawa pada DR.				
	4) <i>Bangunan Rawa</i>	217,00	bh	219,00	bh
	5) <i>Saluran Drainase</i>	345.926,00	m'	378.226,00	m'
	6) <i>Tanggul Air Asin</i>	60.735,00	m'	60.735,00	m'
3.	Tersedianya sumber air baku pada daerah kekurangan air di musim hujan dalam bentuk Waduk / Embung / Situ-situ (bh)	21	bh	23	bh
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku				
	Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana air baku	21	bh	23	bh
4.	Meningkatnya kestabilan tebing atau pantai dan kelancaran aliran air sungai serta semakin stabilnya alur sungai terhadap daya rusak air dan berkurangnya luasan genangan banjir (%)	78,22	%	79,95	%
	Program Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai				
	Perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan E & P sungai pada Provinsi Sumatera Utara	1	Tahun	2	Tahun
	E & P sungai dan bangunan sungai dan pantai pada 10 UPT PSDA	10	UPT/ Tahun	10	UPT/ Tahun
	Monitoring dan evaluasi kerusakan infrastuktur sumber daya air akibat bencana alam	1	Tahun	2	Tahun
	Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan pantai				
	<i>Perkuatan Tebing</i>	132.628,20	m'	135.993,00	m'
	<i>Normalisasi / Tanggul Banjir</i>	411.455,00	m'	415.455,00	m'
5.	Terlaksananya Kordinasi Pengelolaan SDA Provinsi Sumatera Utara dan Kordinasi Pengelola SDA pada wilayah sungai melalui kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi dan wadah lainnya (%/Dok/Keg)	66	%	72	%
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya				
	Kegiatan wadah koordinasi/Dewan SDA Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara	4 20	Kegiatan Sub Kegiatan	4 20	Kegiatan Sub Kegiatan
	Kegiatan Peringatan Hari Air Sedunia Provinsi Sumatera Utara	6 18	Kegiatan Sub Kegiatan	6 18	Kegiatan Sub Kegiatan
	Pengawasan dan penelitian pemberian rekomendasi teknis perijinan atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan sumber air permukaan umum (APU)	13	Dokumen	16	Dokumen
	Pengelolaan Hidrologi/Hidrometri dan data/informasi sumber daya air	30 13 9	Dokumen Pos AWLR Pos ARR	35 23 19	Dokumen Pos AWLR Pos ARR
	Keg. Program WISMP – II	9	Dokumen	12	Dokumen
6.	Tercapainya peningkatan ketrampilan SDM dalam melaksanakan pengelolaan SDA pada Dinas	66	%/	72	%/
		27	Dok	37	Dok



Laporan Kinerja (LK)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

No.	INDIKATOR/PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2014		REALISASI SAMPAI TAHUN 2015	
	Pengelolaan SDA Provinsi Sumut (%/Dokumen,Laporan UPT per Tahun)	10	Laporan UPT per Tahun	10	Laporan UPT per Tahun
	Program Pembinaan, Pengaturan dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air				
	Pembinaan perencanaan program dan kegiatan pembangunan pada SKPD bidang sumber daya air	4	Dokumen	7	Dokumen
	Pembinaan dan perencanaan teknis pengembangan dan pembangunan sumber daya air	1	Dokumen	2	Dokumen
	Monitoring pengawasan dan evaluasi pelaksanaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air	1	Dokumen	2	Dokumen
	Perencanaan Tehnis Pengembangan dan Pembangunan sumber daya air (FS, Studi, SID)	4	Dokumen	10	Dokumen
	Operasional untuk survey dan perencanaan kegiatan perbaikan kerusakan sarana dan prasarana SDA dan menunjang kegiatan Wadah SDA pada 10 UPT PSDA	10	Laporan UPT/ Tahun	10	Laporan UPT/ Tahun
	Penataan ketatalaksanaan dan pemberdayaan pengelola sumber daya air	-	-	1	Dokumen
	Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif				
	Kegiatan Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Utara	-	Tahun	1	Tahun
	Penyusunan profil kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Sumatera Utara	-	Lap. Kegiatan/ Dokumen	1	Lap. Kegiatan/ Dokumen
	Penguatan kapasitas Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Utara	-	Tahun	1	Tahun
	Pelatihan/Lokakarya/Workshop bagi staf Dinas PU/SDA tentang "Desain, Konstruksi dan OP Irigasi Partisipatif".	4	Kabupaten /Kota, Laporan Kegiatan	8	Kabupaten /Kota, Laporan Kegiatan
	Training of Trainer bagi staf Dinas PUP/SDA tentang "Desain, Konstruksi OP Irigasi Partisipatif"	4	Kabupaten /Kota, Laporan Kegiatan	8	Kabupaten /Kota, Laporan Kegiatan
	Pelatihan/Lokakarya bagi staf Dinas PUP/SDA tentang "Desain Irigasi Partisipatif".	4	Kabupaten /Kota, Laporan Kegiatan	8	Kabupaten /Kota, Laporan Kegiatan
	Pelatihan/Lokakarya bagi staf Dinas PUP/SDA tentang "Konstruksi Irigasi Partisipatif".	4	Kabupaten /Kota, Laporan Kegiatan	8	Kabupaten /Kota, Laporan Kegiatan
	Pelatihan/Lokakarya bagi staf Dinas PUP/SDA tentang "OP Irigasi Partisipatif".	4	Kabupaten /Kota, Laporan Kegiatan	8	Kabupaten /Kota, Laporan Kegiatan
	Pelatihan Desain Partisipatif untuk P3A/GP3A/IP3A.	4	Kabupaten /Kota, Laporan Kegiatan	8	Kabupaten /Kota, Laporan Kegiatan
	Pelatihan Konstruksi Partisipatif untuk P3A/GP3A/IP3A.	4	Kabupaten /Kota, Laporan Kegiatan	8	Kabupaten /Kota, Laporan Kegiatan



No.	INDIKATOR/PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA PADA		REALISASI SAMPAI	
		TAHUN 2014		TAHUN 2015	
	Pelatihan O&P Jaringan Irigasi Partisipatif untuk P3A/GP3A/IP3A.	4	Kabupaten /Kota, Laporan Kegiatan	8	Kabupaten /Kota, Laporan Kegiatan
	Pelatihan O&P Petugas Juru dan Pengamat Jaringan Irigasi Dinas PSDA	4	Kabupaten /Kota, Laporan Kegiatan	8	Kabupaten /Kota, Laporan Kegiatan
	Pemilihan petugas OP Teladan Tingkat Provinsi	-	Tahun	1	Tahun

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumut

Tahun 2014 Capaian Indikator Kinerja “**Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan Kelembagaan Pengelola Irigasi (SKPD,KOMIR, P3A, GP3A, IP3A)**”, Pada Indikator Kinerja Utama ini adalah merupakan program/kegiatan muatan kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara, dan ternyata pada tahun 2014 belum ada kegiatan yang dilaksanakan melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara karena program ini merupakan program baru.

Pencapaian kinerja menunjukkan dari 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh Indikator) yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah 6 indikator berhasil mencapai **kinerja sangat baik (100% - 80%)** dan **1 indikator mencapai kinerja baik (79,99% - 60,00%)**.

Untuk perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 per indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 68
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013.

No.	INDIKATOR/PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2013		REALISASI SAMPAI TAHUN 2014	
1.	Optimalisasi Jaringan Irigasi (%)	60,00	%	61,31	%
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				
	O&P jaringan irigasi (1.000 ha – 3.000 ha) dan lintas Kab/Kota pada UPT PSDA	73.318	Ha	75.201	Ha
	Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi pada DI.				
	7) <i>Bangunan Irigasi</i>	28	<i>bh</i>	18	<i>bh</i>
	8) <i>Peningkatan saluran, pasangan/tembok penahan</i>	9.700	<i>m'</i>	12.122	<i>m'</i>
	9) <i>Normalisasi</i>	7.900	<i>m'</i>	1.200	<i>m'</i>
	Keg. Program WISMP-II	1	Kegiatan	-	-
	Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan O&P Jaringan Irigasi dan Rawa	1	Tahun	1	Tahun
	Konsultasi O&P Pengelolaan SDA	1	Laporan Kegiatan	1	Laporan Kegiatan
	Koordinasi Pembina P3A untuk Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A	1	Tahun	-	-
2.	Optimalisasi Jaringan Rawa (%)	35			
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				
	O&P jaringan rawa (1.000 ha – 3.000 ha) dan lintas Kab/Kota pada UPT PSDA	55.232	Ha	52.832	Ha
	Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur Rawa pada DR.				
	10) <i>Bangunan Rawa</i>	3	<i>bh</i>	9	<i>bh</i>
	11) <i>Normalisasi</i>	39.860	<i>m'</i>	7.000	<i>m'</i>
3.	Tersedianya sumber air baku pada daerah kekurangan air di musim hujan dalam bentuk Waduk / Embung / Situ-situ (bh)				
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku				
	Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana air baku	7	Unit	1	Unit
4.	Meningkatnya kestabilan tebing atau pantai dan kelancaran aliran air sungai serta semakin stabilnya alur sungai terhadap daya rusak air dan berkurangnya luasan genangan banjir (%)				
	Program Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai				
	Perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan E & P sungai pada Provinsi Sumatera Utara	1	Tahun	1	Tahun
	E & P sungai dan bangunan sungai dan pantai pada 10 UPT PSDA	10	UPT/Tahun	10	UPT/Tahun
	Monitoring dan evaluasi kerusakan infrastuktur sumber daya air akibat bencana alam	1	Tahun	1	Tahun
	Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan pantai				
	<i>Perkuatan Tebing</i>	3.810	<i>m'</i>	3.089	<i>m'</i>
	<i>Normalisasi / Tanggul Banjir</i>	106.200	<i>m'</i>	36.300	<i>m'</i>
	<i>Bangunan Air</i>	0	<i>bh</i>	1	<i>Bh</i>



No.	INDIKATOR/PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2013		REALISASI SAMPAI TAHUN 2014	
5.	Terlaksananya Kordinasi Pengelolaan SDA Provinsi Sumatera Utara dan Kordinasi Pengelola SDA pada wilayah sungai melalui kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi dan wadah lainnya (%/Dok/Keg)				
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya				
	Kegiatan wadah koordinasi/Dewan SDA Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara	3	Kegiatan	5	Kegiatan
	Kegiatan Peringatan Hari Air Sedunia Provinsi Sumatera Utara	1	Kegiatan	1	Kegiatan
	Operasional Kegiatan Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Utara	2	Kegiatan	-	-
	Pengawasan dan penelitian pemberian rekomendasi teknis perijinan atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan sumber air permukaan umum (APU)	1	Dokumen	3	Dokumen
	Pengelolaan Hidrologi/Hidrometri dan data/informasi sumber daya air	1	Dokumen	5	Dokumen
	Keg. Program WISMP- II	1	Dokumen	2	Dokumen
6.	Tercapainya peningkatan ketrampilan SDM dalam melaksanakan pengelolaan SDA pada Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Sumut (%/Dokumen,Laporan UPT per Tahun)				
	Program Pembinaan, Pengaturan dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air				
	Pembinaan perencanaan program dan kegiatan pembangunan pada SKPD bidang sumber daya air	3	Dokumen	1	Dokumen
	Pembinaan dan perencanaan teknis pengembangan dan pembangunan sumber daya air	1	Dokumen	1	Dokumen
	Monitoring pengawasan dan evaluasi pelaksanaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air	1	Dokumen	1	Dokumen
	Penyusunan Detail Engineering Design (DED)	-	-	1	Dokumen
	Studi	-	-	2	Dokumen
	Survey Investigasi Design	-	-	1	Dokumen
	Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai	2	Kegiatan	-	-
	Operasional untuk survey dan perencanaan kegiatan perbaikan kerusakan sarana dan prasarana SDA dan menunjang kegiatan Wadah SDA pada 10 UPT PSDA	10	Laporan UPT/ Tahun	10	Laporan UPT/ Tahun
Penataan ketatalaksanaan dan pemberdayaan pengelola sumber daya air	1	Kali	-	-	

Sumber : Dinas PSDA Prov. Sumut

Capaian Indikator Kinerja

Dokumen dan Regulasi Perencanaan KSP (*Kawasan Strategis Provinsi*)



Indikator kinerja Dokumen dan Regulasi Perencanaan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dicapai dengan melakukan Bantuan Teknis penyusunan RDTR, peraturan zonasi dan Penyusunan kajian alokasi kebutuhan ruang dalam pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Utara.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang disusun dengan 2 (dua) regulasinya adalah Kawasan Agropolitan dataran Tinggi dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun-Batubara-Asahan.

Tabel 69
Capaian Indikator Kinerja Dokumen dan
Regulasi Perencanaan KSP (*Kawasan Strategis Provinsi*)

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)
	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
Dokumen dan regulasi perencanaan KSP	2	Dokumen	2	Dokumen	100%

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Prov. Sumut

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun. 2014 :

Capaian Indikator kinerja Regulasi Daerah Terhadap Pengendalian Ruang dengan target kinerja 1 regulasi dicapai dengan dengan melakukan penyusunan Regulasi mekanisme persetujuan subtransi dan evaluasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Capaian Indikator kinerja Dokumen dan Regulasi Perencanaan Kawasan Strategis Provinsi dicapai dengan dengan melakukan Bantuan Teknis penyusunan RDTR, peraturan zonasi dan Penyusunan kajian alokasi kebutuhan ruang dalam pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Utara. 2 Kawasan



Strategis Provinsi yang disusun regulasinya adalah PKW Dairi dan Padang Sidempuan.

Tabel 70
Capaian Kinerja Dokumen dan Regulasi Perencanaan KSP 2 Tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun 2014					Tahun 2015				
	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)
	Vol	Sat	Vol	Sat		Vol	Sat	Vol	Sat	
Kinerja Dokumen dan Regulasi Perencanaan KSP	2	Dok	2	Do	100%	2	Dok	2	Do	100%

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Prov. Sumut

Kinerja tahun 2014 dan tahun 2015, menunjukkan hasil yang positif dan sangat baik. Hal ini dikarenakan target kinerja dapat dicapai.

Capaian Indikator Kinerja

Regulasi Daerah terhadap Pengendalian Ruang (Regulasi)



Indikator kinerja Regulasi Daerah Terhadap Pengendalian Ruang dengan target kinerja 1 regulasi dicapai dengan dengan melakukan penyusunan Regulasi mekanisme persetujuan sub tansi dan evaluasi Rencana Tata Ruang Kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi 100 %.

Tabel 71
Capaian Indikator Regulasi Daerah terhadap Pengendalian Ruang (Regulasi)

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)
	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
Regulasi Daerah terhadap Pengendalian Ruang (Regulasi)	1	Regulasi	1	Regulasi	100%

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Prov. Sumut

Provinsi Sumatera Utara telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang RTRW Provsu Tahun 2003 – 2018. Saat ini Perda dimaksud sedang direvisi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta



untuk mengakomodir perkembangan terkini. Proses penyusunan dan pembahasan revisi RTRW Provsu tersebut telah dimulai pada tahun 2008 dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pada Juli 2010 Gubernur telah menyampaikan Raperda RTRW Provsu ke DPRD Provsu. Kemudian DPRD Provsu membentuk Badan Legislasi Daerah (Balegda) dan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Setelah melalui Balegda, selanjutnya DPRD Provinsi Sumatera Utara membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dimana saat ini Raperda RTRW Provsu dimaksud sedang dibahas oleh Pansus Tata Ruang.

Kegiatan Pembahasan dengan Pansus Tata Ruang DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011 dilakukan dengan mengadakan pertemuan/konsultasi publik ke kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara guna membahas hal-hal untuk dijadikan masukan maupun muatan terhadap substansi dari materi draft Raperda RTRW Provsu. Kabupaten/kota yang berjumlah 33 tersebut kemudian dibagi ke dalam 6 (enam) zona dan masukan-masukan yang didapatkan telah didokumentasikan untuk dibahas bersama Pansus RTRW DPRD Provinsi Sumatera Utara, tenaga ahli dan BKPRD Provinsi Sumatera Utara untuk dimuat di draft Raperda RTRW Provinsi Sumatera Utara. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2013 bersama Panitia Khusus Tata Ruang DPRD Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan dan menghasilkan Persetujuan Bersama antara Gubernur dengan DPRD Nomor 07/K/2013 dan 188.44/669/KPTS/2013 Tanggal 9 September 2013 tentang persetujuan bersama terhadap 4 (empat) rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2033, Raperda tentang PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara, Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah dan Raperda Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

Mempedomani amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, khususnya pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa Rancangan Peraturan



Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Gubernur, terlebih dahulu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan Rancangan Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2034, yang telah mendapat kesepakatan Bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, tanggal 6 November 2013 kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Selanjutnya disampaikan bahwa menindaklanjuti hal tersebut, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara, oleh Ditjen. Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI tanggal 16 November 2013 di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah diterbitkan hasil Evaluasi Raperda RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2034 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 650-1650 Tahun 2014.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 579 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, sebagai rangkaian proses revisi Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, maka telah dilakukan proses integrasi Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 579 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara ke dalam Rencana Pola Ruang Raperda RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2034 serta ke dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk memenuhi kebutuhan akan pusat data geospasial di Provinsi Sumatera Utara, sejak Tahun 2012 telah dimulai pembangunan Jaringan Pusat Data dan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Terkait status legalisasi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota, 16 (enam belas) Kabupaten/Kota telah memperdakan RTRW nya. Status legalisasi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut ini :



Tabel 72
Status Legalisasi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN / KOTA	STATUS
1	Kota Medan	PERDA NO. 13 TAHUN 2011
2	Kota Binjai	PERDA NO. 12 TAHUN 2011
3	Kota Gunung Sitoli	PERDA NO. 12 TAHUN 2012
4	Kabupaten Simalungun	PERDA NO. 10 TAHUN 2012
5	Kota Pematangsiantar	PERDA NO. 1 TAHUN 2013
6	Kota Tebing Tinggi	PERDA NO. 4 TAHUN 2012
7	Kota Tanjung Balai	PERDA NO. 2 TAHUN 2013
8	Kabupaten Serdang Bedagai	PERDA NO. 12 TAHUN 2013
9	Kabupaten Batubara	PERDA NO. 10 TAHUN 2013
10	Kabupaten Tapanuli Tengah	PERDA NO. 8 TAHUN 2013
11	Kabupaten Langkat	PERDA NO. 9 TAHUN 2013
12	Kabupaten Asahan	PERDA NO. 12 TAHUN 2013
13	Kabupaten Nias	PERDA NO. 1 TAHUN 2014
14	Kabupaten Dairi	PERDA NO. 7 TAHUN 2014
15	Kota Padangsidimpuan	PERDA No. 4 TAHUN 2014
16	Kabupaten Nias Utara	PERDA No. 1 TAHUN 2015
17	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
19	Kabupaten Nias Barat	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
20	Kabupaten Nias Selatan	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
21	Kota Sibolga	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
22	Kabupaten Labuhan Batu	Di Biro Hukum
23	Kabupaten Pakpak Bharat	Evaluasi Teknis
24	Kabupaten Mandailing Natal	Evaluasi Teknis
25	Kabupaten Humbang Hasundutan	Evaluasi Teknis
26	Kabupaten Tapanuli Utara	Evaluasi Teknis
27	Kabupaten Toba Samosir	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
28	Kabupaten Samosir	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
29	Kabupaten Padang Lawas	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
30	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
31	Kabupaten Tapanuli Selatan	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
32	Kabupaten Karo	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
33	Kabupaten Deliserdang	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Capaian Indikator Kinerja

Luas RTH (*Ruang Terbuka Hijau*) Perkotaan (%)



Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Dan Pengembangan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Tujuan meningkatkan kuantitas ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan di provsu. Indikator sasaran ini adalah Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan. Kegiatan mendukung indikator ini adalah penyusunan identifikasi ruang terbuka hijau di kabupaten kota.

Tabel 73
Capaian Indikator Luas RTH (*Ruang Terbuka Hijau*) Perkotaan (%)

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)
	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
Luas RTH (<i>Ruang Terbuka Hijau</i> Perkotaan (%))	12	%	1,06	%	8,83%

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Prov. Sumut

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun. 2014 :

Perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 59, dengan penjelasan bahwa Tahun 2014 dilaksanakan kajian ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dilaksanakan di 4 (empat) Kota yaitu Medan, Binjai, Pematang Siantar dan Tanjung Balai. Pada 4 kawasan tersebut luas Ruang Terbuka Hijau adalah 8,2 %, sehingga persentase kinerja adalah $8,2 / 11 \times 100 \% = 74,5 \%$ atau pada **Kategori BAIK**. Pada tahun 2014 kegiatan kajian ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dilaksanakan di 4 (empat) Kota yaitu Medan, Binjai, Pematang Siantar dan Tanjung Balai. Pada tahun 2015 kajian dilakukan di 3 (tiga) kota yaitu P. Sidempuan, Sibolga dan Tebing Tinggi. Luas 7 (tujuh) kota tersebut adalah 67.465 Ha. Dari hasil studi diketahui luas RTH adalah 716,55 Ha. Bila dibandingkan dengan luas wilayah kota tersebut adalah 1,06 %. Target luas ruang terbuka hijau tersebut belum dapat dicapai karena belum tersedia kegiatan untuk menambah luasan RTH.



Tabel 74
Capaian Indikator Luas RTH (*Ruang Terbuka Hijau*) Perkotaan (%) 2 Tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun 2014					Tahun 2015				
	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)
	Vol	Sat	Vol	Sat		Vol	Sat	Vol	Sat	
Luas RTH (<i>Ruang Terbuka Hijau</i>) Perkotaan (%)	11	%	8,2	%	74,5	12	%	1,06	%	8,83

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Prov. Sumut

Kendala dan Permasalahan :

1. Kondisi kinerja pada bidang tata ruang banyak dipengaruhi oleh belum finalnya proses penyesuaian Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara yang sedang dikaji dan revisi khususnya pada masalah hutan dan kawasan hutan. Sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi. Dengan terjadinya pemekaran daerah mendorong meningkatnya pemanfaatan ruang, berakibat pada terjadinya alihfungsi kawasan. Untuk itu diperlukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Permasalahan dalam bidang perkembangan perkotaan, permasalahannya adalah perkembangan perkotaan yang tidak seimbang antara kota-kota besar menengah dan kecil, memburuknya kualitas fisik kawasan perkotaan dan menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan karena keterbatasan pelayanan dasar perkotaan.
3. Permasalahan pokok air bersih adalah peningkatan air bersih di perkotaan dan perdesaan khususnya penduduk miskin yang berjalan lambat, tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) yang belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi. Terhadap air limbah permasalahannya adalah masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (sistem sewerege) di perkotaan, pengolahan lumpur



tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang terbangun.

4. Pada permasalahan sampah dan drainase meliputi; masih belum efektifnya penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam upaya mengurangi volume sampah dari sumbernya, masih lemahnya kelembagaan institusi yang mengelola sampah dan belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sampah terpadu, tidak berfungsinya saluran drainase sebagai patus air hujan, penanganan masalah banjir perkotaan masih secara parsial dan tidak konseptual karena keterbatasan dokumen perencanaan induk dan perencanaan detail drainase yang seharusnya dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak.
5. Permasalahan bidang perumahan dan permukiman adalah rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau, belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman serta sistem pembiayaan perumahan, terbatasnya akses masyarakat beropenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak, dan lemahnya akses masyarakat terhadap sumber daya perumahan.
6. Dalam hal bangunan gedung dan jasa konstruksi permasalahannya adalah masih rendahnya penegakan aturan keselamatan bangunan, dan masih perlunya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung negara.



Sasaran Strategis- 5 :

“Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat yang berkeadilan”

Tabel 75
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tercapainya Kondisi Makro Sosial :			
▪ Kemiskinan (%)	9,5	10,79	11,9
▪ Pengangguran (%)	5,69	6,71	20,7
▪ Elastisitas Kesempatan Kerja	3,6		
▪ Penciptaan Wirausahawan Baru (Orang)	12.000	150	12,5
2. Perumahan dan Permukiman :			
▪ Luas Kawasan Kumuh (Ha)	1.392	1.575	88
▪ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	1.500	1.045	69,7
3. Bangunan Gedung :			
▪ NSPM (<i>Norma Standar Pedoman Manual</i>) Bangunan Gedung	3 dok.	2 dok.	66,6
▪ Bangunan Gedung Pemerintah	1	0	0
4. Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan :			
▪ Peningkatan Akses Air Minum Perpipaan (%)	22,25	18,42	82,7
▪ Persentase Penanganan Sampah (<i>Sampah terangkut ke TPA</i>)	40	0	0
▪ Cakupan pelayanan Air Limbah Perpipaan (KK)	27,150	18.682	68,81
▪ Jaringan Drainase Dengan Kondisi Baik (m)	326,174 m	222.305 m	68,16
5. Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman :			
▪ Panjang Jalan Lingkungan yang Ditangani (km)	10 km	11,337 km	113,37
▪ Panjang Jalan Poros Pendukung Ekonomi Pedesaan (km)	15 km	12,15 km	80

Sebagaimana Tabel di atas, untuk pencapaian kinerja sasaran strategis ke-5, akan dapat dilihat di masing-masing indikator kinerjanya, yaitu sebagai berikut :



Capaian Indikator Kinerja

Tercapainya Kondisi Makro Sosial :



Dalam rangka pencapaian kinerja pada indikator ini, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di bawah ini yang mejadi indikator kinerja pendukungnya, yaitu :

1. Kemiskinan (%)



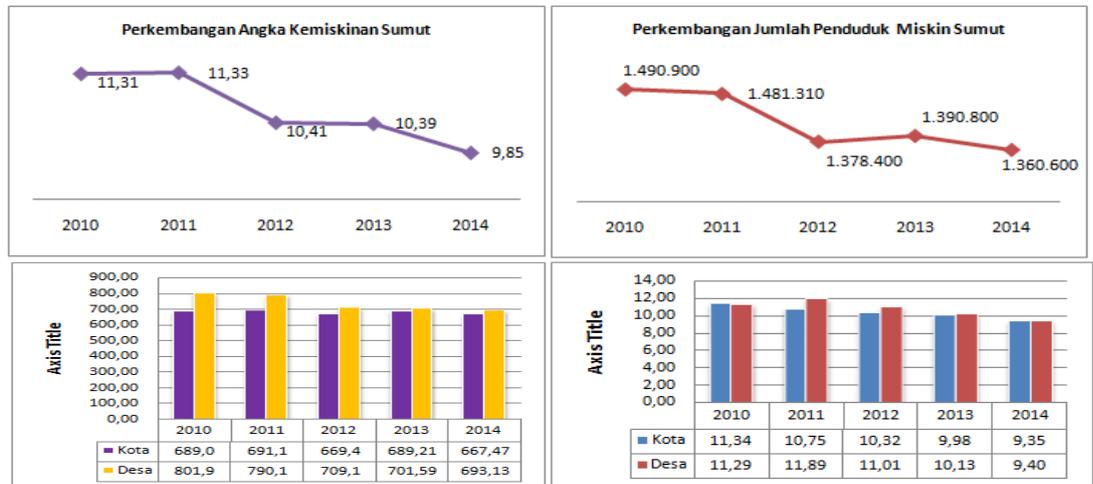
Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sejak tahun 2010 – 2014 mengalami perkembangan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan menurunnya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Pada tahun 2010, angka kemiskinan di Sumatera Utara mencapai 11,31 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 1.490.900 orang. Kondisi ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2014, angka kemiskinan Sumatera Utara telah mencapai 9,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.360.600 orang. Untuk sebaran penduduk miskin di Sumatera Utara, cenderung terfokus di wilayah perkotaan. Pada tahun 2010 sebaran penduduk miskin di Sumatera Utara wilayah perkotaan mencapai persentase sebesar 11,34 persen lebih rendah dari wilayah perdesaan sebesar 11,29 persen.

Kondisi ini terus mengalami penurunan dengan tetap terfokus pada wilayah perkotaan. Namun pada tahun 2014, terjadi perpindahan fokus kemiskinan di Sumatera Utara, dimana wilayah perdesaan menjadi fokus penduduk miskin dengan capaian sebesar 9,40 persen di atas capaian fokus penduduk miskin wilayah perkotaan sebesar 9,35 persen. Hal ini merupakan bagian percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dimulai dari daerah-daerah kantong kemiskinan di desa-desa.

Berikut akan digambarkan angka jumlah kemiskinan kondisi tahun 2010-2014 di Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana pada grafik berikut ini.



Grafik 36
Perkembangan Angka dan Jumlah Penduduk Miskin
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014



Sumber: : Publikasi BPS

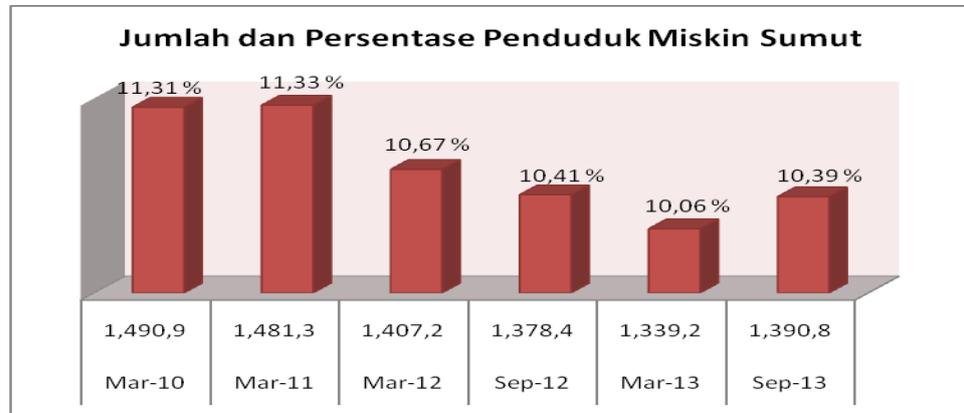
Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada Maret 2013 sebanyak 1.339.200 orang (10,06 persen), angka ini berkurang sebanyak 39.200 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin September 2012 yang berjumlah 1.378.400 orang (10,41 persen). Untuk melihat perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik. 37
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010-2013



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Grafik. 38
Jumlah dan Perse ntase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010-2013



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin Sumatera Utara cenderung positif (mengalami penurunan) dari tahun 2010 hingga tahun 2012, yaitu dari 1.490.900 jiwa (11,31 persen) pada tahun 2010 menjadi 1.390.800 jiwa (10,39 persen) pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan adanya trend negatif yang terjadi dari pada tahun 2013 hal ini dikarenakan terjadinya inflasi tinggi hingga 5,02 persen sebagai akibat dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Bulan Juni 2013 yang juga diiringi dengan kenaikan harga bahan makanan pokok secara nasional.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan September 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.360.600 orang atau sebesar 9,85 persen terhadap jumlah total penduduk. Sementara itu dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara bahwa kondisi ini lebih buruk jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2014. Pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 1.286.700 orang atau sebesar 9,38 persen. Berarti pada September 2014 ada peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 73.900 orang serta peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,47 point atau 9,87 %.



Jumlah penduduk miskin Sumatera Utara yang berada di daerah perkotaan pada September 2014 sebanyak 667.500 orang (9,81 persen) dan di daerah pedesaan sebanyak 693.100 orang atau 9,89 %. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2014 sampai dengan September 2014 diduga berkaitan dengan beberapa faktor antara lain :

- 1) Inflasi selama periode Maret 2014–September 2014 meningkat jadi 2,83 persen, dari 1,48 persen pada periode sama tahun 2013. Kemudian faktor Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami penurunan yaitu dari 101,31 pada Maret 2014 menjadi 99,79 pada September 2014.
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan yaitu dari 5,95 persen pada Pebruari 2014 menjadi 6,23 persen pada Agustus 2014. Pertumbuhan ekonomi melambat yaitu dari 5,64 persen pada Triwulan I 2014 menjadi 5,20 persen pada Triwulan III 2014. Ia menyebut garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
- 3) Pada September 2014 garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp330.663 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp349.372 per kapita per bulan, dan untuk daerah pedesaan sebesar Rp312.493 perkapitaperbulan. Dibanding Maret 2014, garis kemiskinan Sumatera Utara pada September 2014 naik 3,85 persen. Garis kemiskinan di perkotaan naik 3,29 persen dan garis kemiskinan di pedesaan naik 4,46 persen. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.



Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan pada periode Maret 2014 sampai dengan September 2014.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,467 pada Maret 2014 menjadi 1,710 pada bulan September 2014. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,373 menjadi 0,450 pada periode yang sama, dimana kenaikan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Tingkat keparahan kemiskinan di pedesaan lebih besar dibanding perkotaan. Ternyata rata-rata pengeluaran penduduk miskin di pedesaan lebih jauh dari garis kemiskinan dibanding perkotaan, begitu juga tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di pedesaan lebih lebar dibanding perkotaan. Untuk mengukur kemiskinan, dari metode yang lazim digunakan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu :

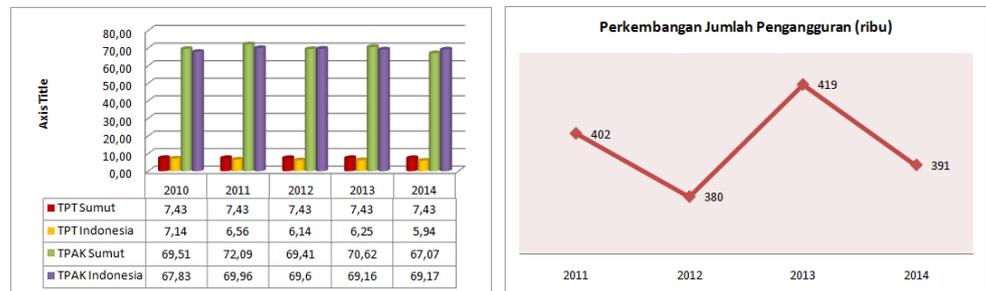
- 1) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan
- 2) Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM).

2. Pengangguran



Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara, telah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2014 yang mncapai 67,07 persen, sebesar 7,43 persen adalah pengangguran terbuka. Kondisi capaian ini berada di bawah capaian nasional pada tahun yang sama sebesar 6,25 persen, Sehingga hal ini juga menggambarkan bertambahnya jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Dimana pada tahun 2013 jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara sebesar 419.202 jiwa mengalami peningkatan menjadi 391.202 jiwa pada tahun 2014, sebagaimana grafik berikut :

Grafik 39
Kondisi Ketenaga Kerjaan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2010-2014

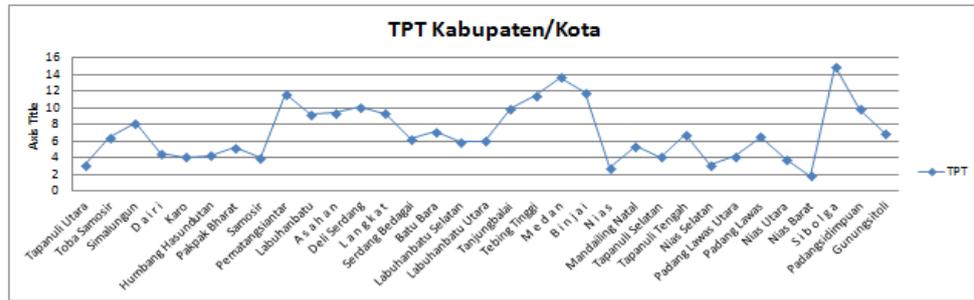


Sumber :RKPD Pemprov Sumut Tahun 2016

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dicapai oleh kabupaten Nias Barat sebesar 1,87%. Kota Medan sebagai ibukota provinsi memiliki nilai TPT sebesar 13,68%, atau lebih tinggi dibanding nilai TPT Provinsi Sumatera Utara sebesar 7.07%. Hal ini diperkirakan erat kaitannya dengan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tentunya cukup didominasi oleh kota besar seperti Medan, termasuk dari sisi investasi dimana Kota Medan sebagai pusat investasi terbesar sebagai ibukota provinsi dengan berbagai jenis kegiatan usaha.



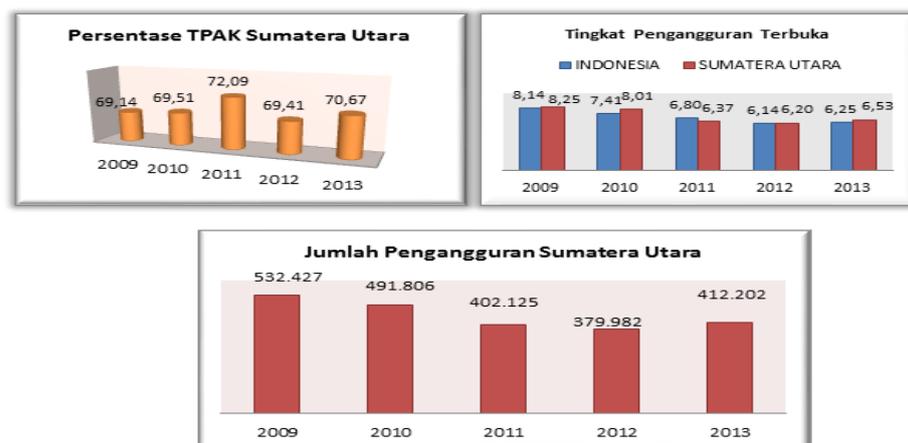
Grafik 40
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Sumut dalam Angka. BPS

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara, telah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2013 yang mncapai 70,67 persen, sebesar 6,53 persen adalah pengangguran terbuka. Kondisi capaian ini berada di bawah capaian nasional pada tahun yang sama sebesar 6,25 persen, Sehingga hal ini juga menggambarkan bertambahnya jumlah pengangguran diProvinsiSumateraUtara.Dimana pada tahun 2012 jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara sebesar 379.982 jiwa mengalami peningkatan menjadi 412.202 jiwa pada tahun 2013, sebagaimana grafik berikut :

Grafik 41
Tingkat Penangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2009-2013



Sumber : RKPD Prov Sumut, Tahun 2016

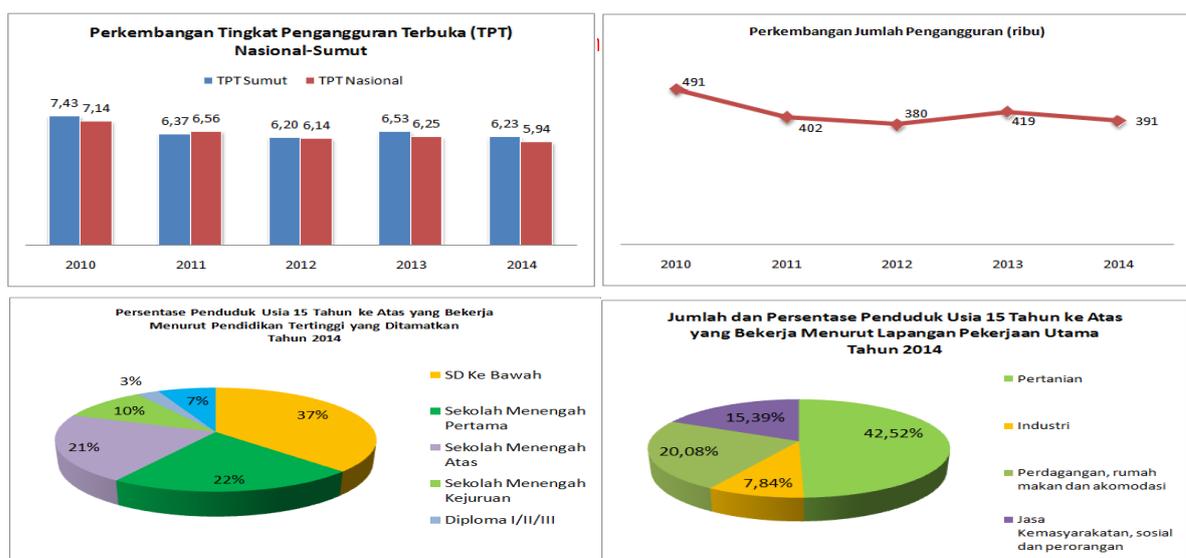
3. Elastisitas Kesempatan Kerja



Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja) sungguh tidak mempunyai pekerjaan) secara umum capaian Sumatera Utara berada di atas Nasional. Sejak tahun 2010 – 2014 Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara terus berada di atas capaian Nasional.

Hingga tahun 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara telah mencapai 6,23 persen, berada di atas nasional pada tahun yang sama sebesar 5,94 persen dengan jumlah pengangguran mencapai 391 ribu orang, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2013) yang mencapai 419 penganggur. Dominasi pekerjaan bila dilihat dari besaran jumlah penduduk usia 15 tahun yang bekerja pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) mencapai 37 persen, Sekolah Menengah Pertama 22 persen, Sekolah Menengah Atas 21 persen, Sekolah Menengah Kejuruan 10 persen dan Perguruan Tinggi 10 persen dengan fokus pekerjaan pada sektor pertanian yang mencapai 42,52 persen. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi (20,08 persen), sektor Jasa 15 persen dan Industri 7 persen.

Grafik 42
Perkembangan Kondisi Ketenaga Kerjaan Provinsi Sumatera Utara



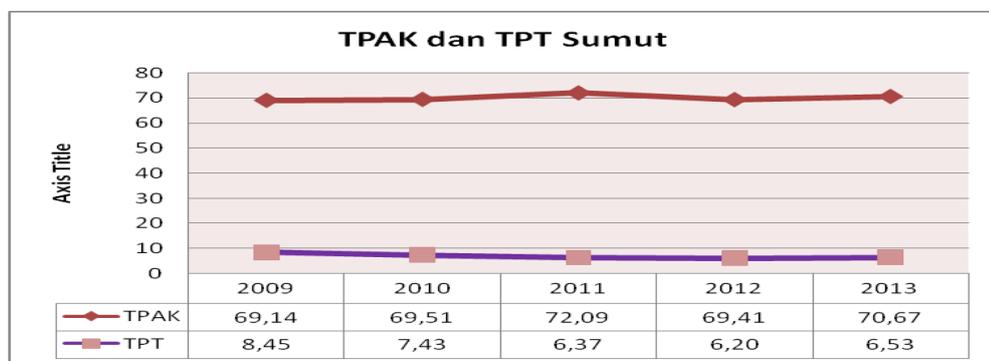
Sumber: BPS dan BAPPEDA Prov. Sumut



Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja)Jumlah Angkatan Kerja di Sumatera Utara pada Agustus 2012 sebanyak 6,13 juta orang, terdiri dari 5,75 juta orang bekerja, dan 0,38 juta orang penganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara pada Agustus 2012 mencapai 6,20 persen, mengalami penurunan sebesar 0,17 persen dibanding TPT Agustus 2011, yaitu sebesar 6,37 persen.Pada Agustus 2012, jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebesar 2,1 juta orang (36,49%), pekerja keluarga 1,09 juta orang (19,02%), berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebesar 955 ribu orang (16,61%), dan berusaha sendiri sejumlah 922 ribu orang (16,03%). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2012 sebesar 69,41 persen atau mengalami penurunan sebesar 2,68 persen bila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2011 sebesar 72,09 persen.Persentase pekerja formal di Sumatera Utara meningkat dari 38,51 persen pada Agustus 2011 menjadi 40,09 persen pada Agustus 2012.

Grafik 43

Perkembangan Kondisi Ketenaga Kerjaan Sumut 2009-2013



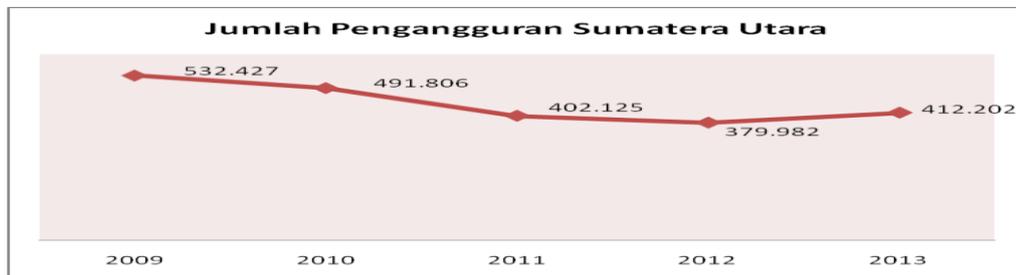
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Perkembangan ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara kembali menunjukkan perbaikan. Seperti tergambar dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menunjukkan kenaikan dari 69,41% pada tahun 2012 menjadi 70,67% pada tahun 2013. Namun berbanding terbalik dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami kenaikan dari 6,20% pada



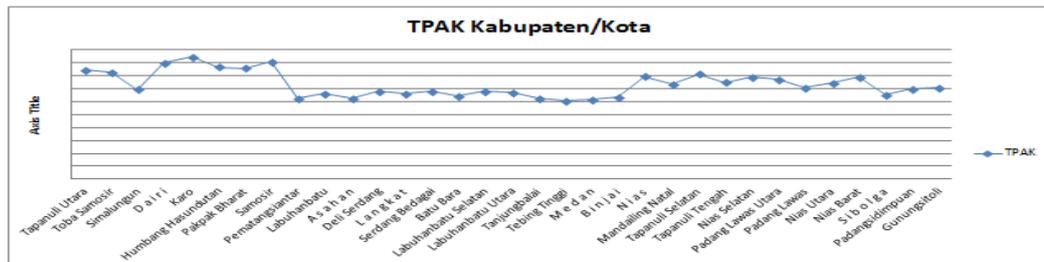
tahun 2012 menjadi 6,53% pada tahun 2013. Trend positif dari naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ternyata tidak dibarengi dengan trend positif dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara. Karena sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2013 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan dari 6,20 persen pada tahun 2012 menjadi 6,53 persen pada tahun 2013, dengan besaran jumlah pengangguran mencapai 412.202 jiwa sebagaimana grafik berikut :

Grafik 44
Perkembangan Jumlah Pengangguran di Sumatera Utara
Tahun 2009-2013



Sumber : Data Statistik Nasional, BPS

Grafik. 45
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

4. Penciptaan Wirusahawan Baru



Capaian kinerja tidak tercapai maksimal sebagaimana target sebesar 12.000, hanya tercapai 150. Capaian ini diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu Tahun 2015.

Capaian Indikator Kinerja

Perumahan dan Permukiman



Indikator kinerja Perumahan dan Permukiman, memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

1. Luas kawasan kumuh



Target kinerja pada Indikator Kinerja “**Luas kawasan kumuh**” adalah pengurangan kawasan kumuh. Dari tahun 2014 s/d 2019 ditargetkan pengurangan luas kawasan kumuh 200 Ha setiap tahunnya. Pada tahun 2014 pengurangan luas kawasan kumuh adalah 166 Ha. Realisasi kinerja tahun 2015 adalah 49,52 Ha atau sama dengan 24,76 % dari target kinerja pengurangan luas kawasan kumuh 200 Ha Untuk mencapai ini telah dilaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, program ini belum memberikan outcome langsung terhadap pengurangan luas kawasan kumuh. Pengurangan luas kawasan kumuh merupakan kontribusi dari Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman dengan asumsi setiap panjang jalan lingkungan yang terbangun dapat mengurangi luas kawasan kumuh 40 M².

Tabel 76
Capaian Indikator Kinerja Luas kawasan kumuh

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)
	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
Luas kawasan kumuh	1.392	Ha	1.575	Ha	88%

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Prov. Sumut

Capaian Kinerja Tahun 2014 :

Pengurangan kawasan kumuh menjadi 1.592 ha atau berkurang sejumlah 200 Ha. Untuk mencapai ini telah dilaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, program ini belum memberikan outcome langsung terhadap pengurangan luas kawasan kumuh. Pengurangan



luas kawasan kumuh merupakan kontribusi dari Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman sejumlah 166 Ha atau sama dengan 83 % dari target kinerja pengurangan luas kawasan kumuh.

2. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni



Dalam mencapai kinerja tersebut dilakukan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan bedah rumah dalam rangka hari keluarga nasional tahun 2015. Pelaksanaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagai stimulan penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin telah dimulai sejak tahun 2012, ditargetkan terlaksana pada 33 kabupaten / kota di Sumatera Utara.

Sejak tahun 2012 s/d 2015 total rumah tidak layak huni yang telah di rehab adalah 4.500 unit. Pada tahun 2012 dilaksanakan di 8 kabupaten / kota sejumlah 1500 unit, tahun 2013 dilaksanakan di 5 kabupaten / kota sejumlah 1400 unit, tahun 2014 dilaksanakan pada 4 kabupaten / kota sejumlah 600 unit, tahun 2015 dilaksanakan pada 6 kabupaten / kota sejumlah 1000 unit.

Pelaksanaan bedah rumah dalam rangka hari keluarga nasional tahun 2015 dilakukan bedah rumah sebanyak 45 unit. Total rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah 1045 unit, sedangkan yang target kinerja tahun 2015 adalah 1500 unit, sehingga realisasi kinerja adalah 69,67 %.

Kinerja ini tidak maksimal karena alokasi dana yang tersedia hanya Rp. 24.266.111.000,00 dari jumlah kebutuhan Rp. 35.250.000.000,00.

Tabel 77
Capaian Indikator Kinerja Rumah Tidak Layak Huni

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)
	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
Rumah Tidak Layak Huni	1.392	Ha	1.575	Ha	88%

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Prov. Sumut



Capaian Indikator Kinerja

BANGUNAN GEDUNG



Indikator kinerja Bangunan Gedung, memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

1. NSPM bangunan gedung



Dalam melaksanakan pembangunan gedung, *Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM)* dimaksudkan untuk memberikan panduan dan kemudahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang pekerjaan pembangunan gedung. Pencapaian indikator tersebut pada tahun 2014 adalah 85,71%. Pencapaian NSPM bangunan gedung tersebut pada tahun 2015 adalah 66,67% yang merupakan realisasi 2 NSPM yaitu Standart Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kab/Kota dan Data Base Bangunan Gedung Dan Rumah Negara Di Sumatera Utara.

Hal ini tidak tercapai maksimal karena ada kegiatan yang tidak terlaksana sebagai akibat penyesuaian anggaran yaitu kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan Yang Terkait Bangunan Gedung Negara Di Provsu, Pembinaan Teknis Pengelolaan Bangunan Gedung Negara Di Provinsi Sumatera Utara dan Penyusunan RTBL Koridor Kualanamu-Kayu Besar Kawasan Mebidang.

Tabel 78
Capaian Indikator Kinerja NSPM bangunan gedung

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)
	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
NSPM bangunan gedung	3	Dokumen	2	Dokumen	67%

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Prov. Sumut



Capaian Kinerja Tahun 2014 :

Terdapat satu regulasi yang tidak terlaksana yaitu Finalisasi/Regulasi Ranperda Bangunan Gedung Provsu, Kegiatan ini tidak Efektif Dilaksanakan Dengan Berakhirnya Periode Tugas DPRD Sumut tahun 2009-2014, karena Menyangkut Proses Legislasi Daerah (Prolegda) yang Melibatkan secara langsung DPRD Sumut.

2. Bangunan Gedung Pemerintah



Pencapaian indikator bangunan gedung pemerintah pada tahun 2014 adalah 1 unit atau 100 % dari target. Target indikator pada tahun 2015 adalah 1 unit. Realisasi indikator ini adalah 0 %. Hal ini disebabkan kegiatan pembangunan gedung mendukung indikator ini tidak terlaksana, karena dilakukan penghematan anggaran tahun 2015. Kegiatan mendukung indikator ini adalah Perencanaan Teknis Gedung Kantor Dan Lingkungan Dinas Penataan Ruang Dan Permukiman Provsu, Rehabilitasi Gedung PWI Provinsi Sumatera Utara, Pembangunan Islamic Center Sumatera Utara dan Rehabilitasi Gedung Sekretariat HMI Cabang Medan.

Tabel 79
Capaian Indikator Kinerja Bangunan Gedung Pemerintah

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)
	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
Bangunan Pemerintah Gedung	1	Unit	0	Unit	0%

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Prov. Sumut

Capaian Kinerja Tahun 2014 :

Pembangunan gedung Islamic Center, pembangunan konstruksi tidak terlaksana karena belum tersedianya lahan pembangunan. Kegiatan ini telah dianggarkan



sejak tahun 2012 S/d 2015 pada Dinas Tarukim, untuk perencanaan fisik, studi AMDAL dan pematangan lahan. Namun tidak dapat terlaksana karena lahan lokasi pembangunan Islamic Center masih berstatus HGU PTPN-II. Upaya untuk pengalihan aset PTPN-II menjadi lahan pembangunan Islamic Center telah dilaksanakan melalui rapat koordinasi, proses surat menyurat, peninjauan lapangan serta penyampaian koordinat lahan pertapakan.

Capaian Indikator Kinerja

Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan



Kinerja Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan, dipengaruhi oleh beberapa aspek terdiri-dari 4 (empat) yang merupakan indikator kinerja pendukungnya, yaitu :

1. Peningkatan akses air minum perpipaan



Capaian indikator tersebut didukung oleh semua sumber dana pembangunan APBD Provinsi, APBN, APBD Kabupaten/Kota dan Pihak Swasta. Kegiatan dengan sumber dana APBD Provsu diantaranya :

1. Identifikasi pelayanan air bersih,
2. Penyusunan RISPAM regional,
3. Pembangunan sarana air bersih di Kota Padang Sidempuan, Kab. Padang Lawas, Kab. Mandailing Natal
4. Pendampingan penyediaan air bersih berbasis masyarakat (pamsimas).

Tabel 80
Capaian Indikator Kinerja Peningkatan akses air minum perpipaan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)
	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
Peningkatan akses air minum perpipaan	22,25	%	18,42	%	82,79%

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Prov. Sumut



Target kinerja sesuai perjanjian kinerja dan RPJMD Provsu 2014-2019 adalah 3,5 % atau setara dengan penambahan akses air minum perpipaan untuk 109.000 KK. Pada tahun 2015 di Sumatera Utara telah dibangun akses air minum perpipaandengan potensi sejumlah 43.040 KK, dengan rincian 3.680 KK Melalui sumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara, 1.760 KK melalui kegiatan Pamsimas, 37.600 KK dengan sumber dana APBN.

Tabel 81
Capaian Indikator Kinerja Peningkatan akses air minum perpipaan

No	Indikator	Th 2014		Th 2015		
		Target	Realiasi	Target	Realiasi	Persentase
1	Peningkatan akses air minum perpipaan	3,5 %	1,79 %	3,5 %	1,38 %	39,49 %

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Prov. Sumut

Capaian kinerja Peningkatan akses air minum perpipaan tidak mencapai target karena tidak didukung oleh ketersediaan dana sesuai pagu anggaran pada Renstra Dinas Penataan Ruang dan Permukiman.

Capaian Kinerja Tahun 2014 :

Capaian kinerja diperoleh sebesar 3,5 % adalah target kinerja pembangunan bidang Air minum di Sumatera Utara sesuai RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang memperhitungkan semua sumber dana pembangunan yaitu APBD Provinsi, APBN, APBD Kabupaten/Kota dan Pihak Swasta. Target kinerja 3,5 % itu setara dengan penambahan akses air minum perpipaan untuk 109.000 KK. Pada tahun 2014 di Sumatera Utara telah dibangun akses air minum dengan potensi 4.930 KK Melalui sumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara, 4.819 KK melalui kegiatan Pamsimas, 46.400 KK dengan sumber sumber dana APBN. Untuk pembangunan yang dilakukan melalui APBD Kabupaten/Kota dan Pihak Swasta sampai dengan saat penyusunan Laporan Kinerja ini belum dapat dikompilasi.



Realisasi kinerja Peningkatan akses air minum perpipaan adalah 56.149 KK atau 51,23 %.

2. Persentase penanganan sampah (Sampah terangkut ke TPA)



Untuk kinerja Persentase penanganan sampah(sampah terangkut ke TPA) belum dapat diukur, namun sekalipun demikian perlu juga dikemukakan capaian kinerja tahun 2014 yang lalu, yaitu pada tabel di bawah ini.

Tabel 82
Capaian Indikator Kinerja Persentase penanganan sampah
(Sampah terangkut ke TPA)

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)
	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
Persentase penanganan sampah (Sampah terangkut ke TPA)	40	%	0	%	0%

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Prov. Sumut

3. Cakupan Pelayanan air limbah perpipaan.



Untuk Kinerja Cakupan layanan air limbah perpipaan, Pemernitah Provinsi Sumatera Utara, melalui Dinas Penataan Ruang dan Permukiman, melakukan :

1. Pendampingan kegiatan pembangunan sektor air limbah dari kegiatan *Metropolitan Sanitation Management and Health Project* (MSMHP)dilaksanakan di Kota Medan, Kegiatan ini dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak dari tahun 2012 s/d 2016
2. Studi Pengembangan IPAL Ajibata – Parapat.

Penambahan sambungan rumah sistem air limbah perkotaan kota Medan yang direncanakan penambahan untuk 2000 KK pada 2015, belum dapat dilaksanakan karena sistem air limbah belum selesai dibangun. Target kinerja Cakupan pelayanan air limbah perpipaan sampai dengan tahun 2015 adalah



27.150 KK dengan realisasi sambungan rumah adalah 18.682 KK atau 68,81 %, dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 83
Capaian Indikator Kinerja Peningkatan akses air limbah perpipaan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)
	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
Peningkatan akses air limbah perpipaan	27.150	KK	18.682	KK	68,81%

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Prov. Sumut

Capaian Kinerja Tahun 2014 :

Capaian realisasi pada indikator kinerja ini adalah sebesar 18.682 KK atau 68,81 %. Direncanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan MSMHP target kinerja dapat dicapai 100 %. Dalam hal capaian kinerja pada indikator kinerja ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2014 melakukan Pendampingan kegiatan Pembangunan Sektor Air Limbah dari Kegiatan Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP) dilaksanakan di Kota Medan, Kegiatan ini dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak dari tahun 2012 s/d 2015 dan Sosialisasi dan pilot projek bantuan PS air limbah dan air bersih dilaksanakan di 6 UPT Dinas Tarukim yaitu di Langkat, Samosir, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Padang Sidempuan dan Gunung Sitoli.

4. Jaringan Drainase Dengan Kondisi Baik



Untuk mencapai target kinerja jaringan drainase dengan kondisi baik didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Penyusunan masterplan drainase di kabupaten Dairi
2. Pembangunan saluran drainase pada kawasan rawan genangan di kota Medan, Kab. Deli Serdang, Pakpak Bharat, Toba Samosir, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Nias, Gunung Sitoli dengan total panjang terbangun sepanjang 11.159 Meter.



Jaringan drainase yang terbangun sampai dengan tahun 2014 adalah 211.146 meter. Hasil pembangunan drainase tahun 2015 menambah jumlah drainase dengan kondisi baik menjadi 222.305 Meter atau 68,18 % dari target kinerja. Capaian kinerja pada indikator ini, dapat diilustrasikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 84
Capaian Indikator Kinerja Drainase Dengan Kondisi Baik

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)
	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
Drainase Dengan Kondisi Baik	326.174	Meter	222.305	Meter	68,16%

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Prov. Sumut

Capaian Kinerja Tahun 2014 :

Telah dilakukan Penyusunan masterplan drainase, DED drainase dan Pembangunan saluran drainase sepanjang 24.955 Meter. Hasil pembangunan ini menambah jumlah drainase dengan kondisi baik menjadi 211.146 Meter atau 82,42 % dari target kinerja.



Sasaran Strategis- 6 :

“Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Provinsi Sumatera Utara Baik di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup”

Tabel 85
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tercapainya kondisi makro ekonomi :			
▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,28	5,10	81,21
▪ Inflasi (%)	4,25		0,00
▪ PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	501,47	571,72	114,01
▪ PDRB ADHK (Triliun Rupiah)	160,87	440,95	274,10
▪ PDRB/Kapita (ADHB) (Rp. Juta)	36,91	41,02	111,14
▪ Neraca Perdagangan (US\$.000)	5.080		0,00
▪ Nilai Investasi (PMTB)	109,42	129,6	118,44
▪ APBD Provinsi (Triliun Rupiah)	9,20	8,45	91,85
▪ ICOR (<i>Incramental Capital Output Ratio</i>)	3,25	0,40	12,31
2. Daya Saing			
▪ Lama Perijinan (Hari)	6	3	50,00
▪ Laju Pertumbuhan Ekspor	3,99	17,18	430,58
▪ Laju Pertumbuhan Impor	5,02	20,91	416,53
▪ % Investasi (PMTB)	107,42		0,00
▪ Dana Pihak Ketiga pada Perbankan	187,88		0,00
▪ IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	76,87	76,87	100,00



INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
3. Ketahanan Pangan			
1) Swasembada Pangan :			
▪ Beras (ton GKG)	2.431.444	2.463.728*	101,33
▪ Jagung (ton)	293.524	478.584	163,04
2) Angka Kecukupan Energi (Kalori/Protein) :			
▪ Energi (Kalori/Kap/Hari)	3.872	3.763	97,18
▪ Protein (gram/kap/hari)	76,98	51.01	66,26
3) Jumlah Desa Rawan Pangan	75		
4) Pola Pangan Harapan	95,00		
5) Nilai Tukar Petani (NTP) :			
▪ Peternakan	107,51	108,95	101,34
▪ Pangan	101,14	102,55	101,39
▪ Hortikultura	109,62	110,6	100,89
▪ Perikanan	117,4	97,62	83,15
4. Ketahanan Energi			
▪ Daya Listrik Terpasang	2.900 MW	2.855,3 MW	99,49
▪ Rasio Elektrifikasi	91,08 %	92 %	101,01
5. Lingkungan Hidup			
▪ Pelayanan Informasi Status Mutu Air Sungai dan Danau di Reseptor Yang Sensitif (Unit lokasi)	6	6	100
▪ Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambient (Unit Lokasi)	5	5	100
▪ Cakupan Pelayanan AMDAL (%)	100	100	100
▪ Cakupan Pelayanan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup (%)	100	100	100
▪ Publikasi dokumen status lingkungan hidup	1	1	100
▪ Dokumen pemantauan pengelolaan wilayah pesisir	1	1	100

Tabel di atas dapat menunjukkan bahwa Sasaran Strategis ke-6 yaitu **“TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING PROVINSI SUMATERA UTARA BAIK DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP”**, untuk keberhasilan maupun kegagalan pada Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja pada Tabel di atas pada umumnya capaian kinerja dari masing-masing indikator mencapai target kinerja yang ditetapkan, atau pada kategori SANGAT BAIK.



Tabel 86.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014

No	Indikator Kinerja	Th 2014			Th 2015		
		Target	Realiasi	Capaian Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
1.	Tercapainya Kondisi Makro Ekonomi :						
	▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,16	5,23	84,49	6,28	5,10	81,21
	▪ Inflasi (%)	6,25	8,17	76,49	4,25		0,00
	▪ PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	454,03	523,77	115,36	501,47	571,72	114,01
	▪ PDRB ADHK (Triliun Rupiah)	151,37	419,65	277,23	160,87	440,95	274,10
	▪ PDRB/Kapita (ADHB) (Rp. Juta)	33,32	38,05	114,20	36,91	41,02	111,14
	▪ Neraca Perdagangan (US\$.000)	4.950	4,312	87,11	5.080		0,00
	▪ Nilai Investasi (PMTB)	95,99	124,07	129,25	109,42	129,6	118,44
	▪ APBD Provinsi (Triliun Rupiah)	8,58	8,60	100,23	9,20	8,45	91,85
	▪ ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	3,50	3,50	100	3,25	0,40	12,31
2.	Daya Saing						
	▪ Lama Perijinan (Hari)	7	7	100	6	3	50,00
	▪ Laju Pertumbuhan Ekspor	2,83	2,47	87,27	3,99	17,18	430,58
	▪ Laju Pertumbuhan Impor	1,08	1,21	112,03	5,02	20,91	416,53
	▪ % Investasi (PMTB)	95,99	31,57	32,88	107,42		0,00
	▪ Dana Pihak Ketiga pada Perbankan	170,8	178,65	104,59	187,88		0,00
	▪ IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	76,35	75,57	98,87	76,87	76,87	100,00
3.	Ketahanan Pangan						
	1) Swasembada Pangan :						
	▪ Beras (ton GKG)	3.771.545	3.628.968	96,22	2.431.444	2.463.728 *	101,33
	▪ Jagung (ton)	1.529.636	1.159.698	75,82	293.524	478.584	163,04
	2) Angka Kecukupan Energi (Kalori/Protein) :						
	▪ Energi (Kalori/Kap/Hari)	3.872	3.887	100,38	3.872	3.763	97,18
	▪ Protein (gram/kap/hari)	76,58	76,18	99,47	76,98	51.01	66,26
	3) Jumlah Desa Rawan Pangan	75	27	35,06	75		
	4) Pola Pangan Harapan	84,50	84,8	100,36	95,00		
	5) Nilai Tukar Petani (NTP) :						
	▪ Peternakan	107,32 %	106,95 %	99,66	107,51	108,95	101,34
	▪ Pangan	100,74 %	99,54 %	98,81	101,14	102,55	101,39
	▪ Hortikultura	109,19 %	98,14 %	89,88	109,62	110,6	100,89
	▪ Perikanan	110,2 %	101,72 %	92,30	117,4	97,62	83,15
4.	Ketahanan Energi						
	▪ Daya Listrik Terpasang (MW)	2.500	2.855,3	114,21	2.900	2.855,3	99,49
	▪ Rasio Elektrifikasi	89,44 %	88,53 %	98,98	92 %	101,01	92 %
5.	Lingkungan Hidup						
	▪ Pelayanan Informasi Status Mutu Air Sungai dan Danau di Reseptor Yang Sensitif (Unit lokasi)	6	6	100	6	6	100
	▪ Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambient (Unit Lokasi)	5	5	100	5	5	100
	▪ Cakupan Pelayanan AMDAL (%)	100	77,78	77,78	100	100	100
	▪ Cakupan Pelayanan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup (%)	100	59,38	59,37	100	100	100
	▪ Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
	▪ Dokumen Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir	1	1	100	1	1	100



Capaian Indikator Kinerja :

PENCAPAIAN KONDISI MAKRO EKONOMI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015



Terkait dengan capaian kinerja **Kondisi Makro Ekonomi pada Tahun 2015** di Provinsi Sumatera Utara, juga ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini yang selanjutnya dapat dikatakan sebagai Sub Indikator Kinerja atau Indikator Pendukung dalam rangka keberhasilan Sasaran Strategis “**TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING PROVINSI SUMATERA UTARA BAIK DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP**”, akan diuraikan lagi menurut capaian dari indikator kinerja pendukung, yang terdiri-dari :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi



Laju pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 6,28 % sampai akhir tahun 2015 hanya tercapai sebesar 5,10 %. Salah satu penyebabnya adalah depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang sampai akhir tahun 2015 berkisar Rp. 12.000,-/\$1.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir :

Kondisi perekonomian Sumatera Utara secara umum lima tahun terakhir masih dalam kondisi baik, rata-rata masih tumbuh 6 persen dan lebih baik dari capaian nasional, sebagaimana tercermin pada tabel berikut ini :



Tabel 87
Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara
dengan Metode Baru (SNA2008) dan Tahun dasar 2010 (persen)

No	Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)			(6)	(7)	(12)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	5,88	5,3	4,7	4,4
2	B	Pertambangan dan Penggalian	-	10,72	11,9	26,0	5,3
3	C	Industri Pengolahan	-	3,22	5,6	4,8	3,0
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	-	13,87	-3,0	-3,9	3,7
5	E	Pengadaan Air	-	6,30	5,1	5,7	6,0
6	F	Konstruksi	-	8,46	6,7	7,7	6,8
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	7,13	7,9	5,6	6,9
8	H	Transportasi dan Pergudangan	-	10,24	8,2	7,4	5,7
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	8,52	6,8	7,8	6,5
10	J	Informasi dan Komunikasi	-	9,96	8,8	7,8	7,2
11	K	Jasa Keuangan	-	8,71	10,1	10,0	2,8
12	L	Real Estate	-	9,66	7,0	6,9	6,6
13	M,N	Jasa Perusahaan	-	10,68	6,0	6,7	6,8
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	8,93	2,5	3,3	6,9
15	P	Jasa Pendidikan	-	4,79	4,9	8,3	6,4
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	16,00	10,6	10,8	7,0
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	-	9,00	7,8	7,5	7,0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			-	6,66	6,45	6,08	5,23

Sumber :BPS Provsu Tahun 2015

Data pada tabel di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan dengan metode lama (2011-2013), dengan perbandingan sebagai berikut :

Tabel 88
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Tahun 2011-2013
Dengan Metode lama (Tahun dasar 2000) dan Metode Baru (SNA2008)
dengan Tahun dasar 2010 (persen)

TAHUN	METODE LAMA	METODE BARU
2011	6,63	6,66
2012	6,22	6,45
2013	6,01	6,08

Sumber :BPS Provinsi Sumatera Utara

Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 6,19 % sampai akhir tahun 2014 hanya tercapai sebesar 5,23 %. Salah satu penyebabnya adalah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal ini dikarenakan permasalahan



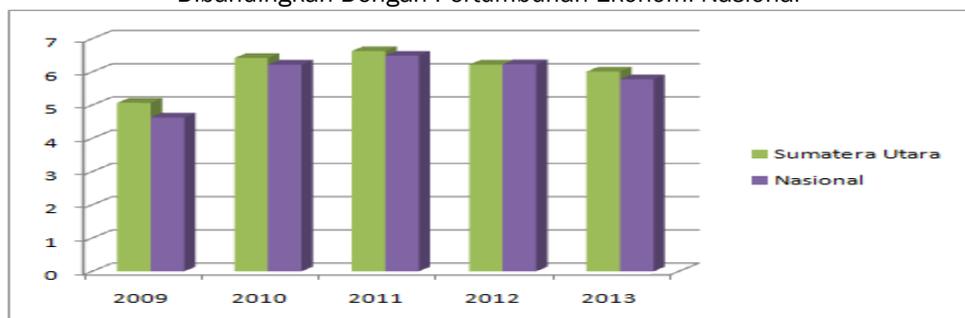
Inflasi pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 6,25%. Perekonomian Sumatera Utara tahun 2014 tumbuh sebesar 5,23 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,23 persen, diikuti oleh jasa lainnya sebesar 7,04 persen dan jasa kesehatan sebesar 7,00 persen. Struktur perekonomian Sumatera Utara menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan (23,18%); industri pengolahan (19,90%); serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (17,11%). Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terlihat sangat baik, bahkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara selalu berada diatas capaian nasional, dengan pertumbuhan rata-rata selama 2009-2013 sebesar 6,07%, sementara capaian nasional hanya sebesar 5,87%. Untuk melihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dibandingkan dengan capaian nasional dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 89
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2009-2013

wilayah	Pertumbuhan Ekonomi					rata-rata
	2009	2010	2011	2012	2013	
Sumatera Utara	5.07	6.42	6.63	6.22	6.01	6.07
Nasional	4.63	6.22	6.49	6.23	5.78	5.87

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (Data Diolah)

Grafik. 47
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013
Dibandingkan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Sumber : BPS Sumatera Utara (Data Diolah)



Jika melihat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara lima tahun terakhir berdasarkan ADHK Tahun 2009-2013 dari sisi produksi, terlihat kondisi sebagai berikut :

Tabel 90
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara per sektoral ADHK
dari Sisi produksi Tahun 2009-2013

Lapangan Usaha/Sektor	2009	2010	2011*	2012	2013
Pertanian	4.85	5.7	4.82	4.72	4.00
Pertambangan dan Penggalian	1.43	5.87	6.73	2.04	5.48
Industri Pengolahan	2.76	4.16	2.05	3.63	4.01
Listrik, Gas, dan Air Bersih	5.57	6.88	8.21	3.43	3.95
Konstruksi	6.54	6.77	8.54	6.78	7.17
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5.43	6.53	8.09	7.23	7.78
Pengangkutan dan Komunikasi	7.56	9.44	10.02	8.26	7.60
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	6.14	10.78	13.61	11.2	8.31
Jasa-jasa	6.62	6.77	8.3	7.54	7.13
Total	5.07	6.42	6.63	6.22	6.01

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (Data Diolah)

*) angka revisi

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2013 sebagian besar sektor PDRB mengalami kenaikan, akan tetapi terdapat 4 sektor yang laju pertumbuhannya lebih kecil dari tahun 2012 diantaranya sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa jasa.

Struktur PDRB

Secara garis besar sektor-sektor pembentuk PDRB dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis yakni sektor primer (pertanian dan penggalian serta pertambangan); sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih serta bangunan/konstruksi); dan sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan serta jasa-jasa).



Jika dilihat dari struktur sektor pembentuk PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2009-2013 terlihat bahwa sektor sekunder telah mulai meninggalkan sektor primer sebagai penyumbang terbesar bagi PDRB, seperti terlihat dari tabel berikut :

Tabel. 91
Struktur PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2013

SEKTOR	T A H U N				
	2009	2010	2011	2012*)	2013
Primer	24,40	24,29	23,86	23,20	22,62
Sekunder	30,57	30,26	29,84	29,70	29,35
Tersier	45,01	45,45	46,30	47,10	48,03

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Dari data tabel 89 di atas menunjukkan bahwa struktur ekonomi Provinsi Sumatera Utara ternyata lebih didominasi oleh sektor jasa/tersier yang ditunjukkan dari perkembangan kontribusi sektor tersier yakni dari tahun 2009 sebesar 45,01% meningkat terus menjadi 47,10% pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 menjadi 48,03%.

Grafik. 48
Struktur Sektor Pembentuk PDRB Sumatera Utara Tahun 2009-2013



Sumber : BPS Sumatera Utara (diolah)



Nilai dan Kontribusi PDRB

Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Utara pada periode 2009-2013 secara umum menunjukkan keadaan yang terus membaik/meningkat, hal ini dapat dilihat pada tabel perkembangan nilai dan kontribusi berbagai sektor terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 92
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2013
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Rp. miliar)

NO	Sektor	2009		2010		2011		2012		2013*)	
		(Rp.)	%								
1	Pertanian	26,526.93	23.78	28,040.20	23.60	29,390.58	23.22	30,778.67	22.89	32,010.15	22.46
2	Pertambangan & Penggalian	1,322.98	1.19	1,400.65	1.18	1,494.85	1.18	1,525.32	1.13	1,608.89	1.13
3	Industri Pengolahan	24,977.11	22.39	26,105.21	21.97	26,548.66	20.97	27,513.10	20.46	28,615.62	20.08
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	816.01	0.73	872.15	0.73	943.75	0.75	976.09	0.73	1,010.40	0.71
5	Bangunan	7,554.37	6.77	8,066.15	6.79	8,754.63	6.92	9,348.16	6.95	10,018.50	7.03
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,575.43	18.44	21,919.34	18.45	23,693.43	18.72	25,406.77	18.89	27,384.48	19.21
7	Pengangkutan & Komunikasi	10,630.44	9.53	11,633.90	9.79	12,799.43	10.11	13,856.60	10.31	14,911.54	10.46
8	Keuangan, Sewa & Js perusahaan	7,939.21	7.12	8,795.15	7.40	9,992.46	7.89	11,111.51	8.26	12,034.81	8.44
9	Jasa-Jasa	11,216.75	10.05	11,976.16	10.08	12,969.81	10.25	13,947.74	10.37	14,942.74	10.48
	PDRB	111,559.22	100.00	118,808.90	100.00	126,587.59	100.00	134,463.95	100.00	142,537.13	100.00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
Ket : *) Angka Sementara

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa secara umum struktur ekonomi pembentuk PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga konstan didominasi oleh pertanian disusul oleh sektor Industri Pengolahan, dan berturut-turut oleh sektor perdagangan, Hotel dan Restoran; jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi.



Tabel. 93
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2013
Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. miliar)

NO	Sektor	2009		2010		2011		2012		2013*	
		(Rp.)	%								
1	Pertanian	54,431.19	23.03	62,984.34	22.90	70,655.87	22.48	76,838.11	21.88	86,118.60	21.32
2	Pertambangan & Penggalian	3,229.57	1.37	3,759.75	1.37	4,341.19	1.38	4,653.32	1.33	5,252.87	1.30
3	Industri Pengolahan	55,050.58	23.29	63,013.46	22.91	70,672.28	22.48	77,484.96	22.07	87,170.66	21.58
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2,324.65	0.98	2,602.70	0.95	2,966.49	0.94	3,178.78	0.91	3,430.43	0.85
5	Bangunan	14,901.55	6.30	17,519.79	6.37	20,172.80	6.42	23,595.94	6.72	27,934.64	6.92
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	44,941.66	19.01	52,395.32	19.05	60,387.52	19.21	67,027.28	19.09	77,918.68	19.29
7	Pengangkutan & Komunikasi	21,040.75	8.90	24,907.45	9.06	28,964.29	9.21	32,854.36	9.36	38,574.73	9.55
8	Keuangan, Sewa & Js perusahaan	15,728.68	6.65	18,163.64	6.60	21,887.63	6.96	26,442.22	7.53	31,030.23	7.68
9	Jasa-jasa	24,704.99	10.45	29,709.88	10.80	34,324.37	10.92	39,061.19	11.12	46,502.22	11.51
	PDRB	236,353.62	100.00	275,056.31	100.00	314,372.44	100.00	351,136.16	100.00	403,933.06	100.00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
Ket : *) Angka Sementara

Sedangkan struktur PDRB atas dasar harga berlaku didominasi oleh sektor industri pengolahan kemudian disusul oleh sektor pertanian dan berturut-turut oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, sewa dan jasa perusahaan; pertambangan dan penggalian; dan listrik, gas dan air bersih.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terlihat sangat baik, bahkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara selalu berada diatas capaian nasional, dengan pertumbuhan rata-rata selama 2009-2013 sebesar 6,07%, sementara capaian nasional hanya sebesar 5,87%. Untuk melihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dibandingkan dengan capaian nasional dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

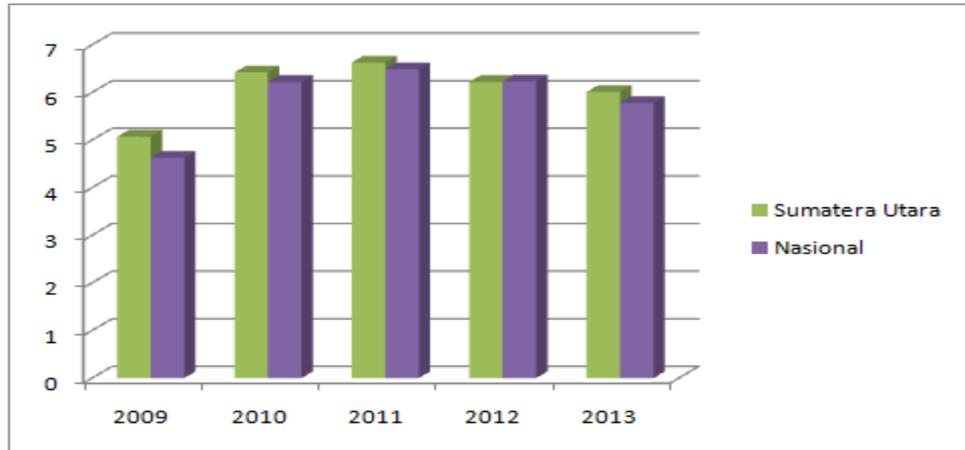
Tabel. 94
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2009-2013

wilayah	Pertumbuhan Ekonomi					rata-rata
	2009	2010	2011	2012	2013	
Sumatera Utara	5.07	6.42	6.63	6.22	6.01	6.07
Nasional	4.63	6.22	6.49	6.23	5.78	5.87

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (Data Diolah)



Grafik. 49
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013
Dibandingkan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Sumber : BPS Sumatera Utara (Data Diolah)

Jika melihat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara lima tahun terakhir berdasarkan ADHK Tahun 2009-2013 dari sisi produksi, terlihat kondisi sebagai berikut :

Tabel 95
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara per sektoral ADHK dari Sisi produksi
Tahun 2009-2013

Lapangan Usaha/Sektor	2009	2010	2011*	2012	2013
Pertanian	4.85	5.7	4.82	4.72	4.00
Pertambangan dan Penggalian	1.43	5.87	6.73	2.04	5.48
Industri Pengolahan	2.76	4.16	2.05	3.63	4.01
Listrik, Gas, dan Air Bersih	5.57	6.88	8.21	3.43	3.95
Konstruksi	6.54	6.77	8.54	6.78	7.17
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5.43	6.53	8.09	7.23	7.78
Pengangkutan dan Komunikasi	7.56	9.44	10.02	8.26	7.60
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	6.14	10.78	13.61	11.2	8.31
Jasa-jasa	6.62	6.77	8.3	7.54	7.13
Total	5.07	6.42	6.63	6.22	6.01

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (Data Diolah)
*) angka revisi



Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2013 sebagian besar sektor PDRB mengalami kenaikan, akan tetapi terdapat 4 sektor yang laju pertumbuhannya lebih kecil dari tahun 2012 diantaranya sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa jasa.

2. PDRB ADHB (Triliun Rupiah)



PDRB ADHB pada tahun 2015 tercapai sebesar Rp. 571,72 triliun dari target sebesar Rp. 501,47 triliun, sehingga terdapat Rp. 70,25 triliun pencapaian diatas target.

Tabel 96
PDRB Sumatera Utara Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 Dengan Metode Baru (SNA2008) dengan Tahun dasar 2010 (Rp. juta)

No	Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	85,561,143.96	95,856,863.79	103,933,114.9	115,194,745.9	121,435,442.7
2	B	Pertambangan dan Penggalian	3,336,340.26	4,048,821.63	4,848,020.0	6,581,443.7	6,944,808.7
3	C	Industri Pengolahan	70,540,953.80	79,947,917.24	86,171,929.7	93,241,472.5	104,224,003.8
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	501,178.84	643,052.37	641,934.1	586,207.1	514,666.3
5	E	Pengadaan Air	316,551.82	355,925.07	399,026.0	441,816.0	501,060.0
6	F	Konstruksi	38,650,891.30	44,527,253.68	51,426,256.0	60,997,621.4	71,225,774.0
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	56,555,799.54	64,308,761.08	70,891,922.7	78,324,823.4	89,596,998.2
8	H	Transportasi dan Pergudangan	14,101,567.03	16,580,077.93	19,056,202.1	22,990,245.2	25,923,438.0
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,936,756.77	7,874,972.12	9,100,935.8	10,598,775.3	12,283,315.7
10	J	Informasi dan Komunikasi	7,465,664.08	8,103,346.98	8,957,698.9	9,594,390.2	10,287,350.9
11	K	Jasa Keuangan	9,676,981.62	11,195,195.18	13,479,426.2	15,738,019.0	17,155,250.9
12	L	Real Estate	12,814,477.23	15,290,923.39	16,358,719.3	20,078,791.2	22,786,418.7
13	M,N	Jasa Perusahaan	2,711,690.37	3,181,125.34	3,646,330.4	4,224,044.0	4,836,417.7
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,212,993.02	12,990,356.75	14,786,938.0	16,427,959.7	18,832,080.3
15	P	Jasa Pendidikan	6,690,893.89	7,318,570.99	7,938,014.6	8,848,513.7	9,930,056.9
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,500,421.51	3,044,544.66	3,519,331.3	4,020,161.9	4,604,434.0
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	1,510,932.41	1,769,392.83	1,964,638.7	2,332,953.3	2,690,048.7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			331,085,237.47	377,037,101.03	417,120,438.7	470,221,983.6	523,771,565.5

Sumber :BPS Provsu Tahun 2015

Dari table di atas, diperoleh bahwa berdasarkan atas harga berlaku, PDRB Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 58,20 persen dari tahun 2010 yakni dari Rp. 331,09 triliun meningkat menjadi Rp. 523,77 triliun, atau terdapat peningkatan PDRB sebesar Rp. 192,67 triliun. Adapun kontribusi per kategori dengan memakai metode baru perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 disajikan sebagai berikut :



Tabel 97
Struktur PDRB Sumatera Utara Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014
Dengan Metode Baru (SNA2008) dengan Tahun dasar 2010 (%)

No	Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.79	25.42	24.9	24.5	23.2
2	B	Pertambangan dan Penggalian	1.06	1.07	1.2	1.4	1.3
3	C	Industri Pengolahan	21.3	21.2	20.7	19.8	19.9
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
5	E	Pengadaan Air	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6	F	Konstruksi	11.7	11.8	12.3	13.0	13.6
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.1	17.1	17.0	16.7	17.1
8	H	Transportasi dan Pergudangan	4.3	4.4	4.6	4.9	4.9
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.1	2.1	2.2	2.3	2.3
10	J	Informasi dan Komunikasi	2.3	2.1	2.1	2.0	2.0
11	K	Jasa Keuangan	2.9	3.0	3.2	3.3	3.3
12	L	Real Estate	3.9	4.1	3.9	4.3	4.4
13	M,N	Jasa Perusahaan	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6
15	P	Jasa Pendidikan	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber :BPS Provsu Tahun 2015

Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa selama lima tahun terakhir kategori pertanian merupakan penyumbang terbesar bagi pembentukan PDRB Sumatera Utara, walaupun kontribusinya semakin menurun, dimana pada tahun 2010 kontribusinya mencapai 25,79 persen, dan terus menurun menjadi hanya sebesar 23,20 persen pada tahun 2014. Adapun kategori penyumbang kedua terbesar bagi PDRB Sumatera Utara adalah Industri pengolahan dimana sama dengan kategori pertanian sumbangannya juga semakin menurun dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar 21,30 persen dan hanya sebesar 19,90 persen pada tahun 2014, sementara kategori ketiga penyumbang PDRB adalah Perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor yang sumbangannya relative stabil, hal ini terlihat dari sumbangannya pada tahun 2010 sebesar 17,1 persen dan pada tahun 2014 juga memberikan sumbangannya sebesar 17,10 persen juga.

Sementara jika melihat kondisi perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2014, berdasarkan data terakhir triwulan IV 2014, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,23 persen. Perekonomian Sumatera Utara tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku



mencapai Rp.523.771,57 milyar dan PDRB perkapita mencapai Rp.38,05 juta atau US\$3.205,8. Informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,23 persen, diikuti oleh jasa lainnya sebesar 7,04 persen dan jasa kesehatan sebesar 7,00 persen. Struktur perekonomian Sumatera Utara menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan (23,18%); industri pengolahan (19,90%); serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (17,11%).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2014, perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,20 persen, diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,10 persen; dan konstruksi sebesar 0,82.

Struktur perekonomian Sumatera Utara pada triwulan IV-2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan (21,71 persen); industri pengolahan (20,41 persen) dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (17,14 persen).

Sumber utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara Triwulan IV-2014 adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,26 persen, diikuti konstruksi sebesar 1,05 persen: dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 0,95 persen.

Adapun untuk Triwulan I 2015 perekonomian Sumatera Utara yang diukur berdasarkan kenaikan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 tumbuh sebesar 4,78 persen bila dibandingkan dengan triwulan I 2014 (YoY), hal ini melambat bila dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun 2014 yang capaiannya sebesar 5,24 persen. Berdasarkan pendekatan produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalan sebesar 12,25 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) yang tumbuh sebesar 4,91 persen.



Bila dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2014 (q-to-q) ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I 2015 meningkat 1,61 persen. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 8,38 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa netto sebesar 1,47 persen (ekspor barang dan jasa sebesar 15,89 persen dan impor barang dan jasa sebesar 14,42 persen).

Berdasarkan pendekatan produksi, tiga lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB pada triwulan I 2015 yaitu : pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,26 persen, industry pengolahan sebesar 19,37 persen serta perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,58 persen.

Dari sisi pengeluaran, diperoleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 54,17 persen, komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) sebesar 30,99 persen serta komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 6,38 persen.

Secara nominal, PDRB Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2015 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 138.019,78 milyar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 108.221,57 milyar.

Capaian Kinerja Tahun 2014 :

PDRB ADHB pada tahun 2014 tercapai sebesar Rp. 523,77 triliun dari target sebesar Rp. 454,03 triliun, sehingga terdapat Rp. 69,74 triliun pencapaian diatas target. Pada tahun 2014 tercapai sebesar Rp. 523,77 triliun dari target sebesar Rp. 454,03 triliun, sehingga terdapat Rp. 69,74 triliun pencapaian diatas target. Perbandingan Capaian Kinerja PDRB ADHK di Sumatera Utara, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



Tabel. 98
Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
01. Nias	982,94	1140,43	1299,65	1439,73	1 638,83
02. Mandailing Natal	3385,34	3717,81	4276,71	4808,31	5 573,13
03. Tapanuli Selatan	2761,51	3145,18	3573,33	4006,03	4 485,93
04. Tapanuli Tengah	2000,27	2296,07	2572,05	2880,68	3 304,28
05. Tapanuli Utara	3392,63	3807,80	4157,53	4564,75	5 121,10
06. Tobasamosir	3056,88	3429,77	3857,58	4395,20	5 010,99
07. Labuhanbatu	6658,79	7610,59	8550,34	9526,34	10 894,86
08. Asahan	10435,94	11931,68	13650,24	15376,29	17 525,62
09. Simalungun	9272,02	10360,95	11627,58	13055,30	14 694,53
10. Dairi	3393,00	3777,74	4226,28	4731,42	5 345,42
11. Karo	5646,54	6676,02	7634,39	8512,71	9 550,52
12. Deli Serdang	34172,48	39804,28	45125,83	50667,52	59 862,75
13. Langkat	14789,83	17037,98	19565,25	22166,50	25 189,51
14. Nias Selatan	2014,35	2244,82	2442,56	2678,83	2 947,37
15. Humbang Hasundutan	2 189,65	2 468,65	2 791,89	3 179,57	3 612,23
16. Pakpak Bharat	290,30	331,84	373,19	420,52	479,46
17. Samosir	1 519,32	1 669,60	1 835,40	2 019,69	2 240,76
18. Serdang Bedagai	8 490,36	9 697,60	10 905,56	12 313,15	14 041,79
19. Batubara	14 517,23	16 590,57	18 994,98	21 006,93	22 418,91
20. Padang Lawas Utara	1 424,47	1 725,25	1 957,90	2 189,62	2 487,98
21. Padang Lawas	1 349,42	1 597,82	1 850,14	2 067,67	2 333,84
22. Labuhanbatu Selatan	6 284,98	7 161,09	8 094,36	9 032,13	9 189,50
23. Labuhanbatu Utara	5472,19	6288,95	7101,85	7984,44	10 501,60
24. Nias Utara	998,84	1136,17	1293,29	1428,39	1 618,49
25. Nias Barat	507,06	589,40	673,15	747,01	844,57
26. Sibolga	1361,12	1543,78	1698,29	1884,81	2 125,85
27. Tanjungbalai	2765,28	3088,52	3373,86	3692,18	4 025,36
28. Pematangsiantar	3746,22	4163,38	4531,59	4897,69	5 281,37
29. Tebing Tinggi	2033,00	2302,74	2608,91	2964,04	3 453,99
30. Medan	72630,21	83315,02	93610,76	105400,44	119 715,48
31. Binjai	4308,94	4945,36	5701,43	6593,39	7 428,96
32. Padangsidempuan	1900,04	2099,89	2304,04	2561,84	2 866,37
33. Gunungsitoli	1781,86	2009,06	2305,74	2543,99	2 927,31
Sumatera Utara	236 353,62	275 056,51	314 372,44	351 118,16	403 933,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Provsu

3. PDRB ADHK



PDRB ADHK pada tahun 2015 tercapai sebesar Rp. 440,95 triliun dari target sebesar Rp. 160,87 triliun, sehingga terdapat Rp. 280,08 triliun, sehingga pencapaian kinerja pada tahun 2015 berada di atas target.



Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB adalah perbandingan antara nilai kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap jumlah PDRB dalam bentuk persentase.

Nilai ini menggambarkan seberapa besar peran kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB pada tahun tertentu. Tabel berikut menjelaskan kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB untuk tahun 2010-2014 di Propinsi Sumatera Utara.

Tabel 99.
Kontribusi **Kategori** Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap ADHK 2010 dan ADHB Tahun 2010 s/d 2014 Provinsi Sumatera Utara

Tahun	PDRB (ADHK 2010)	ADHK 2010		PDRB (ADHB)	ADHB	
		(JutaRp.)	%		(JutaRp.)	%
2010	331,085,237.47	56,555,799.54	17.08	331,085,237.47	56,555,799.54	17.1
2011	353,147,591.20	60,589,055.04	17.16	377,037,101.03	64,308,761.08	17.1
2012	375,924,139.50	65,384,605.2	17.39	417,120,438.7	70,891,922.7	17.0
2013	398,779,250.40	69,025,207.6	17.31	470,221,983.6	78,324,823.4	16.7
2014	419,649,281.70	73,817,641.8	17.59	523,771,565,5	89,596,998.2	17.1

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Perbandingan Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir :

Capaian Indikator kinerja "PDRB ADHK", PDRB ADHK pada tahun 2014 tercapai sebesar Rp. 419,65 triliun dari target sebesar Rp. 151,37 triliun, sehingga terdapat Rp. 268,28 triliun pencapaian diatas target.pada tahun 2014 tercapai sebesar Rp. 419,65 triliun dari target sebesar Rp. 151,37 triliun, sehingga terdapat Rp. 268,28 triliun pencapaian diatas target.PDRB/Kapita



(ADHB) pada tahun 2014 tercapai sebesar Rp. 38,05 juta dari target sebesar Rp. 33,32 juta. Sehingga terdapat Rp. 4,73 jutapencapaian diatas target yang telah ditetapkan pada tahun 2014.Perbandingan Capaian Kinerja PDRB ADHK di Sumatera Utara, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 100
Perbandingan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/KotaTahun 2009-2013 (Persen)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
01. Nias	6,62	6,75	6,81	6,24	6,43
02. Mandailing Natal	6,40	6,41	6,40	6,41	6,41
03. Tapanuli Selatan	4,05	5,06	5,30	5,22	5,21
04. Tapanuli Tengah	5,76	6,17	6,28	6,35	6,85
05. Tapanuli Utara	4,98	5,56	5,54	5,95	6,05
06. Tobasamosir	5,30	5,50	5,26	5,52	5,14
07. Labuhanbatu	4,88	5,15	5,72	6,11	6,00
08. Asahan	4,67	4,97	5,37	5,57	5,83
09. Simalungun	4,92	5,12	5,81	6,06	4,48
10. Dairi	4,72	5,02	5,28	5,44	5,46
11. Karo	5,17	6,03	6,59	6,34	4,72
12. Deli Serdang	5,55	5,98	6,01	6,06	12,79
13. Langkat	5,04	5,74	5,78	5,66	5,97
14. Nias Selatan	4,08	4,12	4,46	5,78	5,16
15. Humbang Hasundutan	5,32	5,45	5,94	5,99	6,03
16. Pakpak Bharat	5,83	6,77	5,98	6,02	5,86
17. Samosir	5,10	5,59	5,96	6,07	6,46
18. Serdang Bedagai	5,92	6,14	5,98	6,00	5,97
19. Batubara	4,30	4,65	5,11	4,37	3,35
20. Padang Lawas Utara	5,70	6,74	6,81	6,38	6,13
21. Padang Lawas	5,14	5,56	6,39	6,31	6,12
22. Labuhanbatu Selatan	4,94	5,68	6,21	6,38	6,05
23. Labuhanbatu Utara	5,29	5,61	6,13	6,33	6,33
24. Nias Utara	6,59	6,73	6,68	5,88	6,25
25. Nias Barat	5,66	6,30	6,76	4,93	5,81
26. Sibolga	5,70	6,04	5,09	5,34	5,80
27. Tanjungbalai	4,17	4,75	4,86	4,99	4,52
28. Pematangsiantar	5,36	5,85	6,02	5,71	5,16
29. Tebing Tinggi	5,95	6,04	6,67	6,75	6,91
30. Medan	6,55	7,16	7,69	7,63	4,30
31. Binjai	5,87	6,07	6,28	6,34	6,48
32. Padangsidempuan	5,83	5,81	5,88	6,23	6,20
33. Gunungsitoli	7,45	6,24	6,46	6,28	6,35
Sumatera Utara	5,07	6,42	6,63	6,22	6,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Provsu

Pada tahun 2013, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Batu Bara merupakan kabupaten/kota yang memberikan kontribusi



terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB atas dasar harga berlaku Sumatera Utara masing-masing sebesar 29,64%, 14,82 %, 6,24 %, dan 5,55 %. Sedangkan kabupaten/kota lainnya juga memberikan kontribusi tetapi dalam jumlah persentase yang relatif kecil. Kabupaten Asahan sebesar 4,34%, Kabupaten Simalungun sebesar 3,64%, Kabupaten Serdang Bedagai 3,48 %, Kabupaten Labuhanbatu 2,70 %, Kabupaten Labuhanbatu Utara 2,60 %, Kabupaten Karo 2,36 %, Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2,28%, Kota Binjai 1,84 %.

Kabupaten Mandailing Natal 1,38%, Kabupaten Dairi 1,32%, Kota Pematangsiantar 1,31%, Kabupaten Tapanuli Utara 1,27%, Kabupaten Tobasamosir 1,24%, Kabupaten Tapanuli Selatan 1,11%, dan Kota Tanjungbalai 1,00%. Kontribusi di bawah 1 % yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan 0,89%, Kota Tebing Tinggi 0,86%, Kabupaten Tapanuli Tengah 0,82%, Kabupaten Nias Selatan 0,73%, Kota Gunungsitoli 0,72%, Kota Padangsidimpuan 0,71%, Kabupaten Padang Lawas Utara 0,62 %, Kabupaten Padang Lawas 0,58%, Kabupaten Samosir 0,55 %, Kota Sibolga 0,53 %, Kabupaten Nias 0,41%, Kabupaten Nias Utara 0,41%, Kabupaten Nias Barat 0,21%, dan Kabupaten Pakpak Bharat 0,12 %.

Aspek kesejahteraan masyarakat berdasarkan fokus kesejahteraan antara lain dapat dilihat dari angka nilai PDRB, kontribusi PDRB, pertumbuhan PDRB, Inflasi, PDRB perkapita, disparitas pendapatan masyarakat dan persentase penduduk yang berada diatas garis kemiskinan. Secara umum dapat diungkapkan sebagai berikut :

4. PDRB / Kapita (ADHB)



PDRB/Kapita (ADHB) pada tahun 2015 tercapai sebesar Rp. 41,02juta dari target sebesar Rp. 36,91 juta, sehingga terdapat Rp. 4,11 jutapencapaian diatas target yang telah ditetapkan pada tahun 2015.



5. Neraca perdagangan (US\$.000)



Neraca perdagangan (US\$.000) pada tahun 2015 hanya tercapai sebesar 5.050 US\$ dari target sebesar 5.080 US\$ (terdapat kekurangan 30 US\$ dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2015. Persentase pencapaian target kinerja adalah sebesar 99%.

Capaian Kinerja Tahun 2014 :

Pada tahun 2014 hanya tercapai sebesar 4,312 US\$ dari target sebesar 4,950 US\$ (terdapat kekurangan 638 US\$ dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2014.

6. Laju INFLASI



Inflasi pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 4,25%. Sementara itu kodnisi di tahun 2015, laju inflasi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 3,24%. Dengan keberhasilan ini, pemerintah pusat memberikan **Penghargaan sebagai Provinsi terbaik dalam pengendalian inflasi di daerah kepada TPID** (Tim Pengendali Inflasi Provinsi) Sumatera Utara.

Capaian Kinerja Tahun 2014 :

Tingkat inflasi di Sumatera Utara secara umum juga kondisinya lebih baik dari nasional, akan tetapi pada tahun 2014 kondisi inflasi Sumatera Utara lebih baik dari capaian nasional, dimana inflasi di Sumatera Utara mencapai 8,17%,. Secara Makro Rata-Rata Inflasi Sumatera Utara selama periode 2010-2014 sebesar 6,78% berada diatas rata-rata Inflasi Nasional pada periode yang sama sebesar 6,37% (nasional lebih baik). Ada pun perkembangan nilai inflasi Sumatera Utara dibandingkan dengan tingkat nasional disajikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel. 101
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2010-2014 Provinsi Sumatera Utara

INFLASI	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
INDONESIA	6,96	3,79	4,36	8,38	8,36
SUMATERA UTARA	8	3,67	3,86	10,18	8,17

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Tidak terjaganya target inflasi sebesar 6,25% juga dikarenakan adanya kenaikan harga BBM. Tingkat inflasi di Sumatera Utara secara umum juga kondisinya lebih baik dari nasional, akan tetapi pada tahun 2013 kondisi inflasi Sumatera Utara tidak sebaik capaian nasional, dimana inflasi di Sumatera Utara mencapai 2 digit pada posisi 10,18%, hal ini disebabkan terjadinya kenaikan pada kelompok bahan makanan (13,18 %); perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (8,27 %); pendidikan, rekreasi dan olahraga (7,93 %); makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (6,24 %); sandang (2,47 %) dan kesehatan (2,11 %).

Secara Makro Rata-Rata Inflasi Sumatera Utara selama periode 2009-2013 sebesar 5,66% berada diatas rata-rata Inflasi Nasional pada periode yang sama sebesar 5,25% (nasional lebih baik). Perkembangan nilai inflasi Sumatera Utara dibandingkan dengan tingkat nasional disajikan pada Tabel 84 berikut :

Tabel 102
Nilai inflasi rata-rata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013

INFLASI	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
INDONESIA	2,78	6,96	3,79	4,36	8,38
SUMATERA UTARA	2,61	8,00	3,67	3,86	10,18

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)



7. "Nilai Investasi (PTMB)"



Capaian Indikator kinerja, tercapai sebesar Rp. 124,07 triliun dari target yang ingin dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 95,99 triliun, sehingga terdapat Rp. 28,08 triliun diatas target.

8. APBD Provinsi



Pada tahun 2014 sebesar Rp. 8,6 triliun lebih besar dari jumlah APBD Provinsi Sumatera Utara ditargetkan pada tahun 2014 sebesar Rp. 8,58 triliun, karena adanya tambahan anggaran pada P.APBD tahun 2014.

9. ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*)



Target ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) pada tahun 2015 sebesar 3,25%, dan capaian ICOR pada tahun 2015 adalah dikisaran 0,40%. Pada tahun 2014 sebesar 3,50%, dan angka sementara adalah dikisaran 3,50%.

Capaian Kinerja :

PENCAPAIAN DAYA SAING SUMATERA UTARA TAHUN 2015



Terkait dengan capaian Daya Saing Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2015 juga dipengaruhi oleh aspek 6 (enam) yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Pendukung dalam rangka keberhasilan Sasaran Strategis "**TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING PROVINSI SUMATERA UTARA BAIK DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP**", yaitu :

1. Lama Perijinan
2. Laju Pertumbuhan Ekspor (%)



3. Laju Pertumbuhan Impor (%)
4. Investasi (PMTB)
5. Dana Pihak Ketiga (Perbankan).
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Lama Perjinan



Dalam hal proses perizinan di Provinsi Sumatera Utara telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010. tentang Pedoman. tata Cara Permohonan dan Jenis Perizinan dan Non perijinan dibidang Penanaman Modal. Dalam pergub tersebut telah diatur tentang penerbitan perizinan dan non perizinan lama proses nya 10 hari. terkecuali perizinan yang terkait dengan penataan ruang. lingkungan hidup. keamanan. keselamatan dan kesehatan masyarakat atau yang diatur khusus dengan perundang-undangan.

Tabel 103
Capaian Indikator Kinerja Lama Perijinan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja	
	Volume	Satuan	Volume	Satuan
Lama Perijinan	6	hari	3	hari

Sumber : BAPPEDA dan Badan Perijinan Terpadu Prov. Sumut

Proses perijinan di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 2015, dari target kinerja yang ditetapkan semula adalah 7 (tujuh) hari kerja ternyata dapat dipercepat menjadi 3 (tiga) hari kerja, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan perijinan terpadu melalui Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara dapat menunjukkan kinerja yang sangat baik. Sehingga diharapkan masyarakat yang dilayani akan merasa puas dan tidak dipersulit. Hal ini tentu tidak terlepas dari komitmen Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan Daya Saing dibidang pelayanan perijinan dan non perijinan.

2. Laju Pertumbuhan Ekspor (%)



Ekspor bersih perdagangan adalah Nilai Ekspor suatu daerah selama satu tahun dikurangi dengan jumlah Nilai Impor selama satu tahun. Untuk menggambarkan nilai ekspor bersih perdagangan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 s.d 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 104
Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2010-2014
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	EKSPOR		IMPOR		Neraca (000 US\$)
	BeratBersih	Nilai FOB	BeratBersih	Nilai CIF	
	(Ton)	(000 US\$)	(Ton)	(000 US\$)	
2010	7.992.103	9.147.778	6.171.734	3.576.248	5.571.530
2011	8.161.003	11.883.268	6.718.063	4.953.462	6.929.806
2012	8.695.942	10.393.936	6.813.898	5.164.751	5.229.185
2013	9.275.859	9.597.907	6.922.414	5.108.737	4.489.170
2014	9.087.526	9.361.110	7.391.305	5.046.514	4.314.598

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Kinerja ekspor Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara yang terus mencatatkan nilai negatif sepanjang tahun lalu diperkirakan akan berlanjut tahun ini. Hal tersebut tentu akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang diprediksi Bank Indonesia (BI) mencapai angka 5,8% tahun ini, meskipun Pemerintah sendiri tetap memasang target pertumbuhan di atas 6%. Dengan keadaan demikian, devisa Provinsi Sumatera Utara dari pasar ekspor tergerus, dimana pada 2014 hanya sebesar US\$9,36 miliar atau turun 2,47% dibanding tahun sebelumnya yang mampu mencatat angka US\$9,60 miliar. Kondisi tersebut terkait belum pulihnya ekonomi global, yang dicerminkan pada ekspor yang mengalami penurunan.



Kinerja ekspor yang buruk itu otomatis mengambat laju ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada tahun lalu yang melambat di angka 5,23% dan pada tahun 2015 ekonomi diprediksi membaik dimana, penopangnya dari sektor lain. Indikasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara didukung oleh menguatnya daya beli masyarakat sejalan dengan penurunan harga BBM di awal tahun.

Selain didorong daya beli, kegiatan investasi pada tahun 2015 yang diperkirakan meningkat, juga akan mendorong perekonomian di Provinsi Sumatera Utara. Begitupun, kuncinya ada di belanja pemerintah. Semakin cepat pemerintah membelanjakan anggaran maka serapannya akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, jika semua program infrastruktur mampu dipercepat bisa jadi ekonomi Sumut akan tumbuh di level 5,7%.

Nilai Ekspor Sumatera Utara Bulan Desember 2015 Sebesar US\$677,29 Juta. Nilai ekspor tersebut melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara pada bulan Desember 2015 mengalami kenaikan dibandingkan pada bulan November 2015, yaitu dari US\$607,63 juta menjadi US\$677,29 atau naik sebesar 11,47 %. Tetapi bila dibandingkan dengan bulan Desember 2014, ekspor Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,40 %. Jika dihitung akumulasi sepanjang bulan Januari hingga Desember 2015, total nilai ekspor Sumatera Utara mencapai US\$7,75 miliar, mengalami penurunan sebesar 17,18 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

3. Laju Pertumbuhan Impor (%)



Impor barang konsumsi ke Sumatera Utara mengalami peningkatan 12,91 persen secara year on year (yoy). Peningkatan tersebut dikarenakan tingkat konsumsi masyarakat yang cukup tinggi terhadap produk impor. Nilai impor barang



konsumsi yang masuk ke Sumut periode Agustus 2013 dengan Agustus 2012 mengalami peningkatan sekitar 12,91 persen atau mencapai 701,7 juta Dolar AS. Impor barang konsumsi dilihat dari jenis golongan barang didominasi gandum-gandum. Komoditas impor barang konsumsi gandum-gandum periode Agustus 2013 mencapai 95,89 juta Dolar AS, naik 8,99 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya 87,98 juta Dolar AS. Peningkatan tersebut dikarenakan tingkat konsumsi masyarakat cukup tinggi.

Sementara itu, secara umum pangsa impor terbesar untuk periode Januari – Agustus 2013 masih berasal dari golongan bahan baku/penolong yang mencapai 61,12 persen, sementara untuk barang konsumsi dan barang modal pangasanya masing-masing sebesar 22,74 persen dan 16,15 persen. Pangsa impor untuk golongan barang konsumsi mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, sebaliknya pangsa impor untuk bahan baku penolong dan barang modal mengalami penurunan. Nilai impor melalui Sumatera Utara di bulan Maret 2014 tercatat mencapai US\$ 398,77 juta, atau naik sebesar 9,80 persen dibanding bulan Februari 2014 yang sebesar US\$ 363,19 juta. Namun demikian, bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, angka impor Maret 2014 mengalami penurunan sebesar 11,30 persen.

Sementara itu neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara bulan Maret 2014 mengalami surplus dari sisi nilai sebesar US\$ 439,04 juta, angka ini turun sebesar 5,89 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu sebesar US\$466,54 juta. Walaupun sejauh ini neraca perdagangan Sumut masih mengalami surplus, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah membaiknya perekonomian Sumut juga memberikan efek negatif terhadap impor yang juga mengalami kenaikan.



Program dan Kegiatan yang dilaksanakan
pada Tahun Anggaran 2015 :

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	PROGRAM / KEGIATAN
I	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1	Pengendalian dan Pengawasan garam beryodium
2	Pengendalian dan Pengawasan bahan tambahan pangan pada industri makanan
3	Pembinaan Wajib SNI Komoditi ILMEA
4	Akreditasi Lembaga Sertifikat Produk (LS Pro) Sumatera Utara
5	Akreditasi dan Survilance Kemampuan Laboratorium Penguji Mutu dan Kalibrasi
6	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu dan Kalibrasi
7	Audit Internal Laboratorium Penguji Mutu dan Kalibrasi UPTD. BPSMB Medan
8	Kaji Ulang Manajemen dan Revisi Dokumen
9	Registrasi Personil Petugas Pengambil Contoh BPSMB Medan
10	Kalibrasi Peralatan Laboratorium Penguji mutu dan Laboratorium Kalibrasi
11	Pengawasan barang beredar di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara
12	Sidang Tera/Tera Uang alat UTTP UPT Metrologi Medan
13	Pengawasan Jembatan Timbang dan Pompa Ukur SPBU serta Tangki Ukur Mobil
14	Konsultasi teknisi ke Direktorat Metrologi Bandung dan Pertekmet
15	Verifikasi alat standar laboraturium UPTD. Metrologi Medan
16	Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen mutu (UPTD Metrologi Medan)



No.	PROGRAM / KEGIATAN
17	Sidang Tera/Tera Ulang alat UTTP UPTD. Metrologi R. Prapat
18	Verifikasi alat standar lab. UPTD Metrologi R. Prapat
19	Konsultasi Teknis ke Direktorat Metrologi Bandung dan Pertekmet dari Metrologi Rt. Prapat
20	Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen mutu (UPTD Metrologi Rt. Prapat)
21	Sidang Tera/Tera Ulang alat UTTP UPTD. Metrologi P. Siantar
22	Verifikasi alat standar laboratorium UPTD. Metrologi P. Siantar
23	Konsultasi Teknis ke Direktorat Metrologi Bandung dan Pertekmet (dari Metrologi P.Siantar)
24	Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen mutu (UPTD Metrologi P. Siantar)
25	Sidang Tera/Tera Ulang alat UTTP UPT Metrologi Sibolga
26	Konsultasi Teknis ke Direktorat Metrologi Bandung dan Pertekmet (dari Metrologi Sibolga)
27	Verifikasi alat standar Lab. UPT Metrologi Sibolga
28	Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen mutu (UPTD Metrologi Sibolga)
II	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
1	Pengamanan Perdagangan Internasional
III	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
1	Dukungan operasional pusat promosi dan pelatihan ekspor P3ED
2	Pelaksanaan informasi dan promosi ekspor UKM oleh P3ED
3	Identifikasi pelaku eksportir produsen yang memenuhi kriteria Self Certification di Kab/Kota
4	Pelatihan kemampuan UKM di bidang ekspor
IV	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1	Sosialisasi peningkatan produksi dalam negeri
2	Promosi & pemasaran produksi dalam negeri melalui berbagai event dalam negeri
3	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
V	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
1	Pembinaan dan Pengembangan Industri Kerajinan Berbahan Baku Lokal
2	Peningkatan Mutu/Kualitas produk dari kelapa



No.	PROGRAM / KEGIATAN
3	Study pengembangan diversifikasi produk gula aren menjadi gula semut
VI	Program Penataan Struktur Industri
1	Updating Database Industri
2	Bimbingan Teknis Kewirausahaan kepada Masyarakat Calon Wirausaha Baru
3	Temu Bisnis antara Industri Besar & Kecil dalam Rangka Menciptakan Struktur Industri Hulu dan Hilir
4	Pembinaan dan Koordinasi anggota dewan kawasan ekonomi khusus Sumatera Utara
VII	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
1	Pengembangan desa binaan melalui pengadaan sarana usaha dan pelatihan
2	Peningkatan ketrampilan pembuat/pencetak batubata
3	Keikutsertaan dan pengadaan barang-barang untuk pameran TTG Tingkat Provinsi dan Nasional

4. Investasi (PMTB)



Nilai Investasi (PTMB) tercapai sebesar Rp. 129,06 triliun dari target yang ingin dicapai pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 109,42 triliun, sehingga terdapat Rp. 19,64 triliun pencapaian diatas target. Capaian kinerja investasi di Provinsi Sumatera Utara akan diuraikan sebagai berikut :

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dan nilai investasinya

Untuk menjelaskan jumlah investor yang telah menanamkan modalnya di Sumatera Utara untuk tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

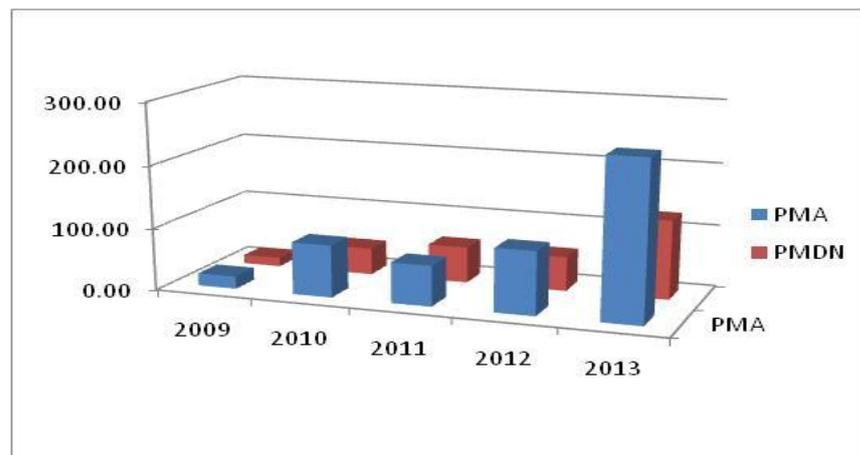


Tabel 105
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2009 – 2013 Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	Jumlah Investor	14	20	34
2010	Jumlah Investor	43	84	127
2011	Jumlah Investor	58	65	123
2012	Jumlah Investor	55	101	156
2013	Jumlah Investor	126	252	378
JUMLAH		522	296	818

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu

Grafik 50
Jumlah Investor PMDN/PMA Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009 – 2013



Dari tabel dan grafik diatas terlihat kenaikan yang signifikan untuk jumlah investor PMA maupun PMDN. Jumlah investor PMDN mengalami peningkatan yang signifikan dari 14 jumlah proyek ditahun 2009 menjadi 126 proyek ditahun 2013, begitu juga dengan Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami kenaikan dari semula 20 proyek menjadi 252 jumlah proyek yang terealisasi di Sumatera Utara.



b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan jumlah proyek dan nilai investasi baik yang masih dalam tahap persetujuan maupun yang sudah direalisasikan di Sumatera Utara untuk tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

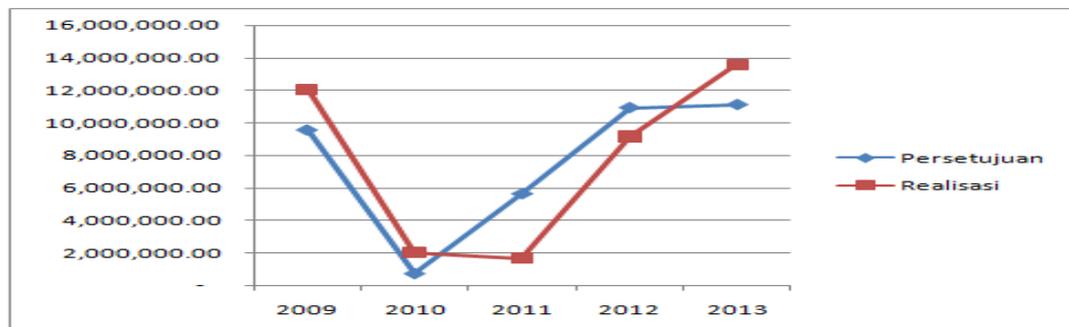
Tabel 106
Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2009 - 2013

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2009	74	9.546.173,77	34	12.047.929,86
2010	54	747.349,91	127	2.024.885,56
2011	54	5.644.561,01	123	1.662.522,50
2012	33	10.921.354,71	156	9.163.446,19
2013	75	11.106.765,19	378	13.588.420,60
Total	290	37.966.204,59	818	38.487.204,71

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu.

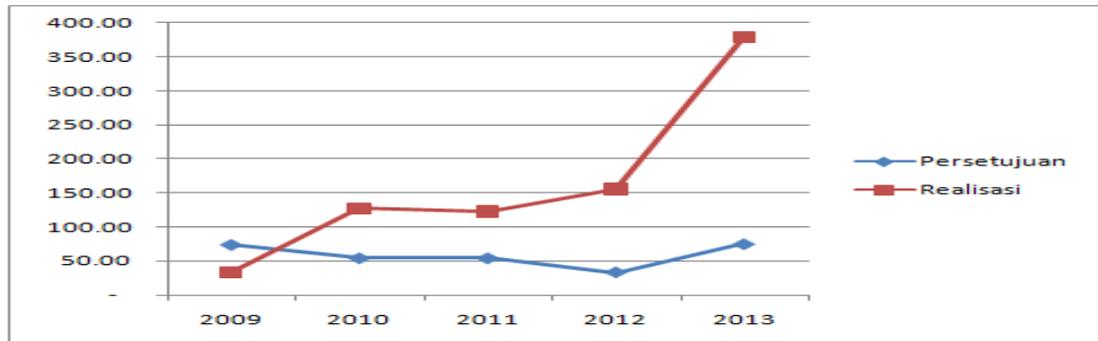
Perkembangan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), terus mengalami pasang surut dalam lima tahun terakhir ini, baik dilihat dari jumlah proyek maupun jumlah dana yang terealisasi. Namun pada tahun 2013 terjadi peningkatan nilai investasi yang disetujui dan yang direalisasikan.

Grafik 51
Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2009 - 2013 Provinsi Sumatera Utara (Juta Rp.)





Grafik 52
Jumlah Investasi Proyek PMDN/PMA Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009 – 2013



Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu

c. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja Perusahaan Modal Asing (PMA) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 107
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA/PMDN) Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Tenaga Kerja yg Bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN	11.672	13.995	12.826	27.092	47.696
2	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	34	127	123	156	378
3	Ratio Daya Serap Tenaga Kerja	343.3	110,2	104,3	173.7	126.18

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu

d. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dan nilai investasinya

Untuk menjelaskan jumlah investor yang telah menanamkan modalnya di Sumatera Utara untuk tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

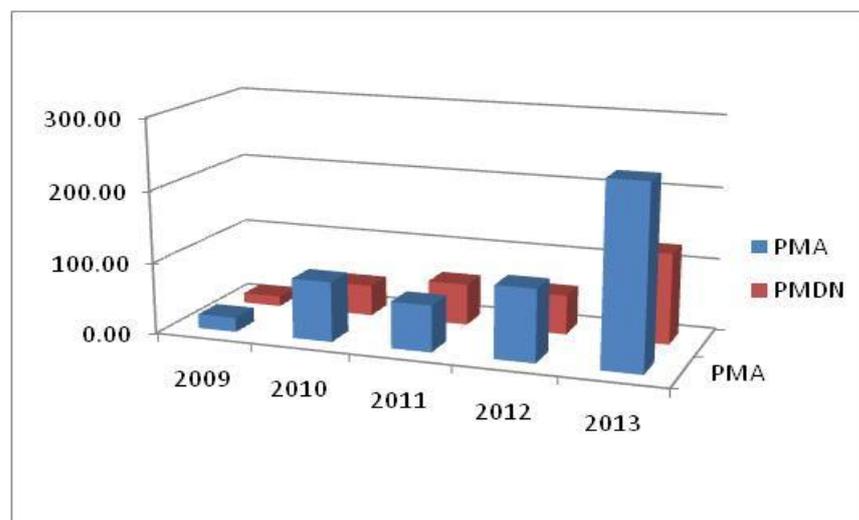


Tabel 108
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2009 – 2013
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	Jumlah Investor	14	20	34
2010	Jumlah Investor	43	84	127
2011	Jumlah Investor	58	65	123
2012	Jumlah Investor	55	101	156
2013	Jumlah Investor	126	252	378
J U M L A H		522	296	818

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu

Grafik 53
Jumlah Investor PMDN/PMA Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009 – 2013



Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Prov. Sumut

Dari tabel dan grafik diatas terlihat kenaikan yang signifikan untuk jumlah investor PMA maupun PMDN. Jumlah investor PMDN mengalami peningkatan yang signifikan dari 14 jumlah proyek ditahun 2009 menjadi 126 proyek ditahun 2013, begitu juga dengan Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami kenaikan dari semula 20 proyek menjadi 252 jumlah proyek yang terealisasi di Sumatera Utara.



e. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan jumlah proyek dan nilai investasi baik yang masih dalam tahap persetujuan maupun yang sudah direalisasi di Sumatera Utara untuk tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

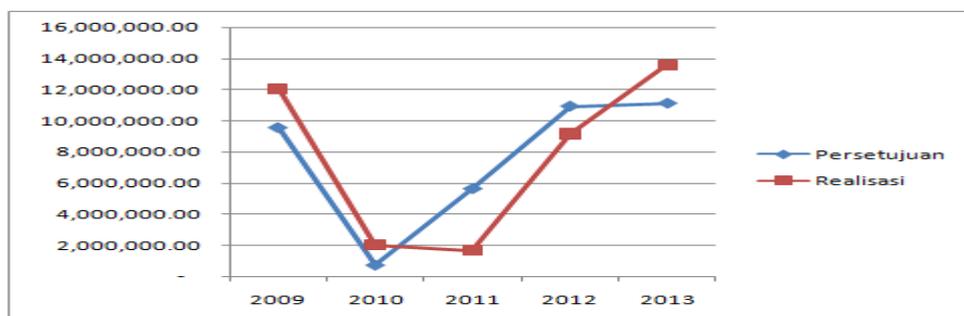
Tabel 109
Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2009 – 2013

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2009	74	9.546.173,77	34	12.047.929,86
2010	54	747.349,91	127	2.024.885,56
2011	54	5.644.561,01	123	1.662.522,50
2012	33	10.921.354,71	156	9.163.446,19
2013	75	11.106.765,19	378	13.588.420,60
Total	290	37.966.204,59	818	38.487.204,71

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu.

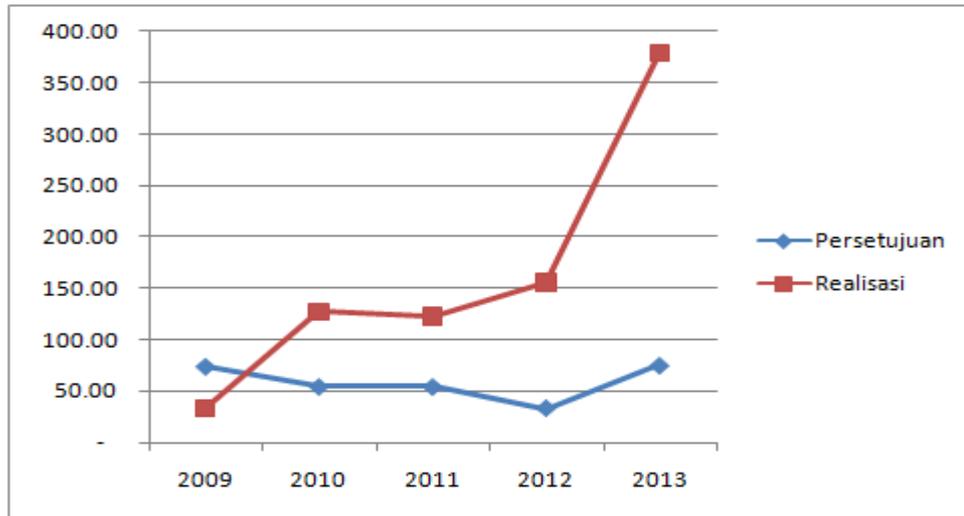
Perkembangan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), terus mengalami pasang surut dalam lima tahun terakhir ini, baik dilihat dari jumlah proyek maupun jumlah dana yang terealisasi. Namun pada tahun 2013 terjadi peningkatan nilai investasi yang disetujui dan yang direalisasikan.

Grafik 54
Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2009 – 2013
Provinsi Sumatera Utara (Juta Rp.)





Grafik 55
Jumlah Investasi Proyek PMDN/PMA Tahun 2009 – 2013
Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Badan Penanaman Modal Provsu

f. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja Perusahaan Modal Asing (PMA) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 110
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA/PMDN) Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Tenaga Kerja yg Bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN	11.672	13.995	12.826	27.092	47.696
2	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	34	127	123	156	378
3	Ratio Daya Serap Tenaga Kerja	343.3	110,2	104,3	173.7	126.18

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu



5. Dana Pihak ketiga pada Perbankan



Capaian kinerja untuk indikator ini belum dapat diukur, dan akan dapat disajikan setelah ada release dari Bank Indonesia.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara (Sumut) tahun 2013 secara nasional berada di urutan ke-8 dengan capaian 75,57 persen. Namun, di nilai IPM Sumut ini sudah di atas rata-rata nasional yang sebesar 73,81 persen. Peringkat pertama IPM yaitu DKI Jakarta, disusul Sulawesi Utara, Riau, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara di posisi ke-8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut, tidak hanya menyangkut di bidang kesehatan saja tetapi menyangkut semua bidang seperti pendidikan. Terkait dengan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut, terdapat 4 (empat) komponen IPM yaitu :

1. Angka Melek Huruf
2. Angka Harapan Hidup yang masuk di bidang kesehatan,
3. Rata-rata lama sekolah, dan
4. Pengeluaran per kapita Provinsi Sumut.

Maka untuk Angka Harapan Hidup perlunya diterapkan pola gaya hidup bersih dan sehat yang harus ditingkatkan melalui promosi kesehatan. Di Sumut sendiri, untuk IPM kabupaten/kota tahun 2013 tertinggi dan berada di atas capaian nasional dan Sumut capaian tertingginya yaitu Kota Medan dan Kota Pematang Siantar dengan capaian 78,62 persen. IPM terendah yakni Nias Barat 47,91 persen, Nias Selatan 68,58 persen, dan Nias Utara 69,39 persen. Dalam meningkatkan IPM ini, salah satu upaya diperlukannya peran puskesmas yang saat ini menangani 155 jenis penyakit. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kesehatan, tidak bisa langsung memberikan bantuan ke puskesmas tapi dari ketenagakerjaan



melalui pusat men-drop dokter PTT dan bidan PTT yang digaji dari pusat. Pemenuhan itu, dikhususkan ke daerah terpencil yang merupakan program ke perdalaman di mana dokter PTT dan bidan PTT lebih gampang masuknya. Sementara untuk indikator sasaran pembangunan kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2016, indikator Angka Kematian Bayi (per 100 kelahiran hidup) capaian 2014 yaitu 20,22 dan sasaran 2016 sebesar 20. Angka Kematian Ibu (per 100 ribu kelahiran hidup) capaian 2014 sebesar 268 dan tahun 2016 sasarannya 250. Prevalensi kekurangan gizi (%) capaian 2014 sebesar 21,5 maka di tahun 2016 sasarannya sebesar 21. Untuk Umur Harapan Hidup (tahun 2014 capaiannya 70,13 dan pada tahun 2016 sasarannya 71,9. Sehingga program prioritas pembangunan kesehatan yaitu program obat dan perbekalan kesehatan, upaya kesehatan masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, lingkungan sehat, pencegahan dan pengendalian penyakit, upaya kesehatan per orangan, sumber daya kesehatan, kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, dan program penelitian dan pengembangan kesehatan.

Permasalahan :

Target IPM tahun 2009 sudah tercapai, namun disparitas antar Kabupaten masih sangat jauh

Solusi :

Terkait dengan permasalahan Indeks Pembangunan manusia, dipadnang perlu tercapinya peningkatan pada aspek-aspek terkait, yaitu dengan :

1. Kesehatan (angka harapan hidup);
2. Pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah), dan
3. Sektor Ekonomi (pengeluaran riil/ perkapita)



Capaian Indikator Kinerja :

**PENCAPAIAN DAYA SAING SUMATERA UTARA TAHUN 2015
BIDANG KETAHANAN PANGAN**



Terkait dengan capaian Daya Saing Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2015 di bidang Ketahanan Pangan juga dipengaruhi oleh aspek 5 (lima) yang selanjutnya sebagai Indikator Kinerja Pendukung dalam rangka keberhasilan Sasaran Strategis “**TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING PROVINSI SUMATERA UTARA BAIK DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP**”, yaitu :

1. Daya Saing Swasembada Pangan :



Terkait dengan pencapaian Daya Saing bidang Swasembada Pangan di Provinsi Sumatera Utara, mencakup aspek-aspek berikut :

1. Swasembada Beras

Terkait dengan capaian kinerja tahun 2015 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel - 111
Capaian Kinerja Swasembada Beras Tahun 2015

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian Kinerja
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Swasembada Pangan :				
Beras (Ton)	2.431.444	2.463.728*	101,33	Sangat Baik

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sumut, 2015.

Capaian swasembada pangan untuk beras di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 mencapai hasil yang membanggakan yaitu pada kategori Memuaskan. Hal ini tentunya diperoleh dari angka realisasi kinerja sebesar 2.463.728* ton dari target yang ditetapkan sebesar 2.431.444 ton



Ketersediaan cadangan pangan di Sumatera Utara Tahun 2014 dan Tahun 2015 Ketersediaan beras yang berasal dari produksi mengalami kenaikan dari 2.295.196 ton tahun 2014 menjadi 2.463.728 (ARAM II) ton tahun 2015, terjadi kenaikan produksi sebesar 168.532 ton, tetapi bila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan beras untuk konsumsi selama tahun 2015 sebesar 1.843.194,23 ton, masih terdapat surplus sebesar 620.533,77 ton. Dalam rangka pengamanan pangan wilayah, sebaiknya dikondisikan stock pangan yang tersedia minimal memenuhi 3 (tiga) bulan kebutuhan pangan penduduk, Jumlah beras yang dibutuhkan Sumatera Utara Tahun 2015 untuk konsumsi penduduk sebesar 14.591.468 jiwa sebanyak 153.599,52 ton per bulan, dengan demikian posisi Sumatera Utara termasuk daerah Surplus beras dan Jika tidak ada pengiriman beras ke luar provinsi, maka surplus yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan konsumsi untuk empat (4) bulan kedepan. Mengacu pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok, dimanfaatkan untuk bantuan darurat akibat bencana, pengendalian harga beras konsumen.

Pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat terutama pada lokasi yang rawan bencana dan terpengaruh masa paceklik. Pengisian lumbung pangan rata – rata 2,5 – 5,8 ton gabah kering giling per unit lumbung. Pembangunan fisik lumbung bervariasi, dari sharing APBD Pemerintah Kabupaten, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana APBD Provinsi. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan :

1. Tersedia cadangan pangan daerah dan terpenuhinya cadangan pangan bagi petani/anggota kelompok.



2. Terjadinya akumulasi modal usaha kelompok sebagai pendorong ekonomi perdesaan yang berorientasi kemitraan usaha antar kelompok dan mitra usaha lainnya dan
3. Terjadi perubahan perilaku anggota kelompok/petani yang selama ini langsung menjual hasil panennya ke pedagang, menjadi budaya menyimpan atau menunggu menjual padinya pada saat harga gabah naik.

Pengembangan cadangan pangan di Sumatera Utara yang telah dilaksanakan tahun 2014 – 2015 seperti tertera pada tabel berikut;

Tabel 112
Ketersediaan Cadangan Pangan di Sumatera Utara Tahun 2014 – 2015

NO.	URAIAN URAIAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015	KETERANGAN
1.	Cadangan Pangan Masyarakat (Lumbung Pangan Masyarakat)	30 unit (88,2 Ton)	49 unit (150 Ton)	Cadangan pangan Meningkat 70 %
2.	Cadangan Pangan Pemerintah (BULOG Divre Sumut)Posisi Bulan Desember	35.037.590, 73 Kg	5.038.786,32 Kg	Cadangan pangan stock untuk operasi pasar dan Raskin,

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Prov. Sumut

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2014 dan tahun 2015 melalui Badan Ketahanan Pangan Provinsi tidak tersedia tetapi Stock beras sebagai cadangan pangan sebanyak 200 Ton beras (SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi) tersedia sepanjang tahun pada Gudang Bulog dan dapat digunakan dan dikeluarkan jika memenuhi administratif. Dari data diatas secara kasat mata dapat dikatakan bahwa total ketersediaan beras untuk Sumatera Utara tahun 2015 ada sebanyak 2.469.116 Ton atau setara dengan 169,20 Kg/kap/tahun. Progres/perkembangan Swasembada pangan di Sumatera Utara tahun 2014 – 2015 masih menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dari hasil Perimbangan swasembada beras tahun 2014 Provinsi Sumatera Utara diperoleh angka Skor Swasembada Beras (SSB) sebesar 122,71 naik menjadi 133,67 persen yang berarti bahwa produksi beras Sumatera Utara dapat memenuhi kebutuhan beras penduduk dan bahkan melebihi kebutuhan beras sebesar



33,67 persen , hal ini sejalan dengan adanya program UPSUS PAJALE (Padi ,jagung ,kedele) Nasional termasuk Sumatera Utara . Ketersediaan beras sebesar 169,20 Kg/Kapita/Tahun , bila dibandingkan dengan kebutuhan beras untuk konsumsi dan penggunaan non pangan sebesar 126,32 Kg/Kapita/Tahun , hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan beras untuk Sumatera Utara sangat surplus. Di sisi lain Sumatera Utara terus mempromosikan pengurangan konsumsi beras sebesar 1,5 % pertahun dengan menggalakkan diversifikasi pangan melalui penggalian potensi pangan lokal dan penggalian kearifan lokal. (Data Perkembangan Swasembada pangan beras di Sumatera Utara Tahun 2014 s.d Tahun 2015 tertera pada tabel berikut).

Tabel 113.
Perkembangan Produksi, Kebutuhan dan Swasembada Beras di
Sumatera Utara Tahun 2014 – 2015

URAIAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015
Jumlah Penduduk (jiwa)	14.551.960	14.591.468
Kebutuhan Beras (ton)	1.870.363	1.843.194
Produksi Beras (ton)	2.295.196	2.463.728 (ARAM II)
Perimbangan Beras (surplus/minus) (ton)	424.833	620.534
% SSB	122,71	133,67

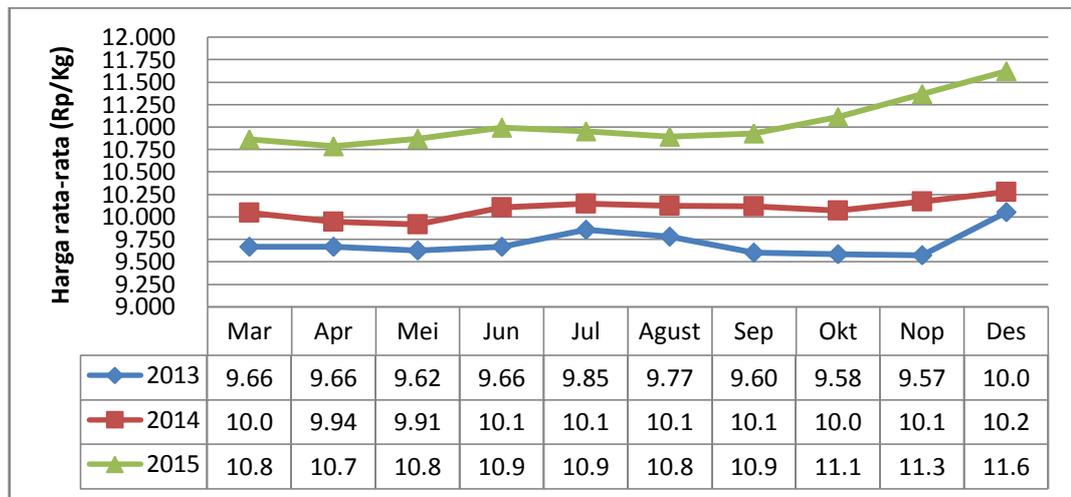
Sumber : Badan Ketahanan Pangan Prov. Sumut

Beberapa produksi komoditas penting mengalami pertumbuhan positif, Produksi jagung mengalami kenaikan dari 1.159.795 ton pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.478.584 (ARAM II) tahun 2015 , begitu juga produksi kedele produksi tahun 2014 sebesar 5.705 Ton , tahun 2015 meningkat menjadi 6.583 Ton (ARAM II). Selain keberhasilan dalam peningkatan produksi pangan pokok beras, Sumatera Utara juga berhasil dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Pada saat harga pangan pokok strategis di pasar tidak stabil dan berfluktuasi akibat menurunnya produksi pangan strategis dunia, harga pangan di pasar dalam negeri juga berpengaruh, namun demikian harga pangan khususnya beras masih lebih stabil . Rata-rata harga beras premium Tahun 2015 pada tingkat pedagang grosir adalah Rp 11.030,- dengan rata-rata tertinggi Rp 11.623,-pada bulan Desember dan terendah Rp. 10.785,- pada bulan April. Pada tahun 2014 harga rata-rata Rp. 10.091 ,- rata-rata tertinggi Rp. 9.509,- pada bulan



Desember , dan rata-rata terendah Rp 9.915,- pada bulan Mei .Terjadi kenaikan harga beras secara rata-rata sebesar Rp .939,- per kg nya. Harga beras medium pada tingkat pedagang grosir Tahun 2015 secara rata-rata adalah Rp 10.053 dengan rata-rata tertinggi Rp.10.967 pada bulan Desember dan terendah Rp. 9.727 pada bulan Maret , jika dibanding dengan tahun 2014, juga mengalami Kenaikan sebesar Rp 824,- per kg nya.

Grafik 56.
Harga rata-rata Beras Premium di Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Badan Ketahanan Pangan Prov. Sumut

Peran strategis sektor pertanian apabila digambarkan terhadap kontribusi sektor pertanian dalam rangka penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya mencapai target sukses pembangunan pertanian pada RPJMN tahap-2 (2010-2014) yang meliputi :

- Peningkatan swasembada berkelanjutan padi dan jagung dan swasembada kedelai, gula dan daging sapi.
- peningkatan diversifikasi pangan.
- peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor.
- Peningkatan kesejahteraan petani melalui strategi yang dikemas dalam 7 Gema Revitalisasi yang meliputi (1) revitalisasi lahan, (2) revitalisasi perbenihan dan



perbibitan, (3) revitalisasi infrastruktur pertanian, (4) revitalisasi SDM petani, (5) revitalisasi permodalan petani, (6) revitalisasi kelembagaan petani, dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir. Sampai saat ini telah banyak capaian yang diwujudkan meskipun masih perlu ditingkatkan.

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan *Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur*.

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal, antara lain :

1. Mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri.
2. Mengatur kebijakan pangan secara mandiri.
3. Melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas



untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP 2015-2045, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah :

1. Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging.
2. Peningkatan diversifikasi pangan.
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan Bio Energi.
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani. serta
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

2. *Swasembada Jagung,*

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja swasembada jagung tahun 2015 di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 114.
Capaian Kinerja Swasembada Jagung Tahun 2015

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian Kinerja
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Swasembada Pangan :				
Jagung (Ton)	293.524	478.584	163,04	Sangat Baik

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk capaian swasembada pangan jagung pada tahun 2015 di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Capaian kinerja ini diperoleh dari capaian realisasi kinerja yang dapat mencapai 478.584 Ton dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 293.444 Ton.



Capaian Swasembada Pangan Tahun 2014 :

1. Swasembada Beras

Pencapaian Produksi untuk komoditi Padi dengan target 3.771.545 ton telah terealisasi sebesar 3.628.968 ton atau sebesar 96,22 % berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2014 .Pencapaian produktivitas untuk komoditi Padi telah mencapai 5,05 ton/ha dari target sebesar 4,99 ton/ha.Berdasarkan Angka Sementara (ASEM) tahun 2014 bahwa produksi padi sebesar 3.628.968 ton atau turun sebesar 2,64 % bila dibandingkan dengan produksi padi di tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh karena di tahun 2014 telah terjadi anomali iklim yang menyebabkan kekeringan pada periode Januari-Mei 2014 sehingga pada beberapa kabupaten/kota tidak dapat bertanam atau melakukan pergeseran tanam, hal ini berdampak pada pencapaian produksi yang telah ditetapkan sehingga target tanam maupun panen tidak dapat tercapai.

2. Swasembada Jagung,

Pencapaian Produksi untuk komoditi Jagung dengan target 1.529.636 ton telah terealisasi sebesar 1.159.698ton atau 75,82 % berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2014.Pencapaian produktivitas untuk komoditi Jagung telah mencapai 5,60 ton/ha dari target sebesar 5,65 ton/ha. Produksi jagung pada ASEM tahun 2014 turun sebesar 1,97%, hal ini disebabkan pada terjadinya kemarau dan pada beberapa kabupaten yang pertanaman jagungnya sebagai tanaman sela di areal perkebunan, sudah tidak bisa lagi bertanam. Produksi kedelai berdasarkan ASEM Tahun 2014 naik sebesar 76,68 % disebabkan karena sentra pertanaman kedele yang berada di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai oleh karena Kabupaten ini melakukan pergeseran tanam padi maka sebahagian kecamatannya mengalihkan pertanamannya ke komoditi kedele.

Capaian Indikator Kinerja :

2. Angka Ketersediaan Energi (Kalori/Protein)



Ketersediaan energi rata-rata penduduk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 sebesar 3.868 k.kal/ kap/hr dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 3.887 k.kal/kap/hr (meningkat sebesar 0,49 %). Ketersediaan protein tahun 2013 sebesar 76,18 gr/kap/hr dan tahun 2014 sebesar 76,96 gr/kap/hr (meningkat sebesar 1,02 %) dan selain daripada itu perlu dikemukakan bahwa konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan energy; karbohidrat minimal 2.200 k.kal dan protein 57,0 gr per kapita per hari

Tabel 115.
Capaian Kinerja Ketersediaan Enengri Tahun 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
1	3	4	5	6
1.	1. Ketersediaan energy per kapita minimal 2400 kkal dan penyediaan protein per kapita minimal 63 gr per hari.	Energi(kalori) : 3.876 kkal; protein 76,98 gr	Energi(kalori)t : 3.763 kkal; protein 51.01 gr (Angka sementara)	Kalori : 97 % Protein : 66,26 %

Sumber : BKP Provsu

Capaian Kinerja Tahun 2014 :

Kinerja “Angka kecukupan Energi dan Protein” di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 Ketersediaan energi rata-rata penduduk Sumatera Utara tahun 2013 sebesar 3.868 k.kal/kap/hr dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 3.887 k.kal/kap/hr (meningkat sebesar 0,49%). Ketersediaan protein tahun 2013 sebesar 76,18 gr/kap/hr dan tahun 2014 sebesar 76,96 gr/kap/hr (meningkat sebesar 1,02 %). Karbohidrat : 3.872 k.kal, Protein 76,58 gram. Ketersediaan energi 3.887 k.kal/kap/hari, protein 76,96 gram/kap/hari. Bila dibandingkan target dan hasil terdapat peningkatan sebesar 0,49 persen untuk ketersediaan energi dan 1,02 persen ketersediaan protein , angka ini diperoleh melalui analisis Neraca Bahan Makanan.



Untuk ukuran Nasional keadaan ini menggambarkan ketersediaan pangan di Sumatera Utara sangat aman, karena target nasional ketersediaan energi per kapita minimal 2.400 k.kal per kapita per hari dan penyediaan protein 63 gram per kapita per hari. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh terlaksananya swasembada pangan di Sumatera Utara dan tersedianya sumber protein yang cukup, yang berasal dari daging, ikan.

Capaian Indikator Kinerja :

3. Jumlah Desa Rawan Pangan :



Berkenaan dengan kinerja untuk **Jumlah Desa Rawan Pangan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015**, diilustrasikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 116
Capaian Kinerja Jumlah Desa Rawan Pangan
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
1	3	4	5	6
1.	Jumlah desa rawan pangan	75 desa	87 desa	120 %

Sumber : Badan Ketahanan Pangan (BKP) Prov. Sumut, (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian Desa rawan pangan sebesar 120 %, dimana realisasi kinerja tercapai sebesar 87 desa dari 75 desa yang ditargetkan sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa capaian kinerja untuk Jumlah Desa Rawan Pangan dapat ditangani sebanyak 87 desa selama tahun 2015. Sehingga dengan demikian, bahwa masih banyak masyarakat di pedesaan yang perlu untuk dipantau dan dimonitor atas ketersediaan pangan sesuai dengan kebutuhan ataupun sebagaimana yang dimaksudkan pada Standard Pelayanan Masyarakat (SPM) bidang Ketahanan Pangan.



Capaian Kinerja Tahun 2014 :

Capaian Indikator kinerja “Jumlah Desa Rawan Pangan”.

Jumlah desa miskin/rawan pangan sebanyak 75 desa, yang diberdayakan melalui penguatan modal usaha kelompok sebanyak 35 kelompok di 13 Kab/kota desa Gempangan dan Demapan .Pemberian bantuan untuk masyarakat terkena erupsi Gunung Sinabung di Desa Guruhkinayang Kec. Payung Kab.Karo

Capaian Indikator Kinerja :

4. *Pola Pangan Harapan :*



Kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2015 di Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagaimana tertera pada tabel bderikut ini.

Tabel 117
Capaian Kinerja Pola Pangan Harapan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
1	3	4	5	6
1.	Pola Pangan Harapan	85	85,2	100,35

Sumber : Badan Ketahanan Pangan (BKP) Prov. Sumut, (diolah)

Pola Pangan Harapan (PPH) pada prinsipnya adalah merupakan skor yang diperoleh dari hasil survey dan penilaian dari tim yang melibatkan stakeholder terkait yang dilakukan ke daerah dan desa-desa yang ada di Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara setiap tahun. Pelaksanaan Pola Pangan Harapan ini dilakukan antara lain melalui penganekaragaman konsumsi pangan dan penurunan konsumsi beras per kapita 1,5 % untuk memenuhi target Skor Pola Pangan Harapan (PPH).



Oleh sebab itu dari Skor yang diperoleh atas kinerja PPH Tahun 2015 menunjukkan hasil yang SANGAT BAIK, hal ini ditunjukkan dari capaian kinerja dan perbandingan capaian angka realiasi kinerja sebesar 85,2 dari target yang ditetapkan sebesar 85 point.

Capaian Kinerja Tahun 2014 :

Capaian Indikator Kinerja “Pola Pangan Harapan”.

Tercapainya Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 84,5 dan konsumsi beras 128,65 kg/kap/tahun. Pola Pangan Harapan (PPH) Sumatera Utara tahun 2013 sebesar 83,6 dan tahun 2014 meningkat menjadi 84,8 (meningkat sebesar 1,43 %) dan konsumsi beras tahun 2013 sebesar 130,61 kg/kap/tahun, bila dibandingkan dengan konsumsi beras tahun 2014 sebesar 128,53 kg/kap/tahun, terjadi penurunan sebesar 1,60%.

Capaian Indikator Kinerja :

Nilai Tukar Petani (NTP)



Terkait dengan capaian kinerja untuk DAYA SAING pada Nilai Tukar Petani (NTP), mencakup 4 (empat) kategori yaitu :

1. NTP sub sektor Peternakan
2. NTP sub sektor Pangan
3. NTP sub sektor Hortikultura
4. NTP sub sektor Perikanan.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator proxy kesejahteraan petani yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). $NTP > 100$ berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. $NTP = 100$ berarti petani mengalami impas.



Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. $NTP < 100$ berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. NTP Sumatera Utara pada tahun 2014 sebesar 100,18 atau naik 0,72% bila dibandingkan dengan tahun 2013, namun bila dilihat dari NTPH (Nilai Tukar Petani Hortikultura) terjadi penurunan. Penurunan disebabkan oleh karena fokus kegiatan hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan masih di Dataran Tinggi terutama di Kabupaten Karo. Seperti kita ketahui sampai saat ini di Kabupaten Karo masih terjadi erupsi Gunung Sinabung sehingga menyebabkan kerusakan tanaman hortikultura dimana banyak tanaman yang rusak tidak dipanen dan sebagian yang tidak rusak namun tidak dapat berproduksi secara optimal.

1. Daya Saing Nilai Tukar Petani Peternakan



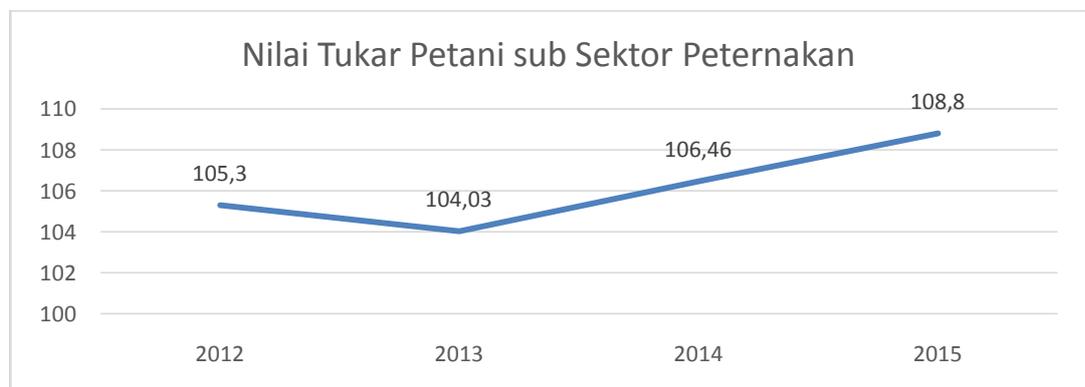
Hasil kinerja untuk nilai tukar petani peternak pada tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera pada bulan Desember tahun 2015 menunjukkan angka 108,95 sedangkan nilai rata-rata Nilai Tukar Petani Peternak tahun 2015 sebesar 108,80. Jikadibandingkandengan NTP yang ditargetkandalamrenstra (107,51) sudahterlampau. Jikadibandingkandengan NTP sub sektorpeternakanbulan November mengalamipenurunan 0,17. Hal inikarenaperubahan It (0,49%) lebihrendahdibandingkanperubahanpadaIb (0,66%). Hal ini disebabkan juga karena pelaku agribisnis peternakan Sumatera Utara pada umumnya petani peternak menengah kebawah yang dicirikan penyediaan modal sangat terbatas, sementara untukmendapatkan modal dalam bentuk kredit masih sulit. Upaya yang terus dilakukan untuk mengatasi masalah ini antara lain adalah dengan cara memfasilitasi peternak dengan lembaga keuangan dan pemberi modal dan juga memberikan penguatan modal langsung kepada masyarakat peternak.



Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015
dengan Tahun 2014 :

Capaian kinerja Peternak dari program peningkatan program peningkatan kesejahteraan petani dapat dilihat dari nilai NTP (%). **Meningkatnya Nilai tukar petani peternak (NTP)**. Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Grafik 57.
Nilai Tukar Petani sub Sektor Peternakan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2012-2015



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumut

Mulai Januari 2014 dilakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan NTP dari tahun dasar 2007=100 menjadi tahun dasar 2012=100. Perubahan tahun dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan/pergeseran pola produksi pertanian dan pola konsumsi rumah tangga pertanian di pedesaan, serta perluasan cakupan subsektor pertanian dan provinsi dalam penghitungan NTP, agar penghitungan indeks dapat dijaga ketepatannya. Perbedaan antara NTP tahun dasar 2007=100 dengan NTP tahun dasar 2012=100 adalah meningkatnya cakupan jumlah komoditas



baik pada paket komoditas indeks yang diterima petani (It) maupun indeks yang dibayar petani (Ib). Penghitungan NTP (2012=100) juga mengalami perluasan khususnya pada Subsektor Perikanan.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan It terhadap Ib, dimana komponen Ib hanya terdiri dari Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Dengan dikeluarkannya konsumsi dari komponen indeks harga yang dibayar petani (Ib), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya. Pada akhir bulan Desember 2014, nilai NTP peternakan yang dikeluarkan dari BPS menunjukkan nilai sebesar 106,95 atau mencapai 99,66% dari target yang ditetapkan dari SKPD yaitu 107,32. Hal ini karena perubahan It lebih tinggi dibandingkan perubahan pada Ib. Kenaikan yang terjadi pada It karena kenaikan indeks subkelompok ternak besar, indeks subkelompok ternak kecil, dan indeks subkelompok hasil ternak. Sedangkan indeks subkelompok unggas turun. Sementara itu, penurunan yang terjadi pada Ib karena perubahan pada indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) yang turun dan indeks BPPBM yang juga turun.

2. Daya Saing Nilai Tukar Petani Sektor Pangan



Kinerja untuk daya saing Nilai Tukar Petani pada sektor tanaman pangan pada Tahun 2015 di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 118
Capaian Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Sektor Pangan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian Kinerja
	Volume	Satuan	Volume	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NTP Sektor Pangan	101,14	%	102,55	%	100,42	Sangat Baik

Sumber : Badan Ketahanan Pangan (BKP) Prov. Sumut, diolah

Capaian Kinerja yang ditunjukkan pada Tabel di atas, menggambarkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mampu mendongkrak Nilai Tukar Petani



sektor tanaman pangan sehingga jika capaian kinerja diklasifikasikan menurut tingkatannya berada pada kategori SANGAT BAIK. Capaian kinerja ini juga digambarkan dari angka capaian realisasi kinerja yang mencapai 10,2 % dari target yang ditetapkan sebesar 101,14 %.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 :

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator proxy kesejahteraan petani yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). $NTP > 100$ berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. $NTP = 100$ berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. $NTP < 100$ berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

NTP Sumatera Utara untuk Pangan pada tahun 2014 sebesar 99,54 atau naik 0,25% bila dibandingkan dengan tahun 2013, sedangkan NTPH (Nilai Tukar Petani Hortikultura) terjadi penurunan yaitu dari 102,16 pada tahun 2013 menjadi 98,14 pada tahun 2014 atau turun 3,94 %. Penurunan disebabkan oleh karena fokus kegiatan hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan masih di Dataran Tinggi terutama di Kabupaten Karo. Seperti kita ketahui sampai saat ini di Kabupaten Karo masih terjadi erupsi Gunung Sinabung sehingga menyebabkan kerusakan tanaman hortikultura dimana banyak tanaman yang rusak tidak dipanen dan sebagian yang tidak rusak namun tidak dapat memproduksi secara optimal.



3. Daya Saing Nilai Tukar Petani Sektor Hortikultura



Pembangunan Pertanian ditujukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Indikator yang dapat digunakan untuk mengembangkan kesejahteraan petani, antara lain : pendapatan, tingkat upah dan daya beli yang di ukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP), serta terbukanya akses bagi setiap pelaku usaha pertanian terhadap sumber daya produktif pertanian (modal, informasi, teknologi, lahan dan air).

Tabel 119
Capaian Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Sektor Pangan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian Kinerja
	Volume	Satuan	Volume	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NTP Sektor Holtikultura	109,62	%	98,24	%	89,61	Sangat Baik

Sumber : Badan Ketahanan Pangan (BKP) Prov. Sumut, diolah

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator proxy kesejahteraan petani yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). $NTP > 100$ berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. $NTP = 100$ berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. $NTP < 100$ berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. NTP Sumatera Utara pada tahun 2014 sebesar 100,08 lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2015, namun bila dilihat dari NTPH (Nilai Tukar Petani Hortikultura) terjadi penurunan. Penurunan disebabkan oleh karena fokus kegiatan hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan masih di Dataran Tinggi terutama di Kabupaten Karo. Seperti kita ketahui sampai saat ini di Kabupaten Karo masih terjadi erupsi Gunung Sinabung sehingga menyebabkan kerusakan tanaman hortikultura dimana banyak tanaman



yang rusak tidak dipanen dan sebagian yang tidak rusak namun tidak dapat berproduksi secara optimal. Perkembangan Nilai Tukar Petani Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2013, 2014 dan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 120
Perbandingan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2013, 2014 dan 2015

URAIAN	2013	2014	2015*
Nilai Tukar Petani (NTP)	99,48	100,18	99,23
• Nilai Tukar Petani Padi & Palawija (NTPP)	99,29	99,54	97,16
• Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	102,16	98,14	98,24

Sumber : Dinas Pertanian Prov. Sumatera Utara Tahun 2015

4. Daya Saing Nilai Tukar Petani Sektor Perikanan



Pada Tahun 2015, Target NTN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 117,4. Dan Realisasi NTN Pada tahun 2015 adalah sebesar 100,98. Walaupun NTN tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2015, namun terdapat peningkatan sebesar 0.25% dari tahun 2014, dimana realisasi NTN pada tahun 2014 sebesar 100,72.

Secara Umum dapat diartikan bahwa kemampuan daya beli nelayan relatif lebih baik jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya (NTN > 100), dimana nilai tersebut mengindikasikan dari pendapatan yang dihasilkan oleh nelayan masih ada yang dapat di simpan dalam bentuk tabungan sebesar 0.98% dari penghasilannya tersebut. Nelayan merupakan salah satu komunitas masyarakat yang selama ini berada dalam lingkaran kemiskinan dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Upaya peningkatan kesejahteraan nelayan yang dilakukan melalui berbagai skema program pemberdayaan belum sepenuhnya berhasil mengentaskan kemiskinan nelayan secara merata. Untuk itulah maka program peningkatan



kesejahteraan nelayan merupakan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung Sasaran Strategis ke-6 (enam) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu: “Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup”. Dimana didalam sasaran strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mendukung untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN).

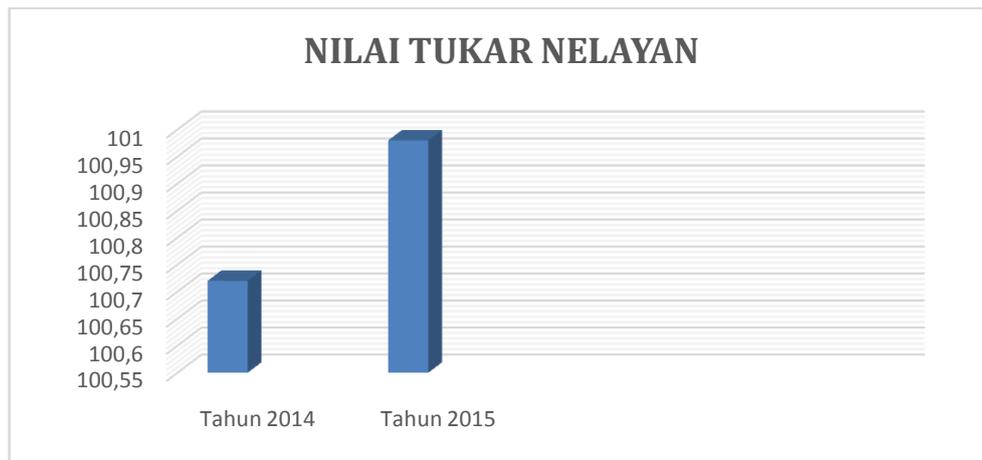
Nilai Tukar Nelayan (NTN) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan. NTN juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTN, secara relative semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan 2015 :

Pada Tahun 2015, Target NTN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 117,4. Dan Realisasi NTN Pada tahun 2015 adalah sebesar 100,98. Walaupun NTN tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2015, namun terdapat peningkatan sebesar 0.25% dari tahun 2014, dimana realisasi NTN pada tahun 2014 sebesar 100,72. Secara Umum dapat diartikan bahwa kemampuan daya beli nelayan relatif lebih meningkat jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya (NTN > 100), masih ada 0.25% peningkatan pendapatan yang dapat disimpan oleh nelayan dibanding tahun sebelumnya.

Berikut Grafik NTN Nelayan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Grafik 58
Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2015

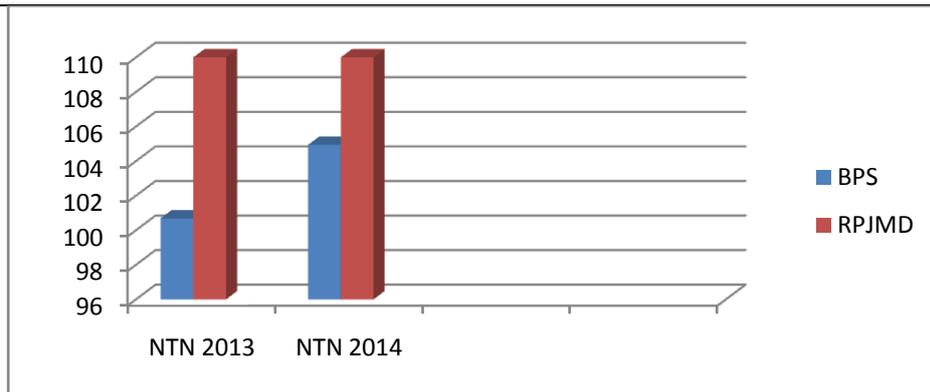


Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Sumut

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014, bahwa Nilai Tukar Nelayan di Sumatera Utara adalah sebesar 100,69 dimana hal ini dibandingkan dengan Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2013 mengalami penurunan 4%, dimana Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2013 adalah sebesar 104,94, sedangkan apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Sumut Tahun 2013-2018 sebesar 110,2 maka persentase indeks nilai tukar nelayan belum tercapai optimal (91,54%).

Nilai Tukar Nelayan Sumatera Utara di atas 100%, ini menggambarkan bahwa keluarga nelayan Sumatera Utara mempunyai tingkat kesejahteraan cukup baik untuk memenuhi kebutuhannya dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya atau menabung dalam bentuk investasi barang.

Grafik 59
Nilai Tukar Nelayan Tahun 2013-2014



Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Sumut

Nilai Tukar Nelayan ini menurun pada tahun 2014 disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi selain keadaan force major, seperti cuaca yang memburuk sehingga nelayan tidak dapat melaut, kelangkaan bbm (solar), sumberdaya ikan yang sudah mulai menurun dikarenakan kurangnya rehabilitasi ekosistem sebagai tempat hidup ikan di laut, dimana perlu adanya: pembuatan rumah ikan di Pantai Barat dan Pantai Timur, Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang, Transplantasi Terumbu Karang serta rehabilitasi mangrove. Selain itu, faktor penurunan Nilai Tukar Nelayan tahun 2014 disebabkan oleh seluruh kegiatan berupa bantuan ke masyarakat tidak dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu karena belum memenuhi persyaratan sesuai Permendagri No 32 Tahun 2011 Perihal: Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana seluruh kegiatan berupa bantuan kepada masyarakat merupakan hibah/ bantuan sosial yang membutuhkan proposal kelompok masyarakat yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara. Kemudian Gubernur Sumatera Utara meminta kepada SKPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan bantuan hibah dari kelompok tersebut dan membuat rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara, yang kemudian Gubernur Sumatera Utara menetapkan dalam SK. Mengingat pada tahun 2014, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara belum melaksanakan seluruh prosedur tersebut oleh karena itu semua kegiatan masyarakat baik untuk nelayan, pembudidaya, pengolahan dan pemasaran tidak dilaksanakan. Hal ini jelas



mempengaruhi penurunan indeks nilai tukar nelayan dikarenakan dengan adanya bantuan-bantuan alat tangkap, coolbox dan kapal sangat membantu nelayan dalam meningkatkan produksi tangkapan yang akhirnya mempengaruhi pendapatannya. Terutama melalui mata pencaharian alternatif nelayan untuk mengantisipasi musim yang tidak dapat melaut, sehingga nelayan tetap mendapatkan penghasilan melalui pekerjaan alternatifnya seperti budidaya lele di pekarangan, kepiting bakau, dan sebagainya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014, bahwa Nilai Tukar Nelayan di Sumatera Utara adalah sebesar 100,69 dimana hal ini dibandingkan dengan Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2013 mengalami penurunan 4%, dimana Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2013 adalah sebesar 104,94, sedangkan apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Sumut Tahun 2013-2018 sebesar 110, maka persentase indeks nilai tukar nelayan belum tercapai optimal (91,54%). Nilai Tukar Nelayan Sumatera Utara di atas 100%, ini menggambarkan bahwa keluarga nelayan Sumatera Utara mempunyai tingkat kesejahteraan cukup baik untuk memenuhi kebutuhannya dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya atau menabung dalam bentuk investasi barang.

Adapun angka Nilai Tukar Nelayan ini menurun pada tahun 2014 disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi selain keadaan force major, seperti cuaca yang memburuk sehingga nelayan tidak dapat melaut, kelangkaan bbm (solar), sumberdaya ikan yang sudah mulai menurun dikarenakan kurangnya rehabilitasi ekosistem sebagai tempat hidup ikan di laut, dimana perlu adanya: pembuatan rumah ikan di Pantai Barat dan Pantai Timur, Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang, Transplantasi Terumbu Karang serta rehabilitasi mangrove. Selain itu, faktor penurunan Nilai Tukar Nelayan tahun 2014 disebabkan oleh seluruh kegiatan berupa bantuan ke masyarakat tidak dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu karena belum memenuhi persyaratan sesuai Permendagri No 32 Tahun 2011 Perihal: Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang



Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana seluruh kegiatan berupa bantuan kepada masyarakat merupakan hibah/ bantuan sosial yang membutuhkan proposal kelompok masyarakat yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara. Kemudian Gubernur Sumatera Utara meminta kepada SKPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan bantuan hibah dari kelompok tersebut dan membuat rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara, yang kemudian Gubernur Sumatera Utara menetapkan dalam SK. Mengingat pada tahun 2014, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara belum melaksanakan seluruh prosedur tersebut oleh karena itu semua kegiatan masyarakat baik untuk nelayan, pembudidaya, pengolahan dan pemasaran tidak dilaksanakan. Hal ini jelas mempengaruhi penurunan indeks nilai tukar nelayan dikarenakan dengan adanya bantuan-bantuan alat tangkap, coolbox dan kapal sangat membantu nelayan dalam meningkatkan produksi tangkapan yang akhirnya mempengaruhi pendapatannya. Terutama melalui mata pencaharian alternatif nelayan untuk mengantisipasi musim yang tidak dapat melaut, sehingga nelayan tetap mendapatkan penghasilan melalui pekerjaan alternatifnya seperti budidaya lele di pekarangan, kepiting bakau, dan sebagainya.

Capaian Indikator Kinerja :

Daya Saing Ketahanan Energi



Terkait dengan capaian Daya Saing Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2015 di bidang Ketahanan dalam rangka keberhasilan Sasaran Strategis “**TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING PROVINSI SUMATERA UTARA BAIK DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP**”, juga dipengaruhi oleh 2 (dua) indikator lain sebagai turunan dari indikator Ketahanan Energi, yaitu :

1. Daya Listrik Terpasang
2. Rasio Elektrifikasi.



1. Daya Listrik Terpasang



Sistem tenaga listrik Provinsi Sumatera Utara tidak bisa dilepaskan dari sistem Sumatera Bagian Utara (SUMBAGUT) PT. PLN (Persero). Tenaga listrik dipasok melalui sistem terintegrasi pembangkit, transmisi dan distribusi. Karena seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah usaha PT. PLN (Persero), penyediaan tenaga listrik terintegrasi hanya dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Sistem ketenagalistrikan SUMBAGUT terdiri dari Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Sistem SUMBAGUT dipasok dari beberapa pembangkit listrik yang pada umumnya berada di Sumatera Utara. Sumber energi primer yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik sistem SUMBAGUT bervariasi dari minyak bumi, gas, batubara, air dan panas bumi. Berikut ini data pembangkit terpasang di Sumatera Utara yang memasok listrik ke sistem SUMBAGUT :

Tabel 121.
Pembangkit Sumatera Bagian Utara (SUMBAGUT)

No	Lokasi Pembangkit	Kapasitas Terpasang (MW)				
		Energi Fosil		Energi Terbarukan		
		Diesel	Batubara	Air	Panas Bumi	Biomassa
Sektor Belawan						
1	PLTU, PLTGU, PLTD sewa	1.284				
Sektor Medan						
2	Glugur	36				
3	Paya Pasir	119				
4	Titi Kuning	25				
5	PLTD Sewa	335				
Sektor Pandan						
6	Sipansihaporas			50		
7	Renun			80		
8	PLTMH tersebar			5		
Sektor Labuhan Angin						
9	Labuhan Angin #1, #2		230			
Sektor Pangkalan Susu						
10	Pangkalan Susu #1, #2		440			
Independent Power Producer (IPP)						
11	Asahan I (#1, #2)			180		
12	PLTM Parlilitan			7,5		
13	PLTM Silau			7,5		
14	PLTM Huta Raja			5		



No	Lokasi Pembangkit	Kapasitas Terpasang (MW)				
		Energi Fosil		Energi Terbarukan		
		Diesel	Batubara	Air	Panas Bumi	Biomassa
15	PLTM Karai			8,3		
16	Sibayak #1				10	
17	PLTU Growth Sumatera					11
18	PLTU Growth Asia					20
19	PLTU Rambutan					2
Jumlah		1.799	670	343,3	10	33
		2.469		386,3		
Total		2.855,3				

(Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumatera Utara).

Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Provinsi Sumatera Utara yang memasok daya ke sistem SUMBAGUT adalah sebesar 2.855,3 MW. Selain menggunakan bahan bakar terbarukan berupa diesel dan batubara, beberapa pembangkit listrik memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi dan biomassa. Kapasitas pembangkit berbasis energi fosil dan energi terbarukan masing-masing 2.469 MW dan 386,3 MW. Komposisi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yaitu sebesar 13,5% dari total kapasitas terpasang di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data UPB PT. PLN Sumatera Utara, kapasitas terpasang pembangkit listrik yang berlokasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebesar 463 MW. Jadi, total kapasitas terpasang pembangkit sistem SUMBAGUT yaitu sebesar 3.318,3 MW. Sedangkan daya mampu pasok pembangkit sistem SUMBAGUT pada tahun 2014 hanya sekitar 1.500 MW atau sekitar 45,2 % dari total kapasitas terpasang. Kemampuan pasok pembangkit relatif rendah disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Kondisi pembangkit eksisting yang sudah berumur di atas 20 tahun khususnya di pembangkit sektor Belawan dan Medan sehingga rentan mengalami kerusakan;
2. Pembangkit-pembangkit baru dibangun berbahan bakar batubara justru sering tidak stabil atau keluar sistem kelistrikan seperti PLTU Labuhan Angin (230 MW);



-
3. PLTU Nagan Raya (220 MW) dan PLTU Pangkalan Susu (440 MW) belum beroperasi maksimal terkendala persoalan teknis.

Penyediaan energi listrik di sisi pembangkit sangat terbantu oleh kebijakan PT.PLN (Persero) melakukan sewa pembangkit diesel (455 MW) yang tersebar di sektor Medan dan Belawan. Pada tahun 2015, daya mampu pasok pembangkit listrik cenderung membaik yaitu sebesar 1.850 MW. Kondisi ini dikarenakan semakin stabilnya PLTU Pangkalan Susu (440 MW) dan PLTU Nagan Raya Aceh (220 MW).

Capaian Kinerja Tahun 2014..... :

Capaian Kinerja Daya Listrik Terpasang :

Sistem tenaga listrik Provinsi Sumatera Utara tidak bisa dilepaskan dari sistem Sumatera Bagian Utara (SUMBAGUT) PT. PLN (Persero). Tenaga listrik dipasok kepada masyarakat melalui sistem terintegrasi pembangkit, transmisi dan distribusi. Karena seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah usaha PT. PLN (Persero), penyediaan tenaga listrik terintegrasi hanya dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Sistem ketenagalistrikan SUMBAGUT terdiri dari Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Sistem SUMBAGUT dipasok dari beberapa pembangkit listrik yang pada umumnya berada di Sumatera Utara. Sumber energi primer yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik sistem SUMBAGUT bervariasi dari minyak bumi, gas, batubara, air dan panas bumi. Berikut ini data pembangkit terpasang di Sumatera Utara yang memasok listrik ke sistem SUMBAGUT. Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Provinsi Sumatera Utara yang memasok daya ke sistem SUMBAGUT adalah sebesar 2.855,3 MW. Selain menggunakan bahan bakar terbarukan berupa diesel dan batubara, beberapa pembangkit listrik memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi dan biomassa. Kapasitas pembangkit berbasis energi fosil dan energi terbarukan masing-masing 2469 MW dan 386,3 MW. Komposisi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yaitu sebesar 13,5 % dari total kapasitas terpasang di Provinsi



Sumatera Utara. Berdasarkan data UPB PT. PLN Sumatera Utara, kapasitas terpasang pembangkit listrik yang berlokasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebesar 463 MW.

Jadi, total kapasitas terpasang pembangkit sistem SUMBAGUT yaitu sebesar 3318,3. Sedangkan daya mampu pasok pembangkit sistem SUMBAGUT hanya sekitar 1500 MW atau sekitar 45,2 % dari total kapasitas terpasang. Kemampuan pasok pembangkit relatif rendah disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Kondisi pembangkit eksisting yang sudah berumur di atas 20 tahun khususnya di pembangkit sektor Belawan dan Medan sehingga rentan mengalami kerusakan.
2. Pembangkit-pembangkit baru dibangun berbahan bakar batubara justru sering tidak stabil atau keluar sistem kelistrikan seperti PLTU Labuhan Angin (230 MW).
3. PLTU Nagan Raya (220 MW) dan PLTU Pangkalan Susu (440 MW) belum beroperasi maksimal terkendala persoalan teknis.

Penyediaan energi listrik di sisi pembangkit sangat terbantu oleh kebijakan PT. PLN (Persero) melakukan sewa pembangkit diesel (455 MW) yang tersebar di sektor Medan dan Belawan.

2. Rasio Elektrifikasi



Rasio elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 sebesar 89,91%. Beban puncak sistem Sumatera Bagian Utara pada tahun 2014 dan 2015 sudah mencapai masing-masing 1.750 MW dan 1.800 MW. Pada tahun 2014, kondisi ini tidak dibarengi dengan daya mampu pasok yang hanya sekitar 1.500 MW, sehingga terjadi defisit listrik sekitar 250 MW. Pada tahun 2015, daya mampu pasok sudah mencapai 1.850 MW sehingga sistem mempunyai cadangan sekitar 50 MW. Kondisi kelistrikan Sumatera Bagian Utara masih jauh dari kondisi ideal yaitu seharusnya memiliki cadangan listrik ideal 30% dari beban puncak. Apabila beban puncak



sistem Sumatera Bagian Utara sekitar 1.800 MW maka seharusnya cadangan daya listrik sudah mencapai sekitar 540 MW. Data Bank Indonesia pada tahun 2014, Provinsi Sumatera Utara mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,39%. Jika pertumbuhan kebutuhan listrik optimistik Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada angka di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata yaitu sekitar 7% maka kebutuhan listrik pada Tahun 2016 akan mengalami kenaikan 126 MW sehingga beban puncak listrik dapat mencapai angka sekitar 1.926 MW. Jika tidak maksimal perbaikan kinerja pembangkit eksisting dan tidak adanya pembangunan pembangkit baru di Sumatera Utara maka bisa dibayangkan pertumbuhan sektor listrik tidak bisa menunjang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang relatif tinggi.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2015 :

1. Program Listrik dan Pemanfaatan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2015. Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Pembangunan *Solar Home System (SHS) 50 Wp di Desa Terpencil di Sumatera Utara.* Kegiatan ini bertujuan melistriki rumah tangga di desa terpencil dengan fokus penerangan rumah kapasitas maksimum 50 Watt peak. Output kegiatan adalah telah membangun SHS di 7(tujuh) kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Langkat sebanyak 25 unit, Kabupaten Labuhan Batu Utara sebanyak 25 unit, Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 25 unit, Kabupaten Padang Lawas Utara 150 unit, Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 110 unit, Kabupaten Nias Utara 100 unit dan Kabupaten Nias Barat 100 unit. Outcome kegiatan ini yaitu masyarakat menikmati listrik untuk penerangan pada 535 Kepala Keluarga yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa terpencil di Sumatera Utara serta berupaya membantu meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan SHS di desa terpencil juga telah dilakukan pada Tahun Anggaran 2014. Total SHS yang dibangun yaitu sebanyak 350



unit yang terdiri dari Kabupaten Langkat sebanyak 30 unit, Kabupaten Labuhan Batu Utara sebanyak 30 unit, Kabupaten Simalungun sebanyak 30 unit, Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 30 unit, Kabupaten Padang Lawas Utara 81 unit dan Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 149 unit. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2014, pembangunan SHS pada Tahun Anggaran 2015 mengalami peningkatan sebanyak 185 unit.

2) Pembangunan PLTMH di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Perbaikan PLTMH di Kabupaten Karo. Apabila suatu daerah mempunyai potensi energi terbarukan tenaga air, maka pembangunan listrik pedesaan diprioritaskan pada PLTMH. Pembangunan PLTMH kapasitas 8 kW berlokasi di Desa Tapus Nabolak, Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan selesainya pembangunan PLTMH ini maka akan melistriki 60 Kepala Keluarga di Desa Tapus Nabolak. Untuk perbaikan PLTMH kapasitas 15 kW dilakukan di Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo.

Inventarisasi perijinan ketenagalistrikan. Pembangkit listrik terpasang di sistem SUMBAGUT salah satunya dipasok oleh pembangkit energi terbarukan bersumber dari tenaga air. Beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah PLTA Asahan I (180 MW), PLTA Renun (80 MW) dan Sipansihaporas (50 MW). Penyediaan listrik bersumber tenaga air juga dibantu oleh pasokan Pembangkit Listrik Tenaga Mini (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Beberapa pembangkit PLTM yang beroperasi adalah PLTM Parlilitan (7,5 MW), PLTM Silau (8 MW), PLTM Hutaraja (5 MW) dan PLTM Karai (7 MW). Berikut rekapitulasi perkembangan pembangunan PLTM yang ada di Provinsi Sumatera Utara:

1. Beroperasi	: 4 Unit (28,3 MW)
2. Pelaksanaan Konstruksi	: 9 Unit (77,9 MW)
3. Sudah <i>Power Purchase Agreement</i> (PPA)	: 16 Unit (158.7 MW)
4. Proses PPA	: 20 Unit (147.3 MW)
5. Proposal	: 67 Unit (501.4 MW)
Total	:116 Unit (913.6 MW)



Selain pembangkit tenaga air yang terhubung dengan sistem SUMBAGUT PT. PLN, pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri yang ijin operasinya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah PLTA Asahan II (603 MW) dan PLTA Asahan IV (90 MW). PLTA Asahan II dioperasikan oleh PT. Inalum yang dayanya digunakan untuk keperluan pabrik peleburan aluminium di Kuala Tanjung Kabupaten Batubara. Untuk membantu PT. PLN mengatasi defisit daya listrik, PT. Inalum juga turut memasok daya ke sistem SUMBAGUT rata-rata sebesar 90 MW.

Dalam upaya membantu PT. PLN menyediakan listrik bagi masyarakat Sumatera Utara khususnya kebutuhan Kawasan Industri Medan (KIM), Pemerintah pusat telah menetapkan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik kepada PT. Mabar Elektrindo. Berdasarkan penetapan wilayah usaha tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan ijin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan KIM kepada PT. Mabar Elektrindo, PT. Mabar Elektrindo sedang proses membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kapasitas 300 MW berlokasi di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

Sementara itu, Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi mempunyai tanggung jawab menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat khususnya masyarakat di desa-desa terpencil yang belum tersambung dengan jaringan PT. PLN. Salah satu pembangkit listrik yang pembangunannya bersumber dari APBN dan APBD adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pada Tahun Anggaran 2015, Kementerian ESDM telah membangun 1(satu) unit PLTMH kapasitas 20 kW berlokasi di Desa Hutabaru, Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Capaian Kinerja Tahun 2014

Rasio elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 sebesar 89,91 %, beban puncak sistem Sumatera Bagian Utara pada tahun 2013 dan 2014 sudah



mencapai sekitar 1750 MW. Rasio elektrifikasi Kondisi ini tidak dibarengi dengan daya mampu pasok yang hanya sekitar 1500 MW, sehingga terjadi defisit listrik sekitar 250 MW. Kondisi kelistrikan Sumatera Bagian Utara masih jauh dari kondisi ideal yaitu seharusnya memiliki cadangan listrik ideal 30 % dari beban puncak. Apabila beban puncak sistem Sumatera Bagian Utara sekitar 1750 MW maka seharusnya cadangan daya listrik sudah mencapai sekitar 525 MW.

Data Bank Indonesia pada tahun 2014, Provinsi Sumatera Utara mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,55 %. Jika pertumbuhan kebutuhan listrik optimistik Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada angka di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata yaitu sekitar 7 % maka kebutuhan listrik pada Tahun 2015 akan mengalami kenaikan 122,5 MW sehingga beban puncak listrik dapat mencapai angka sekitar 1872,5 MW. Jika tidak maksimal perbaikan kinerja pembangkit eksisting dan tidak adanya pembangunan pembangkit baru di Sumatera Utara maka bisa dibayangkan pertumbuhan sektor listrik tidak bisa menunjang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang relatif tinggi. Pembangunan Listrik Pedesaan Tahun 2013 dan Tahun 2014, dilakukan baik melalui dana APBD maupun APBN. Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi telah melaksanakan kegiatan “Pembangunan *Solar Home System* (SHS) 50 Watt peak di Desa Terpencil di Sumatera Utara”.

Kegiatan ini bertujuan memberi penerangan bagi rumah tangga yang berada di desa terpencil dengan kapasitas maksimum 50 Watt peak untuk setiap rumah tangga. Output kegiatan adalah terbangunnya Solar Home System (SHS) sebanyak : 350 unit pada 6 (enam) kabupaten di Sumatera Utara, yaitu :

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Kabupaten Langkat | : 30 unit, |
| 2. Kabupaten Labuhan Batu Utara | : 30 unit, |
| 3. Kabupaten Simalungun | : 30 unit, |
| 4. Kabupaten Tapanuli Utara | : 30 unit, |
| 5. Kabupaten Padang Lawas Utara | : 81 unit |
| 6. Kabupaten Mandailing Natal | : 149 unit. |



Outcome kegiatan ini adalah masyarakat sebanyak 350 KK (Kepala Keluarga) dapat menikmati penerangan listrik tenaga surya, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa terpencil di Sumatera Utara serta meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan SHS di desa terpencil juga telah dilakukan pada Tahun 2013. Total SHS yang dibangun yaitu sebanyak : 80 Unit pada 3 (tiga) kabupaten di Sumatera Utara yaitu :

1. Kabupaten Langkat : 26 unit,
2. Kabupaten Labuhan Batu Utara : 26 unit,
3. Kabupaten Tapanuli Selatan : 28 unit,

Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2013, pembangunan SHS pada tahun anggaran 2014 mengalami peningkatan sebanyak 270 Unit.

Capaian Indikator Kinerja :

Daya Saing Lingkungan Hidup.



Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan melalui pengendalian sumber-sumber pencemaran serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan uraian sasaran melalui 0% penurunan beban pencemaran parameter kunci air permukaan *Biological Oxygen Demand* (BOD), 0% *Chemical Oxygen Demand* (COD), 0% penurunan beban pencemaran parameter kunci udara ambien Sulfur Dioksida (SO₂), Carbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO₂), penurunan emisi gas rumah kaca, persentase ketaatan industri ditinjau dari kelengkapan dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL- UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), persentase Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata), prosentase penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat



yang sesuai dengan kewenangan, jumlah kabupaten/ kota yang mendapatkan kota bersih dan teduh (Adipura).

Peningkatan kualitas air danau khususnya air Danau Toba diperkuat melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan menetapkan Danau Toba merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup. Pada tahun 2009 tersusunlah Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) di Bali, dimana kegiatan ini bertujuan untuk pengelolaan danau berkelanjutan dan penentuan Danau Prioritas Nasional Tahap I. Dalam kesempatan tersebut dijadikan momentum untuk merevitalisasi pengelolaan danau diseluruh Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2011 pada pertemuan Germadan II tersusun *grand design* penyelamatan danau di Indonesia. Dokumen tersebut berisikan program dan penyelamatan ekosistem danau yang telah terintegrasi dengan peran dan fungsi seluruh sektor. Terdapat delapan program inti yaitu penataan ruang kawasan danau, penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Tangkapan Air (DTA) danau, pengembangan sistem monitoring, evaluasi dan informasi serta ekosistem danau, pengembangan kapasitas dan kelembagaan serta koordinasi, dan yang terakhir peningkatan peran dan partisipasi masyarakat.

Pada tanggal 13 Agustus 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Kawasan Danau Toba, dengan terbitnya Perpres tersebut maka Danau Toba telah dijadikan sebagai Kawasan Strategis Nasional artinya Danau Toba sudah menjadi perhatian Pemerintah Pusat, termasuk dalam hal alokasi anggaran sebagai bantuan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan diberbagai sektor terutama kepariwisataan. Diharapkan kedepannya setiap rencana pembangunan maupun izin-izin investasi diberbagai sektor yang memanfaatkan ekosistem Danau Toba harus mengacu kepada Tata Ruang Danau Toba.



Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan serta pelestarian Danau Toba antara lain : Pemantauan kualitas air Danau Toba, pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berada dikawasan Danau toba, melakukan pendampingan penilaian Geopark dikawasan Danau Toba, pembentukan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba Provinsi Sumatera Utara melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2016 dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/5/KPTS/2016 tentang Badan Pelaksana dan Kelompok Pakar Geopark Kaldera Toba Provinsi Sumatera Utara, memperbaharui profil jumlah penduduk di desa- desa pinggiran Danau Toba, penetapan daya dukung dan daya tampung kualitas air Danau Toba, *clean up* Danau Toba.

Selain permasalahan ekosistem danau kita juga dihadapkan pada menurunnya kualitas air sungai. Hasil pemantauan beberapa sungai seperti : Sungai Deli, Sungai Belawan, Sungai Wampu, Sungai Percut, Sungai Batahan penurunan kualitas air sungai disebabkan oleh limbah padat dan cair dari kegiatan domestik/rumah tangga, industri, lingkungan pemukiman, pasar, rumah sakit dan berbagai kegiatan lain disepanjang sungai tersebut. Permasalahan pencemaran akibat dari limbah padat seperti sampah dikarenakan penerapan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh kabupaten/kota, dimana amanah dari undang-undang tersebut harus menerapkan *Sanitary Landfill* (metode pengurangan sampah yang dioperasikan secara sistematis).

Untuk itu Pemprovsum berencana akan membangun 7 TPA Regional dengan pengelompokan sebagai berikut : Medan, Binjai Deli Serdang (Satu Cluster), Tebing Tinggi, Serdang Bedagai (Satu cluster), Tapanuli Tengah, Sibolga (Satu Cluster), Simalungun, Pematangsiantar (Satu Cluster), Tanjungbalai, Asahan (satu Cluster), Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan (Satu Cluster), Kepulauan Nias (Satu Cluster), jadi total semua ada 7 Cluster. Selain itu pemprovsum juga telah menggandeng negara lain untuk melakukan pengolahan sampah menjadi energy Listrik, dibeberapa daerah sampah juga dimanfaatkan menjadi bernilai ekonomis. Untuk ruang terbuka hijau di



Provinsi Sumatera Utara lebih kurang hanya 2500 Ha. Jumlah ini masih kurang dari target 30% dari luas wilayah Sumatera Utara yang memiliki luas 71.698,68 Km². Terkait dengan urusan wajib lingkungan hidup, dapat disampaikan bahwa indikator kinerja lingkungan diprioritaskan pada :

1. Informasi status mutu udara ambient (pencemaran udara), dari target capaian 2014 sebanyak 4 kabupaten/kota yakni : Medan, Karo, Deli Serdang dan Binjai, kemudian pada tahun 2015 dilaksanakan pemantauan status mutu udara ambient sebanyak 4 kabupaten/kota yakni : Medan, Karo, Deli Serdang, dan Binjai.
2. Jenis pelayanan informasi status mutu air pada tahun 2014 yang dipantau kualitasnya dan ditetapkan status mutu airnya sebanyak 5 sungai yakni : Sungai Asahan, Sungai Wampu, Sungai Percut, Sungai Deli dan Sungai Batahan, pada tahun 2015 sebanyak 6 sungai (5 Sungai 1 Danau) yaitu : Sungai Percut, Sungai Batahan, Sungai Deli, Sungai Wampu, Sungai Belawan, Danau Toba.
3. Kabupaten yang tergolong baik sesuai dengan kriteria Adipura pada tahun 2014 sebanyak 4 kabupaten/kota yakni: Medan, Tanjungbalai, Langkat dan Tebing Tinggi, sedangkan pada tahun 2015 dari 10 kabupaten/kota yang ikut Adipura, 2 mendapat Anugrah Adipura yakni : Lubuk Pakam dan Tebing Tinggi, 4 kabupaten mendapat Sertifikat Adipura yakni : Stabat, Pematangsiantar, Tanjungbalai dan Sidikalang.
4. Kabupaten yang menyediakan Tempat Pembuangan Sampah untuk dipergunakan masyarakat pada tahun 2014 sebanyak 918 buah yang terdiri dari Kabupaten Asahan 70 unit, Labuhanbatu Selatan 100 unit, Labuhanbatu Utara 123 unit, Padang Lawas 262 unit, Padang Lawas Utara 144 unit, Simalungun 70 unit, Tapanuli Selatan 20 unit, Toba Samosir 111 unit dan Kota Tebing Tinggi 18 unit. Sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 1.746 unit yang terdiri dari : Pemprovsu sebanyak 200 unit, Kabupaten Batu Bara 30 Unit, Labuhanbatu Utara 120 Unit, Nias Utara 166 Unit, Karo 200 Unit, Labuhanbatu Selatan 430 Unit dan Kota Sibolga 600 Unit.
5. Penegakan Hukum Lingkungan pengaduan yang diterima Badan Lingkungan Hidup Provsu : pada tahun 2014 pengaduan yang diterima 3 kasus yang ada



di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK RI) dan ditangani oleh mereka yakni : Rumah Sakit Abdul Manan Simatupang, Rumah Sakit Permata Bunda dan Hotel J.W Marriot diberikan sanksi Administrasi. Badan Lingkungan Hidup Provsu menerima 10 kasus dan diverifikasi dan dilakukan pengawasan sedangkan kasus yang ditangani kabupaten/kota sebanyak 20 kasus dan 6 diantaranya dibina dan dilakukan pengawasan, pada tahun 2015 kasus yang masuk sebanyak 27 kasus, 2 kasus telah masuk ke pengadilan dan 25 kasus sedang dalam tahap verifikasi dan penyidikan.

6. Program Penilaian Peringkat kinerja Perusahaan (Proper) merupakan salah satu upaya program unggulan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan kepada daerah khususnya Provinsi Sumatera Utara yang berupa kegiatan pengawasan dan pemberian kepada penanggungjawab usaha atau kegiatan untuk mendorong penataan perusahaan dalam mengikuti proper dalam pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2014 sebanyak 93 perusahaan mengikuti Proper. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah yang ikut proper sebanyak 101 perusahaan. Perusahaan yang mendapat hijau sebanyak 3 perusahaan, biru sebanyak 76 perusahaan, merah 18 perusahaan, hitam 2 perusahaan sedangkan 1 perusahaan ditunda sementara yang 1 lagi belum diumumkan, masih dalam proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup. Pada tahun 2015 diberikan kepada Saudara N. Akelaras, dengan kategori Perintis Lingkungan di Kabupaten Deli Serdang.
8. Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Diharapkan setiap warga sekolah dapat terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan. Pada tahun 2014 sekolah yang mendapatkan penghargaan dari Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan Pergub No. 188/454/KPTS/2014 Tanggal 24 Juni 2014 sebanyak 211 sekolah



dan mendapat Adiwiyata tingkat Nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 183/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebanyak 72 sekolah. Sedangkan pada tahun 2015, 35 sekolah mendapat Adiwiyata Nasional, 74 mendapat Adiwiyata Provinsi serta 10 sekolah mendapat Adiwiyata Mandiri.

9. Menuju Indonesia Hijau (MIH) yang mempunyai program menurunkan laju *deforestasi* dan lahan kritis. Saat ini di Provinsi Sumatera Utara jumlah kabupaten yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2014 sebanyak 8 kabupaten terdiri dari : Deli Serdang, Karo, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Langkat, Toba Samosir dan Nias Barat sedangkan pada tahun 2015 Program Menuju Indonesia hijau (MIH) tidak dilaksanakan.
10. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera Utara memperoleh **Juara Harapan I**.

Terkait dengan rekomendasi dewan untuk melakukan Pengendalian Pencemaran Air Danau toba sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Baku Mutu Air Danau toba, dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus melakukan pembinaan dan menginformasikan secara berkala kepada masyarakat dan stakeholder terkait kondisi dan kualitas air Danau Toba. Selanjutnya dalam pengendalian dan pencemaran air Danau Toba sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Baku Mutu Air Danau Toba, telah dilakukan langkah-langkah berupa :
 - a. Pemantauan kualitas air perairan Danau Toba yang dilakukan setiap tahun oleh UPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Gerakan Penyelamatan Danau Toba (Germadan Toba) dengan menerbitkan buku Germadan yang disusun dalam bentuk matriks analisis lingkungan kawasan Danau Toba dan rekomendasi program kegiatannya.



-
- c. Penetapan daya dukung dan daya tampung kualitas air Danau Toba yang ditindaklanjuti dengan menyurati pemerintah kabupaten/kota yang berada di kawasan sekitar Danau Toba untuk melakukan tindakan pencegahan dan pencemaran lingkungan.
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berada di kawasan Danau Toba melalui Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
 2. Evaluasi kebersihan dan keteduhan kota melalui program Adipura sangat memberikan kontribusi dan pengaruh signifikan pada peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan. Terkait dengan Menuju Indonesia Hijau (MIH) ini juga merupakan program yang dapat meningkatkan upaya pemerintah kabupaten dalam pemulihan kualitas lingkungan yang dilaksanakan dengan membuka peluang dan kesempatan masyarakat luas untuk berperan aktif dalam pelestarian sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan disamping itu, melalui pengembangan inovasi dalam menciptakan mata pencaharian alternatif untuk mendorong peningkatan masyarakat setempat. Melalui penghargaan Menuju Indonesia Hijau (MIH) pengawasan terhadap kinerja pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan peraturan dibidang konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan akan menjadi lebih baik.
 3. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pengendalian pencemaran udara, dapat dijelaskan bahwa Perda pencemaran udara yang diselaraskan dengan cukai rokok dan pelarangan merokok ditempat umum, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui lintas unit kerja terus melakukan upaya dalam rangka koordinasi maupun sosialisasi tentang bahaya merokok bagi lingkungan sekitarnya melalui dinas kesehatan dan Rumah Sakit Pemerintah.
 4. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan DAS terpadu Provinsi Sumatera Utara, dapat disampaikan bahwa Pemerintah
-



Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti dengan mengkomunikasikan dan mengkoordinasi tentang Perda Nomor 1 Tahun 2014 tersebut ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara melalui kegiatan Rapat Koordinasi Tekhnis (Rakornis) BLH Provsu bersama dengan seluruh SKPD Lingkungan Hidup yang ada di Sumatera Utara. Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan secara menyeluruh mulai keterpaduan kebijakan, penentuan sasaran dan tujuan, rencana kegiatan, implementasi program yang telah dilaksanakan serta monitoring dan evaluasi hasil kegiatan secara terpadu.

5. Mengenai Danau Toba sebagai daerah tangkapan air yang sudah terganggu oleh aktifitas dan degradasi lahan serta pencemaran air oleh aktifitas budidaya perikanan keramba apung, dapat kami sampaikan bahwa fungsi lingkungan perairan Danau Toba secara umum diperuntukkan dan dimanfaatkan sebagai sumber air untuk penyediaan air bersih, air industri, air untuk pengairan pertanian, sumber daya pariwisata, sumber daya perikanan, sumber daya energi dan prasarana transportasi. Terkait dengan kerusakan yang terjadi di kawasan Danau Toba, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan perhatian yang cukup serius terhadap kondisi Danau Toba melalui kegiatan Gerakan Penyelamatan Danau Toba, gerakan ini mencakup skala prioritas yang harus dilakukan tujuh daerah hulu dan tiga daerah hilir mengait daya dukung dan daya tampung. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Lingkungan Hidup juga telah mendirikan Unit Pelayanan Tekhnis (UPT) Danau Toba pada tahun 2012 yang berada di Ajibata. Terkait dengan pencemaran air Danau Toba oleh aktifitas budidaya perikanan keramba apung, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membuat edaran ke tujuh kabupaten/kota yang ada dikawasan Danau Toba agar tidak menerbitkan ijin Keramba Jaring apung (KJA) karena buangan pakan yang tidak dikonsumsi serta penggunaan bahan konstruksi yang tidak ramah lingkungan dapat mencemari Danau Toba.



Program/ Kegiatan yang dilaksanakan :

1. **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**, memuat kegiatan :
 - 1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL kabupaten/kota.
 - 2) Kajian pendahuluan penetapan baku mutu Sungai Wampu.
 - 3) Monitoring kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Sumatera Utara.
 - 4) Pemantauan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman di wilayah kabupaten/kota.
 - 5) Fasilitas dan pembinaan Menuju Indonesia Hijau (MHI) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**, memuat kegiatan :
 - 1) Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura.
 - 2) Operasional Komisi Penilai AMDAL Sumatera Utara.
 - 3) Operasional UPT. Laboratorium Lingkungan BLH Sumatera Utara.
 - 4) Penyusunan laporan pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara.
 - 5) Operasional UPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba.
 - 6) Operasional UPT. Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan dan Deli.
 - 7) Penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - 8) Pemantauan kualitas udara ambien Mebidangro.
 - 9) Rapat koordinasi daerah tentang pengelolaan limbah B3.
 - 10) Pemberdayaan masyarakat dalam penetapan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*).



- 11) Pembinaan terhadap perusahaan tentang pengelolaan limbah B3.
- 12) Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan pada industri di Kawasan Industri Medan (KIM).
- 13) Operasional Sekretariat Bersama (Sekber) aspek pengelolaan Industri Kelapa Sawit berwawasan lingkungan.
- 14) Bimbingan teknis terhadap perusahaan tentang pengelolaan limbah B3.
- 15) Monitoring dan evaluasi status mutu kualitas air sungai lintas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
- 16) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan status perizinan pengelolaan limbah terhadap industri pengumpul, pemanfaat dan pengelola limbah B3.
- 17) Pengadaan tempat sampah.

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan

Lingkungan Hidup, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pembinaan program dan penilaian sekolah Adiwiyata.
- 2) Pembinaan dan penilaian Kalpataru 2015.
- 3) Publikasi lingkungan hidup melalui media cetak dan elektronik.
- 4) Pembinaan dan penilaian status lingkungan hidup kabupaten/kota.
- 5) Penyusunan laporan status lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Penguatan jaringan data dan informasi melalui pengembangan SISFOKOM Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara.
- 7) Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2015.

4. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Operasional UPT. Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut.

Sebagaimana uraian di atas, bahwa terkait dengan kinerja Daya Saing bidang Lingkungan Hidup, dipengaruhi juga oleh 6 (enam) aspek di bawah ini yang



sekaligus merupakan indikator kinerja pendukungnya. Adapun ke- 6 aspek dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air Sungai dan Danau di Reseptor Sensitif



Kinerja pada Tahun 2015 untuk indikator ini, dapat diillustrasikan pada tabel berikut :

Tabel 122.
. Capaian Kinerja Tahun 2015

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2014		
	Target	Realisasi	%
Pelayanan Informasi Status Mutu Air Sungai dan Danau di Reseptor Sensitif (Unit/ Lokasi)	6	6	100

Sumber : Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Sumu

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Pelayanan Status Mutu Air Sungai dan Danau di reseptor yang sensitive sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 6 lokasi yang terdapat di:

1. Sungai Deli

Pemantauan Sungai Deli dilakukan di 5 titik sampling. Berikut status mutu airnya:.

- Status Mutu air di 3 titik (Sibayakindo, Pertemuan antara S.Deli dan S. Babura, dan Jembatan Brayon) **tergolong Cemar Berat.**
- Status mutu air di 2 titik (Si Mei-Mei dan Hulu Tirtanadi Deli Tua) **tergolong Cemar Sedang.**

2. Sungai Belawan

Pemantauan Sungai Belawan dilakukan di 5 titik sampling. Berikut status mutu airnya:

- Status mutu air di 4 titik (Jembatan Tuntungan, PT. Everbright, Bendungan Pabrik Gula Sei Semayang, Dekat PT. Rubber Hock Lie, Hilir Tirtanadi Sunggal) pada Sungai Belawan **tergolong Cemar Sedang.**
- Status mutu air di 1 titik yaitu di PT. Everbright pada Sungai Belawan **tergolong Cemar Berat.**



3. Sungai Wampu

Pemantauan Sungai Wampu dilakukan di 6 titik sampling. Berikut status mutu airnya:

- a. Status mutu air di 3 titik sampling (Jembatan Sei Bahorok, Jembatan Desa Tanjung Lenggang, Penyeberangan Getek Jumari Desa Perhiasan) pada Sungai Wampu **tergolong Cemar Berat**.
- b. Status mutu air di 3 titik sampling (Jembatan Desa Sogong, Jembatan Jl. Umar Baki binjai, Jembatan Desa Stabat) pada Sungai Wampu **tergolong Cemar Sedang**.

4. Sungai Percut

Pemantauan Sungai Percut dilakukan di 5 titik sampling. Berikut status mutu airnya:

- Status Mutu air di 2 titik (Jembatan Bukum desa Cinta Rakyat, Jembatan desa Sari laba Jahe, Jembatan desa Ajibaho Patumbak, Jembatan Desa Tembung, Jembatan Desa Bandar Setia) **tergolong Cemar Sedang**.
- Status mutu air di 3 titik (Jembatan Medan Amplas) **tergolong Cemar Berat**.

5. Sungai Batahan

Status mutu air di 6 titik sampling (Jembatan Gantung Desa Batu, Jembatan Bintungan Bejangkar Baru/Aerapa, Jembatan Bintungan Bejangkar Kampung, Jembatan Rambin trans-1, Jembatan Gantung Simpang Gordes, Lubuk Pusing) pada Sungai Batahan tergolong Cemar Berat.

6. Danau Toba

Pemantauan Danau Toba dilakukan di 22 titik sampling. Berikut status mutu airnya:

- a. Status Mutu air di 4 titik (Prapat, Lintong, Karo, Salbe) **tergolong Sangat Baik**.
- b. Status mutu air di 18 titik (Ajibata, Onan Runggu, Sigaol, Porsea, Balige, Muara, Bakkara, Tao Nainggolan, Palipi, Pangururan, Tao Silalahi, Silalahi, Haranggaol, Simanindo, Ambarita, Tomok, Panahatan) **tergolong Cemar Ringan**.



Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator ini memenuhi 100% target . Sedangkan pemakaian anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan dari indikator ini sebesar 90,26% dari total anggaran yang dialokasikan. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara efektif dan efisien untuk mencapai target dari indikator kinerja ini.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan 2015

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang dicapai selama kurun waktu tahun 2015 dengan tahun 2014 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 123.
Capaian Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2014			Capaian Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pelayanan Informasi Status Mutu Air Sungai dan Danau di Reseptor Sensitif (Unit/ Lokasi)	6	6	100	6	6	100

Sumber : Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Sumut

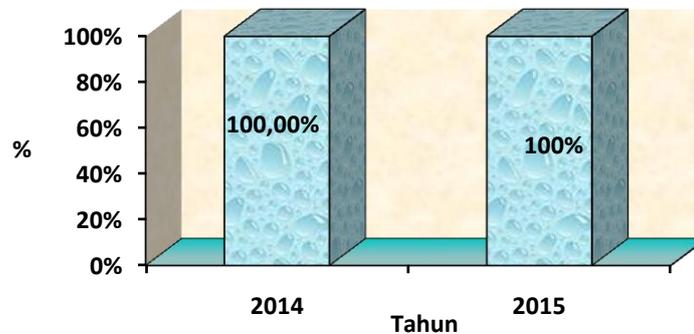
Capaian Kinerja dari indikator ini dalam dua tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 124.
Capaian kinerja untuk pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive dalam 2 tahun terakhir

Tahun	Target lokasi pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive	Jumlah lokasi pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive yang terealisasi	Capaian Kinerja (%)
2014	6	6	100
2015	6	6	100

Sumber : Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Sumut

Grafik 60
Capaian Kinerja untuk pelayanan informasi
status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive dalam 2 tahun terakhir



Sumber : Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumut

Dari Tabel dan Grafik diatas, capaian kinerja untuk indikator pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive tahun 2014 dan 2015 adalah 100%.. Pencapaian kinerja ini sangat bergantung terhadap penyelenggaraan anggaran pada tahun berjalan.

Tahun 2014 Pelayanan Status Mutu Air Sungai dan Danau di reseptor yang sensitive, Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Pelayanan Status Mutu Air Sungai dan Danau di reseptor yang sensitive sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 6 lokasi yang terdapat di:

1. Sungai Deli

Status mutu air Sungai Deli di 7 titik sampling adalah :

- Status Mutu air di 5 titik (Sibayakindo, Jembatan Simalingkar B, Jembatan Jl. Ir. Juanda, Pertemuan antara S.Deli dan S. Babura, dan Jembatan Pulo Brayan) **tergolong Cemar Ringan.**
- Status mutu air di 2 titik (Pt. Unibis dan Jembatan Medan Labuhan) **tergolong Cemar Sedang.**

2. Sungai Belawan

Status mutu air di 7 titik sampling (Jembatan Tuntungan, Pertemuan S.Belawan-Krio, PDAM Tirtanadi Medan, PT. Everbright, Pabrik Gulai Sei Semayang, PT.



Rubber Hock Lie, Tirtanadi Hampan Perak) pada Sungai Belawan **tergolong Cemar Ringan.**

3. Sungai Asahan

Status mutu air Sungai Asahan di 6 titik sampling adalah :

- Status Mutu air di 2 titik (Jembatan Jl. Balige Psr. Porsea, Jembatan Desa Meranti Pintu Pohan) **tergolong Cemar Ringan.**
- Status mutu air di 2 titik (Titi Gantung Deang-deang, Jembatan downstream PKS Pulo Raja) **tergolong Cemar Sedang.**
- Status mutu air di 2 titik (Jembatan Kuning P.Simardan, Jembatan Tabayong Desa Patembo) **tergolong Cemar Berat.**

4. Sungai Wampu

Status mutu air di 6 titik sampling (Jembatan Desa Sogong, Jembatan Sei Bahorok, Jembatan Desa Tanjung Lenggang, Penyeberangan Getek Jumari Desa Perhiasan, Jembatan Jl. Umar Baki binjai, Jembatan Desa Stabat) pada Sungai Wampu **tergolong Cemar Sedang.**

5. Sungai Percut

Status mutu air Sungai Percut di 6 titik sampling adalah :

- Status Mutu air di 2 titik (Jembatan Bukum desa Cinta Rakyat dan Jembatan desa Sari laba Jahe) **tergolong Cemar Ringan.**
- Status mutu air di 3 titik (Jembatan desa Ajibaho Patumbak, Jembatan Medan Amplas dan Jembatan Desa Bandar Setia) **tergolong Cemar Sedang.**
- Status mutu air di 1 titik (Jembatan Desa Tembung) **tergolong Cemar Berat.**

6. Sungai Batahan

Status mutu air di 6 titik sampling (Jembatan Gantung Desa Batu, Jembatan Bitungan Bejangkar Baru/Aerapa, Jembatan Bitungan Bejangkar Kampung, Jembatan Rambin tran-1, Jembatan Gantung Simpang Gordes, Lubuk Pusing) pada Sungai Batahan **tergolong Cemar Berat.**

Tabel 125
Capaian kinerja untuk pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive dari Tahun 2012- 2014

TAHUN	JUMLAH KUALITAS AIR SUNGAI DAN DANAU YANG DIPANTAU
2012	7
2013	3
2014	6

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumut

Capaian kinerja untuk indikator pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2013 namun masih lebih rendah dari tahun 2012. Pencapaian kinerja ini sangat bergantung terhadap penyelenggaraan anggaran pada tahun berjalan.

2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambient



Kualitas Udara untuk parameter SO₂, NO₂, H₂S, NH₃, TSP secara trend nilai keseluruhan di wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo menunjukkan bahwa masih dibawah ambang batas baku mutu kualitas udara ambien. Sedangkan kualitas udara untuk parameter kebisingan di wilayah-wilayah tersebut terdapat trend nilai yang telah melewati ambang batas baku mutu kualitas udara ambien sebagai dampak aktifitas pembangunan dan kegiatan perkotaan. Capaian Kinerja tahun 2015 pada indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 126
Capaian IKinerja Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambient

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)
	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambient	5	Unit/ Lokasi	5	Unit/ Lokasi	100

Sumber : Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Sumut

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambient dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 5



lokasi walaupun hanya dilakukan di 4 kabupaten/kota. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan satu lokasi pelayanan informasi status mutu udara ambien di Kabupaten Karo sehubungan terjadinya bencana letusan Gunung Sinabung sehingga anggaran pun dialihkan ke lokasi ini. Lokasi-lokasi yang dilakukan Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien adalah sebagai berikut:

1. Kota Medan (Halaman TVRI Medan)
2. Kota Binjai (Lapangan Merdeka Binjai)
3. Kabupaten Deli Serdang (Halaman Kantor Bupati Deli Serdang)
4. Kabupaten Karo-Berastagi (Halaman Kantor Dinas Pariwisata Kab.Karo)
5. Kabupaten Karo (Pos Pemantauan Gunung Sinabung)

Kualitas Udara untuk parameter SO₂, NO₂, H₂S, NH₃, TSP, Kebisingan secara trend nilai keseluruhan di wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo menunjukkan bahwa masih dibawah ambang batas baku mutu kualitas udara ambien.

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 5 lokasi walaupun hanya dilakukan di 4 kabupaten/kota.

Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun terakhir :

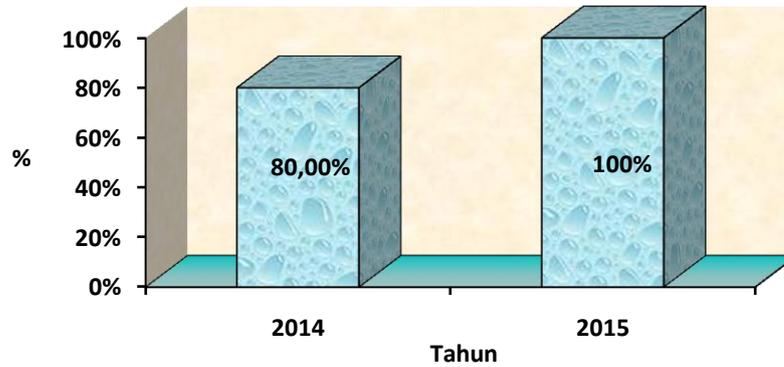
Sedangkan Capaian Kinerja dari indikator ini dalam dua tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 127.
Capaian kinerja untuk pelayanan informasi status mutu udara ambien dalam 2 tahun terakhir

Tahun	Target Lokasi Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	Jumlah Lokasi Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien yang terealisasi	Capaian Kinerja (%)
2014	5	4	80%
2015	5	5	100%

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumut

Grafik 61.
Capaian Kinerja untuk pelayanan informasi
status mutu udara ambien dalam 2 tahun terakhir



Sumber : Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumut

Dari Tabel dan Grafik diatas, capaian kinerja untuk indikator pelayanan informasi status mutu udara ambien tahun lebih tinggi dari tahun 2014. Pencapaian kinerja ini sangat bergantung terhadap penyelenggaraan anggaran pada tahun berjalan.

Tabel 128
Capaian Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2014			Capaian Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pelayanan Informasi Status Mutu Air Sungai dan Danau di Reseptor Sensitif (Unit/ Lokasi)	5	4	80	6	6	100

Sumber : Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Sumut

Capaian Kinerja Tahun 2014 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 5 lokasi yang terdapat di:

1. Kota Medan
2. Kota Binjai
3. Kabupaten Deli Serdang
4. Kabupaten Karo



Capaian kinerja untuk indikator ini hanya mencapai 80% yaitu hanya tercapai 4 lokasi dari 5 lokasi yang ditargetkan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan sehingga target tidak terpenuhi dengan baik. Capaian kinerja untuk indikator pelayanan informasi status mutu udara ambien tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2013 dan sama dengan tahun 2012. Pencapaian kinerja ini sangat bergantung terhadap penyelenggaraan anggaran pada tahun berjalan.

3. Cakupan Pelayanan AMDAL (%)



Capaian Kinerja tahun 2015 pada indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 129
Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan AMDAL Tahun 2015

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)
	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
Cakupan Pelayanan AMDAL (%)	6	Unit/ Lokasi	6	Unit/ Lokasi	100

Sumber : Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Sumut

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Cakupan Pelayanan AMDAL adalah 100% didapat dari: Perusahaan yang mengajukan pembuatan dokumen AMDAL/RKL-RPL sebanyak 17 perusahaan dan dokumen AMDAL/RKL-RPL yang ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 juga sebanyak 17 dokumen. Dimana 8 (delapan) dokumen sudah dikeluarkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dan 9 (sembilan) dokumen dalam proses pembahasan untuk dikeluarkan SKKL. Sedangkan realisasi anggaran yang terpakai untuk menjalankan program/kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja dari indikator ini yaitu sebesar 92,10% dari total anggaran yang dialokasikan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa keefektifan dan keefesienan kerja yang baik dimana untuk mencapai target kinerja 100% dari Cakupan Pelayanan AMDAL masih menyisakan dana sekitar 7,90% dari total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan dari indikator ini.



Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun terakhir :

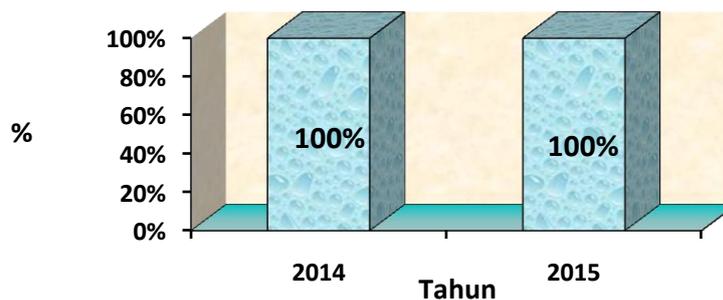
Berkenaan dengan Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir untuk indikator ini disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 130
Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan AMDAL dalam 2 tahun terakhir

Tahun	Perusahaan yang mengajukan pembuatan dokumen AMDAL/UKL-UPL	Dokumen AMDAL/UKL-UPL yang sudah selesai dibahas BLH-SU	Capaian Kinerja (%)
2014	5	5	100
2013	20	20	100
2014	8	8	100
2015	17	17	100

Sumber : Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Sumut

Grafik 62.
Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan AMDAL 2 tahun terakhir



Sumber : Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Sumut

Dari Tabel dan Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk indikator cakupan pelayanan AMDAL dari tahun ke tahun sangat baik dan



memenuhi target 100%. Cakupan pelayanan AMDAL, perusahaan yang mengajukan pembuatan Dokumen AMDAL/UKL-UPL sebanyak 5 (lima) Perusahaan dan dapat terselesaikan, Tahun 2013 sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan dan dapat terselesaikan dan Tahun 2014 perusahaan yang mengajukan pembuatan Dokumen AMDAL/UKL-UPL sebanyak 8 (delapan) Perusahaan dan dapat terselesaikan. Dari tabel dapat dilihat bahwa Trend perusahaan yang mengajukan perusahaan yang mengajukan pembuatan Dokumen AMDAL/UKL-UPL naik turun.

4. Cakupan Pelayanan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup



Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup mencapai 100%. Hasil capaian ini didapat dari Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima instansi lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara dalam 1 tahun sebanyak 27 kasus sedangkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti juga sebanyak 27 kasus dimana 2 kasus sudah ditangani di pengadilan dan 25 kasus sedang dalam proses verifikasi yang memerlukan waktu dalam mengumpulkan bukti-bukti yang sah untuk menaikkan kasus ke pengadilan.

Sedangkan realisasi anggaran yang terpakai untuk melaksanakan program/kegiatan yang menunjang pencapaian target dari indikator ini yaitu sebesar 84,94 dari total anggaran yang dialokasikan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dapat tercapai dengan sangat baik dengan pemakaian dana yang efektif dan efisien.

Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun terakhir :

Capaian Kinerja untuk indikator ini dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 131.
Capaian Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2014			Capaian Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Cakupan Pelayanan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup	6	6	100	6	6	100

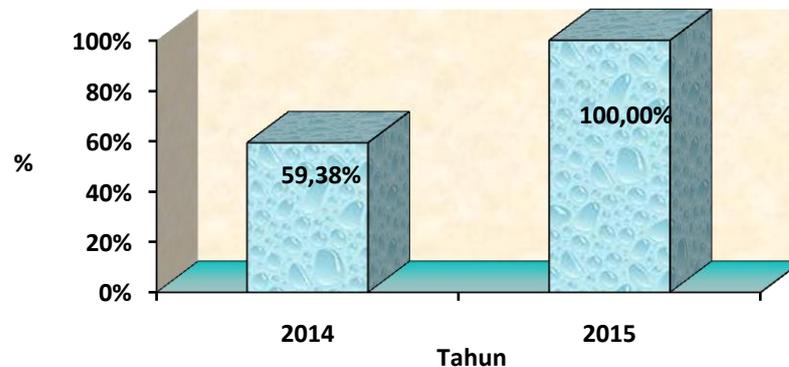
Sumber : Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Sumut

Tabel 132.
Capaian Kinerja untuk Cakupan Pelayanan Kasus-kasus Lingkungan Hidup dalam 2 tahun terakhir

Tahun	Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Pencapaian Kinerja (%)
2014	32	19	59,38
2015	27	27	100

Sumber : Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Sumut

Grafik 63
Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Kasus-kasus Lingkungan Hidup 2 tahun terakhir



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup pada tahun 2015 lebih tinggi dari pada pencapaian kinerja tahun 2014. Pencapaian kinerja untuk indikator cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup sangat bergantung dengan adanya kerjasama yang baik



antara Badan Lingkungan Hidup dengan para stakeholder termasuk masyarakat dan perusahaan/industri untuk penanganan kasus-kasus lingkungan hidup tersebut. Data Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 133
Capaian Kinerja untuk Cakupan Pelayanan Kasus-kasus Lingkungan Hidup
dari Tahun 2012 – Tahun 2014

Tahun	Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Pencapaian Kinerja (%)
2012	55	55	100
2013	15	5	33,33
2014	32	19	59,38

Sumber : Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Sumut

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup pada tahun 2014 lebih tinggi dari pada pencapaian kinerja tahun 2013 namun masih lebih rendah daripada pencapaian tahun 2012. Pencapaian kinerja untuk indikator cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup sangat bergantung dengan adanya kerjasama yang baik dengan para stakeholder termasuk masyarakat dan perusahaan/industri untuk penanganan kasus-kasus lingkungan hidup tersebut.

Permasalahan :

Permasalahan yang ada terkait dengan Capaian pada Indikator Kinerja disebabkan karena beberapa hal antara lain masih kurangnya koordinasi dengan masyarakat di kabupaten/kota dalam melakukan tindak lanjut pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sehingga beberapa kasus di kabupaten/kota tidak dapat ditindak lanjuti. Selain itu hal ini juga disebabkan karena kurangnya personil untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut serta waktu yang tidak memungkinkan atau terlalu singkat.

5. Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup



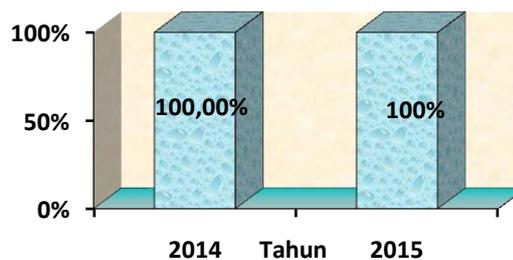
Realisasi Kinerja untuk indikator kinerja dari Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1 dokumen. Sehingga capaian kinerja memenuhi 100% dari target. Sedangkan pemakaian anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan dari indikator ini sebesar 91,64% dari total anggaran yang dialokasikan. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara efektif dan efisien untuk mencapai target dari indikator kinerja ini walaupun hampir menghabiskan seluruh anggaran yang dialokasikan.

Tabel 134.
Capaian Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2014			Capaian Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100

Sumber : Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Sumut

Grafik 64
Capaian Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup dalam 2 tahun terakhir



Sumber : Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provsu

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja publikasi dokumen status lingkungan hidup pada tahun 2014 dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, atau dengan kategori SANGAT BAIK. Capaian kinerja tahun 2015 juga demikian dapat dicapai sesuai dengan target (SANGAT BAIK). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara



dalam dua tahun terakhir selalu melakukan Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup dengan baik sehingga capaian kerjanya mencapai 100%.

6. Dokumen Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir



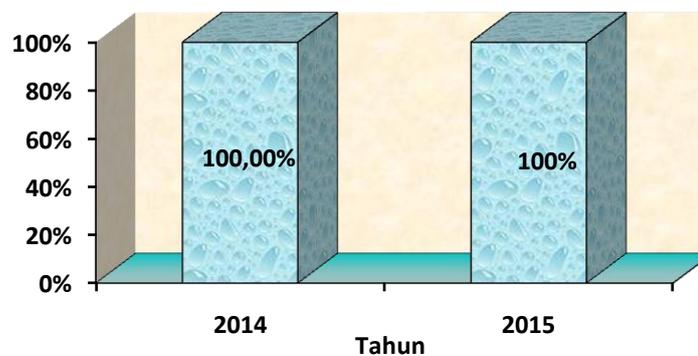
Realisasi kinerja untuk Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1 dokumen. Berarti capaian kinerja memenuhi 100% dari target indikator tersebut. Sedangkan realisasi anggaran untuk kegiatan/program yang menunjang pelaksanaan indikator ini yaitu 85,92% dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemakaian anggaran yang hanya 85,92% dari anggaran dapat menghasilkan kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut capaian kinerja untuk Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam 2 tahun terakhir

Tabel 135.
Capaian Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2014			Capaian Tahun 2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Dokumen Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100

Sumber : Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Sumut

Grafik 65.
Capaian Kinerja untuk Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir
Di Provinsi Sumatera Utara 2 tahun terakhir



Sumber : Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Sumut



Dari Tabel 135 dan Grafik 64 di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk indikator Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir dari tahun ke tahun sangat baik dan memenuhi target 100%.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta implementasi otonomi dan pelayanan umum selama tahun 2015.

APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 – 2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 serta kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, pokok-pokok pikiran DPRD, hasil musyawarah perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 dan hasil indentifikasi aspirasi masyarakat lainnya yang disampaikan, baik melalui perangkat Pemerintah Provinsi maupun DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan Umum Pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 yang disepakati telah dirumuskan dalam Arah Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2015 serta Strategi dan Prioritas APBD tahun 2015.

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Arah dan Kebijakan Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan



bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sehingga pelaksanaannya yang dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015.

B.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pengelolaan pendapatan daerah pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan upaya-upaya yang berkenaan dengan peningkatan pendapatan baik yang bersumber dari pajak-pajak daerah, dana bagi hasil dan sumber pendapatan lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pembangunan daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan berkenaan dengan pengelolaan pendapatan daerah tersebut di atas, antara lain sebagai berikut :

B.1.1. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH

Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya yang dilaksanakan secara terus menerus melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Kebijakan pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun



2014 Tentang penghapusan denda pajak dan gratis Bea Balik Nama Kendaraan bermotor.

- 2) Optimalisasi razia terpadu terhadap kendaraan bermotor yang telah mendaftarkan (menunggak). Kegiatan ini dilaksanakan hampir setiap bulan di seluruh wilayah provinsi Sumatera Utara.
- 3) Pendekatan pelayanan kepada wajib pajak melalui pengoperasian gerai samsat dan samsat keliling. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya Gerai Samsat yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Medan Utara, Medan Selatan, dan Tebing Tinggi.
- 4) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait bagi hasil Pajak Rokok dan Pendapatan Lainnya.
- 5) Pendataan potensi wajib pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara intensif sehingga berdampak terhadap bertambahnya penerimaan pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Terkait dengan ekstensifikasi pendapatan daerah, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memunculkan situasi yang dilematis terhadap penggalan potensi pendapatan daerah, karena dibatasi penggalan sumber pendapatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selalu berupaya untuk mendapatkan penerimaan dari sektor perkebunan, pertambangan dan lain-lain, namun hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan.

CAPAIAN TAHUN 2014 :

Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya terus menerus melalui program kegiatan prioritas, antara lain :



- 1) Pendataan ulang dan razia terpadu terhadap potensi pajak daerah terhadap kendaraan bermotor – termasuk alat-alat berat/besar dan pajak air permukaan.
- 2) Pendekatan pelayanan kepada wajib pajak melalui pendefinitifan UPT/Samsat pada setiap kabupaten/kota serta pengoperasian gerai samsat.
- 3) Pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super PKB).
- 4) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Terkait dengan ekstensifikasi pendapatan daerah, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memunculkan situasi yang dilematis terhadap penggalian potensi pendapatan daerah, karena dibatasi dan ditutupnya penggalian sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berupaya untuk mendapatkan penerimaan dari sektor perkebunan, namun hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan.

B.1.2 . TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 3 sumber penerimaan yakni :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Lain-lain PAD yang Sah, yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah, dari total target Rp. 4.180.782.532.441,- direalisir Rp. 4.427.152.020.428,- (105,89%). Penerimaan ini bersumber dari :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dari target Rp. 1.487.852.149.076,- direalisir Rp. 1.493.779.209.549,- (100,40%).



-
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dari target Rp. 1.025.468.931.371,- direalisasi Rp. 1.001.207.440.989,- (97,63%).
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dari target Rp. 870.000.000.000,- direalisasi Rp. 883.566.337.162,- (101,56%).
 - d) Pajak Air Permukaan, dari target Rp. 167.211.362.801,- direalisasi Rp. 401.710.515.619,- (240,24%).
 - e) Pajak Rokok, dari target Rp. 630.250.089.193,- direalisasi Rp. 646.888.517.109,- (102,64%).
- b. Retribusi Daerah, dari target Rp. 31.129.676.250,- direalisasi Rp. 36.162.915.271,- (116,17%), penerimaan ini bersumber dari :
- a) Retribusi Jasa Umum, dari target Rp. 18.991.538.000,- direalisasi Rp. 22.040.579.855,- (116,05%).
 - b) Retribusi Jasa Usaha, dari target Rp. 11.253.138.250,- direalisasi Rp. 12.812.662.085,- (113,86%).
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu dari target Rp. 885.000.000,- direalisasi Rp. 1.309.673.331,- (147,99%).
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan/Laba BUMD, dari target Rp. 255.650.903.282,- direalisasi Rp. 250.601.153.282,- (98,02%), penerimaan ini bersumber dari :
- a) PD Perkebunan, dari target Rp. 20.000.000.000,- direalisasi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (75,00%).
 - b) PT Bank Sumut, dari target Rp. 234.104.957.294,- direalisasi sebesar Rp. 234.104.957.294,- (100,00%).
 - c) PD Perhotelan, dari target Rp. 360.000.000,- direalisasi sebesar Rp. 360.250.000,- (100,07%).
-



-
- d) PT Kawasan Industri Medan (KIM), dari target Rp. 936.233.263,- direalisasi sebesar Rp. 936.233.263,- (100,00%).
 - e) PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ), dari target Rp. 50.000.000,- direalisasi sebesar Rp. 0,- (0%).
 - f) PT Asuransi Bangun Askrida, dari target Rp. 199.712.725,- direalisasi sebesar Rp. 199.712.725,- (100,00%).
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dari target Rp. 156.073.887.042,- direalisasi Rp. 115.217.960.641,72,- (73,82%), bersumber dari :
- a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, dari target Rp.166.014.000,- direalisasi sebesar Rp. 123.772.896,- (74,56%).
 - b) Jasa Giro Kas Daerah, dari target Rp. 24.000.000.000,- direalisasi sebesar Rp. 28.615.664.666,- (119,23%).
 - c) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, dari target Rp.7.621.141.229,- direalisasi sebesar Rp. 10.809.122.936,30 (141,83%).
 - d) Pendapatan Denda Pajak, dari target Rp. 35.930.017.180,00,- direalisasi sebesar Rp.44.066.975.967,- (122,65%)
 - e) Pendapatan Dari Pengembalian, dari target Rp. 9.122.876.244,- direalisasi Rp. 2.004.999.176,42,- (21,98%).
 - f) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, dari target Rp. 28.610.782.300,- direalisasi sebesar Rp. 25.547.380.000,- (89,29%).
 - g) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dari target Rp. 22.576.250,- direalisasi Rp. 0,- (0%).
-



-
- h) Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD, dari target Rp. 45.975.949.839,00,- direalisasi Rp. 0,- (0%)
 - i) Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya, dari target Rp. 300.000.000,- direalisasi Rp. 0,- (0%).
 - j) Pendapatan Penyelenggaraan Diklat, dari target Rp. 4.324.530.000,- direalisasi Rp. 4.050.045.000,- (93,65%).
- e. Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan penjelasan sebagai berikut :
- a) Dana Perimbangan, dari target Rp. 1.712.730.578.000,- direalisasi sebesar Rp. 1.521.253.168.298,- (88,82%), penerimaan ini diperoleh dari:
 - b) a) Dana Bagi Hasil Pajak, dari target Rp. 457.217.937.000,- direalisasi Rp. 313.793.085.550,- (68,63%).
 - c) b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dari target Rp. 29.438.760.000,- direalisasi Rp. 20.451.831.248,- (69,47%).
 - d) Dana Alokasi Umum (DAU), dari target Rp. 1.139.261.371.000,- direalisasi Rp. 1.139.261.371.000,- (100%).
 - e) Dana Alokasi Khusus (DAK), dari target Rp. 86.812.510.000,- direalisasi Rp. 47.746.880.500,- (55%).
- 2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**, dari target Rp. 2.115.943.238.616,- berhasil direalisasi sebesar Rp. 2.083.024.069.701,29,- (98,44%), dengan perincian :
- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah, dari target Rp. 1.123.954.000,- direalisasi 1.123.954.000,- (100%).
-



-
- b. Pendapatan Hibah dari Badan/lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, dari target Rp. 4.629.960.000,- direalisasi Rp. 4.629.960.000,- (100%).
 - c. Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan, dari target Rp. 4.250.000.000,- direalisasi Rp. 4.678.702.500,- (110,09%).
 - d. Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri, dari target Rp. 24.268.280.639,- direalisasi Rp. 0,- (0%).
 - e. Dana Penyesuaian II, dari target Rp. 2.080.904.200.000,- direalisasi sebesar Rp. 2.061.543.814.318,- (99,07%).
 - f. Pendapatan Lainnya/Pengembalian Dana BOS dari Sekolah Penerima, dari Rp. 766.843.977,- direalisasi Rp. 11.047.638.883,29,- (1.440,66%).

3. Contra Pos, dari target nihil terealisasi sebesar Rp. 28.737.144.973,-. Pada tahun anggaran 2015, penerimaan dari sumber-sumber tersebut terus menerus mengalami peningkatan secara bervariasi. Meskipun peningkatannya kurang signifikan, namun secara kumulatif cukup positif menutupi belanja pemerintahan yang setiap tahunnya terus meningkat. Walaupun relatif minim, konstelasi ini membuktikan bahwa sesungguhnya terjadi pertumbuhan di sektor perekonomian daerah yang ditandai dengan semakin meningkatnya pembelanjaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Upaya peningkatan sumber pendapatan daerah ditempuh melalui program peningkatan pendapatan daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara TA. 2015 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 setelah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

Rencana penerimaan (target) dan realisasi pendapatan daerah



Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam bentuk sederhana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 136
Target & Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015

NO	SUMBER	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	-	14.897.905.723,00	
I	PAJAK DAERAH	4.180.782.532.441,00	4.427.152.020.428,00	105,89
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1.487.852.149.076,00	1.493.779.209.549,00	101,40
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.025.468.931.371,00	1.001.207.440.989,00	97,63
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	870.000.000.000,00	883.566.337.162,00	101,56
4	Pajak Air Permukaan	167.211.362.801,00	401.710.515.619,00	240,24
5	Pajak Rokok	630.250.089.193,00	646.888.517.109,00	102,64
II	RETRIBUSI DAERAH	31.129.676.250,00	36.162.915.271,00	116,17
1	Retribusi Jasa Umum	18.991.538.000,00	22.040.579.855,00	116,05
2	Retribusi Jasa Usaha	11.253.138.250,00	12.812.662.085,00	113,86
3	Retribusi Izin Tertentu	885.000.000,00	1.309.673.331,00	147,99
III	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	255.650.903.282,00	250.601.153.282,00	98,02
1	Perusahaan Daerah (PD. Perkebunan)	20.000.000.000,00	15.000.000.000,00	75
2	Perusahaan Daerah (PT. Bank Sumut)	234.104.957.294,00	234.104.957.294,00	100
3	Perusahaan Daerah (PD. Perhotelan)	360.000.000,00	360.250.000,00	100,07
4	Perusahaan Daerah (PT. KIM)	936.233.263,00	936.233.263,00	100
5	PT. Aneka Industri dan Jasa	50.000.000,00	-	0,00
6	PT. Asuransi Bangun Askrida	199.712.725,00	199.712.725,00	100
IV	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	156.073.887.042,00	115.217.960.641,72	73,82
1	Hasil Penjualan Aset Daerah	166.014.000,00	123.772.896,00	74,56
2	Jasa Giro Kas Daerah	24.000.000.000,00	28.615.664.666,00	119,23
3	Pendapatan Denda	7.621.141.229,00	10.809.122.936,30	141,83
4	Pendapatan Denda Pajak	35.930.017.180,00	44.066.975.967,00	122,65
5	Pendapatan Dari Pengembalian	9.122.876.244,00	2.004.999.176,42	21,98
6	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	28.610.782.300,00	25.547.380.000,00	89,29
7	Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan	22.576.250,00	-	0,00
8	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	45.975.949.839,00	-	0,00
9	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	300.000.000,00	-	0,00
10	Pendapatan Dari Penyelenggaraan Diklat	4.324.530.000,00	4.050.045.000,00	93,65
	JUMLAH PAD	4.623.636.999.015,00	4.829.134.049.622,72	104,44
V	DANA PERIMBANGAN	1.712.730.578.000,00	1.521.253.168.298,00	88,82
1	Bagi Hasil Pajak	457.217.937.000,00	313.793.085.550,00	68,63
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	29.438.760.000,00	20.451.831.248,00	69,47
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.139.261.371.000,00	1.139.263.371.000,00	100,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	86.812.510.000,00	47.746.880.500,00	55,00
VI	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.115.943.238.616,00	2.083.024.069.701,29	98,44
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	1.123.954.000,00	1.123.954.000,00	100,00
2	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya	4.629.960.000,00	4.629.960.000,00	100,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	4.250.000.000,00	4.678.702.500,00	110,09
4	Pendapatan Hibah dari luar Negeri	24.268.280.639,00	0	0
5	Dana Penyesuaian II	2.080.904.200.000,00	2.061.543.814.318,00	99,07
6	Dana Pendapatan Lainnya/Pengembalian Dana BOS dari Sekolah Penerima	766.843.977,00	11.047.638.883,29	1440,66



NO	SUMBER	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VII	CONTRA POST		28.737.144.973,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	8.452.310.815.631,00	8.477.046.338.318,01	100,29

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provsu

Permasalahan dan Solusi :

Dalam menjalankan program dan kegiatan pada Tahun 2015 ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah (pencapaian target) yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, yakni :

1. Perekonomian nasional yang tidak stabil sehingga berdampak kepada menurunnya daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan baru baik sepeda motor maupun mobil.
2. Tingkat kesadaran masyarakat wajib pajak yang relatif masih rendah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya potensi wajib pajak baik wajib pajak kendaraan bermotor maupun wajib pajak lainnya yang masih menunggak.
3. Luas wilayah pelayanan dan kondisi geografis dalam upaya pemungutan pajak juga sangat mempengaruhi terhadap penerimaan pendapatan.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya ataupun solusi, yaitu :

1. Melaksanakan strategi jemput bola dengan mengoptimalkan operasional Bus Samsat Keliling dan membuka lebih banyak lagi Gerai Samsat di Wilayah kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.



2. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi serta publikasi tentang pentingnya membayar pajak, serta melaksanakan upaya penegakan sanksi hukum (*law enforcement*).
3. Melakukan kegiatan razia terpadu terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melibatkan instansi terkait.
4. Peningkatan kualitas Sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek) dan lain-lain. Hal ini juga penting dilakukan untuk dapat meyakinkan wajib pajak bahwa pelayanan yang diterapkan sudah lebih mudah, efektif dan efisien dari sisi waktu dan biaya yang dikeluarkan.

Capaian Tahun 2014 :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Lain-lain PAD yang Sah, sebagai berikut :

- a. **Pajak Daerah, dari total target Rp. 4.662.564.247.086,00,-** direalisasi Rp. 4.055.217.776.906,00,- (86,97%). Penerimaan ini bersumber dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor(PKB), dari target Rp.1.458.995.441.008,00,- direalisasi Rp.1.487.489.752.113,00, (101,95%).
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dari target Rp.1.749.818.556.078,00,- direalisasi Rp. 1.280.838.048.168,00,- (73,20%).
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dari target Rp.846.800.000.000,00,- direalisasi Rp. 823.855.159.113,00,- (97,29%).
 - d) Pajak Air Permukaan, dari target Rp. 60.000.000.000,00,- direalisasi Rp.68.524,532,854,00,- (114,21%).
 - e) Pajak Rokok, dari target Rp. 546.950.250.000,00,- direalisasi Rp. 394.510.284.658,00,- (72,13%)



-
- b. Retribusi Daerah, dari target Rp. 73.214.111.645,00,-** direalisasi Rp.25.960.647.324,49 (35,46%), penerimaan ini bersumber dari :
- a) Retribusi Jasa Umum, dari target Rp. 60.917.943.845,00,- direalisasi Rp.18.357.266.261,49,- (30,13%).
 - b) Retribusi Jasa Usaha, dari target Rp. 12.046.167.800,00,- direalisasi Rp.7.392.506.063,00,- (61,37%).
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu dari target Rp. 250.000.000,00,-,- direalisasi Rp.210.875.000,00,- (84,35%).
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan/Laba BUMD, dari target Rp. 243.118.049.100.00,-** direalisasi Rp. 156.160.197.054,00,- - (64,23).
- d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dari target Rp. 149.418.723.924,00,-** direalisasi Rp. 113.877.715.679,40 (76,21%), penerimaan ini bersumber dari :
- a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, dari target Rp.1.900.000.000,00,- direalisasi sebesar Rp. 1.669.348.854,00,- (87,86%).
 - b) Jasa giro kas daerah, dari target Rp. 35.560.200.000,00,- direalisasi sebesar Rp.22.369.569.895,00,- (62,91%).
 - c) Pendapatan bunga, dari target Rp. 0,- direalisasi nihil.
 - d) Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dari target Rp. 15.000.000.000,00,- direalisasi sebesar Rp.434.370.107,40 (2,90%).
 - e) Pendapatan denda pajak, dari target Rp. 57.995.211.624,00,- direalisasi sebesar Rp.56.393.021.823,00,- (97,24%);
 - f) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, dari target Rp. 28.610.782.300,00,- direalisasi sebesar Rp. 25.144.450.000,00,- (87,88%).
 - g) Pendapatan Dari Penyelenggaraan Diklat, dari target Rp. 10.352.530.000,00,- direalisasi sebesar Rp. 7.866.955.000,00,- (75,99%).
-



2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Dana Perimbangan (DP), dari target Rp.1.918.210.331.691,00,- direalisasi sebesar Rp.1.812.638.981.079,00,- (94,50%), penerimaan ini diperoleh dari:

a. **Dana Bagi Hasil Pajak, dari target Rp. 460.776.894.435,00,-** direalisasi Rp.380.468.138.948,00,- (82,57%)

b. **Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dari target Rp.28.663.311.256,00,-** direalisasi Rp. 23.310.178.131,00,- (81,32%).

c. **Dana Alokasi Umum (DAU), dari target Rp. 1.349.132.276.000,00,-** direalisasi Rp.1.349.132.276.000,00,- (100%).

d. **Dana Alokasi Khusus (DAK), dari target Rp. 79.637.850.000,00,-** direalisasi Rp.59.728.388.000,00,- (75%).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dari target Rp. 1.598.978.354.609,00,- berhasil direalisasi sebesar Rp. 1.564.675.518.577,95,- (97,85%), dengan perincian :

a. Pendapatan hibah dari Jasa Raharja, dari target Rp. 3.083.696.800,00,- direalisasi Rp.4.987.966.000,00,- (161,75%).

b. Sumbangan pihak ketiga (SP-3), dari target Rp. 35.000.000.000,00,- direalisasi Rp. 4.809.735.000,00,- (13,74%).

c. Pendapatan hibah dari donor lainnya, dari target Rp. 20.289.654.809,00,- direalisasi Rp. 20.289.654.809,00,- (100%).

d. Tambahan penghasilan Guru PNSD, dari target Rp. 92.063.000,00,- direalisasi Rp. 92.063.000,00,- (100%).

e. Dana alokasi bantuan operasional sekolah, dari target Rp. 1.540.512.940.000,00,- direalisasi Rp. 1.508.698,241,934,00,- (97,93%).

f. Dana pendapatan lainnya/pengembalian dana BOS dari Sekolah



Penerima, dari target Nihil, realisasi Rp. 25.797.857.834,95,-.

4. Contra Pos

Dari target nihil terealisasi sebesar Rp. 42.415.145.414,58. Pada Tahun Anggaran 2014, secara umum penerimaan dari pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah mengalami peningkatan secara bervariasi, meski peningkatannya kurang signifikan, namun secara kumulatif cukup positif menutupi belanja pemerintahan yang setiap tahunnya terus meningkat. Walaupun relatif minim, konstelasi ini membuktikan bahwa sesungguhnya terjadi pertumbuhan di sektor perekonomian daerah yang ditandai dengan semakin meningkatnya pembelanjaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Upaya peningkatan sumber pendapatan daerah ditempuh melalui program peningkatan pendapatan daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 20013-2018. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.7.770.945.982.035,42 (89,88%) dari target Rp. 8.645.503.818.055,00,-. Rencana penerimaan (target) dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam bentuk sederhana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 137
Target & Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015

NO	SUMBER	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	-	45.200.503.219,79	
I	PAJAK DAERAH	4.662.564.247.086,00	4.055.217.776.906	86,97%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1.458.995.441.008,00	1.487.489.752,113	101,95%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.749.818.556.078,00	1.280.838.048.168	73,20%
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	846.800.000.000,00	823.855.159.113	97,29%
4	Pajak Air Permukaan	60.000.000.000,00	68.524.532.854	114,21%
5	Pajak Rokok	546.950.250.000,00	394.510.284.658	72,13%
II	RETRIBUSI DAERAH	73.214.111.645,00	25.960.647.324,49	35,
1	Retribusi Jasa Umum	60.917.943.845,00	18.357.266.261,49	30,13%



NO	SUMBER	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Retribusi Jasa Usaha	12.046.167.800,00	7.392.506.063,00	61,37%
3	Retribusi Izin Tertentu	250.000.000,00	210.875.000,00	84,35%
III	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	243.118.049.100,00	156.160.197.054,00	64,23%
1	Perusahaan Daerah (PD. Perkebunan)	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	100%
2	Perusahaan Daerah (PT. Bank Sumut)	223.000.000.000,00	136.736.516.054,00	61,32%
3	Perusahaan Daerah (PD. Perhotelan)	700.000.000,00	180.000.000,00	25,71%
4	Perusahaan Daerah (PT. KIM)	1.918.049.100,00	1.743.681.000,00	90,91%
IV	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	149.418.723.924,00	113.877.715.679,40	76,21%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah	1.900.000.000,00	1.669.348.854,00	87,86%
2	Jasa Giro Kas Daerah	35.560.200.000,00	22.369.569.895,00	62,91%
3	Pendapatan Bunga	-	-	0,00%
4	Pendapatan Denda	15.000.000.000,00	434.370.107,40	2,90%
5	Pendapatan Denda Pajak	57.995.211.624,00	56.393.021.823,00	97,24%
6	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	28.610.782.300,00	25.144.450.000,00	87,88%
7	Pendapatan Dari Penyelenggaraan Diklat	10.352.530.000,00	7.866.955.000,00	75,99%
JUMLAH PAD		5.128.315.131.755,00	4.351.216.336.963,89	84,85%
V	DANA PERIMBANGAN	1.918.210.331.691,00	1.812.638.981.079,00	94,50%
1	Bagi Hasil Pajak	460.776.894.435,00	380.468.138.948,00	82,57%
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	28.663.311.256,00	23.310.178.131,00	81,32%
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.349.132.276.000,00	1.349.132.276.000,00	100,00%
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	79.637.850.000,00	59.728.388.000,00	75,00%
VI	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.598.978.354.609,00	1.564.675.518.577,95	97,85%
1	Pendapatan Hibah dari Jasa Raharja	3.083.696.000,00	4.987.966.000,00	161,75%
2	Sumbangan Pihak Ketiga (SP-3)	35.000.000.000,00	4.809.735.000,00	13,74%
3	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya	20.289.654.809,00	20.289.654.809,00	100,00%
4	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	92.063.000,00	92.063.000,00	100,00%
5	Dana Alokasi Bantuan Operasional Sekolah	1.540.512.940.000,00	1.508.698.241.934,00	97,93%
6	Dana Pendapatan Lainnya/Pengembalian Dana BOS dari Sekolah Penerima	-	25.797.857.834,95	-
VII	CONTRA POST	-	42.415.145.414,58	-
JUMLAH SELURUHNYA		8.645.503.818.055,00	7.770.945.982.035,42	89,88%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sumut

Permasalahan :

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah (pencapaian target) yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, antara lain :



1. Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat bertumpu pada Pajak Daerah, sementara kewenangan pemerintah provinsi dalam mengembangkan jenis pajak daerah (ekstensifikasi) dan retribusi daerah telah dibatasi, sehingga upaya yang dapat dilakukan terbatas pada intensifikasi. Hal ini sangat rentan terhadap berbagai resiko, sehingga perlu melakukan penggalan sumber-sumber baru.
2. *Law Enforcement* yang tidak tegas diatur dalam peraturan dan perundangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

Solusi :

Untuk mengatasi permasalahan di atas Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya ataupun solusi, yaitu :

1. Pendekatan pelayanan melalui pengoperasian sentra pelayanan seperti Samsat Gerai, Samsat Corner / Mall, samsat keliling dan Samsat *Drive Thru*.
2. Peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan SDM petugas, peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta penyempurnaan regulasi tentang pelayanan.
4. Penagihan secara langsung terhadap tunggakan pajak.
5. Pengoperasian Payment Point System dalam pembayaran Pajak Daerah bekerjasama dengan PT. Bank Sumut.

B.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan belanja daerah berkenaan dengan strategi dan sistem pembiayaan belanja dalam rangka pembangunan daerah. Oleh sebab itu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, adalah mencakup hal-hal berikut :



B.2.1. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Semua belanja dianggarkan secara bruto dan jumlahnya merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja bersangkutan dan dilaksanakan melalui kas daerah. Belanja daerah dirinci menurut bidang pemerintahan, organisasi, bagian, kelompok, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. Kelompok pembiayaan dirinci menurut jenis objek penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Belanja daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis belanja yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung, meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja bagi hasil dan belanja tidak terduga. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal. Didalam struktur APBD terdapat sisi pembiayaan yang fungsi pokoknya adalah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah (surplus dan defisit anggaran). Di dalam pos pembiayaan terdapat pos pembiayaan penerimaan dan pos pengeluaran sehingga memungkinkan daerah investasi untuk menggunakan surplus anggaran.

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, struktur APBD telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.



Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 2) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

B.2.2 . TARGET DAN REALISASI BELANJA

Pada tahun anggaran 2015 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 8.442.940.440.715,- dimana sebesar Rp. 6.076.595.529.813,- atau 71,98% untuk keperluan belanja tidak langsung dan sisanya 28,02% atau Rp. 2.366.344.910.902,- untuk keperluan belanja langsung. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.076.595.529.813,- dialokasikan untuk keperluan :

No.	JENIS BELANJA	JUMLAH BELANJA (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Belanja Pegawai	Rp. 1.149.362.015.084,-
2.	Belanja Hibah	Rp. 2.131.351.406.650,-
3.	Belanja Bantuan Sosial (BANSOS)	Rp. 0,-
4.	Belanja Bagi Hasil	Rp. 2.330.828.370.083,-
5.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 457.553.737.996,-
6.	Belanja Tidak Terduga	Rp. 7.500.000.000,-

Sumber : Dinas Pendapatan Prov. Sumut

Realisasi belanja tidak langsung berdasarkan realisasi SKPD Pengelola APBD Pemprov TA. 2015 sampai saat ini adalah sebesar Rp. 5.883.798.272.155,- atau terealisasi sebesar 96,83%. Belanja langsung sebesar Rp. 2.366.344.910.902,- dialokasikan untuk keperluan:



1. Belanja Pegawai	Rp. 175.006.921.650,-
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.168.022.051.400,-
3. Belanja Modal	Rp. 1.023.315.937.852,-

Data realisasi belanja langsung berdasarkan realisasi SKPD Pengelola APBD Pemprov TA. 2015 sampai saat ini adalah sebesar Rp. 2.066.849.766.508,60 atau terealisasi sebesar 87,34%. Bila dilihat dari Urusan Pemerintahan dan Organisasi maka alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 8.442.940.440.715,- terbagi pada Urusan Wajib Rp. 8.059.176.896.029,- atau sebesar 95,45% dari total belanja APBD Pemprov dan Urusan Pilihan Rp. 383.763.544.686,- atau sebesar 4,55% dari total belanja APBD TA. 2015.

Tabel 138
Alokasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Berdasarkan SKPD Pengelola Tahun Anggaran 2015

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	BELANJA		JUMLAH
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	Dinas Pendidikan	47.809.426.000	118.765.852.437	166.575.278.437
2	Dinas Kesehatan	95.139.982.000	128.493.687.000	223.633.669.000
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah	24.139.508.000	11.073.252.139	35.212.760.139
4	Rumah Sakit Haji	-	78.761.033.016	78.761.033.016
5	Dinas Bina Marga	58.412.724.000	848.322.172.495	906.734.896.495
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	70.410.460.000	137.934.374.868	208.344.834.868
7	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman	36.334.458.000	87.050.352.443	123.384.810.443
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.775.551.000	15.356.486.700	27.132.037.700
9	Dinas Perhubungan	64.352.081.000	25.029.907.700	89.381.988.700
10	Badan Lingkungan Hidup	13.539.382.000	12.262.531.064	25.801.913.064
11	Dinas Kesejahteraan dan Sosial	46.934.255.000	32.083.975.078	79.018.230.078
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24.387.313.000	8.519.311.850	32.906.624.850
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10.092.190.000	31.766.463.209	41.858.653.209
14	Badan Penanaman Modal dan Promosi	5.253.613.000	9.448.782.891	14.702.395.891
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19.378.358.000	21.366.714.794	40.745.072.794
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	9.175.073.000	45.874.712.200	55.049.785.200
17	Bakesbangpol dan Linmas	7.954.880.000	9.162.241.000	17.117.121.000
18	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	6.013.844.000	10.377.826.000	16.391.670.000
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.058.557.000	9.732.516.640	15.791.073.640
20	DPRD	36.406.426.040	-	36.406.426.040
21	KDH & WKDH	7.797.746.264	-	7.797.746.264
22	Sekretariat Daerah	5.008.093.503.185	123.250.402.954	5.131.343.906.139
23	Sekretariat DPRD	11.351.313.000	76.782.919.077	88.134.232.077
24	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.505.574.000	5.135.467.625	10.641.041.625
25	Inspektorat Provinsi	14.548.685.000	19.813.226.250	34.361.911.250
26	Kantor Perwakilan Jakarta	5.417.000.000	10.168.631.540	15.585.631.540
27	Dinas Pendapatan	174.473.476.324	173.001.194.405	347.474.670.729
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan	10.260.576.000	10.377.578.876	20.638.154.876



Laporan Kinerja (LK)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	BELANJA		JUMLAH
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
29	Badan Kepegawaian Daerah	8.367.865.000	7.166.463.743	15.534.328.743
30	Sekretariat KORPRI	2.469.298.000	2.550.005.258	5.019.303.258
31	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	5.946.161.000	7.370.618.949	13.316.779.949
32	Badan Ketahanan Pangan	9.834.475.000	24.896.943.700	34.731.418.700
33	Badan Koord. Penyuluhan	7.966.428.000	18.342.459.663	26.308.887.663
34	Bapemmas dan Pemdes	7.706.606.000	5.646.230.600	13.352.836.600
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.432.623.000	20.891.038.026	34.323.661.026
36	KPID Sumatera Utara	2.217.663.000	4.120.799.630	6.338.462.630
37	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	10.647.528.000	17.853.001.550	28.500.529.550
38	Dinas Pertanian	61.674.926.000	68.182.219.509	129.857.145.509
39	Dinas Perkebunan	14.731.841.000	21.377.216.926	36.109.057.926
40	Dinas Peternakan	9.606.513.000	20.988.475.490	30.594.988.490
41	Dinas Kehutanan	38.250.204.000	7.194.081.150	45.444.285.150
42	Dinas Pertambangan dan Energi	9.356.520.000	17.691.655.000	27.048.175.000
43	Dinas Perikanan Dan Kelautan	15.117.517.000	42.625.201.457	57.742.718.457
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.253.407.000	19.536.886.000	47.790.293.000
	Jumlah	6.076.595.529.813	2.366.376.610.902	8.442.940.440.715

Sumber : Biro Keuangan Setdaprov. Sumut

Tabel 139
Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Berdasarkan SKPD Pengelola Tahun Anggaran 2015

No	Urusan Pemerintahan	Belanja		Jumlah
		Tidak Langsung	Langsung	
1	Dinas Pendidikan	44.716.916.261,00	77.666.779.006,00	122.383.695.267,00
2	Dinas Kesehatan	84.929.873.656,00	108.491.240.272,00	193.421.113.928,00
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah	22.764.058.364,00	11.028.797.941,00	33.792.856.305,00
4	Rumah Sakit Haji	-	71.181.294.032,00	71.181.294.032,00
5	Dinas Bina Marga	50.303.446.712,00	803.459.223.058,00	853.762.669.770,00
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	64.633.365.284,00	106.379.502.823,60	171.012.868.107,60
7	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman	34.128.094.293,00	84.878.295.439,00	119.006.389.732,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.933.359.095,00	14.171.870.764,00	25.105.229.859,00
9	Dinas Perhubungan	60.601.090.869,00	21.416.961.884,00	82.018.052.753,00
10	Badan Lingkungan Hidup	11.982.982.397,00	11.032.437.725,00	23.015.420.122,00
11	Dinas Kesejahteraan dan Sosial	44.775.494.521,00	31.151.336.177,00	75.926.830.698,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22.732.315.153,00	8.147.501.246,00	30.879.816.399,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9.453.809.884,00	29.926.935.686,00	39.380.745.570,00
14	Badan Penanaman Modal dan Promosi	4.904.320.916,00	7.278.711.155,00	12.183.032.071,00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17.128.486.273,00	18.817.277.940,00	35.945.764.213,00
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	8.527.140.092,00	41.486.515.166,00	50.013.655.258,00
17	Bakesbangpol dan Linmas	7.287.593.683,00	8.229.788.521,00	15.517.382.204,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	5.342.886.225,00	9.522.893.770,00	14.865.779.995,00
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.367.410.325,00	5.442.109.177,00	10.809.519.502,00
20	DPRD	35.656.728.953,00	-	35.656.728.953,00
21	KDH & WKDH	4.715.879.870,00	-	4.715.879.870,00
22	Sekretariat Daerah	4.898.214.144.021,00	91.447.465.372,00	4.989.661.609.493,00
23	Sekretariat DPRD	10.516.036.343,00	65.406.248.432,00	75.922.284.775,00
24	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.187.498.211,00	4.651.549.000,00	9.839.047.211,00
25	Inspektoral Provinsi	13.087.502.247,00	17.604.908.050,00	30.692.410.297,00
26	Kantor Perwakilan Jakarta	5.120.471.130,00	8.780.515.228,00	13.900.986.358,00
27	Dinas Pendapatan	163.929.487.405,00	156.655.741.827,00	320.585.229.232,00
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan	9.397.361.028,00	8.704.043.606,00	18.101.404.634,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	7.603.548.047,00	4.003.144.116,00	11.606.692.163,00



No	Urusan Pemerintahan	Belanja		Jumlah
		Tidak Langsung	Langsung	
30	Sekretariat KORPRI	2.239.114.580,00	1.734.931.931,00	3.974.046.511,00
31	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	5.461.617.206,00	6.543.017.857,00	12.004.635.063,00
32	Badan Ketahanan Pangan	9.277.763.742,00	21.592.973.942,00	30.870.737.684,00
33	Badan Koord. Penyuluhan	6.705.502.988,00	15.712.222.714,00	22.417.725.702,00
34	Bapemmas dan Pemdes	6.923.009.875,00	5.025.165.074,00	11.948.174.949,00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.907.428.731,00	18.565.218.878,00	30.472.647.609,00
36	KPID Sumatera Utara	2.028.124.670,00	3.602.600.788,00	5.630.725.458,00
37	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	9.936.343.634,00	14.410.263.491,00	24.346.607.125,00
38	Dinas Pertanian	57.786.580.792,00	55.652.300.929,00	113.438.881.721,00
39	Dinas Perkebunan	13.762.025.902,00	15.990.577.513,00	29.752.603.415,00
40	Dinas Peternakan	9.145.963.035,00	15.556.019.428,00	24.701.982.463,00
41	Dinas Kehutanan	35.575.803.366,00	5.897.593.247,00	41.473.396.613,00
42	Dinas Pertambangan dan Energi	8.707.397.933,00	16.614.478.470,00	25.321.876.403,00
43	Dinas Perikanan Dan Kelautan	13.886.184.229,00	29.478.212.066,00	43.364.396.295,00
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.514.110.214,00	13.511.102.767,00	40.025.212.981,00
	Jumlah	5.883.798.272.155,00	2,066,849,766,508.60	7,950,648,038,763.60

Sumber : Biro Keuangan Setdaprov Sumut
Ket : Data sebelum audit BPK

Tabel realisasi diatas merupakan realisasi berdasarkan SKPD Pengelola APBD Pemprov TA. 2015, yang merupakan angka realisasi sementara yang belum diaudit oleh BPK-RI. Mengenai angka hasil perhitungan data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2015 belum dapat dijelaskan dari uraian ini karena masih dalam proses perhitungan dan data untuk ini dapat diperoleh nantinya setelah hasil perhitungan disusun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Biro Keuangan dan selanjutnya diaudit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dan hasilnya akan disampaikan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara. Hasil audit tersebut nantinya merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 yang akan disampaikan Gubernur kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan :

1. Masih dominannya belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung dalam komposisi belanja daerah. Akibatnya, belanja langsung yang digunakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemenuhan hak layanan dasar bagi masyarakat belum optimal.



2. Terjadi perubahan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga memerlukan waktu bagi SKPD untuk menerapkan dalam mekanisme pengelolaan keuangan.
3. Intensitas pertumbuhan pendapatan daerah jauh lebih lambat dibandingkan intensitas pertumbuhan kebutuhan anggaran untuk layanan publik, sehingga dengan keterbatasan relatif kapabilitas pendapatan, menyulitkan perencanaan alokasi belanja untuk layanan publik, yang menyebabkan sering terjadi belanja daerah untuk layanan publik menjadi kurang fokus terhadap pencapaian target-target pembangunan yang diharapkan.

Solusi :

1. Melakukan penentuan skala prioritas yang ketat dalam pengalokasian anggaran belanja mengingat sulitnya bagi pemerintah daerah untuk mengakomodasi berbagai usulan.
2. Sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan bagi seluruh pengelola keuangan SKPD agar dapat meningkatkan kemampuan dan kinerjanya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kegiatan sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah.
3. Meningkatkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang belum didayagunakan secara optimal serta melakukan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.

Capaian Tahun 2014 :

Pada tahun anggaran 2014 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 8.696.929.880.247,- dimana sebesar Rp. 5.755.568.533.254,- atau 66,18 % untuk



keperluan belanja tidak langsung dan sisanya 33,82 % atau Rp. 2.941.361.346.993,- untuk keperluan belanja langsung.

Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.755.568.533.254,- , yang dialokasikan untuk keperluan :

No.	JENIS BELANJA	JUMLAH BELANJA (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Belanja Pegawai	Rp. 1.141.107.908.898,-
2.	Belanja Hibah	Rp. 1.651.261.631.830,-
3.	Belanja Bantuan Sosial (BANSOS)	Rp. 1.065.000.000,-
4.	Belanja Bagi Hasil	Rp. 1.703.707.638.578,-
5.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 1.250.926.353.948,-
6.	Belanja Tidak Terduga	Rp. 7.500.000.000,-

Belanja langsung sebesar Rp 2.941.361.346.993,-ditujukan untuk keperluan :

No.	JENIS BELANJA	JUMLAH BELANJA (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Belanja Pegawai	Rp. 157.052.730.910,-
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.340.546.987.236,-
3.	Belanja Modal	Rp. 1.443.761.628.847,-
4.	Belanja Bagi Hasil	Rp. 1.703.707.638.578,-
5.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 1.250.926.353.948,-
6.	Belanja Tidak Terduga	Rp. 7.500.000.000,-

Data Realisasi belanja berdasarkan realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) periode 1 Januari s.d 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 7.809.453.230.328,- atau terealisasi sebesar 89,80 % dari anggaran belanja APBD Pemprov TA. 2014. Bila dilihat dari urusan pemerintahan dan organisasi maka alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 8.696.929.880.247,- terbagi pada urusan wajib Rp. 8.278.708.722.116,- atau sebesar 95,19 % dari total belanja APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara



dan urusan pilihan Rp. 418.221.158.131,- atau sebesar 4,81% dari total belanja APBD TA. 2014.

Tabel 140
Alokasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan SKPD Pengelola Tahun 2014

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	BELANJA		JUMLAH
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	Dinas Pendidikan	49,754,833,500.00	152,251,776,900.00	202,006,610,400.00
2	Dinas Kesehatan	98,579,598,000.00	192,595,976,750.00	291,175,574,750.00
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah	24,248,529,000.00	16,408,881,841.00	40,657,410,841.00
4	Rumah Sakit Haji	-	103,373,826,504.00	103,373,826,504.00
5	Dinas Bina Marga	58,068,602,000.00	1,076,196,725,085.00	1,134,265,327,085.00
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	66,411,665,000.00	89,685,667,767.00	156,097,332,767.00
7	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman	34,658,804,000.00	125,175,695,034.00	159,834,499,034.00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11,457,109,000.00	16,596,776,700.00	28,053,885,700.00
9	Dinas Perhubungan	61,914,237,500.00	53,987,621,000.00	115,901,858,500.00
10	Badan Lingkungan Hidup	12,338,832,000.00	21,101,011,262.00	33,439,843,262.00
11	Dinas Kesejahteraan dan Sosial	46,627,415,000.00	49,411,730,000.00	96,039,145,000.00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24,989,299,000.00	12,760,453,000.00	37,749,752,000.00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10,057,259,000.00	22,430,855,000.00	32,488,114,000.00
14	Badan Penanaman Modal dan Promosi	5,128,291,000.00	13,291,292,891.00	18,419,583,891.00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17,308,539,000.00	23,595,615,870.00	40,904,154,870.00
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	8,902,112,000.00	60,489,300,400.00	69,391,412,400.00
17	Bakesbangpol dan Linmas	7,694,562,000.00	12,804,434,257.00	20,498,996,257.00
18	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	3,040,162,000.00	11,058,373,163.00	14,098,535,163.00
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,276,653,000.00	9,988,275,590.00	15,264,928,590.00
20	DPRD	37,603,132,000.00	-	37,603,132,000.00
21	KDH & WKDH	7,795,165,100.00	-	7,795,165,100.00
22	Sekretariat Daerah	4,700,266,121,356.00	167,933,470,179.00	4,868,199,591,535.00
23	Sekretariat DPRD	11,137,728,000.00	83,787,761,925.00	94,925,489,925.00
24	Badan Penelitian dan Pengembangan	6,085,861,000.00	7,638,058,600.00	13,723,919,600.00
25	Inspektorat Provinsi	14,354,157,000.00	24,074,052,500.00	38,428,209,500.00



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	BELANJA		JUMLAH
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
26	Kantor Perwakilan Jakarta	5,214,452,000.00	13,208,363,652.00	18,422,815,652.00
27	Dinas Pendapatan	177,621,510,733.00	174,099,608,949.00	351,721,119,682.00
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan	9,802,453,000.00	19,431,674,758.00	29,234,127,758.00
29	Badan Kepegawaian Daerah	8,475,083,000.00	11,659,325,885.00	20,134,408,885.00
30	Sekretariat KORPRI	2,309,925,000.00	2,969,290,200.00	5,279,215,200.00
31	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	5,555,847,000.00	10,637,138,625.00	16,192,985,625.00
32	Badan Ketahanan Pangan	8,868,357,000.00	16,747,581,129.00	25,615,938,129.00
33	Badan Koord. Penyuluhan	7,976,349,000.00	18,879,878,650.00	26,856,227,650.00
34	Bapemmas dan Pemdes	7,580,272,000.00	8,491,957,600.00	16,072,229,600.00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	12,890,130,000.00	31,020,692,022.00	43,910,822,022.00
36	KPID Sumatera Utara	2,192,242,000.00	5,785,928,676.00	7,978,170,676.00
37	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	10,463,089,000.00	45,285,628,313.00	55,748,717,313.00
38	Dinas Pertanian	61,379,098,000.00	89,990,866,227.00	151,369,964,227.00
39	Dinas Perkebunan	14,923,030,065.00	18,338,577,300.00	33,261,607,365.00
40	Dinas Peternakan	8,935,130,000.00	21,157,939,200.00	30,093,069,200.00
41	Dinas Kehutanan	36,021,865,000.00	10,971,329,600.00	46,993,194,600.00
42	Dinas Pertambangan dan Energi	9,538,327,000.00	14,410,828,220.00	23,949,155,220.00
43	Dinas Perikanan dan Kelautan	14,138,108,000.00	66,399,840,369.00	80,537,948,369.00
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27,984,599,000.00	15,237,265,400.00	43,221,864,400.00
	Jumlah	5,755,568,533,254.00	2,941,361,346,993.00	8,696,929,880,247.00

Sumber : Biro Keuangan Setdaprov Sumatera Utara



Tabel 141
Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Berdasarkan SKPD Pengelola Tahun 2014

No	Urusan Pemerintahan	Belanja		Jumlah
		Tidak Langsung	Langsung	
1	Dinas Pendidikan	41,916,982,241.00	125,377,553,843.00	167,294,536,084.00
2	Dinas Kesehatan	83,102,290,480.00	157,433,540,142.00	240,535,830,622.00
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah	21,179,535,453.00	15,941,660,384.00	37,121,195,837.00
4	Rumah Sakit Haji	-	58,739,525,432.00	58,739,525,432.00
5	Dinas Bina Marga	48,223,433,343.00	866,461,039,736.00	914,684,473,079.00
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	60,168,523,400.00	81,244,549,537.00	141,413,072,937.00
7	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman	32,240,685,269.00	110,242,930,396.00	142,483,615,665.00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10,206,323,780.00	15,192,544,951.00	25,398,868,731.00
9	Dinas Perhubungan	57,693,548,895.00	29,322,356,830.00	87,015,905,725.00
10	Badan Lingkungan Hidup	11,040,319,893.00	18,478,246,252.00	29,518,566,145.00
11	Dinas Kesejahteraan dan Sosial	39,600,781,501.00	46,235,395,141.00	85,836,176,642.00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21,458,520,281.00	11,438,125,433.00	32,896,645,714.00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8,977,901,058.00	19,998,154,316.00	28,976,055,374.00
14	Badan Penanaman Modal dan Promosi	4,801,457,160.00	9,255,508,162.00	14,056,965,322.00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	16,033,661,755.00	22,067,969,770.00	38,101,631,525.00
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	7,868,088,759.00	51,869,850,559.00	59,737,939,318.00
17	Bakesbangpol dan Linmas	6,941,416,885.00	12,813,805,022.00	19,755,221,907.00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	2,585,758,526.00	9,290,982,057.00	11,876,740,583.00
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,628,615,943.00	6,750,192,818.00	11,378,808,761.00
20	DPRD	37,104,608,691.00	-	37,104,608,691.00
21	KDH & WKDH	5,835,183,597.00	-	5,835,183,597.00
22	Sekretariat Daerah	4,432,227,922,387.00	135,383,475,376.00	4,567,611,397,763.00
23	Sekretariat DPRD	10,192,878,191.00	67,885,524,658.00	78,078,402,849.00
24	Badan Penelitian dan Pengembangan	5,083,465,448.00	6,663,486,538.00	11,746,951,986.00
25	Inspektorat Provinsi	12,401,855,133.00	20,172,980,042.00	32,574,835,175.00
26	Kantor Perwakilan Jakarta	4,776,124,814.00	10,852,161,519.00	15,628,286,333.00
27	Dinas Pendapatan	168,160,148,452.00	152,607,650,181.00	320,767,798,633.00
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan	8,988,677,839.00	16,731,767,613.00	25,720,445,452.00
29	Badan Kepegawaian Daerah	7,433,324,662.00	9,727,148,303.00	17,160,472,965.00
30	Sekretariat KORPRI	2,064,515,907.00	2,870,816,885.00	4,935,332,792.00
31	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	5,143,882,946.00	9,549,450,241.00	14,693,333,187.00
32	Badan Ketahanan Pangan	8,390,294,913.00	16,519,233,217.00	24,909,528,130.00



Laporan Kinerja (LK)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

No	Urusan Pemerintahan	Belanja		Jumlah
		Tidak Langsung	Langsung	
33	Badan Koord. Penyuluhan	6,294,915,570.00	18,701,978,583.00	24,996,894,153.00
34	Bapemmas dan Pemdes	6,646,194,827.00	7,925,962,122.00	14,572,156,949.00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	11,562,376,252.00	29,898,475,626.00	41,460,851,878.00
36	KPID Sumatera Utara	2,008,458,300.00	5,258,467,847.00	7,266,926,147.00
37	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	9,480,984,798.00	41,354,539,782.00	50,835,524,580.00
38	Dinas Pertanian	54,778,458,186.00	79,502,736,301.00	134,281,194,487.00
39	Dinas Perkebunan	13,190,387,058.00	17,989,975,926.00	31,180,362,984.00
40	Dinas Peternakan	8,403,852,312.00	19,838,602,055.00	28,242,454,367.00
41	Dinas Kehutanan	33,680,067,358.00	10,514,872,445.00	44,194,939,803.00
42	Dinas Pertambangan dan Energi	8,384,762,445.00	14,076,712,850.00	22,461,475,295.00
43	Dinas Perikanan dan Kelautan	13,136,858,523.00	59,459,669,260.00	72,596,527,783.00
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24,709,009,121.00	9,066,559,825.00	33,775,568,946,-
	Jumlah	5,378,747,052,352,-	2,430,706,177,976,-	7,809,453,230,328,-

Sumber : Biro Keuangan Setdaprov Sumatera Utara

Tabel 142
Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Berdasarkan SP2D per 31 Desember 2014

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	REALISASI BELANJA BERDASARKAN SP2D		JUMLAH
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	Dinas Pendidikan	41.916.982.241,-	125.377.553.843,-	167.294.536.084,-
2	Dinas Kesehatan	83.102.290.480,-	157.433.540.142,-	240.535.830.622,-
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah	21.179.535.453,-	15.941.660.384,-	37.121.195.837,-
4	Rumah Sakit Haji	-	58.739.525.432,-	58.739.525.432,-
5	Dinas Bina Marga	48.223.433.343,-	866.461.039.736,-	914.684.473.079,-
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	60.168.523.400,-	81.244.549.537,-	141.413.072.937,-
7	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman	32.240.685.269,-	110.242.930.396,-	142.483.615.665,-
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.206.323.780,-	15.192.544.951,-	25.398.868.731,-
9	Dinas Perhubungan	57.693.548.895,-	29.322.356.830,-	87.015.905.725,-
10	Badan Lingkungan Hidup	11.040.319.893,-	18.478.246.252,-	29.518.566.145,-
11	Dinas Kesejahteraan dan Sosial	39.600.781.501,-	46.235.395.141,-	85.836.176.642,-
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.458.520.281,-	11.438.125.433,-	32.896.645.714,-
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.977.901.058,-	19.998.154.316,-	28.976.055.374,-
14	Badan Penanaman Modal dan Promosi	4.801.457.160,-	9.255.508.162,-	14.056.965.322,-
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	16.033.661.755,-	22.067.969.770,-	38.101.631.525,-



Laporan Kinerja (LK)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	REALISASI BELANJA BERDASARKAN SP2D		JUMLAH
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	7.868.088.759,-	51.869.850.559,-	59.737.939.318,-
17	Bakesbangpol dan Linmas	6.941.416.885,-	12.813.805.022,-	19.755.221.907,-
18	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2.585.758.526,-	9.290.982.057,-	11.876.740.583,-
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.628.615.943,-	6.750.192.818,-	11.378.808.761,-
20	DPRD	37.104.608.691,-	-	37.104.608.691,-
21	KDH & WKDH	5.835.183.597,-	-	5.835.183.597,-
22	Sekretariat Daerah	4.432.227.922.387,-	135.383.475.376,-	4.567.611.397.763,-
23	Sekretariat DPRD	10.192.878.191,-	67.885.524.658,-	78.078.402.849,-
24	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.083.465.448,-	6.663.486.538,-	11.746.951.986,-
25	Inspektorat Provinsi	12.401.855.133,-	20.172.980.042,-	32.574.835.175,-
26	Kantor Perwakilan Jakarta	4.776.124.814,-	10.852.161.519,-	15.628.286.333,-
27	Dinas Pendapatan	168.160.148.452,-	152.607.650.181,-	320.767.798.633,-
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan	8.988.677.839,-	16.731.767.613,-	25.720.445.452,-
29	Badan Kepegawaian Daerah	7.433.324.662,-	9.727.148.303,-	17.160.472.965,-
30	Sekretariat KORPRI	2.064.515.907,-	2.870.816.885,-	4.935.332.792,-
31	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	5.143.882.946,-	9.549.450.241,-	14.693.333.187,-
32	Badan Ketahanan Pangan	8.390.294.913,-	16.519.233.217,-	24.909.528.130,-
33	Badan Koord. Penyuluhan	6.294.915.570,-	18.701.978.583,-	24.996.894.153,-
34	Bapemmas dan Pemdes	6.646.194.827,-	7.925.962.122,-	14.572.156.949,-
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.562.376.252,-	29.898.475.626,-	41.460.851.878,-
36	KPID Sumatera Utara	2.008.458.300,-	5.258.467.847,-	7.266.926.147,-
37	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	9.480.984.798,-	41.354.539.782,-	50.835.524.580,-
38	Dinas Pertanian	54.778.458.186,-	79.502.736.301,-	134.281.194.487,-
39	Dinas Perkebunan	13.190.387.058,-	17.989.975.926,-	31.180.362.984,-
40	Dinas Peternakan	8.403.852.312,-	19.838.602.055,-	28.242.454.367,-
41	Dinas Kehutanan	33.680.067.358,-	10.514.872.445,-	44.194.939.803,-
42	Dinas Pertambangan dan Energi	8.384.762.445,-	14.076.712.850,-	22.461.475.295,-
43	Dinas Perikanan dan Kelautan	13.136.858.523,-	59.459.669.260,-	72.596.527.783,-
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.709.009.121,-	9.066.559.825,-	33.775.568.946,-
	Jumlah	5.378.747.052.352,-	2.430.706.177.976,-	7.809.453.230.328,-

Sumber : Biro Keuangan Setdaprov Sumatera Utara

Tabel realisasi diatas merupakan realisasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan Setdaprovsu selama Tahun Anggaran 2014 yang merupakan angka realisasi sementara yang belum diaudit oleh BPK RI. Mengenai angka hasil perhitungan data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2014 belum



dapat dijelaskan dari uraian ini karena masih dalam proses perhitungan dan data untuk ini dapat diperoleh nantinya setelah hasil perhitungan disusun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Biro Keuangan dan selanjutnya diaudit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dan hasilnya akan disampaikan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara, hasil audit tersebut nantinya merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2014 yang akan disampaikan Gubernur kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan :

1. Masih dominannya belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung dalam komposisi belanja daerah. Akibatnya, belanja langsung yang digunakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemenuhan hak layanan dasar bagi masyarakat belum optimal.
2. Terjadi perubahan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga memerlukan waktu bagi SKPD untuk menerapkan dalam mekanisme pengelolaan keuangan.
3. Intensitas pertumbuhan pendapatan daerah jauh lebih lambat dibandingkan intensitas pertumbuhan kebutuhan anggaran untuk layanan publik, sehingga dengan keterbatasan relatif kapabilitas pendapatan, menyulitkan perencanaan alokasi belanja untuk layanan publik, yang menyebabkan sering terjadi belanja daerah untuk layanan publik menjadi kurang fokus terhadap pencapaian target-target pembangunan yang diharapkan.

Solusi :

1. Menetapkan skala prioritas yang ketat dalam pengalokasian anggaran belanja mengingat sulitnya bagi pemerintah daerah untuk mengakomodasi berbagai usulan.
2. Peningkatan kemampuan SDM pengelolaan keuangan bagi seluruh SKPD agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan



pengelolaan administrasi kegiatan sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah.

3. Meningkatkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang belum didayagunakan secara optimal serta melakukan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.

B.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, serta dimaksudkan untuk membiayai selisih kurang bila Belanja Daerah lebih besar dari Pendapatan Daerah atau memanfaatkan surplus Pendapatan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.
2. Pencairan Dana Cadangan.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
4. Pinjaman Dalam Negeri.
5. Penerimaan Kembali Pinjaman.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan.
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.
4. Pemberian Pinjaman.



Tahun anggaran 2015 posisi pembiayaan yang digunakan dalam APBD sebesar Rp. 14.897.905.723,- dengan rincian penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 14.897.905.723,- dan sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan pada struktur APBD TA. 2015 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan :

1. Permasalahan paling mendasar dalam perumusan belanja daerah tahun 2015 adalah masih terbatasnya sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.
2. Adanya perubahan rencana yang menyangkut volume pekerjaan, standar harga dan lokasi sehingga harus ditempuh melalui perubahan APBD.

Solusi :

1. SKPD pengelola PAD diharapkan lebih pro aktif dalam mengali sumber-sumber pendapatan yang dibebankan kepada SKPD yang bersangkutan.
2. Dalam rangka peningkatan kinerja keuangan seharusnya tetap mengacu kepada pencapaian nilai manfaat dan efisiensi.